



PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

# RK 2025 25 PD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688 );

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Rancangan KUA PPAS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD serta disusun minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 terdiri dari:
  - a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan;
  - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2025 periode tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

#### **Pasal 3**

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun 2025;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025; dan
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan KUA PPAS yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Provinsi Lampung tahun 2025.

#### **Pasal 4**

Dalam melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS dan KUA PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

#### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

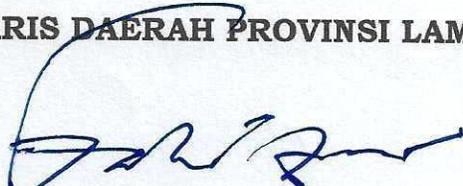
Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 - 6 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SAMSUDIN**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 - 6 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 15**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-66
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-103
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum .....	II-107
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.....	II-174
2.2.1 Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Lampung.....	II-174
2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah.....	II-262
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-262
2.3.2 Isu Strategis .....	II-266
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-14
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-2
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....	IV-24
4.2.1 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2025.....	IV-24
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 .....	IV-26
4.2.3 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025.....	IV-31
4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung.....	IV-50



4.2.5	Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2025 .....	IV-51
4.2.6	Rencana Pengembangan Wilayah .....	IV-196
4.2.7	Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca) .....	IV-200
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....</b>		<b>V-1</b>
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2025 .....	V-1
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung .....	V-7
5.3	Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota .....	V-1
5.2.1	Pertumbuhan Ekonomi .....	V-1
5.2.2	Indek Pembangunan Manusia .....	V-7
5.2.3	Persentase Penduduk Miskin .....	V-11
5.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	V-15
5.4	Sinergi Pembangunan Daerah .....	V-19
5.5	Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota .....	V-57
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>		<b>VI-1</b>
6.1	Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025 .....	VI-2
6.2	Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung tahun 2025 .....	VI-4
6.3	Program Prioritas Berdasarkan SPM .....	VI-145
6.4	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 .....	VI-155
6.5	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025 .....	VI-157
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>		<b>VII-1</b>
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VII-3
7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	VII-4
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>VIII-1</b>



## DAFTAR GAMBAR

### BAB I

- Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 ..... I-4  
Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah .... I-9

### BAB II

- Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung..... II-2  
Gambar 2. 2 Peta Geologi Provinsi Lampung ..... II-6  
Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung..... II-8  
Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung..... II-9  
Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Lampung .....II-10  
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung.....II-12  
Gambar 2. 7 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung.....II-13  
Gambar 2. 8 Peta Keanekaragaman Hayati Darat .....II-17  
Gambar 2. 9 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut.....II-17  
Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan)  
di Provinsi Lampung .....II-21  
Gambar 2. 11 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi  
Lampung.....II-23  
Gambar 2. 12 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung .....II-27  
Gambar 2. 13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung.....II-31  
Gambar 2. 14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Prov. Lampung .....II-33  
Gambar 2. 15 Peta IJLH Pengendali Hama .....II-35  
Gambar 2. 16 Peta IJLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah .....II-37  
Gambar 2. 17 Peta JLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam .....II-39  
Gambar 2. 18 Peta JLH Pendukung Biodiversitas.....II-41  
Gambar 2. 19 Peta IJLH Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung .....II-43  
Gambar 2. 20 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung .....II-50  
Gambar 2. 21 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung .....II-51  
Gambar 2. 22 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung .....II-53  
Gambar 2. 23 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK  
di Provinsi Lampung .....II-56  
Gambar 2. 24 Peta Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Lampung.....II-57  
Gambar 2. 25 Peta Bahaya Cuaca Ektrim di Provinsi Lampung .....II-59



Gambar 2. 26	Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-61
Gambar 2. 27	Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	II-62
Gambar 2. 28	Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 .....	II-73
Gambar 2. 29	Inflasi di Sumatera.....	II-75
Gambar 2. 30	Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung.....	II-145
Gambar 2. 31	Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 – 2022.....	II-148
Gambar 2. 32	Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	II-150
Gambar 2. 33	Peta Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-151
Gambar 2. 34	Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 .....	II-214
Gambar 2. 35	Inflasi di Sumatera.....	II-217

#### **BAB IV**

Gambar 4. 1	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 .....	IV-25
Gambar 4. 2	Prioritas Nasional .....	IV-26
Gambar 4. 3	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung.....	IV-200

#### **BAB V**

Gambar 5. 1	Kontribusi PDRB per Wilayah .....	V-3
Gambar 5. 2	Sasaran Pembangunan Daerah.....	V-4
Gambar 5. 3	Klaster Pengembangan Wilayah.....	V-8
Gambar 5. 4	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2025.....	V-11
Gambar 5. 5	Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	V-16
Gambar 5. 6	Penetapan Target PDRB per kapita Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	V-17
Gambar 5. 7	Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....	V-21
Gambar 5. 8	Penetapan Target Persentase Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	V-25
Gambar 5. 9	Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....	V-29
Gambar 5. 10	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	V-70



## DAFTAR TABEL

### BAB II

Tabel 2. 1	Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .....	II-3
Tabel 2. 2	Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung.....	II-7
Tabel 2. 3	Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung.....	II-8
Tabel 2. 4	Curah Hujan Rata-Rata per tahun (Mm).....	II-10
Tabel 2. 5	Wilayah Sungai di Provinsi Lampung.....	II-13
Tabel 2. 6	Sebaran Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung.....	II-15
Tabel 2. 7	Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi Lampung .....	II-15
Tabel 2. 8	Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi Lampung .....	II-16
Tabel 2. 9	Tabel Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung.....	II-20
Tabel 2. 10	Tabel Luas Kawasan Perikanan Provinsi Lampung.....	II-20
Tabel 2. 11	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung .....	II-22
Tabel 2. 12	Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung.....	II-25
Tabel 2. 13	Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung .....	II-26
Tabel 2. 14	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan .....	II-28
Tabel 2. 15	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung.....	II-30
Tabel 2. 16	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi Lampung.....	II-32
Tabel 2. 17	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung.....	II-34
Tabel 2. 18	JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung..	II-36
Tabel 2. 19	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung .....	II-38
Tabel 2. 20	Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas di Provinsi Lampung .....	II-40
Tabel 2. 21	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung.....	II-42
Tabel 2. 22	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-45
Tabel 2. 23	Nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023.....	II-47
Tabel 2. 24	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023.....	II-48
Tabel 2. 25	Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung.....	II-49
Tabel 2. 26	Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung.....	II-50
Tabel 2. 27	Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi .....	II-52



Tabel 2. 28	Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung .....	II-53
Tabel 2. 29	Tingkat Kerentanan berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung .....	II-55
Tabel 2. 30	Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Lampung .....	II-56
Tabel 2. 31	Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung.....	II-58
Tabel 2. 32	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung .....	II-59
Tabel 2. 33	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung.....	II-61
Tabel 2. 34	Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 .....	II-64
Tabel 2. 35	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023 ....	II-66
Tabel 2. 36	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023.....	II-71
Tabel 2. 37	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-2023.....	II-71
Tabel 2. 38	Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran.....	II-73
Tabel 2. 39	Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2021-2023 (Persen).....	II-74
Tabel 2. 40	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung.....	II-78
Tabel 2. 41	Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017-2023 (Ribu Jiwa) .....	II-82
Tabel 2. 42	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2018-2023 .....	II-82
Tabel 2. 43	IPM Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit.....	II-87
Tabel 2. 44	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023 .....	II-91
Tabel 2. 45	Kondisi Makro Ketenagakerjaan Lampung 2019-2023 .....	II-97
Tabel 2. 46	TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.....	II-100
Tabel 2. 47	Rata-rata pengeluaran per kapita per kabupaten/kota tahun 2022 .....	II-106
Tabel 2. 48	Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022-2023..	II-107
Tabel 2. 49	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Sumatera Tahun 2021-2023.....	II-110
Tabel 2. 50	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Sumatera	II-111
Tabel 2. 51	Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022 .....	II-114
Tabel 2. 52	Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa 2017 - 2021 .....	II-123
Tabel 2. 53	Perbandingan Jumlah Guru PNS dan Siswa 2017 - 2021 .....	II-123
Tabel 2. 54	Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung.....	II-138



Tabel 2. 55	Usulan Lokasi Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung.....	II-143
Tabel 2. 56	Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung .....	II-146
Tabel 2. 57	Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung.....	II-149
Tabel 2. 58	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata.....	II-152
Tabel 2. 59	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2018 – 2023.....	II-153
Tabel 2. 60	Perkembangan Produksi Perikanan 2018-2023 .....	II-155
Tabel 2. 61	Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018 .....	II-155
Tabel 2. 62	Matrik Produksi Perikanan Tangkap .....	II-157
Tabel 2. 63	Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021-2022.....	II-161
Tabel 2. 64	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022 .....	II-165
Tabel 2. 65	Capaian kinerja Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-168
Tabel 2. 66	Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2023 .....	II-170
Tabel 2. 67	Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2019 – 2023 .....	II-171
Tabel 2. 68	Pencapaian Sasaran kinerja Sektor Pengairan Tahun 2023 .....	II-172
Tabel 2. 69	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap air minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018–2022.....	II-172
Tabel 2. 70	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018–2022.....	II-173
Tabel 2. 71	Indeks Reformasi Birokrasi .....	II-182
Tabel 2. 72	Rincian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi .....	II-184
Tabel 2. 73	TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.....	II-197
Tabel 2. 74	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-204
Tabel 2. 75	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023.....	II-209
Tabel 2. 76	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-2023.....	II-209



Tabel 2. 77	Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran.....	II-215
Tabel 2. 78	Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2021–2023 (Persen).....	II-216
Tabel 2. 79	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2023	II-220
Tabel 2. 80	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-226
Tabel 2. 81	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum.	II-232
Tabel 2. 82	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum.	II-239
Tabel 2. 83	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan) .....	II-248
Tabel 2. 84	Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penunjang).....	II-254
Tabel 2. 85	Capaian Jenis pelayanan SPM Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-258
Tabel 2. 86	Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2022.....	II-259
Tabel 2. 87	Tabel Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-260
Tabel 2. 88	Tabel Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-261
Tabel 2. 89	Tabel Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	II-261
Tabel 2. 90	Tabel Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	II-262
Tabel 2. 91	Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024.....	II-268

### **BAB III**

Tabel 3. 1	Kinerja dan Prospek Ekonomi Global (%).....	III-4
Tabel 3. 2	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 .....	III-7
Tabel 3. 3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2025.....	III-10
Tabel 3. 4	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	III-20
Tabel 3. 5	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.....	III-21
Tabel 3. 6	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023 ..	III-22



Tabel 3. 7	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 .....	III-24
Tabel 3. 8	Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	III-25
Tabel 3. 9	Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2025 .....	III-26
Tabel 3. 10	Realisasi Dana APBN Dekonsentrasi Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-26
Tabel 3. 11	Realisasi Dana APBN Tugas Pembantuan Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-27
Tabel 3. 12	Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) .....	III-28

#### **BAB IV**

Tabel 4. 4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Tujuan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPD 2025-2026.	IV-32
Tabel 4. 3	Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 .....	IV-36
Tabel 4. 5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap RKP Tahun 2025 .....	IV-53
Tabel 4. 6	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan .....	IV-190
Tabel 4. 7	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan .....	IV-190
Tabel 4. 8	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-191
Tabel 4. 9	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV-193
Tabel 4. 10	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial .....	IV-195
Tabel 4. 11	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas.....	IV-196

#### **BAB V**

Tabel 5. 1	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	V-12
Tabel 5. 2	Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	V-13
Tabel 5. 3	Capaian dan Laju Pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	V-18
Tabel 5. 4	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-19



Tabel 5.5	Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-22
Tabel 5.6	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-23
Tabel 5.7	Capaian dan Laju Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-26
Tabel 5.8	Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-27
Tabel 5.9	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan .....	V-31
Tabel 5.10	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan .....	V-34
Tabel 5.11	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	V-35
Tabel 5.12	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	V-38
Tabel 5.13	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan .....	V-39
Tabel 5.14	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial.....	V-40
Tabel 5.15	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja .....	V-42
Tabel 5.16	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	V-43
Tabel 5.17	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan.....	V-44
Tabel 5.18	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan.....	V-45
Tabel 5.19	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup .....	V-46
Tabel 5.20	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	V-47
Tabel 5.21	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	V-48



Tabel 5.22	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	V-49
Tabel 5.23	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan.....	V-50
Tabel 5.24	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika .....	V-51
Tabel 5.25	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	V-53
Tabel 5.26	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.....	V-54
Tabel 5.27	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.....	V-55
Tabel 5.28	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik .....	V-56
Tabel 5.29	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian .....	V-56
Tabel 5.30	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan .....	V-57
Tabel 5.31	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan .....	V-58
Tabel 5.32	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan.....	V-59
Tabel 5.33	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan.....	V-60
Tabel 5.34	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata .....	V-61
Tabel 5.35	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian .....	V-61
Tabel 5.36	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan .....	V-64
Tabel 5.37	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	V-65
Tabel 5.38	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan.....	V-65



Tabel 5.39	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian.....	V-66
Tabel 5.40	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi.....	V-67
Tabel 5.41	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesbangpol.....	V-68
Tabel 5.42	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 .....	V-70

## **BAB VI**

Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2025 .....	VI-3
Tabel 6.2	Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2025.....	VI-6
Tabel 6.3	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024.....	VI-62
Tabel 6.4	Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2025 .....	VI-77
Tabel 6.5	Program Prioritas Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025 .....	VI-91
Tabel 6.6	Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM .....	VI-145
Tabel 6.7	Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	VI-155
Tabel 6.8	Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan Rakortekbang dan Musrenbangnas Tahun 2024 .....	VI-158
Tabel 6.9	Alokasi Pagu DAK Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024 .....	VI-163
Tabel 6.10	Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024.....	VI-164

## **BAB VII**

Tabel 7.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2025.....	VI-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-4
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	VI-5
Tabel 7.4	Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Pada Desk Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2025	



Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah  
Provinsi Lampung..... VI-17



## DAFTAR GRAFIK

### BAB II

Grafik 2. 1	Grafik Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.....	II-11
Grafik 2. 2	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Prov. Lampung .....	II-29
Grafik 2. 3	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Prov. Lampung....	II-29
Grafik 2. 4	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung.....	II-30
Grafik 2. 5	Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung.....	II-32
Grafik 2. 6	JLH Pengendali Hama Kab/Kota Provinsi Lampung.....	II-34
Grafik 2. 7	JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah .....	II-36
Grafik 2. 8	Jasa Mitigasi Bencana Alam di Prov. Lampung.....	II-39
Grafik 2. 9	JLH Biodiversitas.....	II-41
Grafik 2. 10	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Provinsi Lampung .....	II-43
Grafik 2. 11	Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2015-2023.....	II-47
Grafik 2. 12	Bencana Longsor di Provinsi Lampung .....	II-49
Grafik 2. 13	Bencana Tsunami di Provinsi Lampung .....	II-51
Grafik 2. 14	Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung.....	II-52
Grafik 2. 15	Grafik Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-60
Grafik 2. 16	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung.....	II-62
Grafik 2. 17	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen) .....	II-65
Grafik 2. 18	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019 - 2023.....	II-67
Grafik 2. 19	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023 .....	II-70
Grafik 2. 20	Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional..	II-72
Grafik 2. 21	PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023.....	II-76
Grafik 2. 22	PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2023 .....	II-77
Grafik 2. 23	Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019 - 2023....	II-79
Grafik 2. 24	Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2023 .....	II-79
Grafik 2. 25	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2023 .....	II-80
Grafik 2. 26	Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2018-2023	II-81
Grafik 2. 27	Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2018- 2023 .....	II-84
Grafik 2. 28	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung.....	II-85
Grafik 2. 29	Indeks Pembangunan Manusia Lampung dan Indonesia.....	II-86



Grafik 2. 30 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Lampung 2020-2023 .....	II-87
Grafik 2. 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023.....	II-88
Grafik 2. 32 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023.....	II-89
Grafik 2. 33 Pengeluaran per kapita tahun 2020 - 2023 .....	II-89
Grafik 2. 34 Posisi IPM Lampung Lingkup Regional Sumatera 2023 .....	II-90
Grafik 2. 35 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung, 2019- 2023.....	II-92
Grafik 2. 36 Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi, 2019-2023.....	II-93
Grafik 2. 37 Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen), 2019-2023.....	II-94
Grafik 2. 38 Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas (Persen), 2019-2023 .....	II-94
Grafik 2. 39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan (persen), 2019-2023 .....	II-95
Grafik 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022-2023.....	II-96
Grafik 2. 41 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2023 .....	II-98
Grafik 2. 42 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal Informal (2018-2023) .....	II-99
Grafik 2. 43 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2023.....	II-101
Grafik 2. 44 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditempatkan 2021-2023.....	II-102
Grafik 2. 45 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota.....	II-102
Grafik 2. 46 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023.....	II-103
Grafik 2. 47 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2023.....	II-104
Grafik 2. 48 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023 .....	II-104
Grafik 2. 49 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2023) .....	II-105



Grafik 2. 50 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	II-106
Grafik 2. 51 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-109
Grafik 2. 52 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2023 .....	II-110
Grafik 2. 53 Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-113
Grafik 2. 54 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-115
Grafik 2. 55 Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2023 .....	II-116
Grafik 2. 56 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-116
Grafik 2. 57 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	II-117
Grafik 2. 58 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023 .....	II-118
Grafik 2. 59 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-119
Grafik 2. 60 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 .....	II-120
Grafik 2. 61 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 .....	II-121
Grafik 2. 62 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 .....	II-121
Grafik 2. 63 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021.....	II-122
Grafik 2. 64 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023.....	II-124
Grafik 2.65 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022 .....	II-126
Grafik 2.66 Tren Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	II-127
Grafik 2.67 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022 dan 2023 .....	II-128
Grafik 2. 68 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2019 –2023 .....	II-129



Grafik 2.69 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 dan 2023 .....	II-129
Grafik 2.70 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 .....	II-130
Grafik 2.71 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung .....	II-131
Grafik 2.72 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023.....	II-132
Grafik 2.73 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023.....	II-133
Grafik 2.74 Trend Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023..	II-134
Grafik 2.75 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung .....	II-135
Grafik 2.76 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	II-136
Grafik 2.77 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	II-137
Grafik 2.78 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2022-2023 .....	II-137
Grafik 2.79 Tren Capaian Ratio Dokter Per satuan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	II-140
Grafik 2.80 Tren Capaian Rasio Dokter Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019 – 2023 .....	II-140
Grafik 2.81 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019-2023.....	II-141
Grafik 2.82 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019-2023.....	II-142
Grafik 2.83 Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	II-156
Grafik 2.84 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 .....	II-162
Grafik 2.85 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 .....	II-163
Grafik 2.86 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 (data termutakhir) .....	II-166
Grafik 2.87 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 .....	II-167
Grafik 2.88 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023.....	II-175



Grafik 2. 89 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi di Sumatera dan Nasional Tahun 2023.....	II-176
Grafik 2. 90 Trend Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023.....	II-176
Grafik 2. 91 Target dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022.....	II-178
Grafik 2. 92 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-178
Grafik 2. 93 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera Tahun 2022 (Metode Baru).....	II-179
Grafik 2. 94 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022.....	II-180
Grafik 2. 95 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2022.....	II-180
Grafik 2. 96 Trend Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2022.....	II-181
Grafik 2. 97 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi se-Sumatera dan Indonesia Tahun 2022.....	II-181
Grafik 2. 98 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2023.....	II-188
Grafik 2. 99 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode SP2020) Tahun 2020-2023.....	II-188
Grafik 2. 100 Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera dan Indonesia Tahun 2023.....	II-189
Grafik 2. 101 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023.....	II-189
Grafik 2. 102 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2020-2023.....	II-190
Grafik 2. 103 Tren Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....	II-191
Grafik 2. 104 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023.....	II-192
Grafik 2. 105 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Provinsi Tahun 2023.....	II-192



Grafik 2. 106	Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-193
Grafik 2. 107	Tren Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....	II-194
Grafik 2. 108	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023.....	II-195
Grafik 2. 109	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023.....	II-196
Grafik 2. 110	TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2018-2023.....	II-197
Grafik 2. 111	TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2021-2023.....	II-198
Grafik 2. 112	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota.....	II-199
Grafik 2. 113	Capaian dan Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022.....	II-200
Grafik 2. 114	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2022 .....	II-200
Grafik 2. 115	Capaian dan Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2022 .....	II-202
Grafik 2. 116	Tren Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-202
Grafik 2. 117	Trend Variabel Penyusun IDG Provinsi Lampung Tahun 2019-2022.....	II-203
Grafik 2. 118	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2021.....	II-203
Grafik 2. 119	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia .....	II-205
Grafik 2. 120	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023.....	II-208
Grafik 2. 121	Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023 .....	II-211
Grafik 2. 122	Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2023.....	II-212
Grafik 2. 123	Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023 .....	II-212
Grafik 2. 124	Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2023).....	II-213



Grafik 2. 125	Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-214
Grafik 2. 126	Tren Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023 .....	II-218
Grafik 2. 127	Tren Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	II-219
Grafik 2. 128	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-221
Grafik 2. 129	Indeks Kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Indonesia dan Lampung... ..	II-222
Grafik 2. 130	Indeks Keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Indonesia dan Lampung....	II-223

### **BAB III**

Grafik 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi dan Share PDRB Provinsi Tahun 2023.....	III-6
Grafik 3. 2	Kapasitas Fiskal Daerah APBD Provinsi TA 2024.....	III-18

### **BAB V**

Grafik 5. 1	Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	V-13
Grafik 5. 2	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	V-19
Grafik 5. 3	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-23
Grafik 5. 4	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-27



RKPD PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN  
2025



# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung tahun 2025-2026 sekaligus tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 -2045. Diharapkan tahun 2025 sebagai tahun transisi sehingga bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada

penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif*, substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas-bawah (top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Lampung sekaligus *kick off* Penyusunan Perencanaan Tahun 2025, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi. Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2025 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Lampung. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2025 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 pada bulan Juni 2024.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025**



Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 adalah "Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia" selaras dengan tema RKP 2025.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perindustrian;
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
  17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...).
  27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

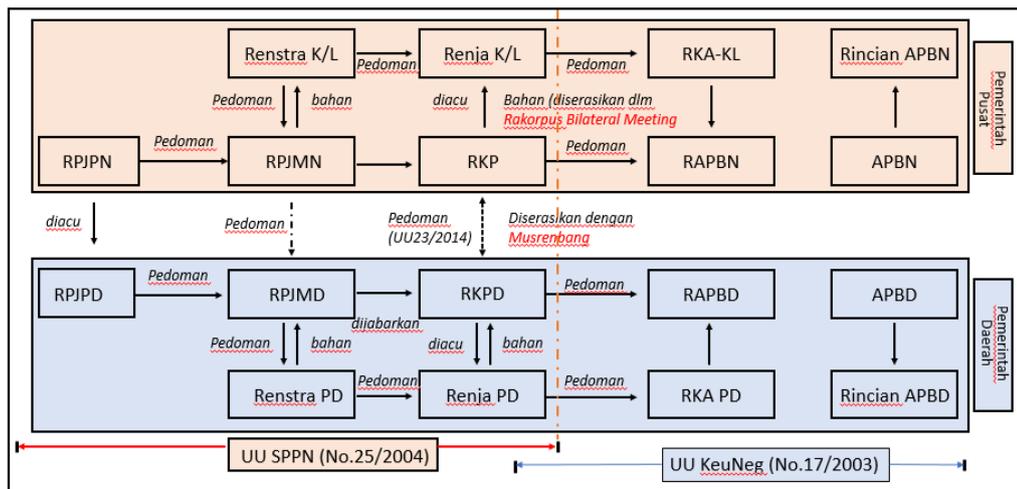


31. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

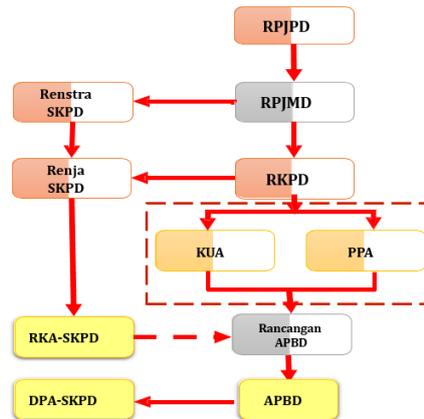
Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Rancangan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS disusun minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Selanjutnya Rancangan KUA PPAS dibahas menjadi KUA PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.



Gambar 1.3 Hubungan antara RKPD dan APBD



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan RKP Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2025.
- 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan RKPD kabupaten dan kota tahun 2025.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BABI PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

#### **1.2. Dasar Hukum**

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

#### **1.3. Hubungan Antardokumen**

Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

#### **1.5. Sistematika**



Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

### **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.**

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2023.

### **2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2025, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2024 dan tahun 2025.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2025.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2025 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025.

### **4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025**

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

#### 4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2025 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

#### 5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2025.

#### 5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2025.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2025, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2025.

#### 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### 7.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2025.



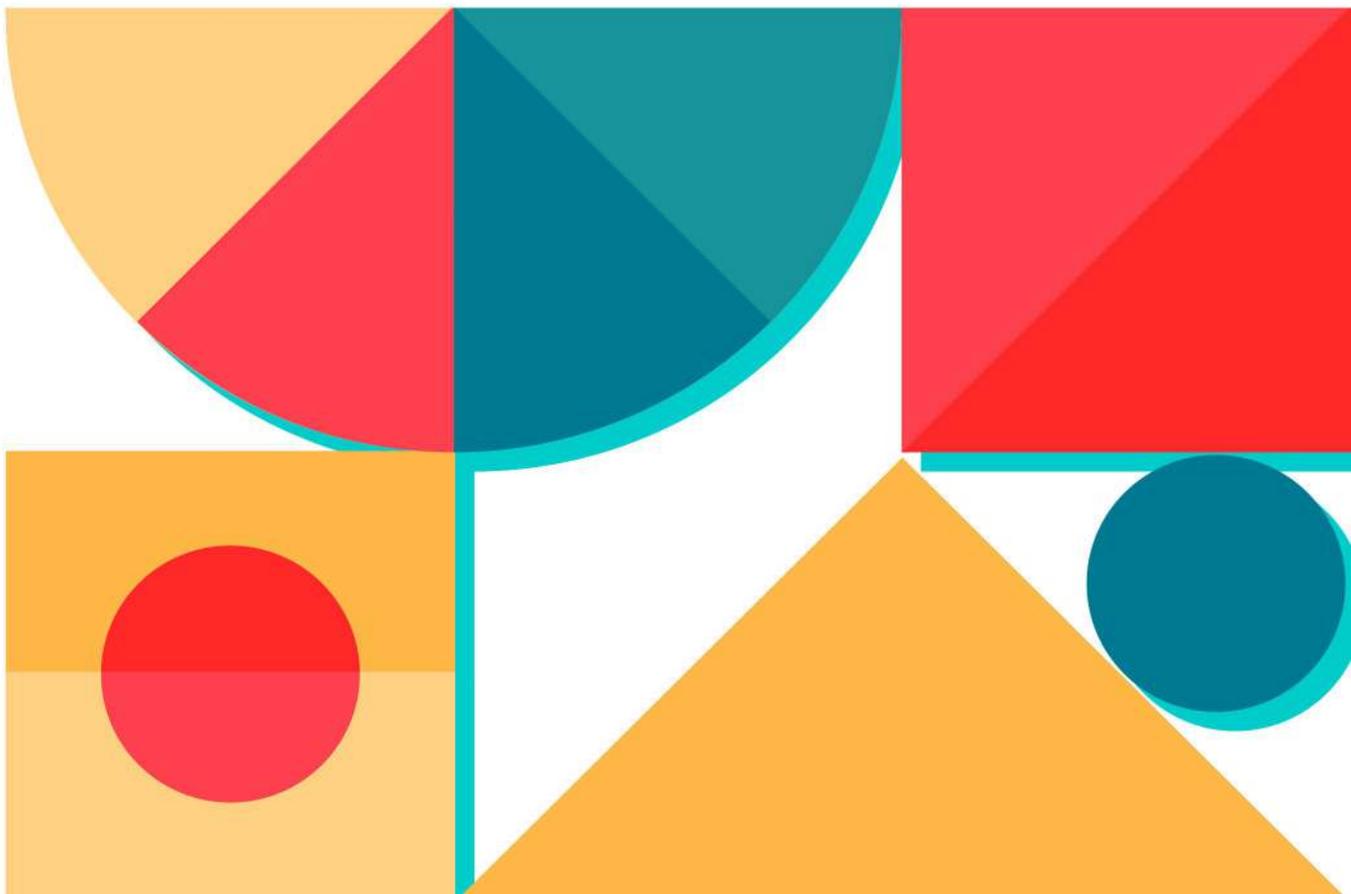
RKPD PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN  
2025



# BAB II

# GAMBARAN UMUM

# KONDISI DAERAH



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

###### **2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah**

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40' - 105°50' Bujur Timur dan 6°45' - 3°45' Lintang Selatan.

Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selain letaknya yang strategis, Provinsi Lampung menjadi salah satu Lumbung Pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2023, Provinsi Lampung menempatkan pada posisi ke enam produsen beras nasional yang membuktikan bahwa wilayah Lampung mampu menjadi lokomotif pembangunan pertanian nasional.

Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan 30 segmen batas wilayah antar kabupaten dan provinsi. Segmen batas Provinsi Lampung terdiri dari 21 segmen batas antar kabupaten/kota serta 8 segmen batas antar Provinsi Sumatera Selatan dan 1 segmen batas antar Provinsi Bengkulu. Dari 15 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 13,54 persen dari luas Provinsi Lampung, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan hanya sebesar 0,21 persen dari total luas wilayah Lampung (*sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024*).



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan wilayah Lampung meliputi 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 Km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 Ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 Ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.



11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	Panaragan	-
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>33.570,26</b>		<b>172</b>

Sumber: *Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau*



### 2.1.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

- a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.  
Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa.
- b. Daerah topografi berombak sampai bergelombang.  
Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran.
- c. Daerah dataran alluvial  
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.
- d. Daerah dataran rawa pasang surut  
Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.
- e. Daerah River Basin  
River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air hujan serta unsur hara. Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%);tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

### 2.1.1.3 Kondisi Geologi

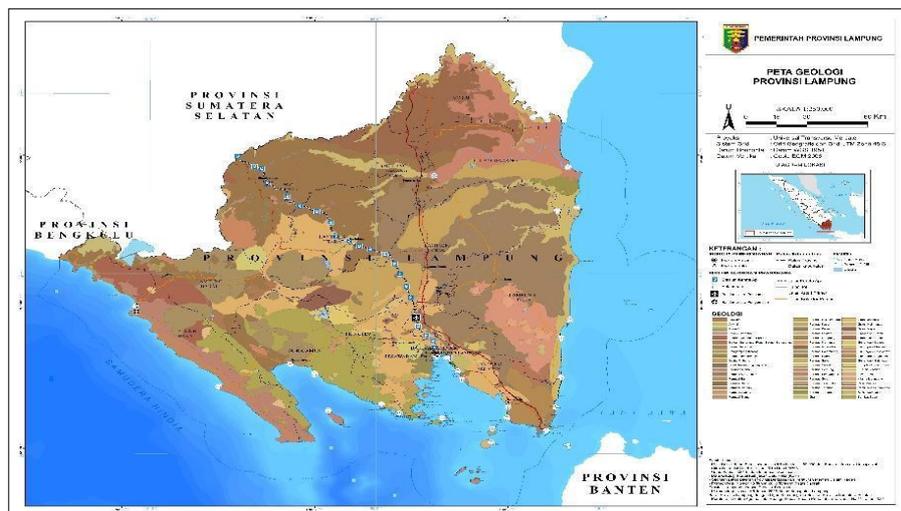
Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km).

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah-Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penunjaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction)di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. FormasiSabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit- Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu

lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan. *Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasir, batu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai, Ranau, Lampung* selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Peta Geologi Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

#### 2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai diantaranya WS Semangka, WS Seputih-Sekampung, WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih- Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

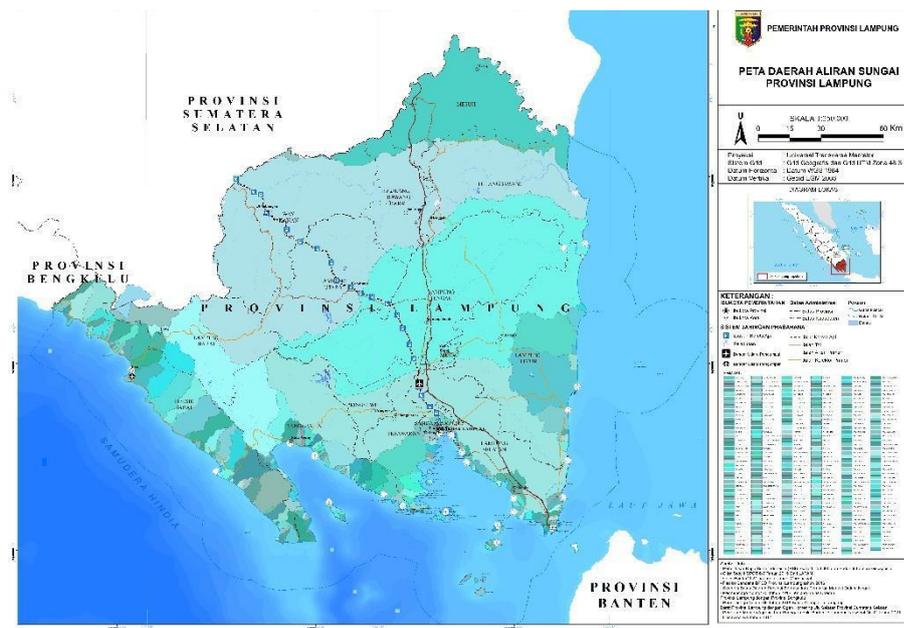
Berikut ini Daftar 10 (Sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Lampung:

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No.	Nama DAS	Luas (hektar)
1	Tulang Bawang	979.818,78
2	Seputih	751.526,73
3	Mesuji	723.714,52
4	Sekampung	482.316,03
5	Semangka	161.448,33
6	Way Jepara	76.187,28
7	Way Kambas	48.750,40
8	Way Ratai	32.477,47
9	Way Tenubang	28.943,08
10	Manula	25.396,62

Sumber: BNPB, dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro - Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

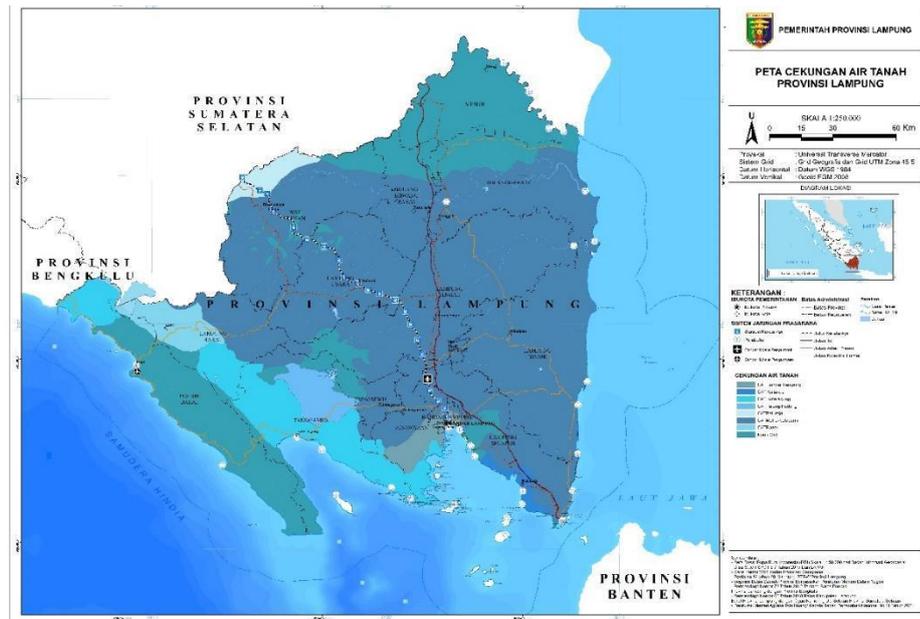
Tabel 2. 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO.	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan

NO.	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

### 2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

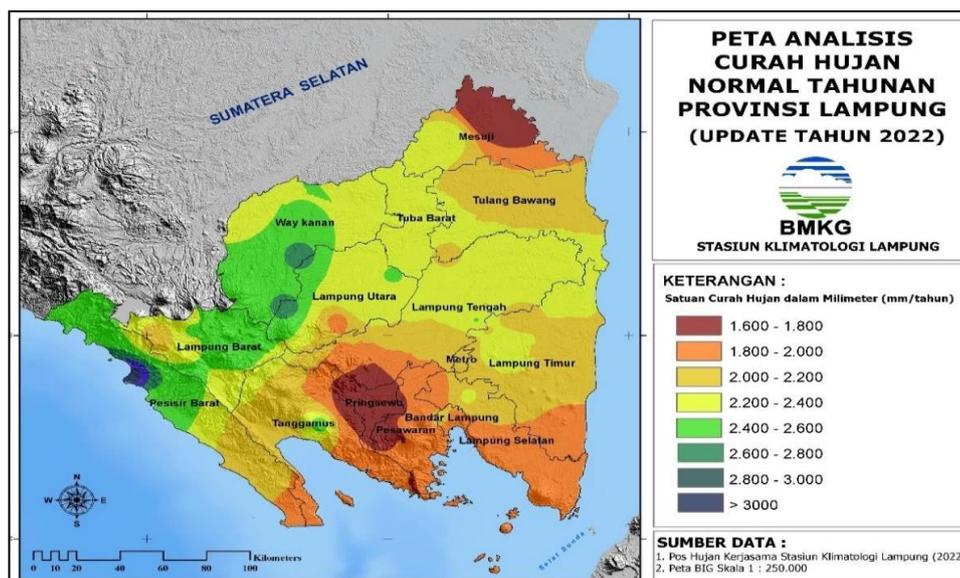
Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm.

Tabel 2. 4 Curah Hujan Rata-Rata per tahun (Mm)

No.	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm)				
		<1.800	1.800-2.500	2.500-2.800	2.800-3.000	>3.000
1	Bandar Lampung	-	1.950	-	-	-
2	LampungBarat	-	2.301	-	-	-
3	Lampung Selatan	-	1.994	-	-	-
4	Lampung Tengah	-	2.220	-	-	-
5	Lampung Timur	-	2.147	-	-	-
6	Lampung Utara	-	2.373	-	-	-
7	Mesuji	1.726	-	-	-	-
8	Metro	-	2.164	-	-	-
9	Pesawaran	-	1.905	-	-	-
10	Pesisir Barat	-	-	-	2.828	-
11	Tanggamus	-	2.067	-	-	-
12	Pringsewu	1.696	-	-	-	-
13	Tulang Bawang Barat	-	2.233	-	-	-
14	Tulang Bawang	-	2.155	-	-	-
15	Way Kanan	-	2.442	-	-	-

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Lampung



Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung 2022, data diolah 1991-2020

### 2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

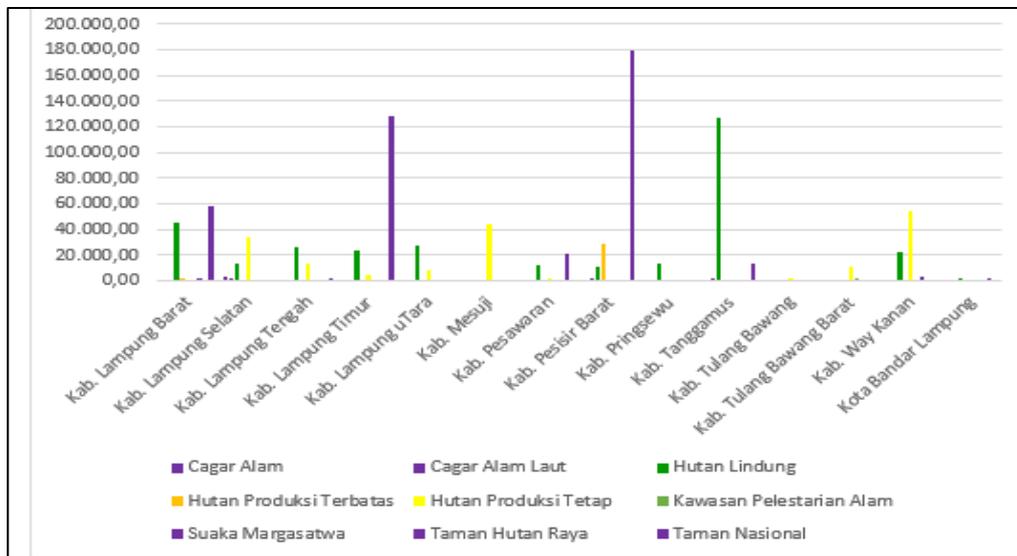
Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi meliputi :

#### 2.1.1.6.1 Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

##### 1. Kawasan Hutan

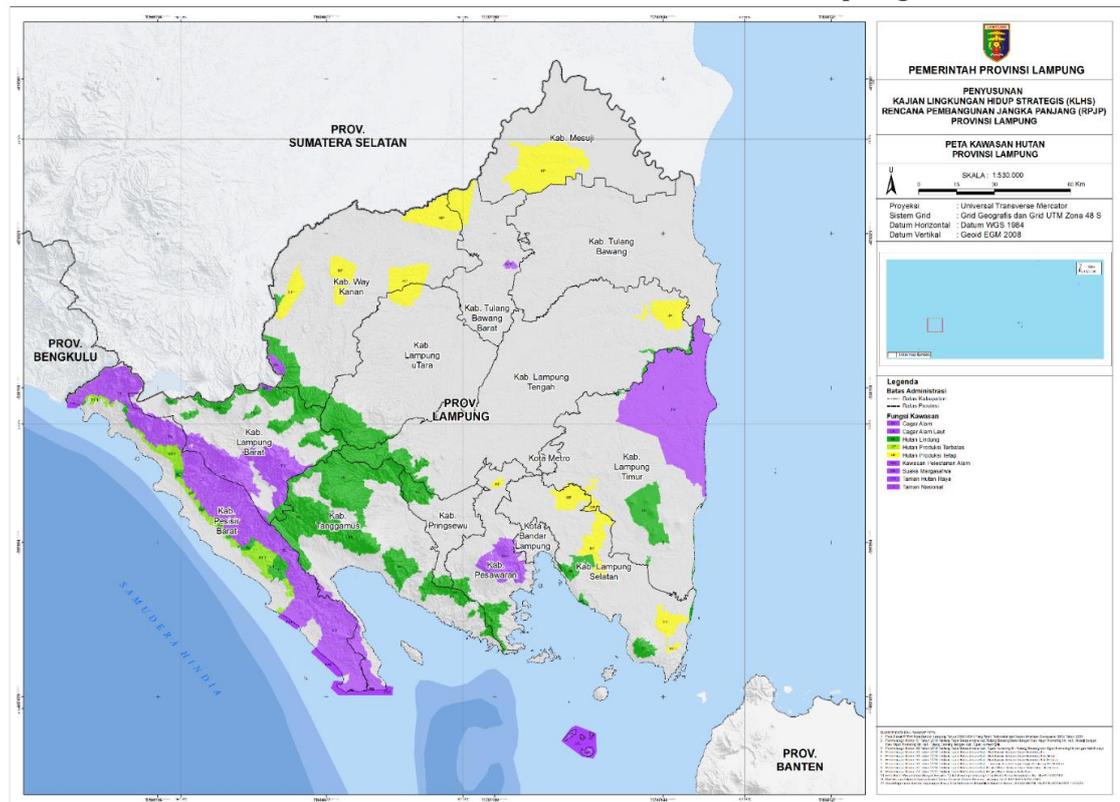
Kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Nasional namun didominasi oleh Taman Nasional seluas 378.623,2 Ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas hanya seluas 28.938,1 Ha yang tersebar di Pesawaran dan Lampung Barat. Adapun Cagar Alam hanya berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 2.533,3 Ha.

Grafik 2. 1 Grafik Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung



Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023

## 2. Wilayah Sungai (WS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Nasal-Padang-Guci, WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, dan WS Mesuji-Tulang Bawang. Provinsi Lampung juga memiliki Wilayah Sungai Strategis Nasional dan terletak di lintas kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu WS Seputih-Sekampung. Selain itu, Provinsi Lampung juga memiliki 1 (satu) wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu WS Semangka. Berikut merupakan peta wilayah sungai Provinsi Lampung dan tabel luas wilayah Provinsi Lampung yang termasuk ke dalam masing-masing Wilayah Sungai.

Gambar 2. 7 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung



Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

Tabel 2. 5 Wilayah Sungai di Provinsi Lampung

Nama Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Kabupaten/Kota terhadap WS
Nasal - Padang Guci	Pesisir Barat	59,281	1,22%
Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	Lampung Barat	219,09	0,25%
Mesuji - Tulang Bawang	Mesuji	2.898,28	17,43%
	Tulang Bawang Barat	522,72	3,14%
	Tulang Bawang	2.340,80	14,08%
	Way Kanan	3.797,83	22,84%
	Lampung Barat	637,88	3,84%
	Lampung Utara	1.911,04	11,50%
Seputih Sekampung	Lampung Tengah	18,83	0,11%
	Bandar Lampung	183,6	100%
	Lampung Barat	12,54	0,59%
	Lampung Selatan	2,159,55	97,03%

Nama Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Kabupaten/Kota terhadap WS
	Lampung Tengah	4,519,14	99,19%
	Lampung Timur	3,858,12	100%
	Lampung Utara	518,24	19,43%
	Metro	73,16	100%
	Pesawaran	855,77	66,53%
	Pringsewu	616,44	99,96%
	Tanggamus	1,079,59	36,66%
	Tulang Bawang	701,95	22,53%
	Tulang Bawang Barat	74,12	5,90%
Semangka	Tanggamus	1.848,68	70,01%
	Pesisir Barat	2.944,12	98,55%
	Lampung Barat	1.107,11	69,47%
	Pesawaran	414,96	57,58%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

### 3. Daerah Aliran Sungai

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan maupun musim kemarau. Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS Mesuji dengan luas 277.559,33 Ha, DAS Sekampung seluas 589.094,99 Ha, DAS Semangka seluas 162.421,94 Ha, DAS Seputih seluas 752.081,30 Ha dan DAS Tulang Bawang seluas 934.004,06 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: dan DAS Way Tulang Bawang yang memiliki luas ± 978.505,805 Ha.

Tabel 2. 6 Sebaran Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

No.	DAS	Luas (Ha)	Luas (Km2)
1	DAS Mesuji	277.559,33	2775,59
2	DAS Sekampung	589.094,99	5890,94
3	Das Semangka	162.421,94	1624,21
4	DAS Seputih	752.081,30	7520,81
5	DAS Tulang Bawang	934.004,06	9340,04
	<b>Jumlah</b>	<b>2.715.161,62</b>	<b>27.151,59</b>

Sumber : KLHK 2022

#### 4. Potensi Keanekaragaman Hayati Darat

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Terdapat juga tanaman khas Provinsi Lampung yaitu Bunga Bangkai, Rafflesia Arnoldi, Kopi Robusta, dan Bunga Ashar. Keanekaragaman hayati tidak hanya flora saja, fauna/satwa liar termasuk kedalamnya. Provinsi Lampung juga memiliki keanekaragaman fauna yang tersebar di wilayah : Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hutan Lindung (HL) di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, Hutan Pantai, dan Hutan Rawa di perairan laut. Taman Nasional di Provinsi Lampung memiliki luas 378.623,2 Ha, kemudian Taman hutan raya seluas 21.716,6 Ha. Ini dapat menjadi potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Barat			882,2		57.530,0	58.412,1
2	Kabupaten Lampung Selatan	2.533,3					2.533,3
3	Kabupaten Lampung Tengah					9,7	9,7
4	Kabupaten Lampung Timur					128.312,5	128.312,5
5	Kabupaten Pesawaran				21.419,9		21.419,9
6	Kabupaten Pesisir Barat					179.729,8	179.729,8

No.	Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Luas (Ha)
7	Kabupaten Tanggamus					13.041,1	13.041,1
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat		1.374,6				1.374,6
9	Kabupaten Way Kanan			3.260,9			3.260,9
10	Kota Bandar Lampung				296,7		296,7
<b>Jumlah</b>		<b>2.533,3</b>	<b>1.374,6</b>	<b>4.143,1</b>	<b>21.716,6</b>	<b>378.623,2</b>	<b>408.390,8</b>

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2023

## 5. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut

Keanekaragaman hayati tidak hanya ada di darat saja tetapi di wilayah laut juga terdapat keanekaragaman hayati. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem khas di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun, ekosistem ini bernama Padang Lamun. Padang Lamun berfungsi sebagai habitat penting untuk berbagai jenis hewan laut, seperti ikan-ikan kecil, Moluska, Krustasea, Ekinodermata, dan Penyu. Padang lamun dapat juga sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. Padang lamun yang terdapat di kawasan Pesisir Lampung banyak terdapat di Pesisir Teluk Lampung terutama menyebar di pulau-pulau, Teluk Lampung, Pesisir Teluk Semaka dan sedikit di Pesisir Barat Lampung. Padang lamun di Teluk Lampung tersebar hampir di sepanjang pantai dan di seluruh pulau-pulau di dalamnya antara lain terdapat di Pulau Tangkil, Pulau Puhawang, Pulau Tegal, Pulau Mahitam, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Tegal, dan Pulau Legundi.

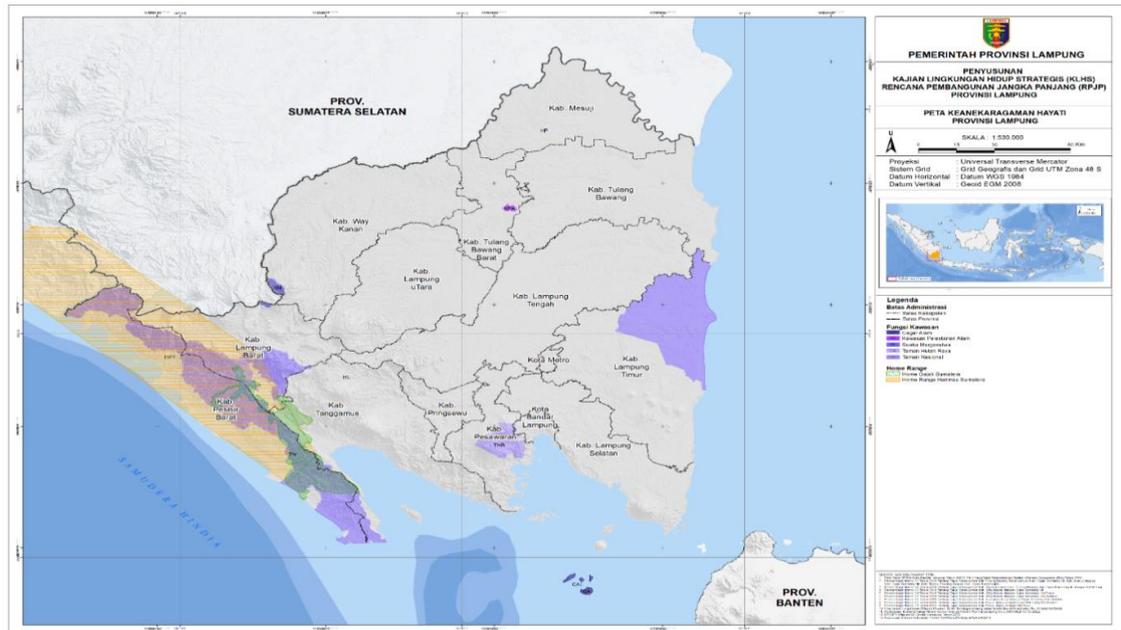
Tabel 2. 8 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi Lampung

No.	Keanekaragaman Hayati Laut	Luas (Ha)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	6.652,68
2	Cagar Alam Laut	20.023,11
3	Kawasan Konservasi	136.677,19
4	Alur Biota Laut	70.535,97
<b>Jumlah</b>		<b>233.888,95</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung, 2022

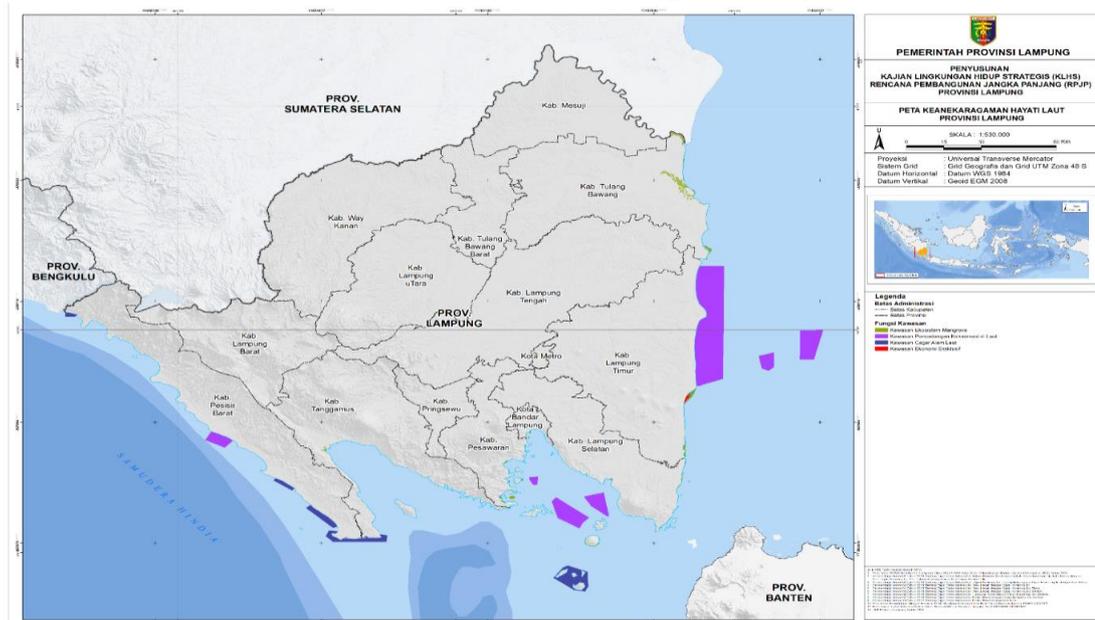
Provinsi Lampung memiliki luasan kawasan keanekaragaman hayati laut yaitu Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 6.652,68 Ha, Cagar Alam Laut seluas 20.023,11 Ha serta kawasan konservasi dengan luas terbesar yaitu 136.677,19 Ha.

Gambar 2. 8 Peta Keanekaragaman Hayati Darat



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 9 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Tabel 2. 19 Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Cagar Alam Laut	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Jumlah
Kab. Lampung Barat			44.850,10	86,9			882,2		57.530,00	103.349,10
Kab. Lampung Selatan	2.533,30	46,3	13.383,00		34.160,70					50.123,30
Kab. Lampung Tengah			26.079,40		13.783,20				9,7	39.872,30
Kab. Lampung Timur			23.184,80		3.852,90				128.312,50	155.350,20
Kab. Lampung Utara			27.178,80		7.628,70					34.807,40
Kab. Mesuji					43.990,50					43.990,50
Kab. Pesawaran			12.300,30		1.351,20			21.419,90		35.071,30
Kab. Pesisir Barat		63,1	10.070,50	28.851,20					179.729,80	218.714,60
Kab. Pringsewu			13.039,30							13.039,30
Kab. Tanggamus		85,5	126.648,90						13.041,10	139.775,50
Kab. Tulang Bawang					2,5					2,5
Kab. Tulang Bawang Barat					10.404,60	1.374,60				11.779,30
Kab. Way Kanan			22.502,20		53.523,50		3.260,90			79.286,60
Kota Bandar Lampung			149,6					296,7		446,3
Jumlah	2.533,30	194,9	319.386,70	28.938,10	168.697,70	1.374,60	4.143,10	21.716,60	378.623,20	925.608,10

Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023



## 6. Kawasan Pertambangan

Kabupaten. Lampung Timur, disekitar Pulau Segama dan Pulau Batang terdapat eksploitasi minyak bumi yang dilakukan kontraktor asing, yaitu China National Oil Ofshore Company SES (CNOOC SES). Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai kabupaten Penghasil Minyak Bumi dengan SK Menteri ESDM No:357.K/80/MEM/2001 tanggal 9 April 2001. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur bahwa realisasi lifting minyak bumi tahun 2011 sebesar 2.706,98 ribu barel dan tahun 2012 sebanyak 2.724,22 ribu barel.

Selain itu juga terdapat penemuan ilmiah baru rencana pengembangan eksplorasi minyak dan gas yang berdampak pada berubahnya alokasi ruang dalam RZWP-3-K atau RZR. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT0291/SKKMI2000/2020/S0 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Tata Ruang Laut PT. Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) di Wilayah Kerja Southeast Sumatra Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan No. B-55 MEN-KPII2021.

## 7. Kawasan Pertanian

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan yang tersebar disetiap kabupaten/kota seluas 880.758,21 Ha atau 26,24%. Luas potensi hortikultura seluas 72.820,47 Ha, perkebunan seluas 446.346,52 Ha, tanaman pangan seluas 361.407,17 Ha dan peternakan seluas 184,05 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan No. B-55 MEN-KPII2021.

Tabel 2. 9 Tabel Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Kawasan Tanaman Pangan	Grand Total (Ha)
Bandar Lampung	0,18	0,12	-	602,62	602,93
Lampung Barat	7.117,16	63.833,24	-	10.276,56	81.226,97
Lampung Selatan	164,85	13.050,17	-	39.082,55	52.297,57
Lampung Tengah	21.832,20	111.793,29	181,46	79.566,71	213.373,65
Lampung Timur	-	-	-	58.275,68	58.275,68
Lampung Utara	-	0,03	-	15.094,48	15.094,51
Mesuji	-	56.920,45	-	29.653,76	86.574,21
Metro	45,69	-	2,59	2.945,62	2.993,90
Pesawaran	13.193,57	43.813,14	-	13.134,45	70.141,17
Pesisir Barat	-	-	-	8.583,44	8.583,44
Pringsewu	8.229,78	4.422,31	-	13.886,39	26.538,48
Tanggamus	0,39	24,46	-	17.123,52	17.148,34
Tulang Bawang	-	503,61	-	52.108,49	52.612,10
Tulang Bawang Barat	1.584,50	69.259,16	-	6.918,72	77.762,38
Way Kanan	20.652,16	82.726,54	-	14.154,17	117.532,88
<b>Grand Total</b>	<b>72.820,47</b>	<b>446.346,52</b>	<b>184,05</b>	<b>361.407,17</b>	<b>880.758,21</b>

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

## 8. Kawasan Perikanan

Tabel 2. 10 Tabel Luas Kawasan Perikanan Provinsi Lampung

Sebaran Kawasan Perikanan	Luas (Ha)	Presentase (%)
Lampung Barat	28,07	0,04
Lampung Selatan	3.259,01	5,13
Lampung Tengah	205,20	0,32
Lampung Timur	7.343,27	11,57
Mesuji	878,16	1,38
Pesawaran	703,16	1,11
Pesisir Barat	2.547,53	4,01
Pringsewu	376,05	0,59
Tanggamus	1.641,14	2,58
Tulang Bawang	37.936,39	59,75
Tulang Bawang Barat	2.942,57	4,63
Way Kanan	5.630,56	8,87
<b>Grand Total</b>	<b>63.491,11</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

### 2.1.1.6.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS

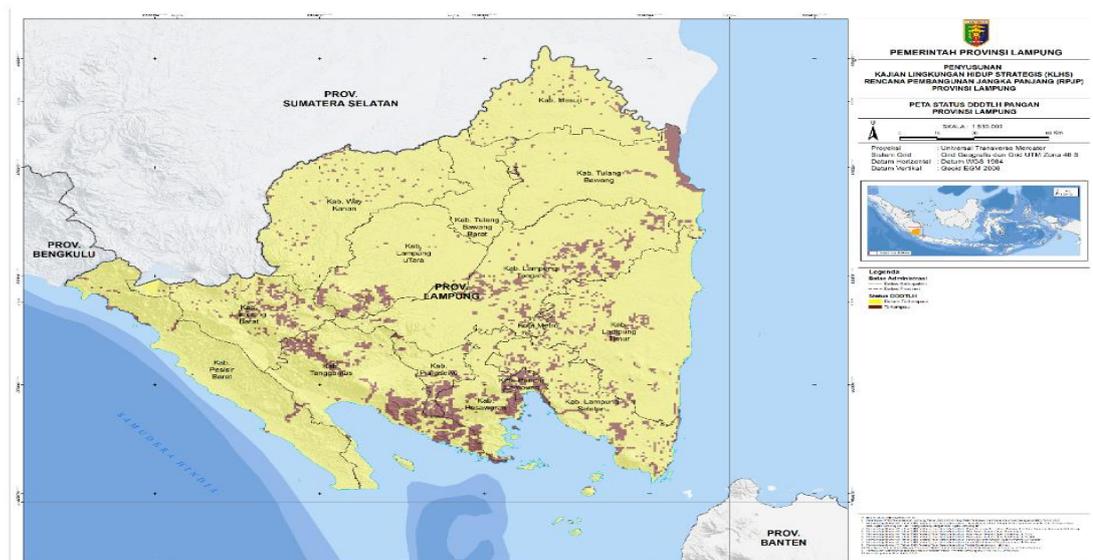
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup harus memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat.

#### 1. Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status **Belum terlampaui**. Kebutuhan pangan di Provinsi Lampung sebesar 7.201.294.473.502,9 kkal/tahun lebih kecil dibandingkan dengan ketersediaan pangan yang ada. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk (sesuai Tabel 2.4). Sedangkan Daya Dukung Pangan yang berada pada status **Terlampaui** hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhannya lebih besar daripada ketersediaan, sehingga terdapat selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/thn.

Berdasarkan luasan, Daya Dukung Pangan Provinsi Lampung yang berada pada kategori Belum Terlampaui adalah seluas 3.016.741 Ha dan kategori Terlampaui seluas 340.723 Ha.

Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Tabel 2. 11 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Sesliah (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kabupaten Lampung Barat	592.073.081.943,3	238.090.795.750,0	754.473,5	353.982.286.193,0	190.077,5	26.527,4	216.605,0
Kabupaten Lampung Selatan	1.505.806.707.045,9	848.404.996.249,6	1.918.836,2	657.401.710.797,5	197.702,2	33.389,9	231.092,1
Kabupaten Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	4.384.687,8	2.263.741.509.979,6	390.339,0	53.298,0	443.637,0
Kabupaten Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4
Kabupaten Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6	1.424.729.000.338,7	258.957,0	20.898,0	279.855,0
Kabupaten Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	1.603.590,4	1.075.818.011.080,8	204.319,8	9.621,9	213.941,7
Kabupaten Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	637.759,8	118.188.675.305,4	95.834,6	29.601,1	125.435,6
Kabupaten Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	989.919,8	647.500.189.016,8	275.340,4	7.302,5	282.642,9
Kabupaten Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	483.417,6	58.858.319.267,0	53.622,0	18.387,0	72.009,0
Kabupaten Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	878.520,5	177.057.243.672,4	240.531,5	58.746,2	299.277,7
Kabupaten Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	2.779.901,0	1.843.136.802.856,7	278.399,3	23.891,2	302.290,5
Kabupaten Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	1.269.239,7	768.756.565.764,6	122.448,3	2.364,2	124.812,5
Kabupaten Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	3.228.188,6	2.155.827.999.171,8	336.324,1	12.186,5	348.510,6
Kota Bandar Lampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	144.171,1	- 836.359.818.671,1	6.406,2	15.785,4	22.191,7
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	109.886,3	- 48.091.591.752,2	8.181,0	2.592,0	10.773,0
<b>Jumlah</b>	<b>20.190.549.119.999,0</b>	<b>7.201.294.473.502,9</b>	<b>25.728.638,6</b>	<b>12.989.254.646.495,9</b>	<b>3.016.740,8</b>	<b>340.722,7</b>	<b>3.357.463,5</b>

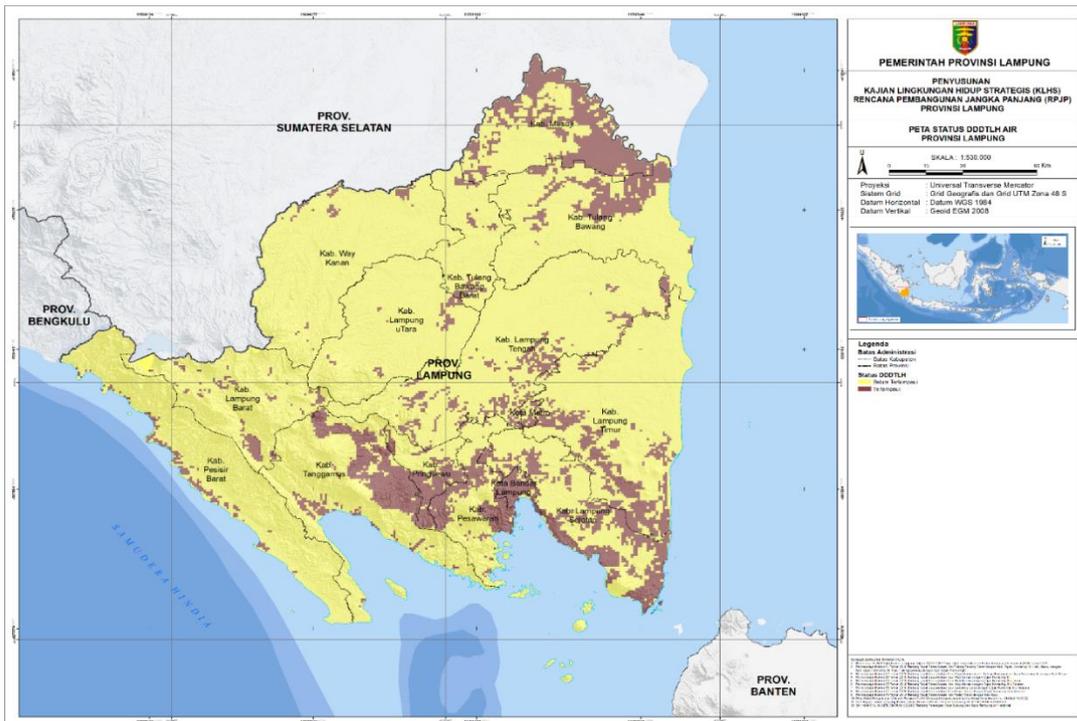
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung,



## 2. Daya Dukung Air

Daya dukung air Provinsi Lampung belum terlampaui dimana ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan. Jumlah ketersediaan sumber daya air sebesar 31.835.052.182 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan kebutuhan total air sebesar 19.477.667.198 m<sup>3</sup>/tahun,

Gambar 2. 11 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Tabel 2. 12 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
							Belum Terlampaui	Terlampaui	
							m <sup>3</sup> /tahun		
Kota Bandar Lampung	102.803.980,7	45.918.784,4	100.750.608,0	146.669.392,4	- 43.865.411,7	102.803.980,7	1.945,7	16.418,4	18.364,1
Kota Metro	86.502.933,8	71.638.715,1	14.573.520,0	86.212.235,1	290.698,7	108.128,7	3.831,7	3.405,9	7.237,6
Lampung Barat	1.804.273.400,8	1.101.907.937,7	26.139.024,0	1.128.046.961,7	676.226.439,2	2.255.341,8	196.370,9	15.581,8	211.952,7
Lampung Selatan	1.657.747.426,6	1.398.648.426,2	91.934.438,4	1.490.582.864,6	167.164.562,0	2.072.184,3	136.476,2	85.761,1	222.237,3
Lampung Tengah	5.240.695.972,0	2.770.025.963,7	126.179.510,4	2.896.205.474,1	2.344.490.497,9	6.550.870,0	406.915,6	47.863,0	454.778,6
Lampung Timur	4.049.215.216,2	1.739.864.240,3	95.970.182,4	1.835.834.422,7	2.213.380.793,5	5.061.519,0	318.012,1	68.776,0	386.788,1
Lampung Utara	2.609.602.388,7	1.375.055.679,1	54.751.420,8	1.429.807.099,9	1.179.795.288,8	3.262.003,0	258.374,6	7.156,0	265.530,6
Mesuji	1.657.079.110,7	1.593.104.004,0	19.651.852,8	1.612.755.856,8	44.323.253,9	2.071.348,9	110.769,8	108.555,8	219.325,6
Pesawaran	960.279.706,4	776.473.942,9	41.247.360,0	817.721.302,9	142.558.403,5	1.200.349,6	82.870,3	45.141,4	128.011,7
Pesisir Barat	2.760.643.022,1	785.947.396,4	14.058.403,2	800.005.799,6	1.960.637.222,5	3.450.803,8	285.721,7	13.480,9	299.202,6
Pringsewu	484.604.943,1	515.392.401,2	35.035.027,2	550.427.428,4	- 65.822.485,2	605.756,2	32.177,6	29.363,4	61.541,0
Tanggamus	2.155.321.986,6	1.543.916.472,8	55.387.238,4	1.599.303.711,2	556.018.275,4	2.694.152,5	214.294,2	75.899,2	290.193,4
Tulang Bawang	3.355.710.830,7	2.196.144.327,0	37.168.156,8	2.233.312.483,8	1.122.398.346,9	4.194.638,5	251.420,7	58.699,1	310.119,8
Tulang Bawang Barat	1.322.846.444,4	733.352.930,7	24.731.481,6	758.084.412,3	564.762.032,0	1.653.558,1	118.641,8	9.545,6	128.187,4
Way Kanan	3.587.724.818,9	2.051.735.684,7	40.962.067,2	2.092.697.751,9	1.495.027.067,0	4.484.656,0	344.444,4	7.934,0	352.378,4
<b>Jumlah</b>	<b>31.835.052.182,0</b>	<b>18.699.126.906,3</b>	<b>778.540.291,2</b>	<b>19.477.667.197,5</b>	<b>12.357.384.984,4</b>	<b>39.793.815,2</b>	<b>2.762.267,3</b>	<b>593.581,6</b>	<b>3.355.848,9</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045



### 3. Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, kendala dan limit dimana daya dukung lahan potensial seluas 2.101.957,0 Ha, daya dukung lahan kendala seluas 515.883,30 Ha dan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 Ha. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 Ha.

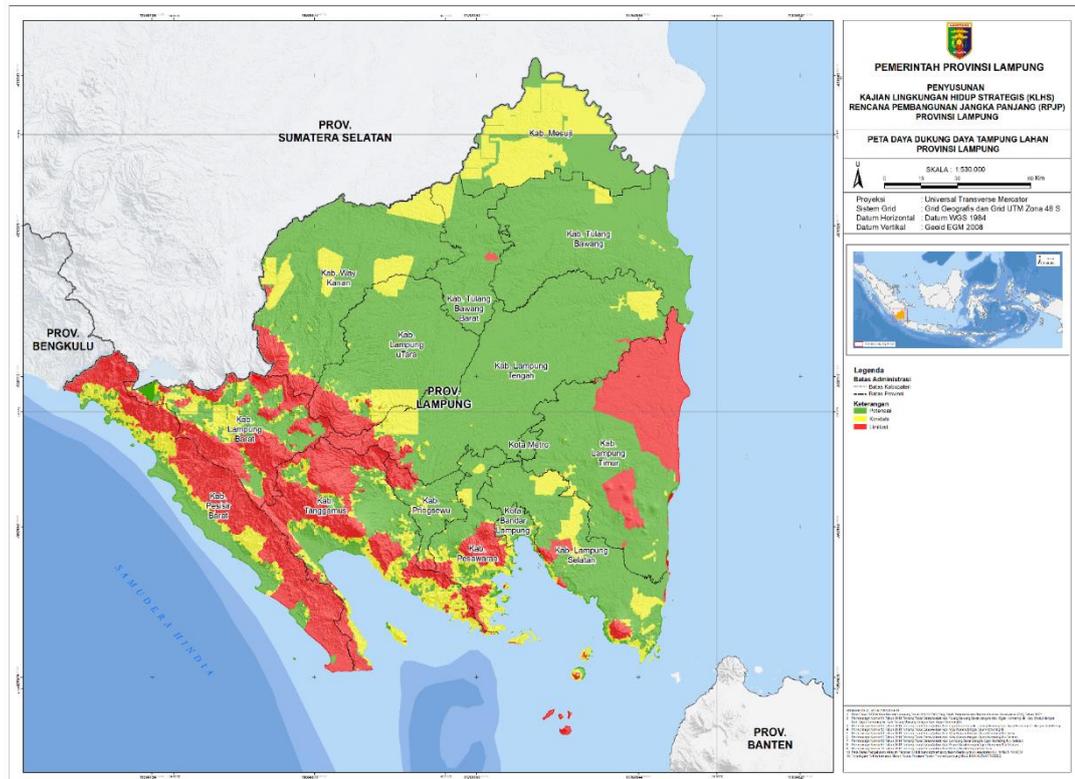
Lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan kendala merupakan area yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu atau kemampuan lahan sedang.

Tabel 2. 13 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (Ha)			Total
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Kabupaten Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Kabupaten Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Kabupaten Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00
4	Kabupaten Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90
5	Kabupaten Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Kabupaten Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Kabupaten Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Kabupaten Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Kabupaten Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20
10	Kabupaten Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60
11	Kabupaten Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Kabupaten Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>739.623,20</b>	<b>515.883,30</b>	<b>2.101.957,00</b>	<b>3.357.463,50</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 12 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung



Sumber : Hasil analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Provinsi Lampung, 2025-2045

#### 4. Jasa Lingkungan Hidup

Secara operasional, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan pendekatan konsep Jasa Lingkungan Hidup, memiliki asumsi dasar sebagai berikut:

- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

## 1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Provinsi Lampung didominasi oleh Jasa Penyedia Pangan **sangat tinggi** dengan luas lahan 1.165.227,7 Ha. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki luas tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campur seluas 1.265.828,1 Ha. Jasa penyedia pangan sangat tinggi juga mengindikasikan Provinsi Lampung adalah wilayah yang mempunyai daya dukung tinggi untuk ketahanan pangan, sehingga lahan tidur akan sangat potensial jika dimanfaatkan sebagai LP2B. Jasa Penyedia Pangan terluas berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu seluas 208.064,7 Ha, dan terkecil berada di Kota Bandar Lampung dengan luasan sebesar 657,8 Ha.

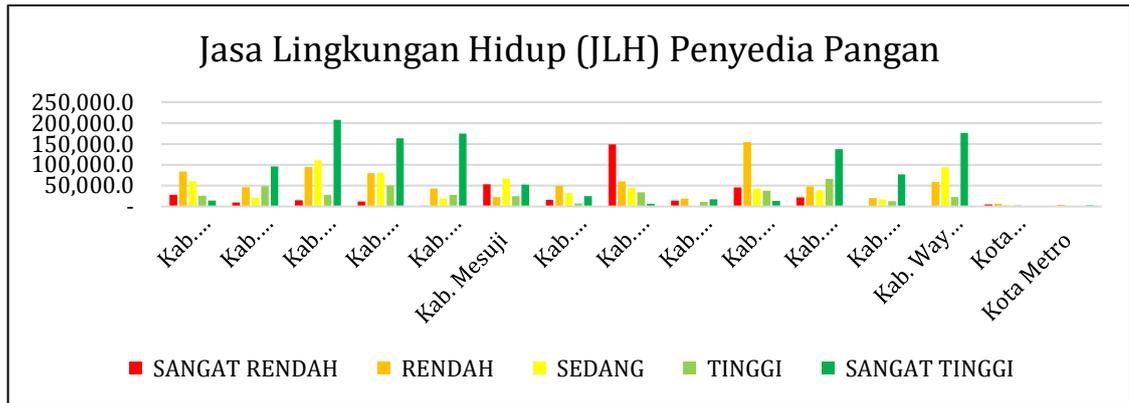
Tabel 2. 14Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	27.938,4	83.639,7	59.864,8	25.529,9	13.826,5	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	9.855,7	46.572,0	21.390,2	48.689,1	96.226,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.011,6	94.826,4	110.393,0	27.661,2	208.064,7	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	11.728,8	80.047,1	80.943,1	49.991,1	163.666,8	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	1.848,3	43.251,4	18.566,5	28.017,6	175.246,6	266.930,4
6	Kab. Mesuji	53.026,7	22.432,3	67.205,1	25.154,5	52.222,8	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	15.994,0	49.371,8	31.399,6	7.061,5	24.984,7	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	148.996,0	59.708,6	44.792,7	34.014,8	6.511,8	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	14.192,3	18.520,3	1.183,1	10.893,3	16.930,1	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	45.541,0	154.298,1	43.597,9	37.840,5	13.567,0	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	21.602,3	47.754,7	38.614,5	66.504,9	137.133,2	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	19.991,8	16.665,7	12.414,7	76.636,4	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	244,6	58.700,4	94.115,6	22.474,7	176.676,0	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	5.099,8	6.509,8	3.365,2	2.742,3	657,8	18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3			2.877,1	7.321,4

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
	Jumlah	371.079,6	790.068,7	632.097,1	398.990,3	1.165.227,7	3.357.463,5

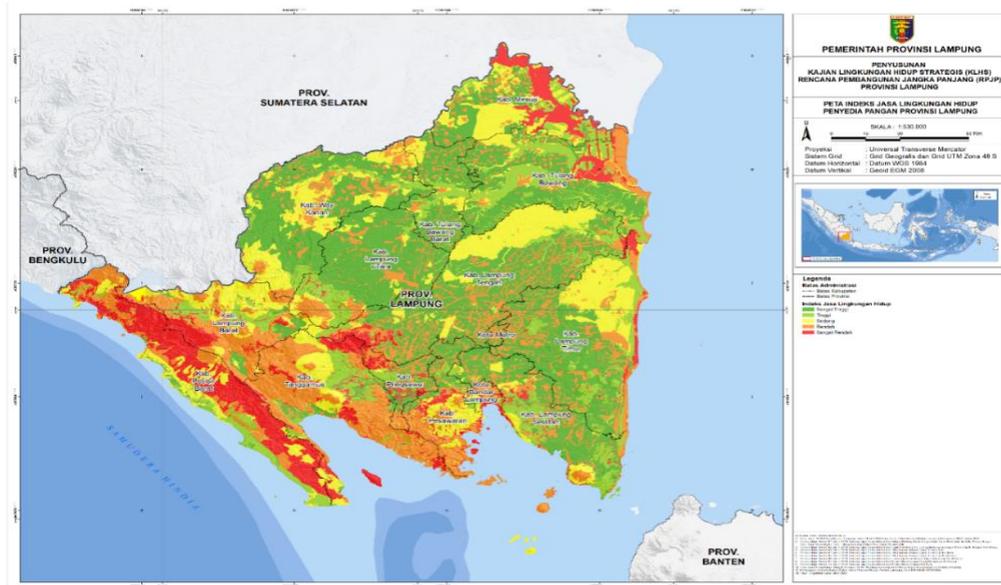
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 2 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Prov. Lampung



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Grafik 2. 3 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Prov. Lampung



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

## 2. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

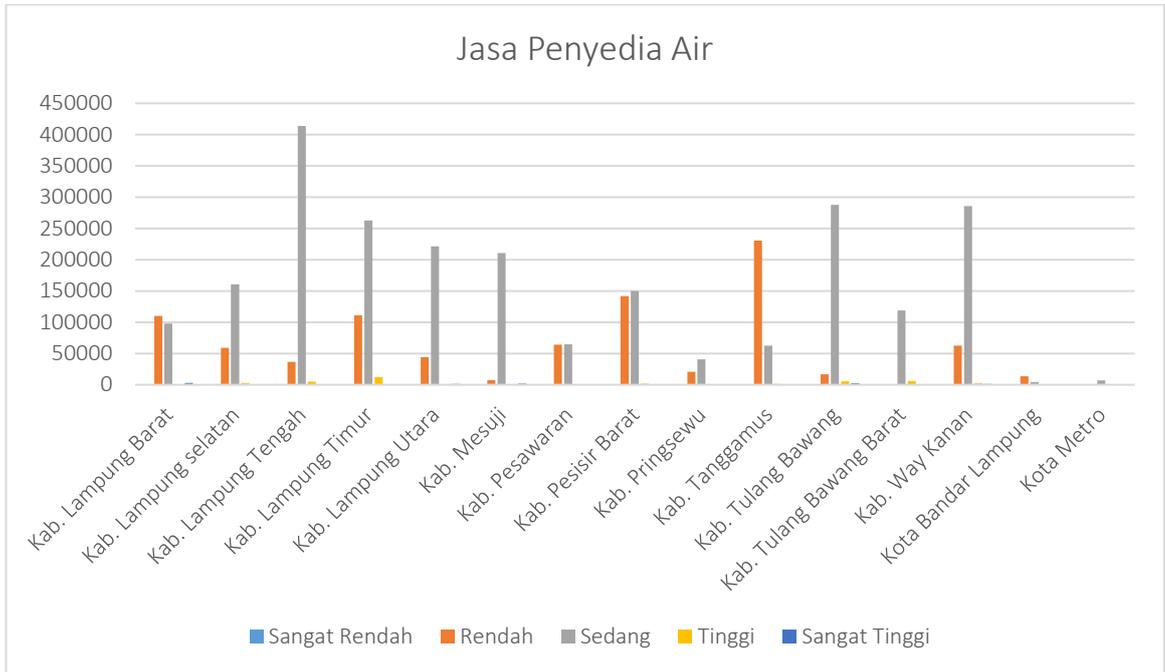
Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung yang berada pada klasifikasi Tinggi dengan luas total 1.622.101,5 Ha tersebar di seluruh Kabupaten. Untuk Jasa Pengatur Air dengan klasifikasi Sangat Rendah seluas total Jasa lingkungan hidup penyedia air di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun didominasi dengan jasa penyedia air sedang dengan luas 2.389.298,4 Ha, hal ini sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki daya dukung air belum terlampaui. Jasa penyedia air tinggi dan sangat tinggi memiliki luas 36.993,0 Ha dan 11.380,9 Ha yang hanya tersebar di beberapa kabupaten.

Tabel 2. 15 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	14,5	110.052,9	97.577,6	100,8	3.053,5	210.799,4
2	Kab. Lampung selatan	256,3	58.953,5	160.752,6	2.722,7	47,9	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	3,1	36.607,9	413.951,0	4.911,3	483,6	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	54,5	111.137,3	262.875,1	11.819,9	490,1	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	25,9	44.303,7	221.174,1	7,7	1.419,1	266.930,4
6	Kab. Mesuji		7.271	210.588,0	370,1	1.842,3	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	65,3	63.919,7	64.826,7			128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	369,5	141.854,7	149.845,2	1.894,4	60,1	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	4,9	20.686,8	40.806,5	222,0		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	192,1	230.722,1	62.719,0	1.201,1	10,2	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	29,6	16.436,4	287.669,3	5.331,7	2.142,6	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat		113,3	118.994,0	6.000,2	601,2	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	80,0	62.634,7	285.855,5	2.411,0	1.230,2	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung		13.736,5	4.611,4			18.374,9
15	Kota Metro		238,1	7.083,3			7.321,4
	Jumlah	1.095,7	918.695,5	2.389.298,4	36.993,0	11.380,9	3.357.463,5

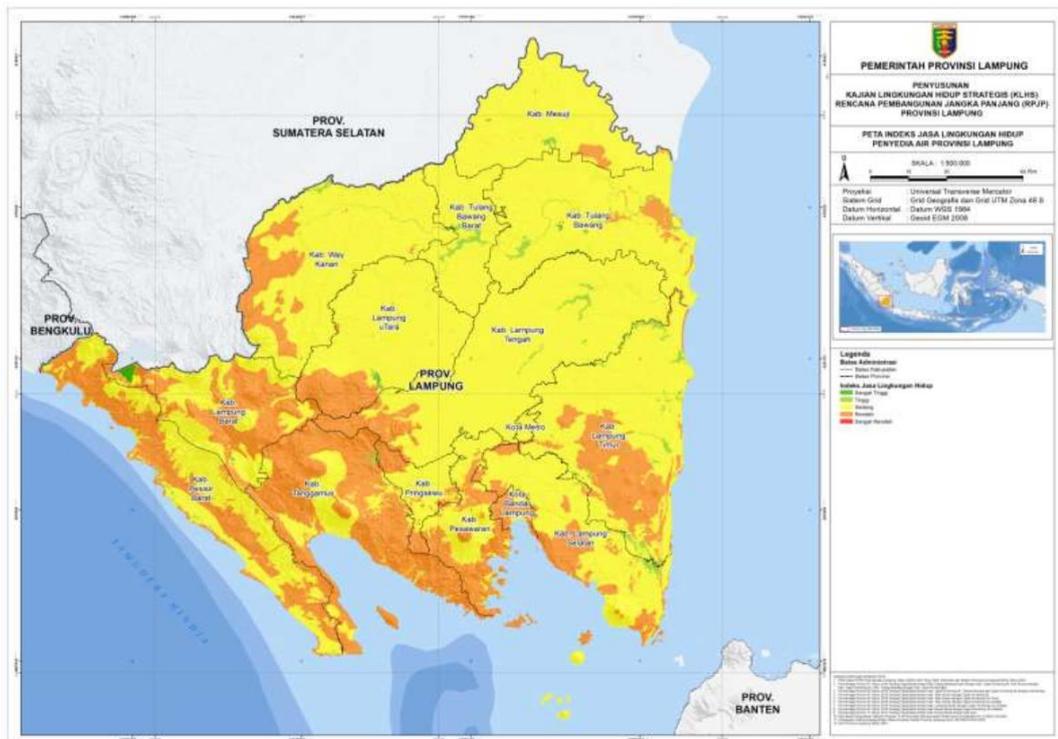
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Grafik 2. 4 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Gambar 2. 13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045



### 3. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

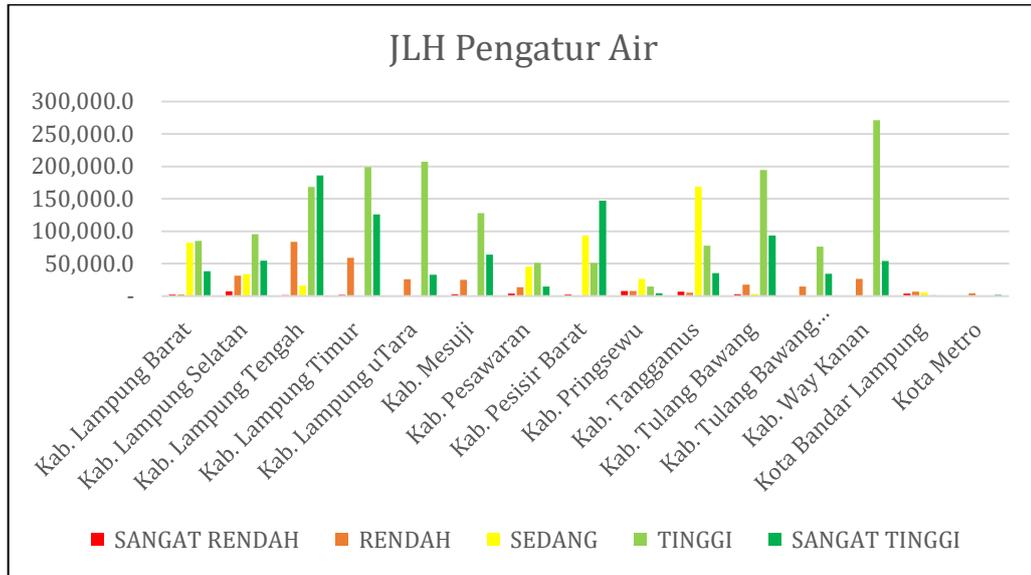
Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung yang berada pada klasifikasi Tinggi dengan luas total 1.622.101,5 Ha tersebar di seluruh Kabupaten. Untuk Jasa Pengatur Air dengan klasifikasi Sangat Rendah seluas total 43.763,5 Ha juga tersebar di beberapa Kabupaten, sedangkan klasifikasi Sedang memiliki luasan total sebesar 476.845,1 Ha. Luasan terbesar dengan Jasa Pengatur Air pada klasifikasi Sangat Tinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah seluas 185.854,1 Ha.

Tabel 2. 16 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	2.428,2	2.380,1	82.382,3	85.339,1	38.269,6	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	7.282,9	31.628,0	33.915,6	95.327,5	54.579,0	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	1.663,1	83.847,2	16.498,6	168.093,9	185.854,1	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	1.784,2	58.972,6	880,7	198.860,4	125.878,9	386.376,9
5	Kab. Lampung uTara		26.329,0		207.442,4	33.159,1	266.930,4
6	Kab. Mesuji	2.736,9	25.352,3	13,1	127.883,5	64.055,6	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	4.005,6	13.714,1	45.059,9	51.010,8	15.021,3	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.250,2	2,4	93.395,3	51.254,8	147.121,3	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	7.990,1	7.851,5	26.413,8	14.899,7	4.564,0	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	6.927,4	5.514,6	169.041,1	77.780,0	35.581,5	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	2.786,3	17.533,7	3.519,1	194.369,7	93.400,8	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	14.792,0		76.461,7	34.455,1	125.708,8
13	Kab. Way Kanan		26.808,3		271.315,3	54.087,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	3.908,5	7.122,2	5.725,6	1.352,0	266,6	18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3		710,8	2.166,3	7.321,4
Jumlah		43.763,5	326.292,3	476.845,1	1.622.101,5	888.461,0	3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Prov. Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

#### 4. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

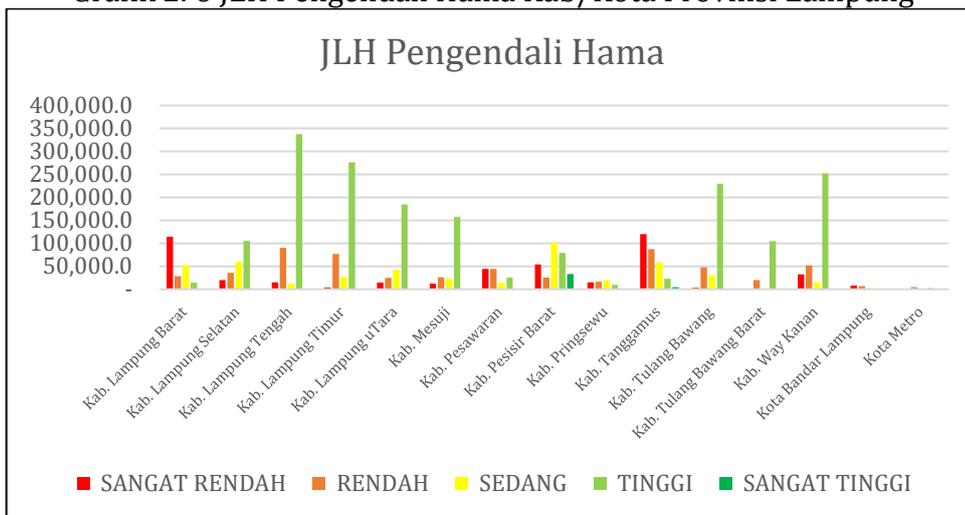
Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama terdiri dari klasifikasi Sangat Rendah, Rendah, Sedang dan Tinggi namun Provinsi Lampung didominasi dengan klasifikasi Tinggi seluas 1.803.258,6 Ha, sedangkan klasifikasi Rendah seluas 588.896,6 Ha yang lokasinya juga tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 17 Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	114.411,5	28.528,3	52.749,2	14.436,5	673,9	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	20.043,3	36.158,6	60.657,6	105.300,0	573,4	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.361,6	90.533,5	12.300,4	337.760,0	1,5	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	4.416,0	76.872,0	27.216,6	276.597,3	1.275,0	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	14.453,1	24.593,7	43.345,8	184.537,8		266.930,4
6	Kab. Mesuji	12.116,7	26.243,6	23.366,6	157.957,9	356,5	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	44.481,8	44.547,2	14.082,4	25.700,3		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	54.332,4	25.609,9	102.305,4	78.843,8	32.932,4	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.074,2	16.506,3	20.381,4	9.757,4		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	120.484,5	87.757,5	59.116,7	22.543,1	4.942,8	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	3.239,9	47.867,2	30.744,8	229.663,3	94,4	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	20.207,5	780,4	104.720,9		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	32.869,0	52.374,3	14.977,4	251.990,7		352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	8.263,2	6.652,5	2.886,5	572,7		18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3		2.877,1		7.321,4
Jumlah		459.547,2	588.896,6	464.911,3	1.803.258,6	40.849,7	3.357.463,5

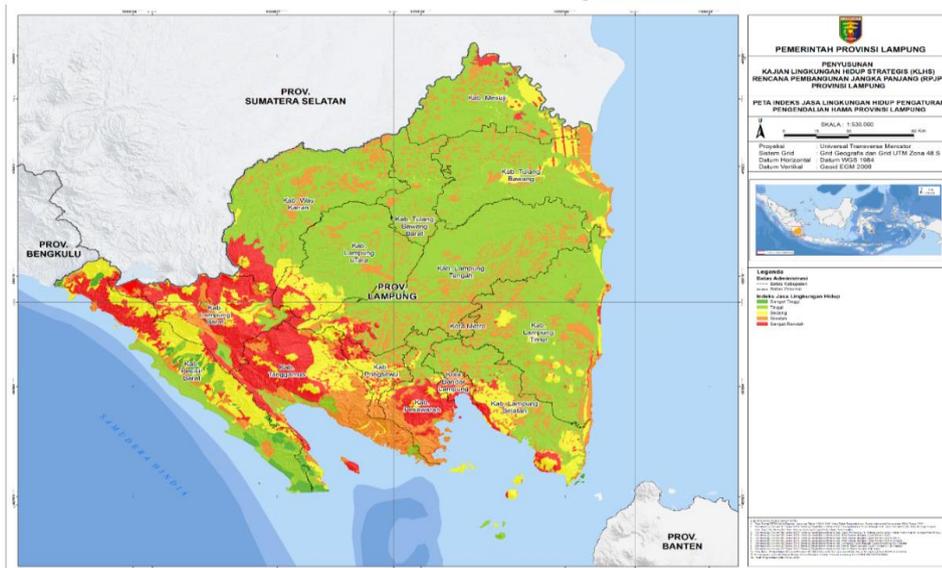
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 6 JLH Pengendali Hama Kab/Kota Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 15 Peta IJLH Pengendali Hama



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

## 5. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah berada pada klasifikasi Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. Luasan Jasa Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung yang berada dalam klasifikasi Rendah sebesar 528.499,7 Ha, Sedang seluas 768.101,6 Ha, serta klasifikasi Tinggi seluas 1.661.262,6 Ha.

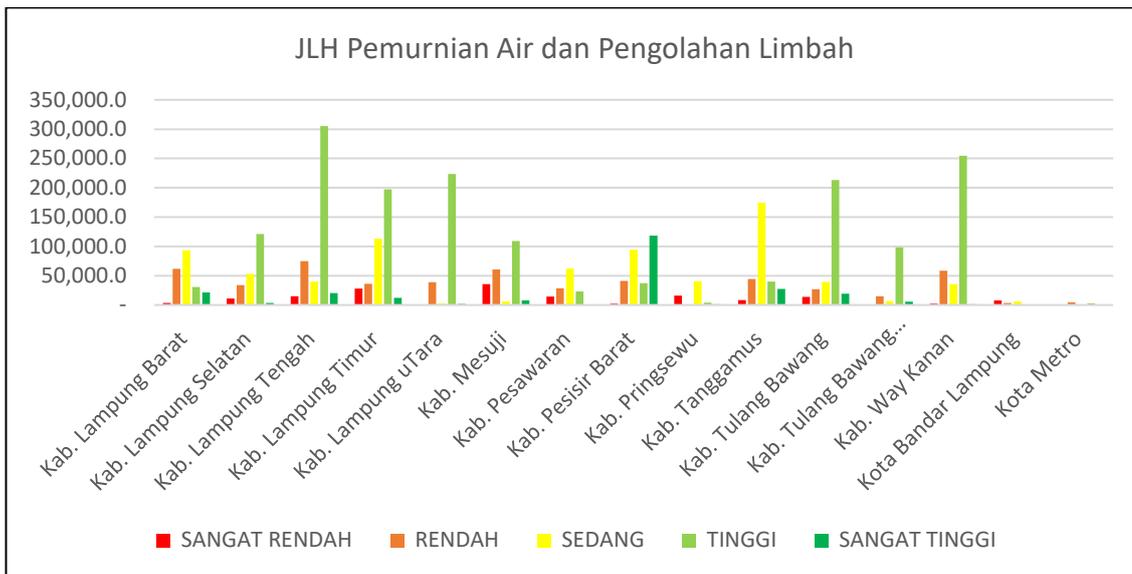
Jasa pemurnian air dan pengolahan limbah tinggi sebesar 1.661.262,6 Ha yang merupakan luasan paling besar di Provinsi Lampung dan tersebar di seluruh Kabupaten, sedangkan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah sangat tinggi memiliki luas sebesar 241.259,4 Ha.

Tabel 2. 18 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan pengolahan limbah (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	3.612,2	61.740,5	93.184,9	30.755,2	21.506,4	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	11.256,4	33.994,8	53.003,4	121.236,0	3.242,5	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	15.126,9	75.038,8	40.231,1	305.416,5	20.143,6	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	27.867,9	36.059,2	112.892,1	197.384,2	12.173,5	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	125,4	38.829,6	2.875,9	223.322,4	1.777,1	266.930,4
6	Kab. Mesuji	35.902,4	60.542,9	6.287,3	109.390,0	7.918,8	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	14.234,2	28.476,9	62.208,5	23.186,4	705,7	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.222,4	41.058,1	94.696,6	37.433,5	118.613,4	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.841,6		40.557,0	3.802,6	1.517,9	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	8.429,9	44.536,0	174.542,6	40.023,1	27.312,9	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	13.667,9	26.680,7	39.237,1	212.988,6	19.035,3	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	158,0	14.849,7	6.561,3	98.235,4	5.904,5	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	2.209,7	58.582,5	35.711,8	254.299,5	1.407,9	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	7.626,4	3.724,3	5.991,6	1.032,6		18.374,9
15	Kota Metro	58,8	4.385,5	120,4	2.756,7		7.321,4
Jumlah		158.340,0	528.499,7	768.101,6	1.661.262,6	241.259,4	3.357.463,5

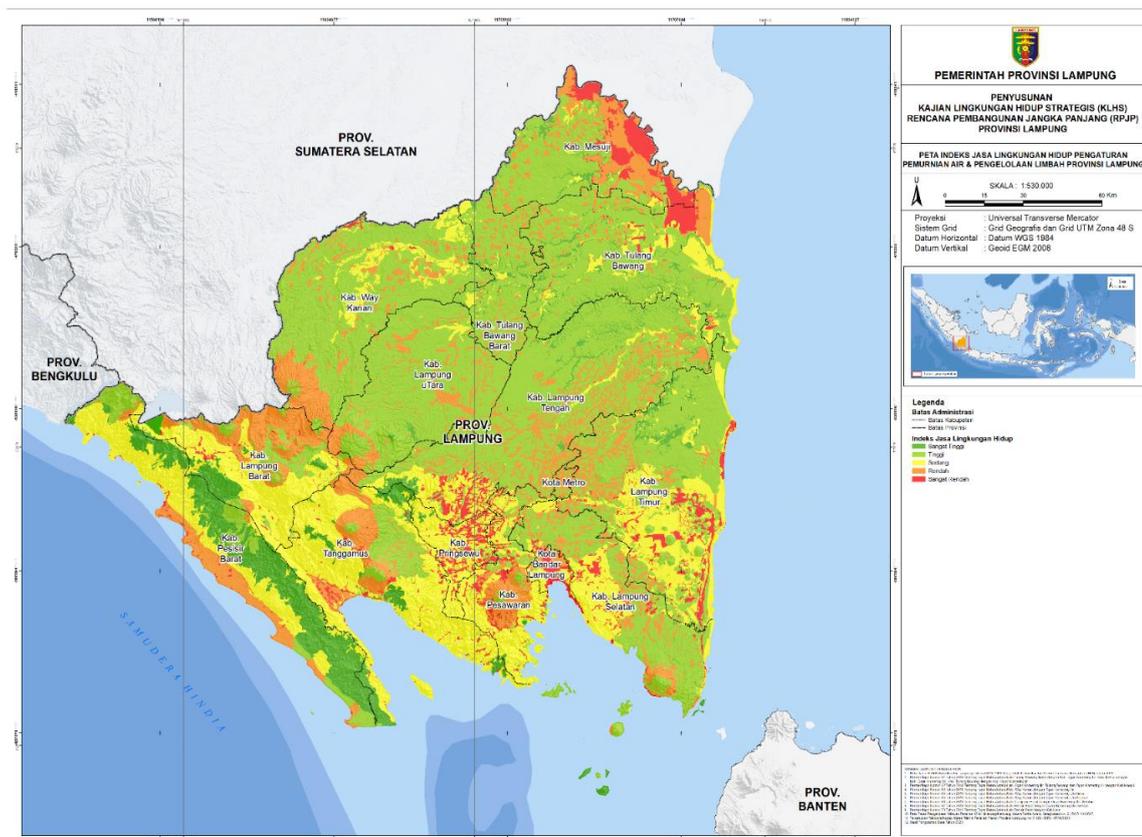
Sumber: Hasil Pengolahan GIS, 2023

Grafik 2. 7 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Gambar 2. 16 Peta IJLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045



## 6. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

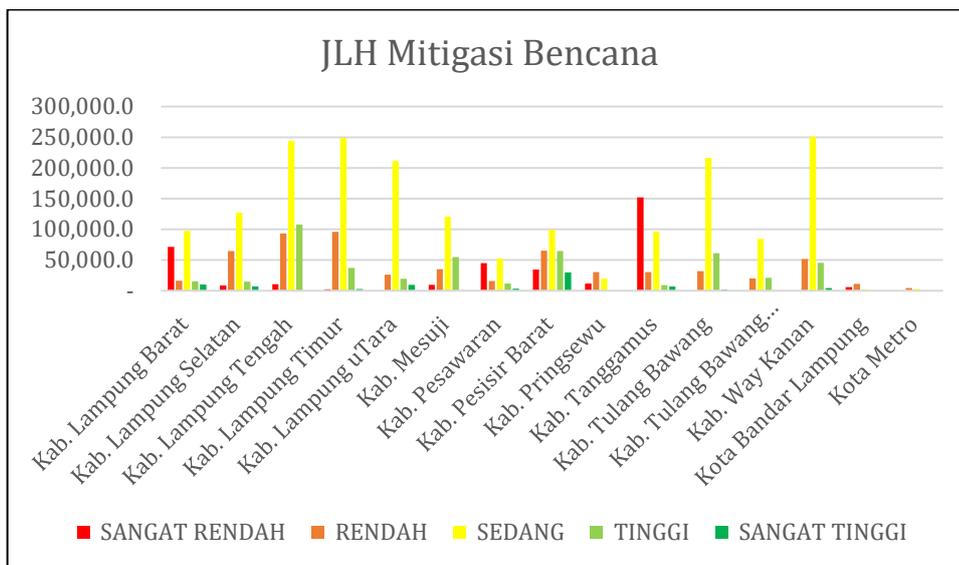
Jasa lingkungan hidup pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan Mitigasi Bencana Alam rendah sebesar 592.392,1 ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sedang sebesar 1.874.068,9 Ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam tinggi sebesar 462.830,1 Ha dan jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi sebesar 76.018,4 ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah jasa lingkungan hidup mitigasi bencana sedang.

Tabel 2. 19 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Alam (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	71.367,9	16.329,8	97.383,4	15.352,5	10.365,8	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	8.701,2	64.672,3	127.238,7	15.039,6	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	10.532,7	93.458,0	244.167,2	107.701,6	97,6	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	2.511,5	95.656,0	248.614,9	36.982,9	2.611,6	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara		26.338,4	211.588,5	19.336,0	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	9.379,8	35.043,4	120.711,0	54.819,9	87,3	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	45.220,0	15.594,6	52.565,1	11.949,3	3.482,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	34.751,1	65.193,4	99.540,8	64.814,7	29.723,9	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	11.537,9	30.492,3	19.335,0	354,0		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	152.015,0	30.262,8	96.378,6	9.163,0	7.025,1	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	398,0	31.809,4	216.611,9	61.082,1	1.708,2	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0	20.207,5	84.655,4	20.845,9		125.708,8
13	Kab. Way Kanan		51.905,8	250.779,0	45.358,8	4.167,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	5.738,9	10.983,9	1.622,3	29,8		18.374,9
15	Kota Metro		4.444,3	2.877,1			7.321,4
Jumlah		352.154,0	592.392,1	1.874.068,9	462.830,1	76.018,4	3.357.463,5

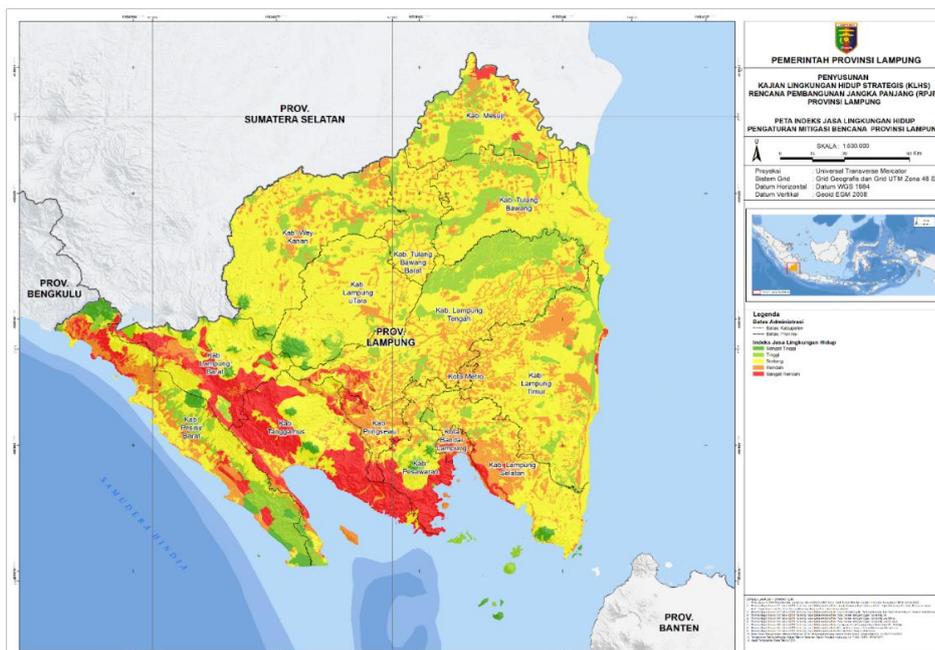
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 8 Jasa Mitigasi Bencana Alam di Prov. Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 17 Peta JLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045



## 7. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

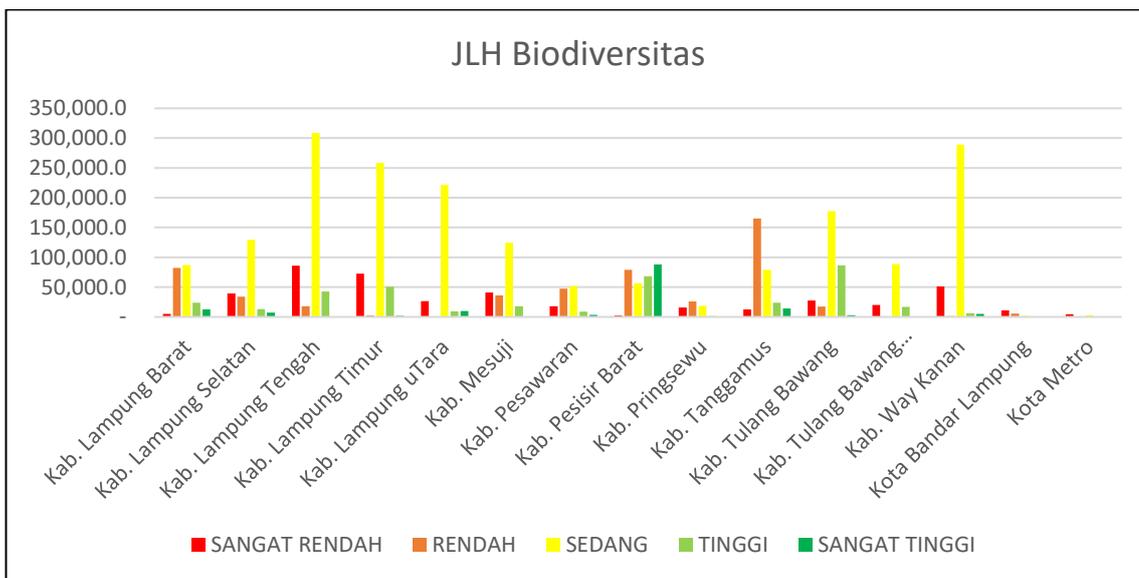
Tingkat keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung diasumsikan dengan menggunakan jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas. Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 Ha. Untuk kelas tinggi memiliki luas sebesar 368.494,1 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada jasa pendukung biodiversitas tinggi.

Tabel 2. 20 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	4.830,5	82.354,9	86.972,7	24.033,6	12.607,5	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	39.221,1	33.817,9	129.485,3	13.127,5	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	86.026,8	17.789,9	308.850,1	42.375,7	914,5	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	72.678,8	2.619,6	258.543,9	50.630,1	1.904,5	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	26.409,9	21,2	221.531,3	9.300,6	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	40.892,9	36.380,7	124.650,7	18.117,0		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	17.719,7	47.333,7	51.536,2	8.739,5	3.482,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	2.261,0	78.924,6	56.592,2	68.176,7	88.069,3	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	15.841,6	26.125,3	18.581,0	1.103,0	68,2	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.506,5	165.371,9	79.060,9	23.669,6	14.235,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	27.503,4	17.180,5	177.609,5	86.625,2	2.691,0	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	19.991,8	215,7	88.524,7	16.616,4	360,1	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	51.259,3	1.118,6	288.739,0	5.962,3	5.132,2	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	11.030,7	5.587,9	1.739,6	16,6		18.374,9
15	Kota Metro	4.444,3		2.877,1			7.321,4
	Jumlah	432.618,5	514.842,5	1.895.294,3	368.494,1	146.214,1	3.357.463,5

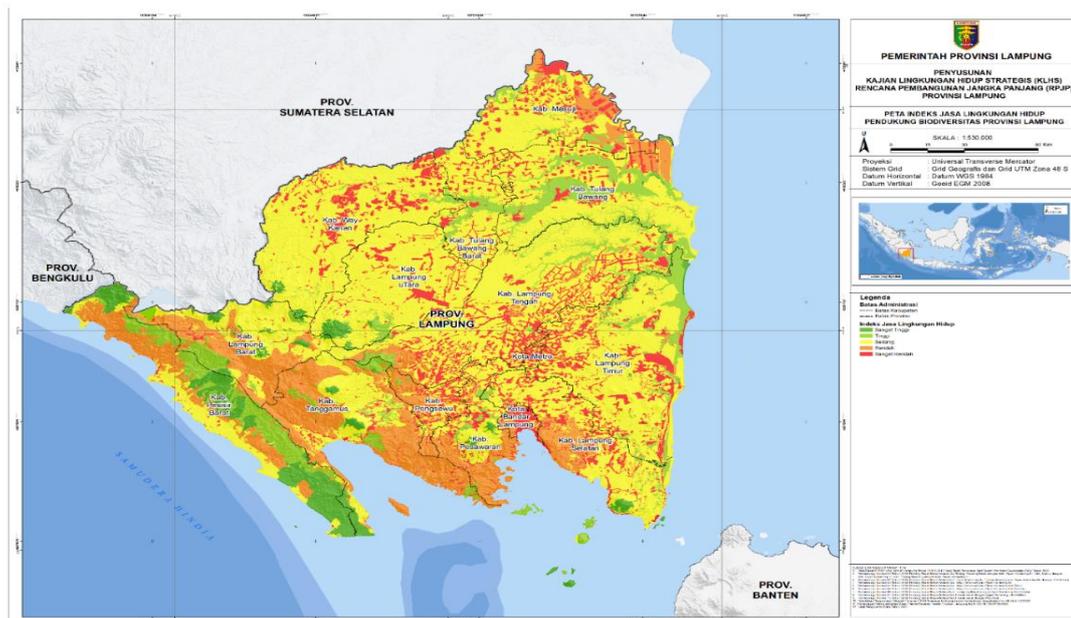
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 9 JLH Biodiversitas



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 18 Peta JLH Pendukung Biodiversitas



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045



## 8. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

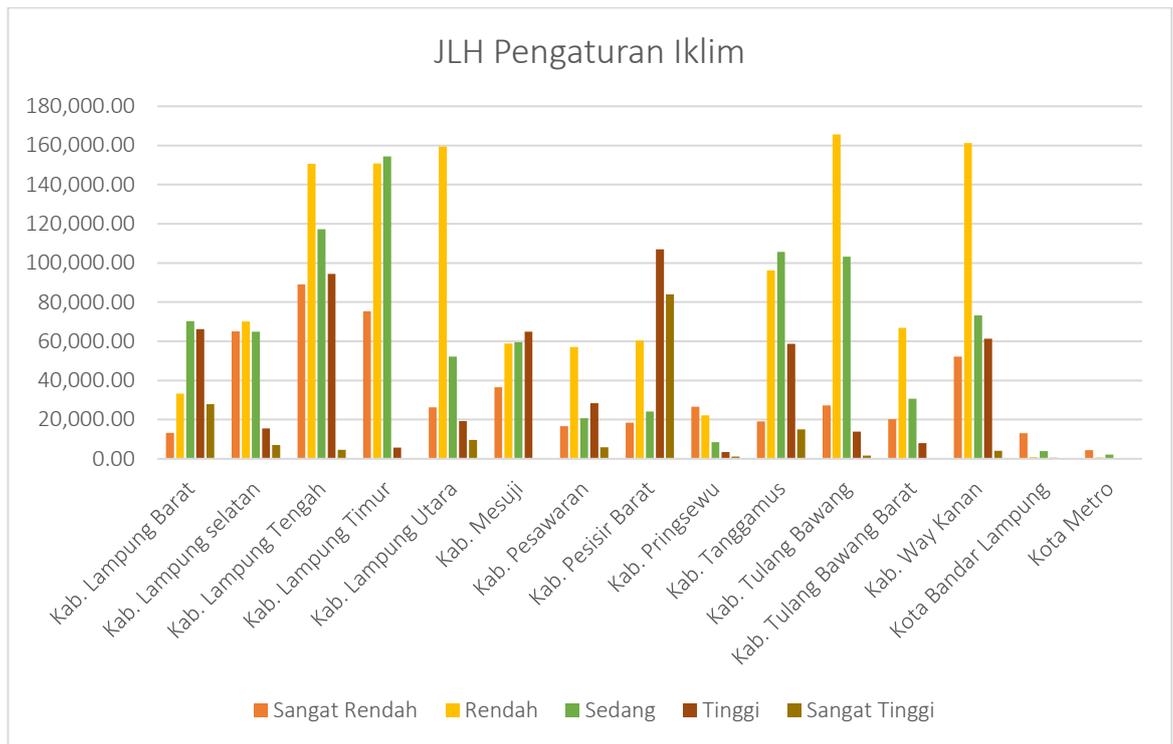
Jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah adalah sebesar 503.713,6 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim rendah sebesar 1.254.500,5 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar 890.746,2 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 547.346,9 Ha dan jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi sebesar 161.156,3 Ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah jasa ekosistem pengaturan iklim rendah seluas 1.254.500,5 Ha

Tabel 2. 21 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	13.196,8	33.257,5	70.234,2	66.163,9	27.947,0	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	65.113,4	70.137,0	64.831,5	15.570,0	7.081,1	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	88.957,3	150.706,7	117.302,5	94.413,4	4.577,0	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	75.298,4	150.869,9	154.489,0	5.719,6		386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	26.317,3	159.483,9	52.147,7	19.314,1	9.667,4	266.930,4
6	Kab. Mesuji	36.607,1	58.902,3	59.585,8	64.859,0	87,3	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	16.706,2	57.033,4	20.750,4	28.429,9	5.891,8	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	18.514,3	60.377,3	24.134,9	106.994,4	84.003,1	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	26.577,0	22.171,7	8.471,7	3.398,1	1.100,8	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	19.168,6	96.207,1	105.728,4	58.758,8	14.981,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	27.320,2	165.601,7	103.180,2	13.856,0	1.651,5	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	20.207,5	66.854,5	30.596,0	8.050,8		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	52.143,3	161.328,2	73.225,3	61.346,8	4.167,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	13.141,9	858,4	3.902,4	472,1		18.374,9
15	Kota Metro	4.444,3	710,8	2.166,3			7.321,4
Jumlah		503.713,6	1.254.500,5	890.746,2	547.346,9	161.156,3	3.357.463,5

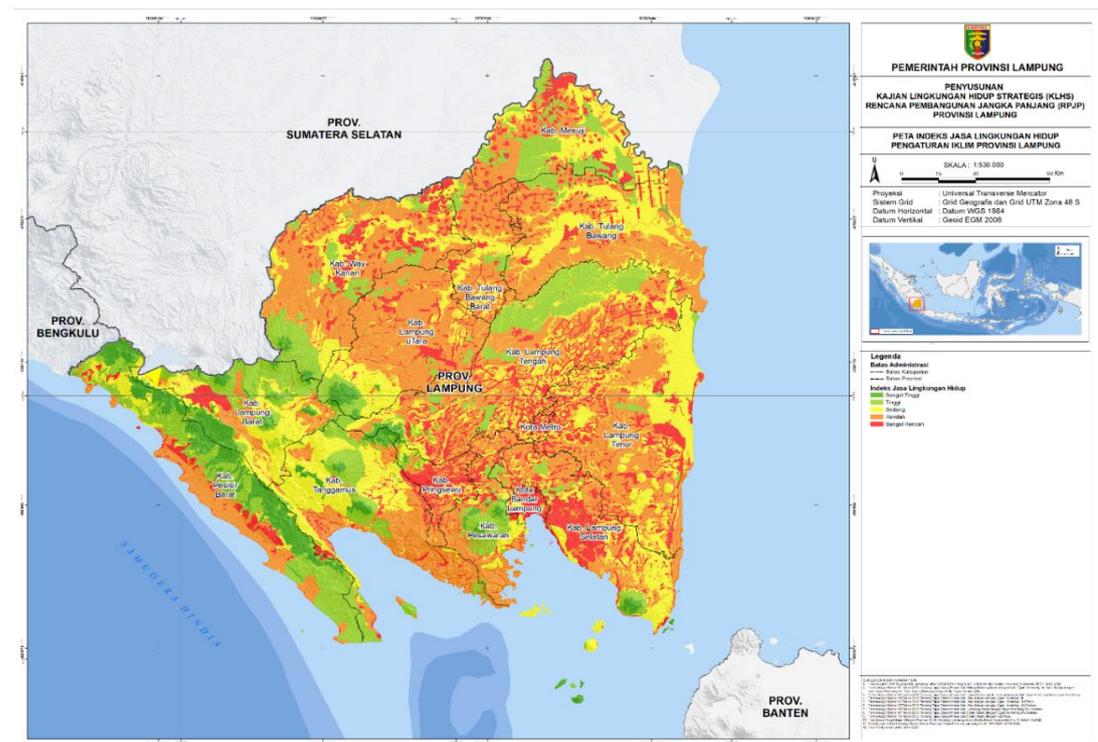
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 10 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Gambar 2. 19 Peta IJLH Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045



### 2.1.1.6.3 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan dan berada pada status “sedang” yaitu 69,91. Namun, masih perlu upaya kerja keras pada semua pemangku kepentingan karena pada dasarnya komponen IKLH pada indikator IKA dan IKL masih di bawah target.

**Indeks Kualitas Air (IKA)** Provinsi Lampung mencapai angka 55,36 (kategori sedang) dan tidak mencapai target SE Menteri LHK yaitu 58,54. Capaian indeks kualitas air berada dibawah target diduga karena banyak limbah domestik (rumah tangga & UMKM) dan industri, limbah pertanian yang masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. Selain itu, kabupaten/kota tersebut mengalami penambahan penduduk yang cukup pesat dan mengalami pengembangan/pembangunan perekonomian yang berdampak terhadap penurunan kualitas air.

Berdasarkan data trend perubahan **indeks kualitas udara** Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 88,04 (baik), yang melampaui target SE Men LHK yaitu 84,44. Selain itu, **Indeks Kualitas Air Laut** Provinsi Lampung yaitu 83,78 dan masuk kategori baik.

**Indeks Kualitas Lahan** Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu hanya 38,42 dan masuk kategori **kurang**. Berdasarkan data trend perubahan indeks kualitas lahan Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target SE Men LHK yaitu 43,03. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Tabel 2. 22 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Lampung Barat	60,00	63,08	66,06	84,73	88,03	90,52	41,63	40,81	41,33	*	*	*	65,99	68,31	70,55	64,27	64,92	65,99	Baik
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	55,00	50,51	87,37	87,89	84,7	26,13	26,10	33,12	*	*	*	63,67	61,99	60,55	60,94	61,39	61,93	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	50,00	53,33	83,46	82,55	84,09	24,48	24,64	26,75	*	*	*	60,47	57,63	59,97	62,97	63,38	63,00	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	49,46	50,54	86,15	87,73	87,74	45,75	45,79	48,80	*	*	*	65,04	64,16	65,22	63,19	63,88	63,79	Sedang
Kabupaten Lampung Utara	57,50	55,93		86,75	88,2	86,98	25,7	25,7	29,72	*	*	*	62,38	62,38	41,73	60,45	60,65	64,58	Kurang
Kabupaten Mesuji	58,57	61,43	59,00	87,05	88,46	89,5	28,13	28,14	28,54	*	*	*	63,44	65,09	64,68	61,83	62,48	62,24	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	57,78	63,33	91,83	91,00	89,37	25,73	25,71	38,59	*	*	*	65,39	64,21	68,46	62,16	62,71	63,13	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	50,00	50,00	87,63	89,06	89,9	73,93	73,93	78,67	*	*	*	71,56	71,06	72,44	61,20	61,72	73,87	Baik
Kabupaten Pringsewu	63,33	50,65	52,22	86,03	86,76	88,98	23,63	23,5	35,00	*	*	*	63,83	59,33	63,34	61,83	62,41	63,26	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	51,54	53,75	84,22	86,78	86,97	34,42	34,42	42,57	*	*	*	63,42	62,06	64,75	64,74	65,36	65,57	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	50,00	50,00	90,15	92,74	92,03	24,09	24,11	24,79	*	*	*	63,09	61,64	61,5	60,89	61,41	61,12	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	52,22	50,00	85,18	88,49	88,15	23,61	23,61	26,51	*	*	*	62,23	60,64	60,31	62,01	62,64	64,48	Sedang
Kabupaten Way Kanan	50,00	67,33	63,33	80,39	84,75	91,94	23,47	39,19	28,10	*	*	*	56,5	68,22	67,2	63,27	63,87	68,43	Sedang
Kota Bandar Lampung	63,75	50,95	50,00	82,31	83,73	82,54	25,89	26,43	28,08	*	*	*	62,98	58,86	58,38	73,21	73,54	61,84	Sedang
Kota Metro	50,00	50,69	50,00	78,69	83,62	87,2	22,59	22,59	36,71	*	*	*	55,62	57,87	62,15	67,22	67,83	60,84	Sedang
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>57,77</b>	<b>54,72</b>	<b>55,36</b>	<b>85,46</b>	<b>87,32</b>	<b>88,04</b>	<b>33,54</b>	<b>34,29</b>	<b>38,42</b>	<b>79,56</b>	<b>86,48</b>	<b>83,87</b>	<b>68,56</b>	<b>69,1</b>	<b>69,91</b>	<b>68,23</b>	<b>68,66</b>	<b>69,09</b>	<b>Sedang</b>
<b>Nasional</b>	<b>55,20</b>	<b>55,30</b>	<b>54,55</b>	<b>87,36</b>	<b>88,05</b>	<b>88,65</b>	<b>62,5</b>	<b>63,5</b>	<b>61,75</b>	<b>59,00</b>	<b>59,50</b>	<b>78,58</b>	<b>71,45</b>	<b>72,42</b>	<b>72,48</b>	<b>68,96</b>	<b>69,22</b>	<b>69,48</b>	<b>Baik</b>

Sumber : KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan) parameter kualitas air yang dianalisa parameter COD, DO, BOD, dan Total Phospat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri. Untuk kualitas udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai target (Lampung Tengah) hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO2 dan NO2 sehingga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya. Lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran. Indeks kualitas



lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik. Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode inteprestasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

#### **2.1.1.6.4 Kebencanaan**

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji berdasarkan yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim dan tanah longsor.

Pada tahun 2023 Data Informasi Bencana Indonesia mencatat 3 jenis bencana dominan terjadi di Provinsi Lampung yaitu banjir, puting beliung dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Lampung memiliki indeks risiko 135.66 (sedang). Nilai indeks resiko di tingkat provinsi merupakan rata- rata dari nilai indeks risiko kabupaten/kota. Keberhasilan penurunan risiko bencana provinsi adalah menurunnya nilai risiko bencana di kabupaten/kota.

Grafik 2. 11 Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2015-2023



Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 oleh BNPB

Tabel 2. 23 Nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	PESISIR BARAT							189.70	189.70	189.70	TINGGI
2	LAMPUNG TIMUR	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
3	LAMPUNG BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	163.85	178.48	176.61	TINGGI
4	LAMPUNG SELATAN	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	176.14	167.23	TINGGI
5	PESAWARAN	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	173.19	162.28	TINGGI
6	TANGGAMUS	201.20	149.37	141.00	135.86	135.86	135.86	135.86	149.46	132.54	SEDANG
7	LAMPUNG UTARA	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
8	TULANG BAWANG	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	132.70	122.66	SEDANG
9	TULANG BAWANG BARAT	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.34	120.28	SEDANG
10	KOTA BANDAR LAMPUNG	182.00	182.00	182.00	165.56	165.56	165.56	165.56	139.02	119.79	SEDANG
11	MESUJI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.36	116.70	SEDANG
12	LAMPUNG TENGAH	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	120.80	113.24	SEDANG
13	WAY KANAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	120.07	108.00	SEDANG
14	KOTA METRO	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	100.26	108.37	96.29	SEDANG
15	PRINGSEWU	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	SEDANG

Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 oleh BNPB

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas

penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran IKD selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada kelas sedang dengan nilai 0,43.

Tabel 2. 24 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023

Kabupaten/ Kota	IKD 2023
Lampung Barat	0,37
Tanggamus	0,70
Lampung Selatan	0,41
Lampung Timur	0,26
Lampung Tengah	0,44
Lampung Utara	0,31
Way Kanan	0,53
Tulang Bawang	0,47
Pesawaran	0,43
Pringsewu	0,27
Mesuji	0,36
Tulang Bawang Barat	0,32
Pesisir Barat	0,30
Kota Bandar Lampung	0,78
Kota Metro	0,54

Sumber : BNPB, 2024

### Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa bumi dan letusan gunung api.

#### a. Longsor

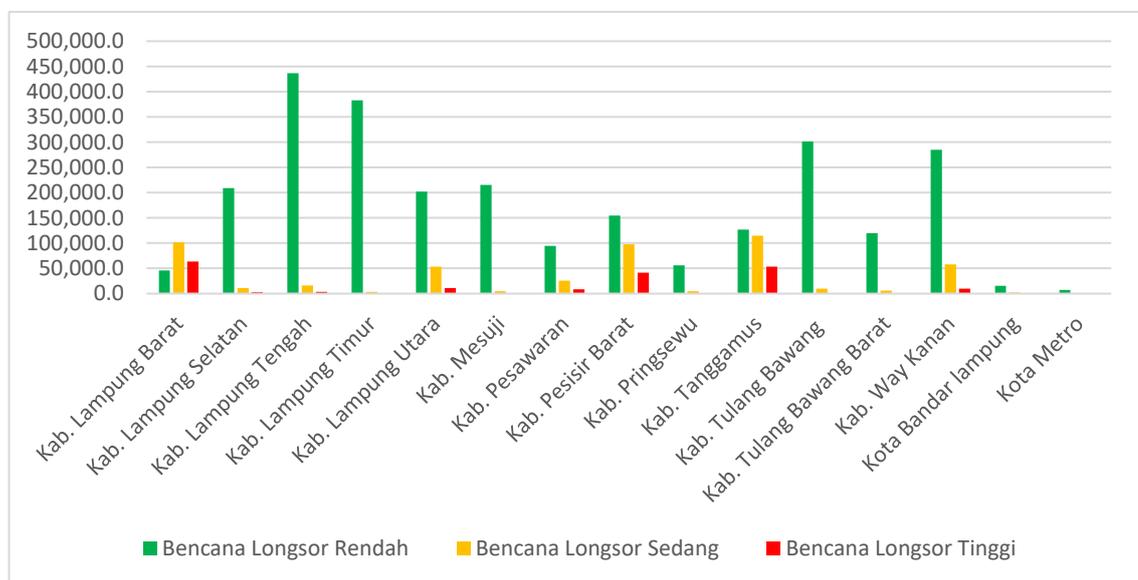
Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor rendah dengan luas 2.650.713,2 Ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi adalah sebesar 195.535,5 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada bencana longsor tinggi.

Tabel 2. 25 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Longsor (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	46.100,6	101.414,8	63.279,2	210.794,6
2	Kab. Lampung Selatan	208.417,1	10.974,1	3.080,9	222.472,1
3	Kab. Lampung Tengah	436.499,4	16.218,7	3.238,9	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	382.193,2	3.506,1	12,4	385.711,7
5	Kab. Lampung uTara	202.272,6	53.460,6	11.197,2	266.930,4
6	Kab. Mesuji	215.293,5	4.666,6	21,9	219.982,0
7	Kab. Pesawaran	94.405,7	25.852,5	8.428,6	128.686,7
8	Kab. Pesisir Barat	154.573,8	97.837,7	41.446,9	293.858,4
9	Kab. Pringsewu	56.075,0	4.752,7	891,5	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	126.731,3	114.713,0	53.264,9	294.709,2
11	Kab. Tulang Bawang	301.573,9	9.865,7	118,1	311.557,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	119.803,9	5.843,2	59,5	125.706,7
13	Kab. Way Kanan	283.992,4	57.646,7	9.952,6	351.591,7
14	Kota Bandar Lampung	15.475,7	2.310,8	542,9	18.329,4
15	Kota Metro	7.305,3	16,1		7.321,4
<b>Jumlah</b>		<b>2.650.713,2</b>	<b>509.079,6</b>	<b>195.535,5</b>	<b>3.355.328,2</b>

Sumber : BPBD Prov. Lampung

Grafik 2. 12 Bencana Longsor di Provinsi Lampung



Sumber : BPBD Prov Lampung

Gambar 2. 20 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung



Sumber: KLHS

## b. Tsunami

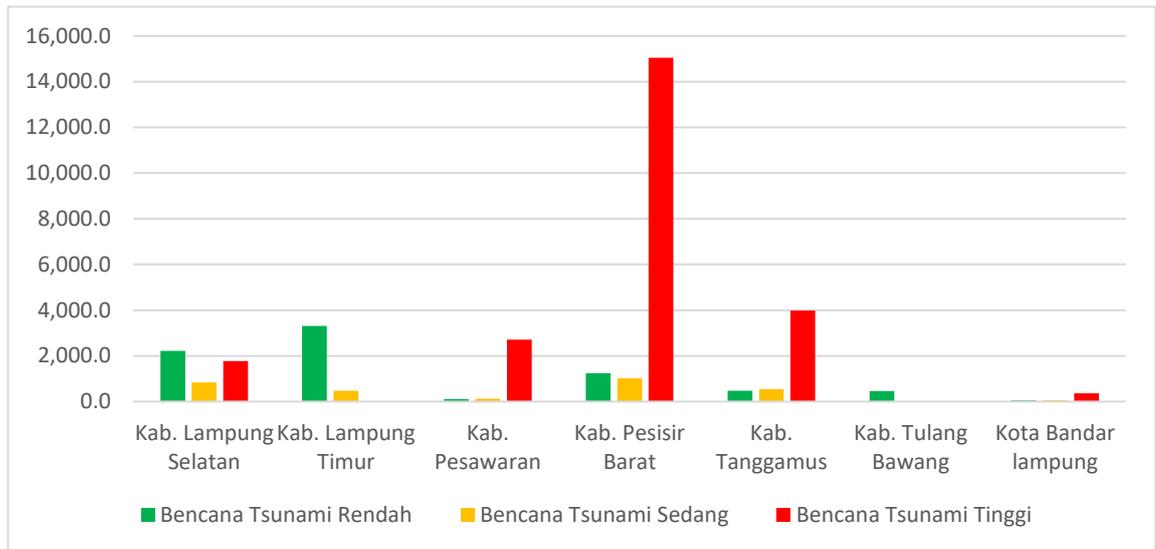
Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami tinggi dengan luas 23.868,2 Ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas 15.046,9 Ha. Sedangkan rawan tsunami sedang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luas 3.073,6 Ha.

Tabel 2. 26 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Tsunami (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	2.214,8	837,5	1.779,5	4.831,8
2	Kab. Lampung Timur	3.317,2	474,2		3.791,4
3	Kab. Pesawaran	116,7	131,4	2.704,2	2.952,4
4	Kab. Pesisir Barat	1.238,5	1.019,0	15.046,9	17.304,4
5	Kab. Tanggamus	469,6	550,5	3.977,5	4.997,6
6	Kab. Tulang Bawang	465,0			465,0
7	Kota Bandar Lampung	61,6	60,9	360,1	482,6
<b>Jumlah</b>		<b>7.883,4</b>	<b>3.073,6</b>	<b>23.868,2</b>	<b>34.825,2</b>

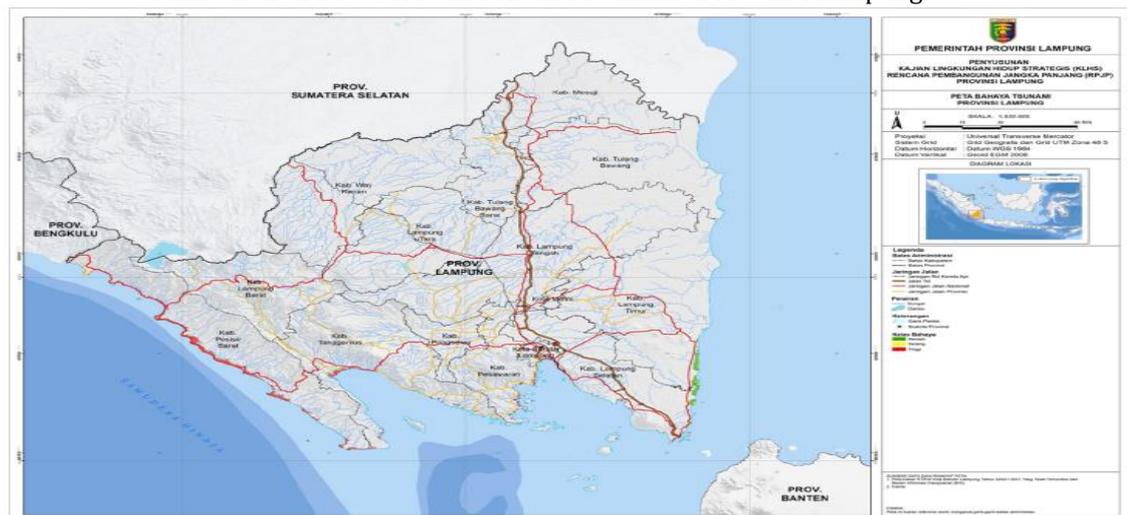
Sumber : Inarisk BNPB

Grafik 2. 13 Bencana Tsunami di Provinsi Lampung



Sumber : Inarisk BNPB

Gambar 2. 21 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

### c. Gempa Bumi

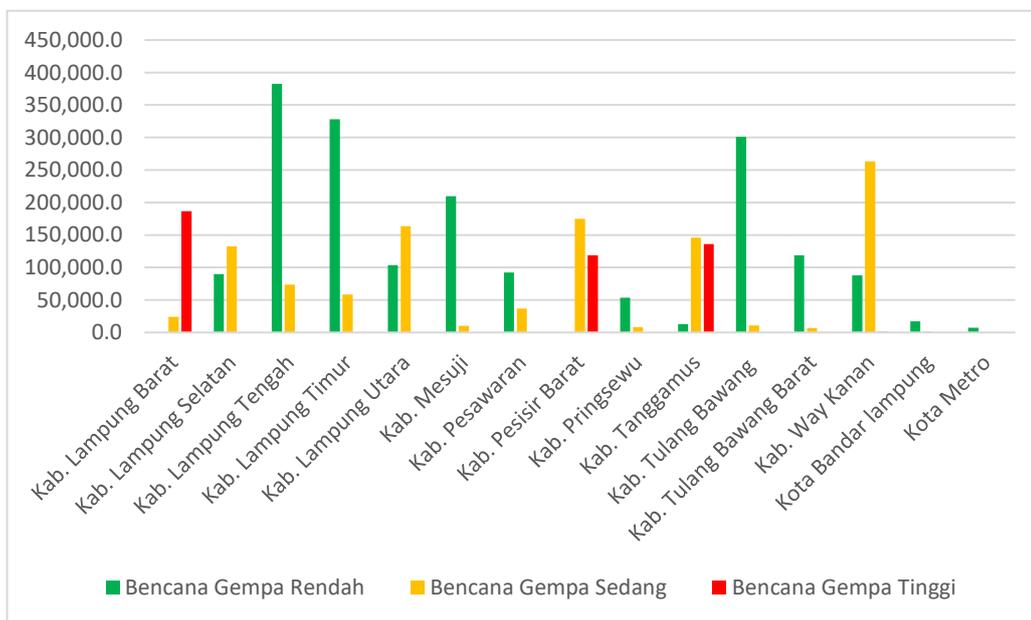
Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 Ha, sedangkan luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 Ha yang tersebar hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 27 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Rendah	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Menengah	Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Tinggi	Jumlah
1	Kab. Lampung Barat		24.243,2	186.556,1	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	90.010,3	132.722,7		222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	382.472,0	73.484,9		455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	327.935,0	58.441,9		386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	103.420,9	163.509,5		266.930,4
6	Kab. Mesuji	209.552,7	10.488,7		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	92.132,6	36.679,1		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat		174.945,4	119.078,5	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	53.628,4	8.090,8		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.970,6	145.811,3	136.062,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.061,7	10.547,9		311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	118.836,2	6.872,6		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	88.075,7	263.215,8	919,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	17.130,6	1.244,3		18.374,9
15	Kota Metro	7.321,4			7.321,4
<b>Jumlah</b>		<b>1.804.548,2</b>	<b>1.110.298,2</b>	<b>442.617,1</b>	<b>3.357.463,5</b>

Sumber : RTRW Prov. Lampung

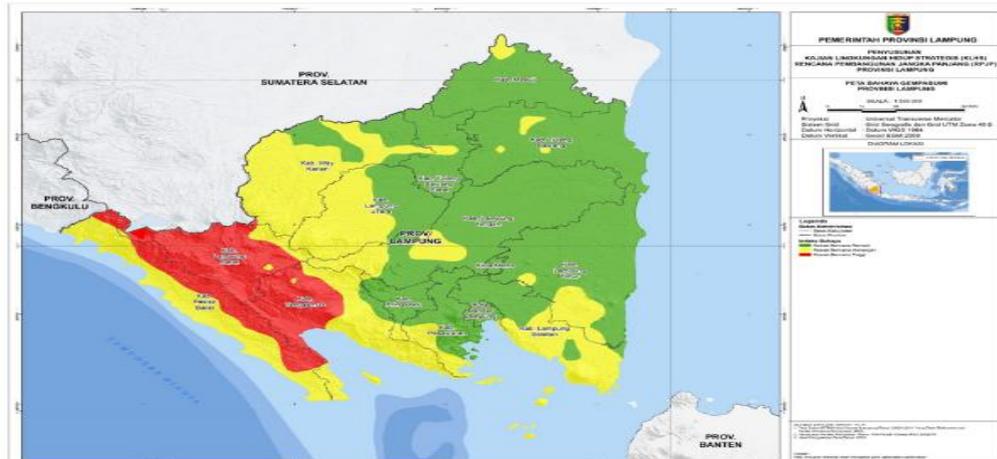
Grafik 2. 14 Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung



Sumber : RTRW Prov Lampung



Gambar 2. 22 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

**d. Letusan Gunung Api**

Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava. Kabupaten Lampung Barat rata-rata berada pada rawan bencana letusan gunung api yang berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm dengan luas 5.025,7 Ha, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan berada pada rawan letusan gunung api berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar seluas 9.600,2 Ha. Untuk luasan rawan letusan gunung api dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 Ha.

Tabel 2. 28 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (Ha)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava	868,9
	berpotensi terlanda aliran lahar	501,7
	berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm	5.025,7
	berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat	2.119,9



	sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun	1.273,6
	sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,2
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	berpotensi terhadap aliran lahar hujan	1.263,5
	berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	9.600,2
	berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan	2.002,6
	berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	22,2
	berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil	798,6
	berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar	2.119,9
	sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun	860,7
	sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,2
	sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	254,5
	sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik	276,7
	<b>Jumlah</b>	

Sumber : BPBD Prov. Lampung

### 2.1.1.6.5 Ancaman Perubahan Iklim

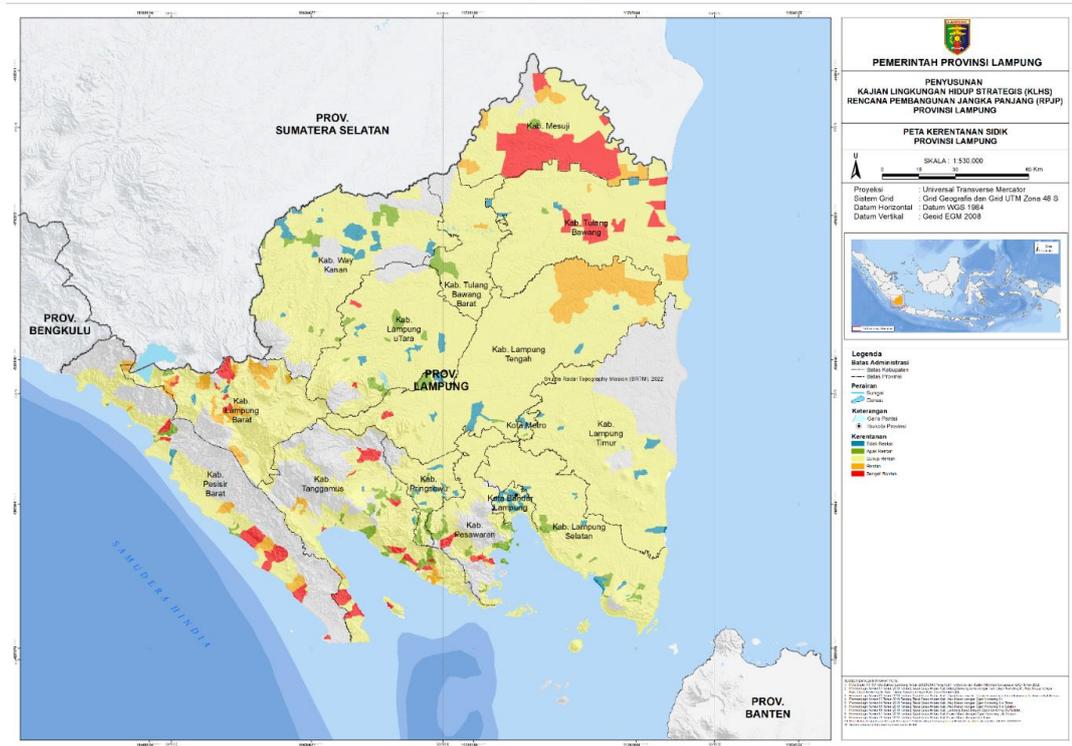
**Kerentanan Iklim.** Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim Provinsi Lampung dapat dijelaskan berdasarkan jasa ekosistem pengaturan iklim, kondisi kerentanan dan resiko serta kondisi kebencanaan. Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi bahwa Provinsi Lampung memiliki nilai tingkat kerentanan 3 hampir di seluruh Kabupaten, yang artinya Provinsi Lampung **cukup rentan** terhadap perubahan iklim, terhadap risiko banjir dan kekeringan, kemudian tingkat kerentanan dengan tingkat sangat rentan atau dengan nilai 5 hanya berada di Kabupaten Pesawaran. Nilai Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA) tertinggi berada di Kota Metro senilai 0,68 dan nilai Indeks Keterpaparan, Sensitivitas (IKS) tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran senilai 0,68.

Tabel 2. 29 Tingkat Kerentanan berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Tingkat Kerentanan				
		IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
1	Lampung Barat	0,50	0,50	3	3	3
2	Tanggamus	0,53	0,63	3	3	3
3	Lampung Selatan	0,46	0,63	3	3	3
4	Lampung Timur	0,56	0,59	3	3	3
5	Lampung Tengah	0,51	0,46	3	3	3
6	Lampung Utara	0,57	0,63	3	3	3
7	Way Kanan	0,55	0,51	3	3	3
8	Tulangbawang	0,45	0,43	3	3	3
9	Pesawaran	0,41	0,68	5	5	5
10	Pringsewu	0,51	0,58	3	3	3
11	Mesuji	0,40	0,48	3	3	3
12	Tulang Bawang Barat	0,55	0,45	3	3	3
13	Pesisir Barat	0,48	0,53	3	3	3
14	Kota Bandar Lampung	0,60	0,56	3	3	3
15	Kota Metro	0,68	0,51	3	3	3

Sumber: SIDIK Tahun 2020

Gambar 2. 23 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK di Provinsi Lampung



Sumber: SIDIK, Tahun 2020

**Kerentanan terhadap Bencana.** Kerentanan terhadap perubahan iklim pun dapat dilihat dari kerentanan terhadap bencana banjir, kebakaran hutan dan laha, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Provinsi Lampung berada pada rawan bencana banjir rendah, sedang dan tinggi namun dilihat dari luasan kategori tersebut, rata-rata Provinsi Lampung berada pada Rawan bencana banjir rendah dengan luas 249.896,6 Ha, luasan tertinggi berada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 75.154,3 Ha. Sedangkan bencana banjir tinggi memiliki luas sebesar 129.811,5 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten.

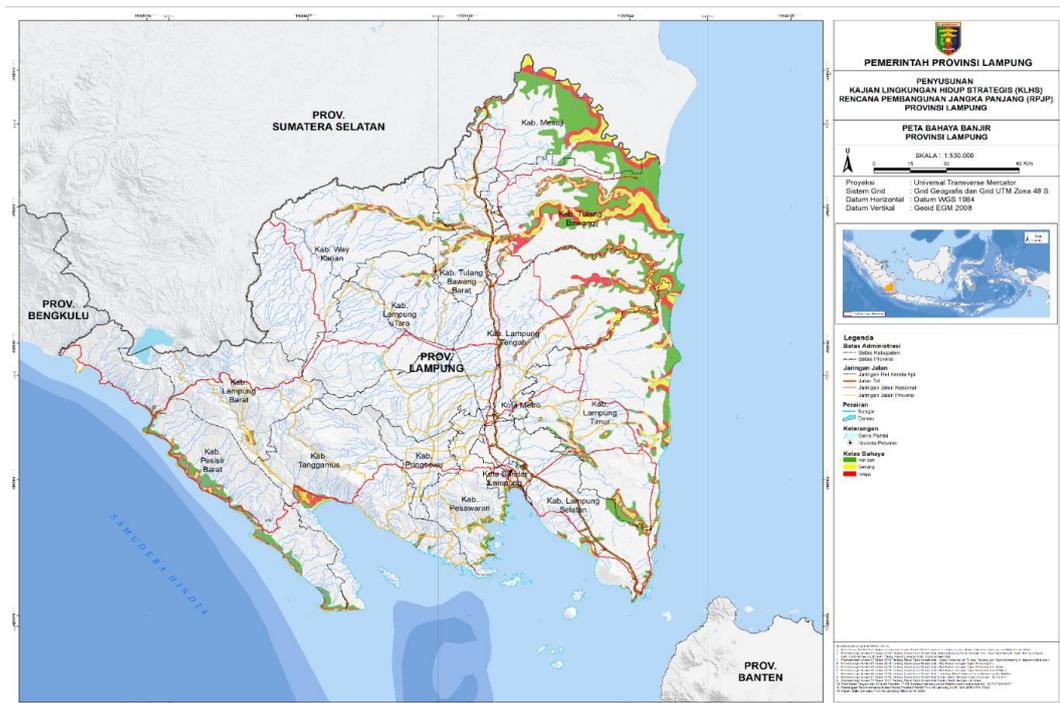
Tabel 2. 30 Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	3.367,3	859,3	696,4	4.922,9
2	Kab. Lampung Selatan	9.465,9	2.638,9	3.291,7	15.396,5
3	Kab. Lampung Tengah	26.019,8	10.802,3	18.103,3	54.925,4

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
4	Kab. Lampung Timur	37.650,7	18.667,0	20.148,3	76.465,9
5	Kab. Lampung uTara	2.040,2	1.805,0	1.335,1	5.180,3
6	Kab. Mesuji	55.755,6	15.603,2	18.091,2	89.449,9
7	Kab. Pesawaran	4.504,8	1.291,7	1.622,1	7.418,6
8	Kab. Pesisir Barat	23.422,1	6.914,9	9.468,6	39.805,6
9	Kab. Pringsewu	469,3			469,3
10	Kab. Tanggamus	3.400,9	3.294,1	4.957,3	11.652,3
11	Kab. Tulang Bawang	75.154,3	33.877,1	40.723,5	149.754,9
12	Kab. Tulang Bawang Barat	3.291,2	5.358,0	4.760,9	13.410,1
13	Kab. Way Kanan	3.390,8	7.236,5	6.172,7	16.800,0
14	Kota Bandar Lampung	1.873,7	128,1	440,5	2.442,2
15	Kota Metro	90,1			90,1
Jumlah		249.896,6	108.476,1	129.811,5	488.184,2

Sumber: Inarisk BNPB

Gambar 2. 24 Peta Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045



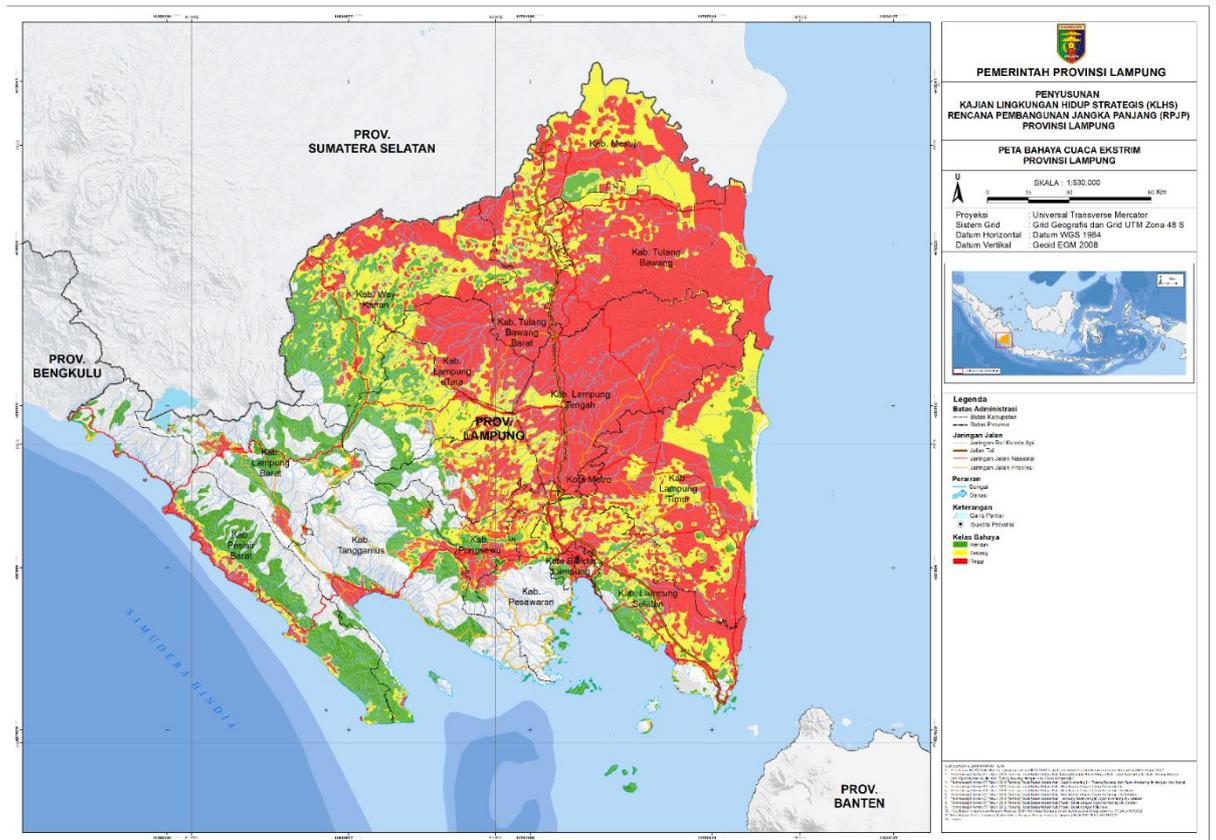
Kemudian dilihat dari **cuaca ekstrim** di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan cuaca ekstrim tinggi dengan luas 2.718.567,4 Ha dimana luasan tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah seluas 350.863,0 Ha. Untuk cuaca ekstrim rendah memiliki luas 526.208,2 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, kecuali Kota Metro tidak berada pada cuaca ekstrim rendah. Sedangkan cuaca ekstrim dengan kategori sedang memiliki luas 787.547,3 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Cuaca Ekstrim (ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	56.963,1	10.188,2	16.621,1	83.772,4
2	Kab. Lampung Selatan	36.581,3	88.063,2	75.290,4	199.934,9
3	Kab. Lampung Tengah	13.436,9	70.470,4	350.863,0	434.770,3
4	Kab. Lampung Timur	43.184,4	137.393,4	199.365,6	379.943,4
5	Kab. Lampung Utara	40.351,3	89.830,6	107.905,1	238.087,0
6	Kab. Mesuji	8.912,9	104.459,1	106.499,5	219.871,6
7	Kab. Pesawaran	15.222,9	20.463,8	20.066,7	55.753,4
8	Kab. Pesisir Barat	115.972,9	20.500,1	19.501,1	155.974,1
9	Kab. Pringsewu	13.135,2	13.703,7	23.477,5	50.316,4
10	Kab. Tanggamus	67.224,1	16.381,7	24.140,8	107.746,6
11	Kab. Tulang Bawang	1.011,2	46.939,6	263.558,3	311.509,1
12	Kab. Tulang Bawang Barat	3.504,0	39.297,9	82.875,8	125.677,7
13	Kab. Way Kanan	106.536,5	128.530,7	96.628,8	331.696,0
14	Kota Bandar Lampung	4.171,5	1.130,4	10.891,3	16.193,1
15	Kota Metro		194,4	7.127,0	7.321,4
Jumlah		526.208,2	787.547,3	1.404.812,0	2.718.567,4

Sumber: BPBD Prov. Lampung

Gambar 2. 25 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Selanjutnya dilihat dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang rata-rata berada pada kebakaran hutan dan lahan rendah dan sedang dengan luas 1.144.756,1 Ha, sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan dengan luas 385.868,0 Ha.

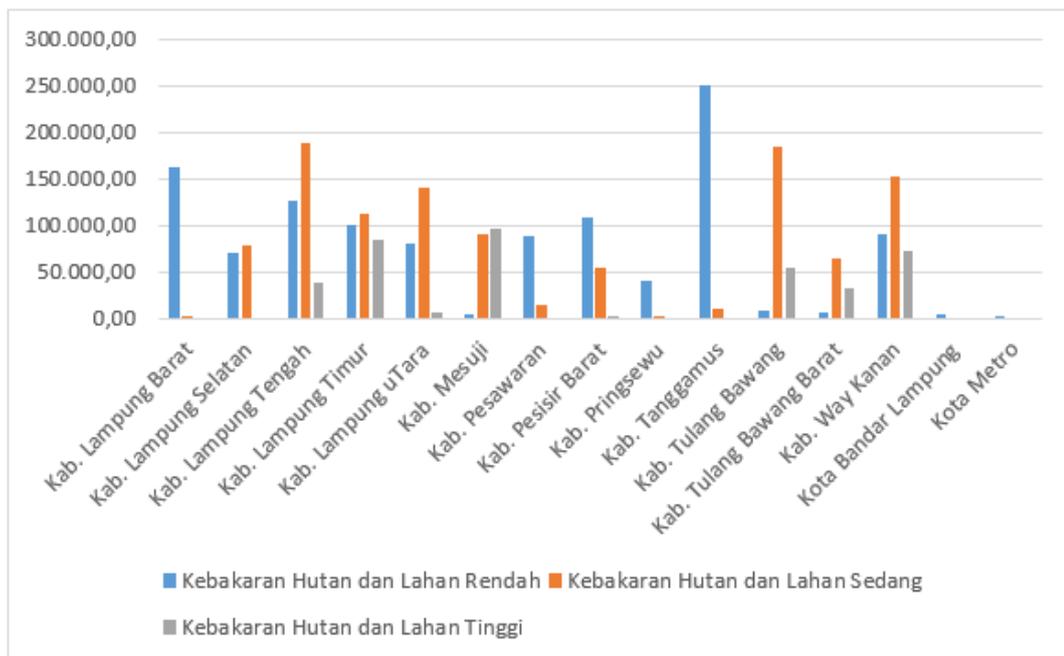
Tabel 2. 32 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	162.327,1	1.050,5		163.377,5
2	Kab. Lampung Selatan	70.498,6	77.645,3		148.144,0
3	Kab. Lampung Tengah	125.786,3	188.032,2	37.739,8	351.558,3
4	Kab. Lampung Timur	101.365,0	112.399,9	84.205,4	297.970,3

No.	Kabupaten/Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
5	Kab. Lampung Utara	79.762,0	140.023,5	6.916,1	226.701,6
6	Kab. Mesuji	4.202,7	90.241,2	97.254,8	191.698,7
7	Kab. Pesawaran	88.139,6	15.048,4		103.188,0
8	Kab. Pesisir Barat	108.693,4	53.744,8	90,6	162.528,7
9	Kab. Pringsewu	40.915,9	1.259,9		42.175,8
10	Kab. Tanggamus	249.434,5	10.292,5		259.727,0
11	Kab. Tulang Bawang	9.459,1	184.900,4	55.187,2	249.546,7
12	Kab. Tulang Bawang Barat	7.423,6	65.006,6	32.337,9	104.768,1
13	Kab. Way Kanan	90.635,4	152.324,8	72.136,2	315.096,5
14	Kota Bandar Lampung	4.151,7			4.151,7
15	Kota Metro	1.961,3			1.961,3
Jumlah		1.144.756,1	1.091.969,9	385.868,0	2.622.594,0

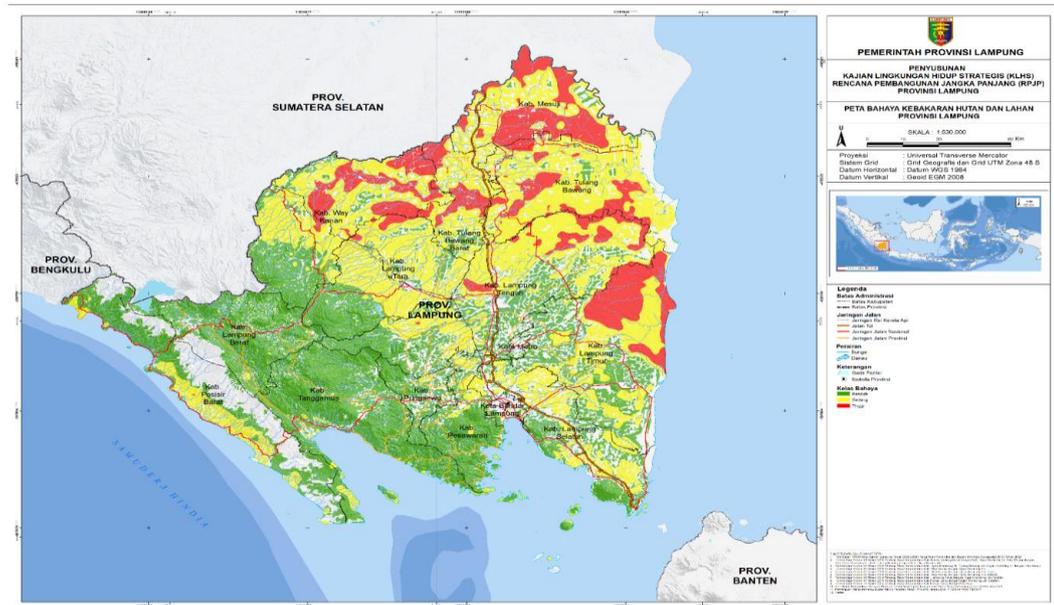
Sumber: Inarisk BNPB

Grafik 2. 15 Grafik Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 26 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Dilihat dari bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Lampung berada pada gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang dan tinggi namun luasan terbesar berada pada kategori bencana rendah dan tinggi seluas 6.172,7 Ha dan 5.286,6 Ha hanya tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. 33 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	1.359,0	139,5	974,3	2.472,8
2	Kab. Lampung Timur	827,2	133,4	668,6	1.629,2
3	Kab. Pesawaran	1.340,4	151,0	587,2	2.078,7
4	Kab. Pesisir Barat	434,3	299,2	1.880,7	2.614,2
5	Kab. Tanggamus	1.452,1	208,0	998,4	2.658,4
6	Kab. Tulang Bawang	616,5	77,4	68,6	762,5
7	Kota Bandar Lampung	143,3	9,9	108,7	261,9
Jumlah		6.172,7	1.018,3	5.286,6	12.477,6

Sumber: Inarisk BNPB

Grafik 2. 16 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung



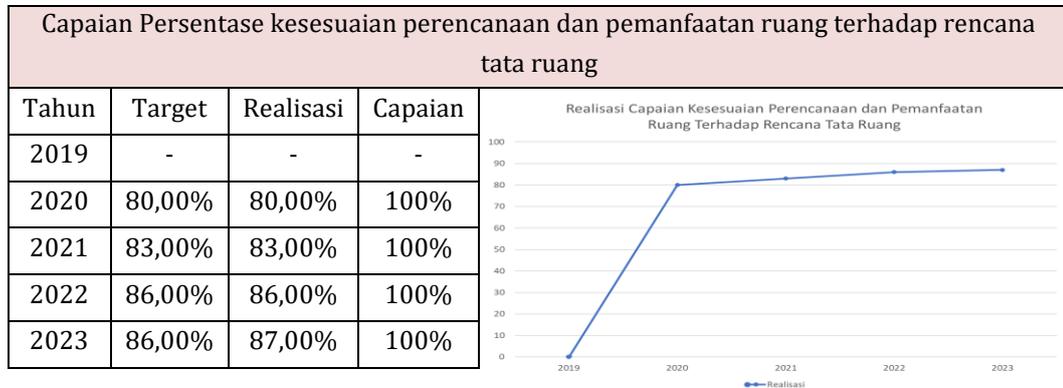
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 27 Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

### 2.1.1.6.6 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043



Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dapat dilihat pada tabel di atas. Sasaran ke-6 : Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian realisasi 87,00% dari target 86,00% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian realisasi kinerja memperoleh predikat sangat tinggi. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020 realisasinya 80,00%, pada tahun 2021 sebesar 83,00%, pada tahun 2022 sebesar 86,00%, dan pada tahun 2023 87,00%.

Tabel Data Capaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

No	Rencana Program	Rencana	Realisasi Program	Perhitungan	Realisasi Capaian
<b>STRUKTUR RUANG</b>		<b>81</b>	<b>66</b>	<b>66/81*100</b>	<b>81%</b>
1	Sistem Perkotaan	3	3		
2	Sistem Jaringan Prasarana	78	63		
<b>POLA RUANG</b>		<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42/43*100</b>	<b>98%</b>
1	Kawasan Lindung	13	13		
2	Kawasan Budi Daya	25	24		
3	Kawasan Strategis	5	5		
<b>Total</b>		<b>124</b>	<b>108</b>	<b>108/124*100</b>	<b>87%</b>

### 2.1.1.7 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titiksentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu determinan penting dalam perencanaanpembangunan adalah aspek penduduk beserta dampak-dampaknya.

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong ekonomi dengan meningkatkan aspek kualitasnya dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Jumlah penduduk provinsi lampung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.313.990 jiwa meningkat dari 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa tumbuh sebesar 1,12 persen. Laju pertumbuhan penduduk provinsi Lampung mengalami kenaikan dengan rata-rata 0,08 persen.

Tabel 2. 34 Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	8.521.201	9.081.792	9.176.546	9.313.990
	- Laki-Laki (jiwa)	4.359.897	4.651.698	4.697.217	4.760.260
	- Perempuan (jiwa)	4.161.304	4.430.094	4.479.329	4.553.720
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.87	1.10	1.04	1.12
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	268,46	270,67	273,31	277,41

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

### 2.1.1.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk provinsi Lampung dari tahun 2019–2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,92 persen menjadi 1,12 persen di tahun 2023. Meskipun cenderung naik namun masih dibawah angka laju pertumbuhan secara nasional.. Hal ini mengindikasikan keberhasilan

kebijakan pemerintah provinsi lampung dalam pengendalian kuantitas penduduk.

Grafik 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen) tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

#### 2.1.1.8.2 Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebanyak 9.313.990 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.508,33 ribu jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.202,07 ribu jiwa dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.142,58 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 169,75 ribu jiwa. Untuk tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2023, sebesar 277,41 Jiwa Per Km<sup>2</sup> dan untuk wilayah terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan sebesar 6.542,95 Jiwa Per Km<sup>2</sup> disusul oleh Kota Metro sebesar 2.374,95 dan Kabupaten Pringsewu sebesar 682,29. Sebaran penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023

Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa)			
	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	302,14	302,75	303,40	312,43
Tanggamus	640,28	645,81	652,90	662,54
Lampung Selatan	1.064,30	1.071,73	1.081,12	1.105,00
Lampung Timur	1.110,34	1.118,12	1.127,95	1.142,58
Lampung Tengah	1.460,05	1.477,40	1.500,02	1.508,33
Lampung Utara	633,10	634,12	635,13	653,85
Way Kanan	473,58	476,87	481,04	491,11
Tulang Bawang	430,02	430,63	431,21	445,17
Pesawaran	477,47	481,71	487,15	494,28
Pringsewu	405,47	406,82	408,42	419,59
Mesuji	227,52	229,77	232,68	237,94
Tulang Bawang Barat	286,16	287,71	289,62	295,48
Pesisir Barat	162,70	163,64	164,82	169,75
Bandar Lampung	1.166,07	1.184,95	1.209,94	1.202,07
Metro	168,68	169,78	171,17	173,87
Provinsi Lampung	9.007,85	9.081,79	9.176,55	9.313,99

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

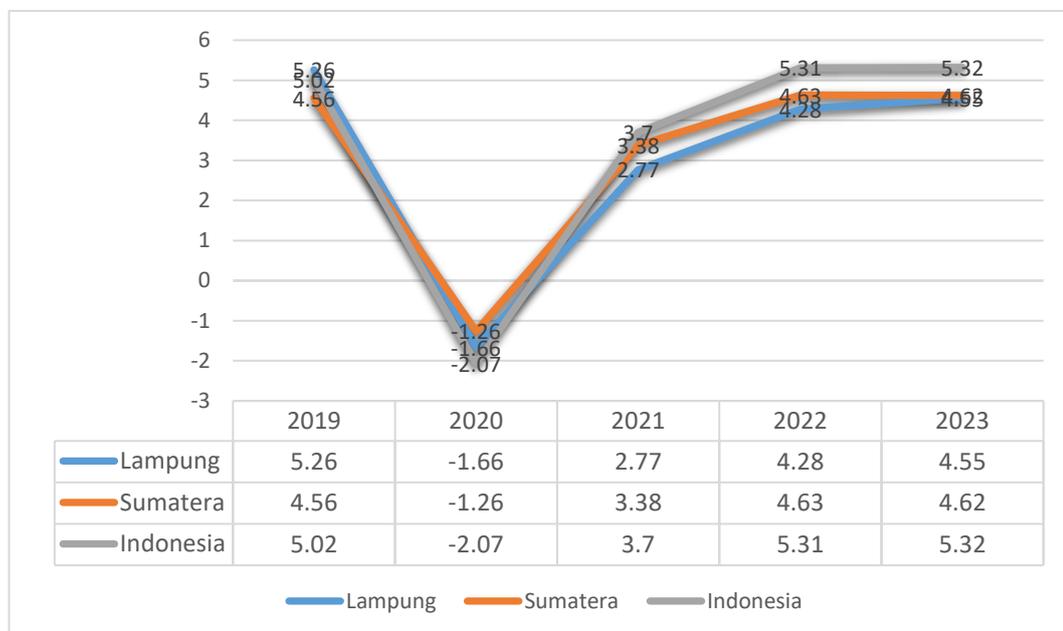
### 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen.

Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami *recovery*, untuk Tahun 2023, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,55 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,32) dan Sumatera (4,62). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Grafik 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024

#### A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen, menguat dibanding tahun 2022 (*c-to-c*) yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50

persen. Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2023 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,29 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,98 persen; serta Konstruksi sebesar 9,86 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,14 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,34 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,97 persen, serta Konstruksi sebesar 0,72 persen. Sementara sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 1,52 persen

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 dibanding periode yang sama tahun 2022 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen, menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,93 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Konstruksi, Jasa Keuangan, serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 15,16 persen, 13,26 persen, dan 11,80 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan juga mengalami pertumbuhan cukup pesat mencapai 11,03 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,78 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang berkontraksi sebesar 7,74 persen serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi sebesar 2,33 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 dibanding triwulan III 2023 (*q-to-q*) berkontraksi sebesar 3,99 persen. Kontraksi pertumbuhan terutama disebabkan penurunan produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 18,69 persen. Selain itu, kontraksi juga terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas serta Industri Pengolahan dengan kontraksi sebesar 9,25

persen dan 5,94 persen. Meski demikian, sebagian besar lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 8,16 persen dan 6,81 persen. Selain itu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan.

## **B. PDRB Menurut Pengeluaran**

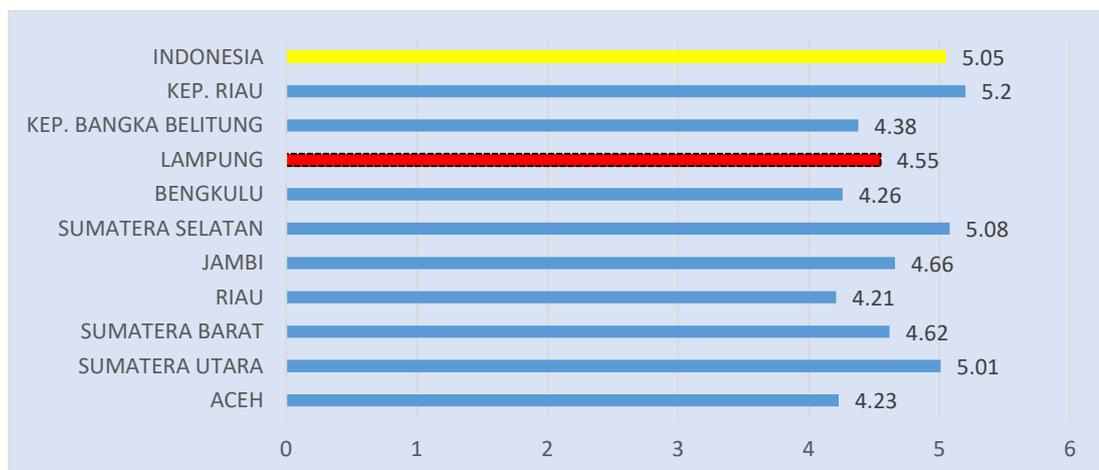
Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,59 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,14 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,06 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 6,18 persen. Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,34 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,79 persen; Komponen PMTB sebesar 32,33 persen; Komponen PK-P sebesar 6,60 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,72 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,02 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 17,36 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 7,08 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,64 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,44 persen; dan Komponen PK-P sebesar 3,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,80 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 3,99 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 0,86 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 47,45 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 10,08 persen; Komponen PMTB sebesar 6,49 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 0,81 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 19,09 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.

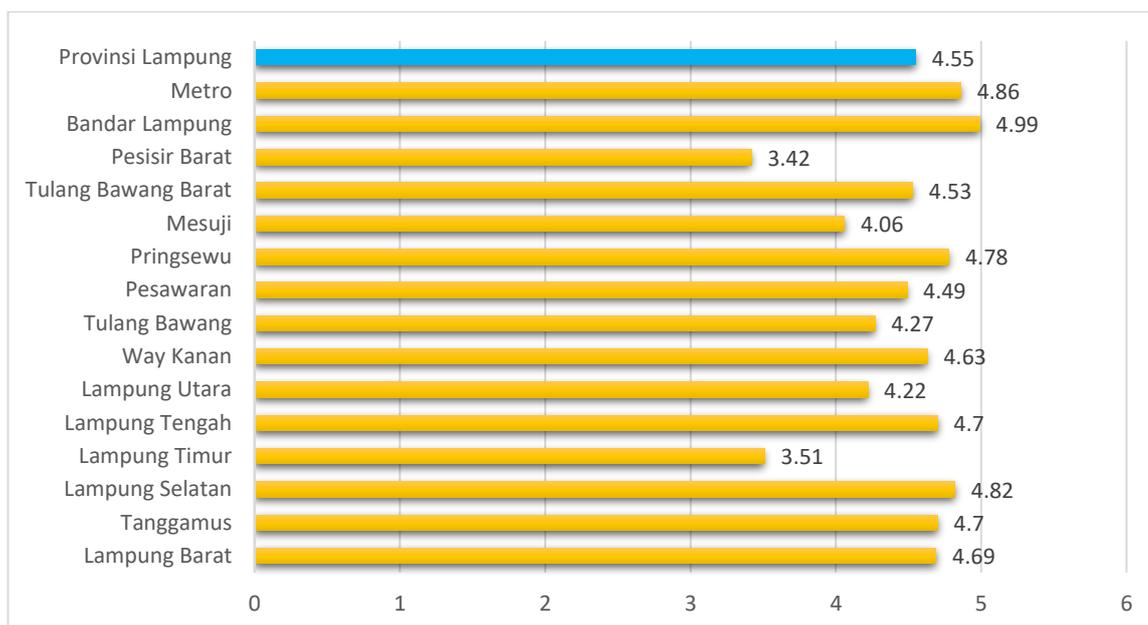
Grafik 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan sebanyak 8 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (4,99), Kota Metro (4,86), Kabupaten Lampung Selatan (4,82), Kabupaten Pringsewu (4,78), Kabupaten Lampung Tengah (4,70), Kabupaten Tanggamus (4,70), Kabupaten Lampung Barat (4,69) dan Kabupaten Way Kanan (4,63).

Tabel 2. 36 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah (2024)

Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus mampu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provinsi Lampung.

Tabel 2. 37 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	5.18	-1.16	2.55	4.09	4.69
Tanggamus	5.02	-1.77	2.34	4.16	4.70
Lampung Selatan	5.13	-1.73	2.6	4.81	4.82
Lampung Timur	3.79	-2.26	0.24	2.02	3.51
Lampung Tengah	5.35	-1.02	2.88	4.65	4.70
Lampung Utara	5.33	-1.45	2.82	3.16	4.22
Way Kanan	5.17	-1.16	2.9	4.41	4.63
Tulang Bawang	5.41	-1.34	2.88	3.85	4.27

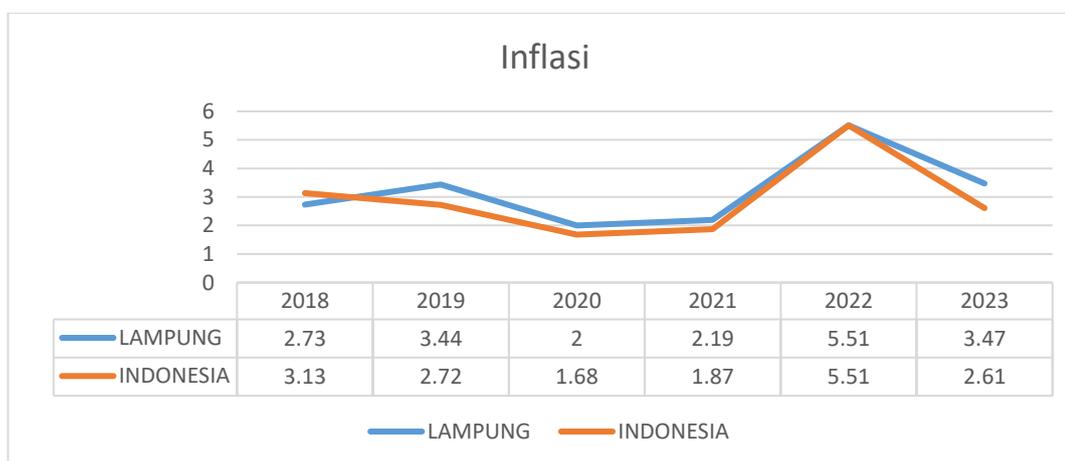
Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pesawaran	5	-1.26	2.08	4.55	4.49
Pringsewu	5.03	-1.21	2.91	4.37	4.78
Mesuji	5.26	-1.35	2.84	3.49	4.06
Tulang Bawang Barat	5.36	-1.32	2.89	4.49	4.53
Pesisir Barat	5.47	-1.18	2.06	2.82	3.42
Bandar Lampung	6.17	-1.88	3.12	4.93	4.99
Metro	5.57	-1.79	2.91	4.51	4.86
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>5.26</b>	<b>-1.67</b>	<b>2.77</b>	<b>4.28</b>	<b>4.55</b>
Nasional	5.02	-2.07	3.69	5.31	5.05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

### 2.1.2.2 Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Grafik 2. 20 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional

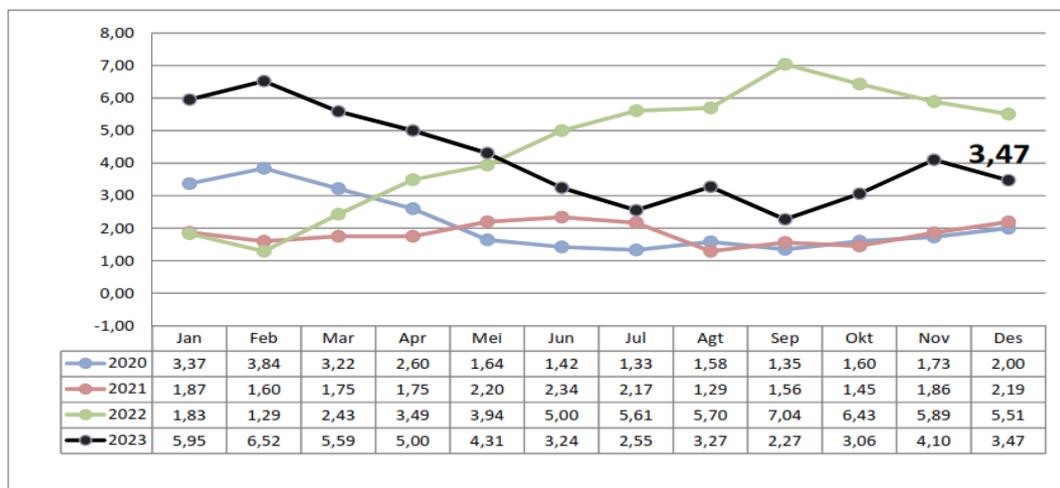


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Secara tahunan (*y to d*), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2023 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi yaitu  $3\% \pm 1$ , yaitu senilai 3,47%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 5,51% yang merupakan angka inflasi tertinggi selama lima tahun

terakhir. Capaian Tahun 2023 tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (*yon y*), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (*y to d*).

Gambar 2. 28 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber : Data BPS, 2023

Secara tahunan (*years to date*), penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan IV 2023 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,27% dan Nilai Inflasi 9,36 % (*ytd*), diikuti oleh kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,12% dan nilai inflasi 3,68% serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,11% dan nilai inflasi 2,15% (*ytd*).

Tabel 2. 38 Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023	Andil Inflasi Tahun Kalender 2023
Umum (Headine)	118,65	3,47	3,47
Makanan, MInuman, dan Tembakau	131,25	9,36	2,77
Pakaian dan Alas Kaki	111,29	1,55	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,90	0,70	0,12
Perlengkapan, Peralatann & Pemeliharaan Rutin Rmh Tangga	116,39	2,15	0,11
Kesehatan	118,65	1,10	0,03

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023	Andil Inflasi Tahun Kalender 2023
Transportasi	121,98	-0,27	-0,04
Informasi, Komunikasi< dan Jasa Keuangan	94,07	-0,28	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	116,15	1,41	0,03
Pendidikan	125,67	3,68	0,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	118,53	0,98	0,08
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,06	1,57	0,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada Desember 2023, tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 3,47 persen, lebih rendah bila dibandingkan inflasi tahun ke tahun Desember 2022 terhadap Desember 2021 yang sebesar 5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).

Sedangkan Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19 persen. Tingkat inflasi bulan ke bulan pada Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,01 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan bulan Desember 2022 dengan tingkat inflasi sebesar 0,62 persen. Sedangkan bulan Desember 2021 mengalami inflasi tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 0,99 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 3,47 persen, lebih rendah jika dibandingkan Desember 2022 dengan inflasi sebesar 5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir). Sementara tahun kalender Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,19 persen.

Tabel 2. 39 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
Desember (m-t-m terhadap bulan sebelumnya)	0,99	0,62	0,01
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,19	5,51	3,47
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,19	5,51	3,47

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila dibandingkan regional Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan yang tertinggi. Walaupun masih dalam rentang target inflasi

Tahun 2023 yang sebesar  $3\pm 1$ , namun hal ini patut pula menjadi perhatian, terutama pada intervensi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga terutama pada komoditas pangan. Secara teori, Inflasi yang tinggi juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2. 29 Inflasi di Sumatera



Sumber : BPS Indonesia, 2023 (diolah).

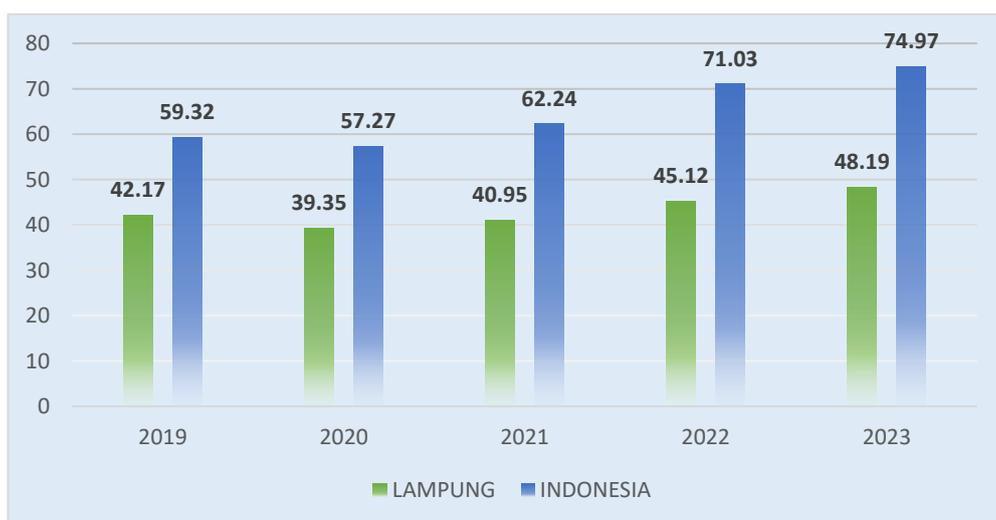
Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok *Core Inflation*, *Volatile Food*, dan *Administered Price*. Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbuan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan

mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

### 2.1.2.3 Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp. 37 juta menjadi Rp. 42 juta. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan akativitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp 48,19 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 74,97 Juta Rupiah pada tahun 2023.

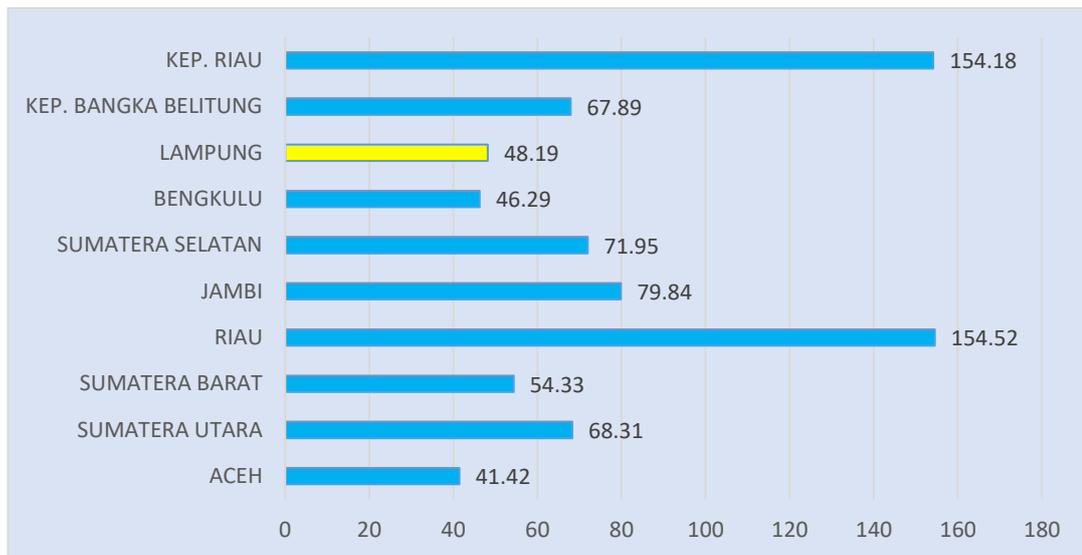
Grafik 2. 21 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 22 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung, masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 45,10 juta).

Tabel 2. 40 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	23.404.088	23.614.681	24.502.694	26.807.920	28.863.642
Tanggamus	26.034.307	24.222.600	25.238.434	27.644.345	29.596.873
Lampung Selatan	44.129.169	41.704.922	42.846.721	47.210.058	50.461.132
Lampung Timur	39.797.485	36.708.873	39.143.064	43.947.196	46.276.311
Lampung Tengah	55.368.656	48.861.769	50.444.973	55.293.725	59.720.053
Lampung Utara	38.512.596	37.549.879	38.888.157	41.758.340	44.751.038
Way Kanan	31.022.091	29.594.040	30.641.179	33.315.086	35.579.572
Tulang Bawang	51.065.626	53.688.800	55.622.657	59.069.782	63.340.842
Pesawaran	36.433.510	34.047.403	34.880.325	38.102.217	40.902.935
Pringsewu	27.851.928	27.563.217	28.482.974	30.984.474	33.389.926
Mesuji	51.934.466	45.812.389	47.213.617	51.038.184	54.420.551
Tulang Bawang Barat	41.859.787	39.971.513	41.430.714	45.295.741	48.701.623
Pesisir Barat	30.246.494	28.799.233	29.718.448	31.971.817	33.782.387
Bandar Lampung	56.217.749	50.752.752	52.259.393	57.070.473	61.646.675
Metro	37.683.219	37.361.032	38.592.844	42.000.965	45.236.830
Provinsi Lampung	42.172.315	39.290.332	40.806.713	44.983.672	48.194.215

Sumber : BPS 2023

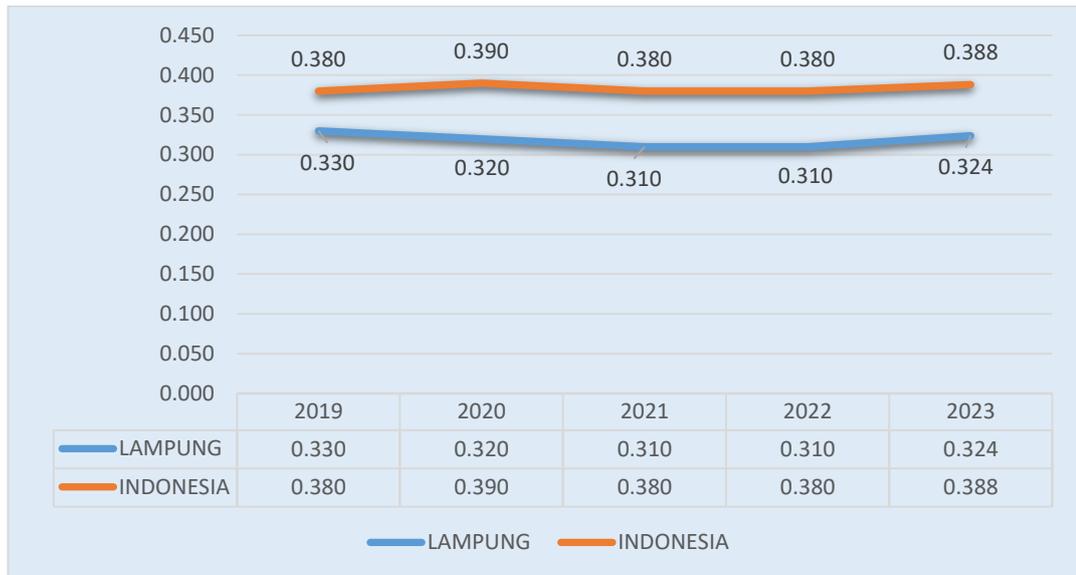
#### 2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada Tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,324 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,388). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

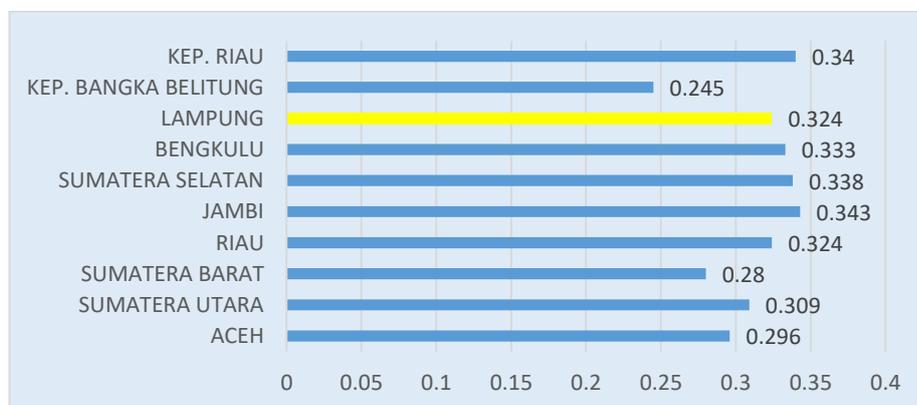
Grafik 2. 23 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan 5 terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

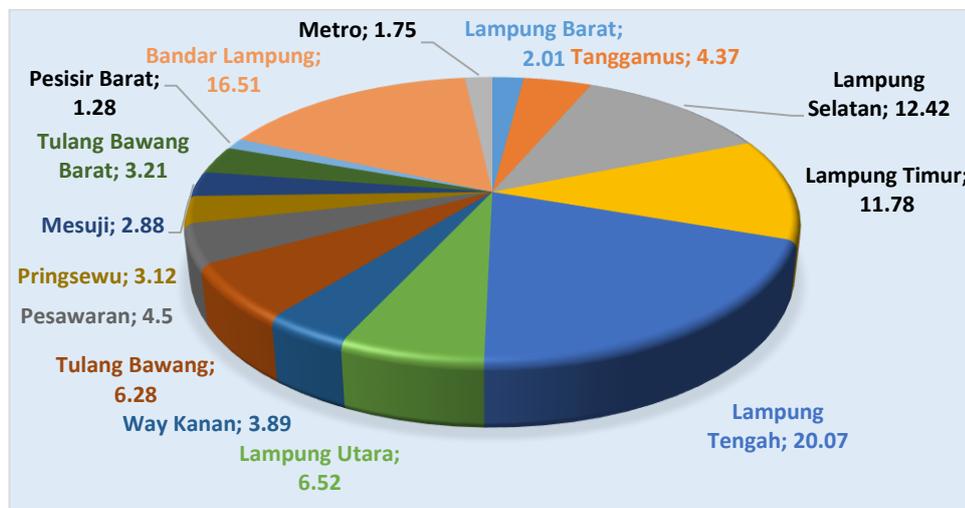
Grafik 2. 24 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2023



Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana dimana 59 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 25 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2023



## 2.1.2.5 Kemiskinan

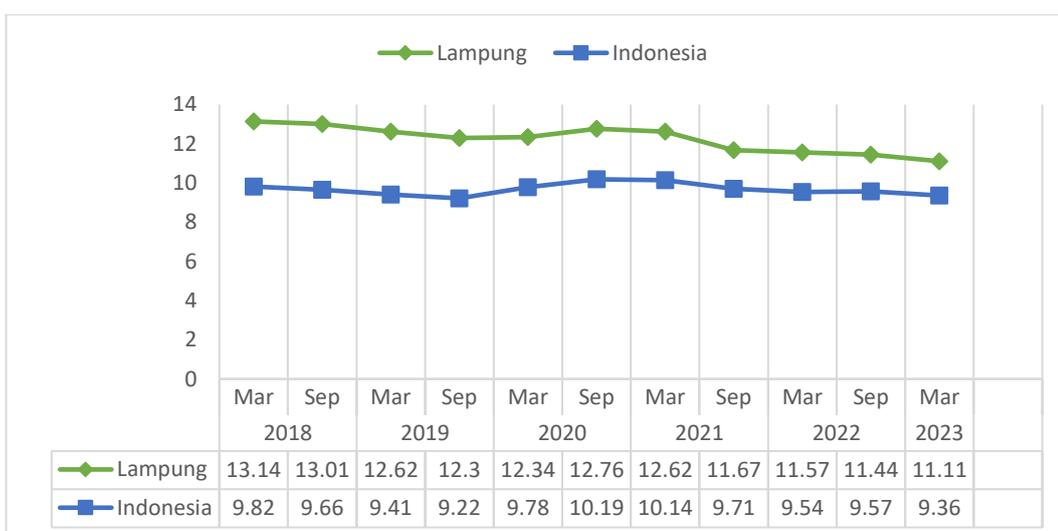
### 2.1.2.5.1 Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,11 persen Maret 2023, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,36 persen.

Bila dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 24,92 ribu orang. Untuk September 2022, BPS mencatat Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Grafik 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-5 menunjukkan pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 18,8 ribu jiwa. Menurun dari 756,48 ribu jiwa (Sep 2022) menjadi 737,71 ribu jiwa (Mar 2023). Hal yang sama terjadi di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 6,2 ribu jiwa (dari 239,11 ribu orang pada September 2022 menjadi 232,96 ribu orang pada Maret 2023). Hal yang patut dicermati bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan, trend cenderung menurun, namun akibat pandemic Covid 19 , pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,39 persen. Selanjutnya menurun di Tahun 2021 namun kembali meningkat di Tahun 2022. Untuk Tahun 2023 kembali menurun

namun masih belum lebih baik dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 41 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017–2023 (Ribuan Jiwa)

LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>KOTA</b>	230.2	224.69	259.28	236.48	239.11	232.96
<b>DESA</b>	861.4	816.79	831.86	770.54	756.48	737.71
<b>KOTA+DESA</b>	1091,6	1041.48	1091,14	1007.02	995.59	970.67

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Selanjutnya berdasarkan tabel II-6, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (17,17 %), Kabupaten Lampung Timur (13,80 %) dan Kabupaten Pesawaran (12,89 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 42 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin						
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Lampung Barat	13.54	12.92	12.52	12.82	11.71	11.71	11.17
Tanggamus	12.48	12.05	11.68	11.81	10.98	10.98	10.52
Lampung Selatan	14.86	14.31	14.08	14.19	13.14	13.14	12.79
Lampung Timur	15.76	15.24	14.62	15.08	13.98	13.98	13.80
Lampung Tengah	12.62	12.03	11.82	11.99	10.96	10.96	10.65
Lampung Utara	20.85	19.9	19.3	19.63	18.41	18.41	17.17
Way Kanan	13.52	13.07	12.9	13.09	11.76	11.76	11.02
Tulang Bawang	9.7	9.35	9.33	9.67	8.42	8.42	8.04
Pesawaran	15.97	15.19	14.76	15.11	13.85	13.85	12.89
Pringsewu	10.5	10.15	9.97	10.11	9.34	9.34	9.14
Mesuji	7.55	7.47	7.33	7.54	6.84	6.84	6.73
Tulang Bawang Barat	8.1	7.75	7.39	8.32	7.44	7.44	7.25
Pesisir Barat	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84	13.84	13.49
Bandar Lampung	9.04	8.71	8.81	9.11	8.21	8.21	7.77

Metro	9.14	8.68	8.47	8.93	7.87	7.87	7.28
Provinsi Lampung	13.01	12.3	12.76	11.67	11.44	11.44	11.11

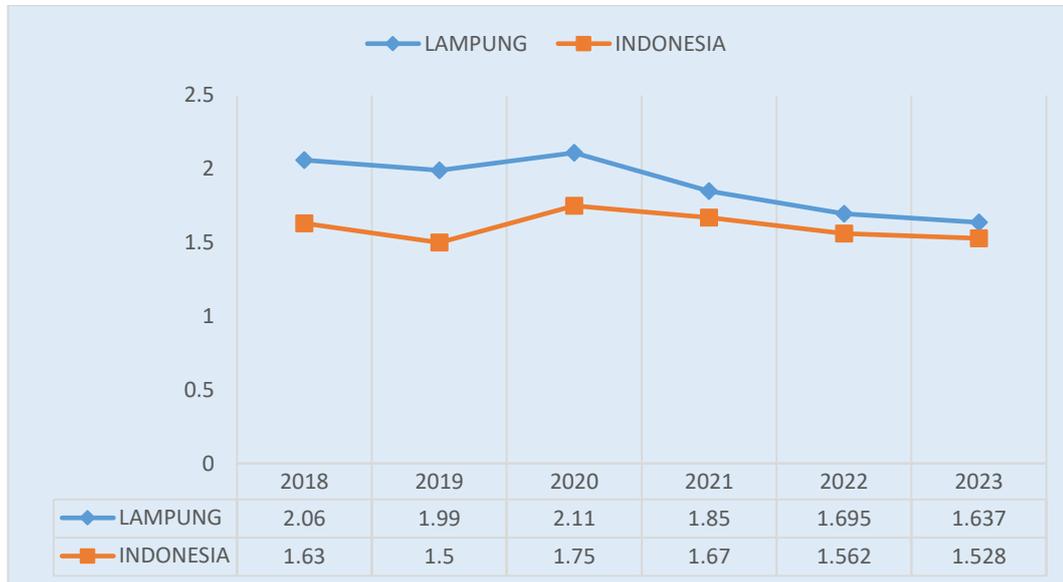
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

#### 2.1.2.5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,06 di tahun 2018 menjadi 1,637 pada Maret 2023. Bila dibandingkan September 2022, menurun 0,058 poin (dari 1,695 menjadi 1,637). Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada Maret 2023 berada pada angka 1,528 (menurun dari 1,562 menjadi 1,528 pada Maret 2023).

Grafik 2. 27 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2018-2023



Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

### 2.1.2.5.3 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,359 di Maret 2023. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan pada Maret 2023 terus menurun menjadi 0,359. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P2 Nasional yang pada Maret 2023 berada pada angka 0,377 (menurun dari 0,379 menjadi 0,377 pada Maret 2023).

Grafik 2. 28 Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

### 2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Untuk Tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan penghitungan IPM dengan menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (UHH LF SP2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2023 mencapai 72,48, meningkat 0,69 poin (0,96 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (71,79). Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Lampung sudah berada di kategori “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2023. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 73,49.

Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Manusia Lampung dan Indonesia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

### Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu dapat dilihat dari Pengeluaran Riil per Kapita yang meningkat dari 2,97 persen menjadi 4,19 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga meningkat dari 1,24 persen menjadi 1,34 persen. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah terjadi peningkatan dari 0,08 persen menjadi 0,24 persen. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,17 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data Umur Harapan Hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2. 43 IPM Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,66	73,73	73,95	74,17
<b>Pengetahuan</b>					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	12,73	12,74	12,77
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,08	8,18	8,29
<b>Standar Hidup Layak</b>					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.982	10.038	10.336	10.769
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>71,04</b>	<b>71,25</b>	<b>71,79</b>	<b>72,48</b>

### Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Lampung adalah 73,66 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,17 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,22 tahun (0,30 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,20 persen per tahun).

Grafik 2. 30 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Lampung 2020-2023



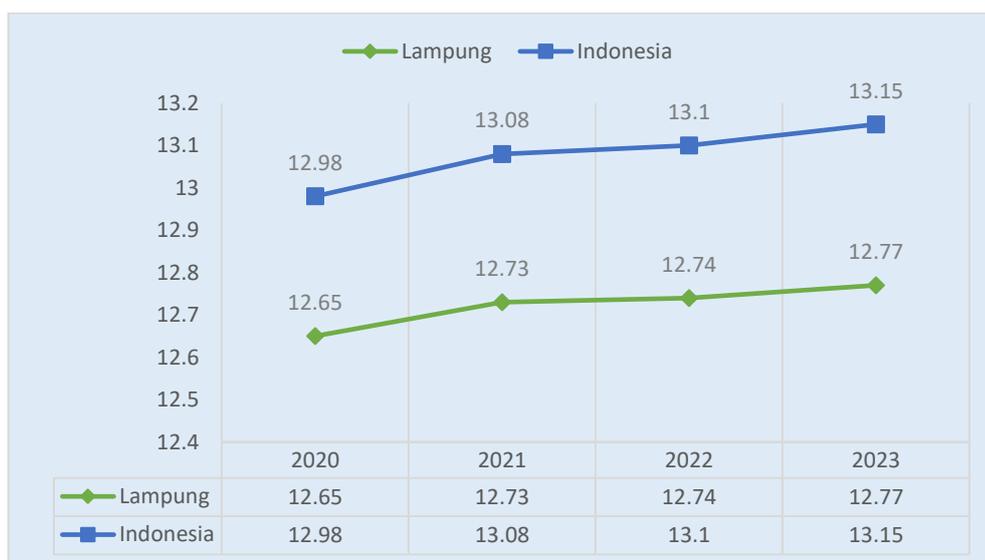
Sumber : BPS, 2023 (diolah)

## Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Lampung rata-rata meningkat 0,32 persen per tahun,

HLS menggambarkan, pada tahun 2023, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,74 tahun. Meningkat 0,24 persen dibandingkan tahun 2022.

Grafik 2. 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023



Sumber : BPS, 2023(diolah)

Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,11 tahun, dari 8,18 tahun menjadi 8,29 tahun pada Tahun 2023, RLS meningkat 0,99 persen per tahun.

Grafik 2. 32 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023



Sumber : BPS, 2024 (diolah)

### Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,77 juta per tahun. Capaian ini meningkat 433 ribu rupiah (4,19 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,76 persen per tahun.

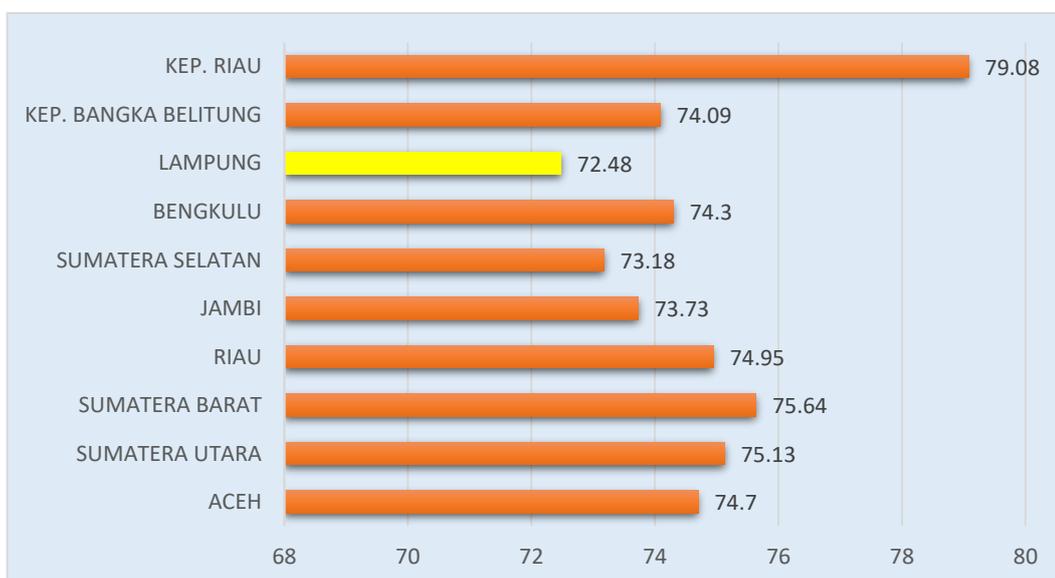
Grafik 2. 33 Pengeluaran per kapita tahun 2020 - 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023 (diolah).

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (74,39). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik 2. 34 Posisi IPM Lampung Lingkup Regional Sumatera 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023 (diolah)

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Lampung, seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Dengan adanya metode perhitungan baru IPM berdasarkan UHH Long Form SP 2020, terdapat perubahan signifikan dari capaian pembangunan manusia Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2023, sebanyak 11 Kabupaten/Kota (meningkat dari sebelumnya hanya 5 Kabupaten/Kota), yang telah mencapai status capaian IPM kategori “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) yaitu Kota Bandar Lampung (79,86), Kota Metro (79,85), Kabupaten Lampung Tengah (73,39), Kabupaten Pringsewu (73,11) dan Kabupaten Lampung Timur (72,44), Lampung Barat (71,72), Kabupaten Tulang Bawang (71,56), Lampung Selatan (71,55), Lampung Utara (71,78), Way Kanan (70,51), Kabupaten Pesisir Barat (70,40). Masih terdapat 4 Kabupaten dengan status capaian IPM Kategori “sedang” (capaian  $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), yaitu Kabupaten Tanggamus (69,93), Tulang Bawang Barat (69,38),

Kabupaten Pesawaran (69,46) dan Kabupaten Mesuji (67,79), serta sudah tidak ada lagi yang berstatus “rendah” (IPM < 60).

Tabel 2. 44 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023 (diolah).

### 2.1.2.7 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir (2019 – 2023) secara konsisten menurun. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,057 poin atau turun 11,54 persen, rata-rata turun 0,011 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender yang terjadi pada tahun 2023, utamanya dipicu oleh menurunnya indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun yang turun sebesar 23,68 persen atau turun sebesar 0,027 poin.

Grafik 2. 35 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung, 2019– 2023



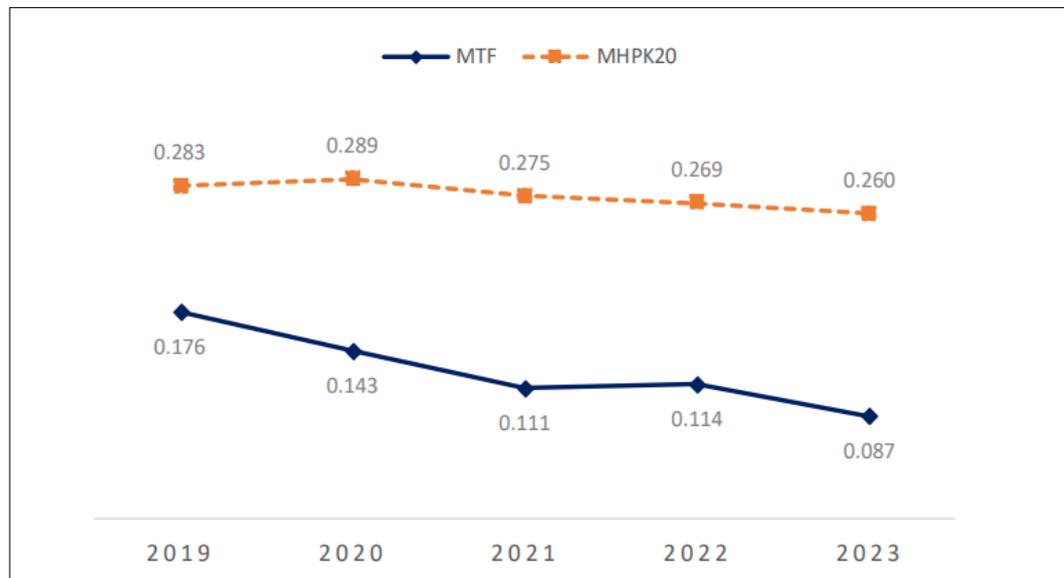
Sumber : BPS 2024.

Dua dari tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik dimana risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Dimensi pemberdayaan juga semakin setara.

### Dimensi Kesehatan Reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada tahun 2022, angka MTF sebesar 11,40 persen, kemudian turun menjadi 8,70 persen pada tahun 2023. Indikator MHPK20 selama tahun 2019–2023 juga cenderung menurun. Pada tahun 2019, MHPK20 sebesar 28,30 persen, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 26,0 persen.

Grafik 2. 36 Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi, 2019–2023



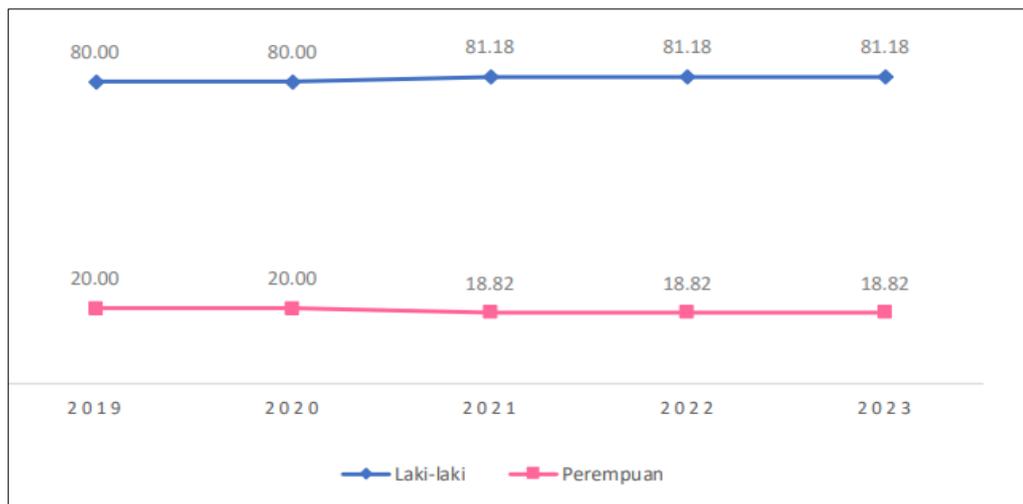
Sumber: BPS, 2024

### Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019–2023, persentase perempuan anggota legislatif cenderung meningkat. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan cenderung mengarah pada kesetaraan.

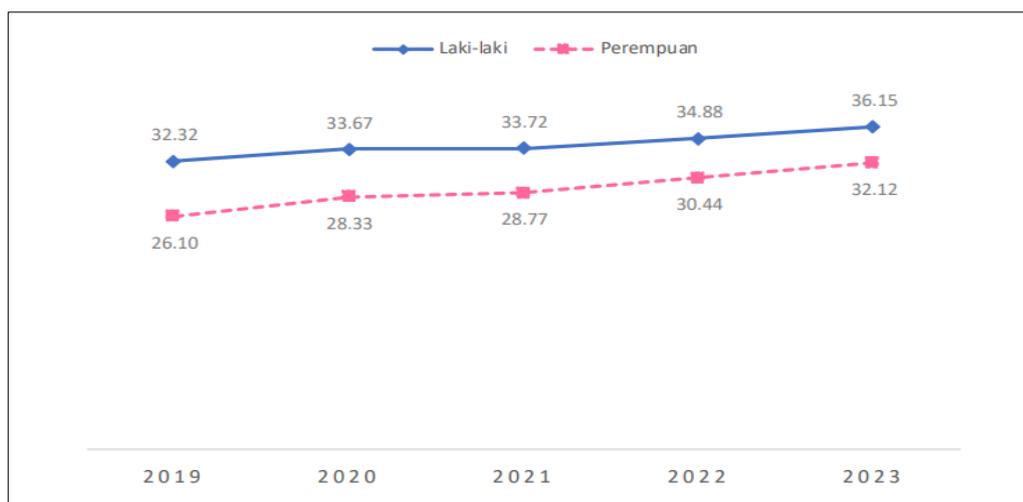
Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu yang sama juga meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase laki-laki pada tahun 2019 sebesar 32,32 persen, meningkat menjadi 36,15 persen pada tahun 2023 (meningkat 3,93 persen poin), sementara persentase perempuan meningkat dari 26,10 persen pada tahun 2019 menjadi 32,12 persen pada tahun 2023 (meningkat 6,02 persen poin). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat Pendidikan antara perempuan dan laki-laki cenderung lebih setara.

Grafik 2. 37 Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen), 2019–2023



Sumber: BPS, 2024

Grafik 2. 38 Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas (Persen), 2019–2023



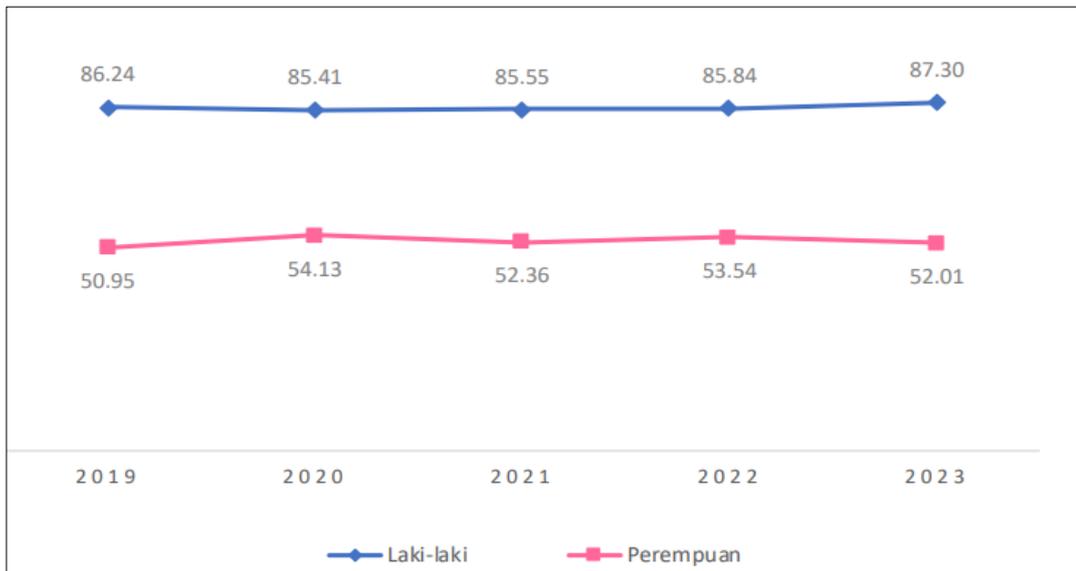
Sumber: BPS, 2024

### Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2019–2023 TPAK laki-laki dan perempuan cenderung meningkat. TPAK laki-laki pada tahun 2019 sebesar 86,24 persen meningkat menjadi 87,30 persen pada tahun 2023 (meningkat 1,06 persen poin). TPAK perempuan pada 2019 sebesar 50,95 persen, meningkat menjadi 52,01 persen pada tahun 2023 (meningkat 1,06 persen poin). Adanya peningkatan TPAK perempuan membuat kesempatan

berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

Grafik 2. 39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan (persen), 2019–2023

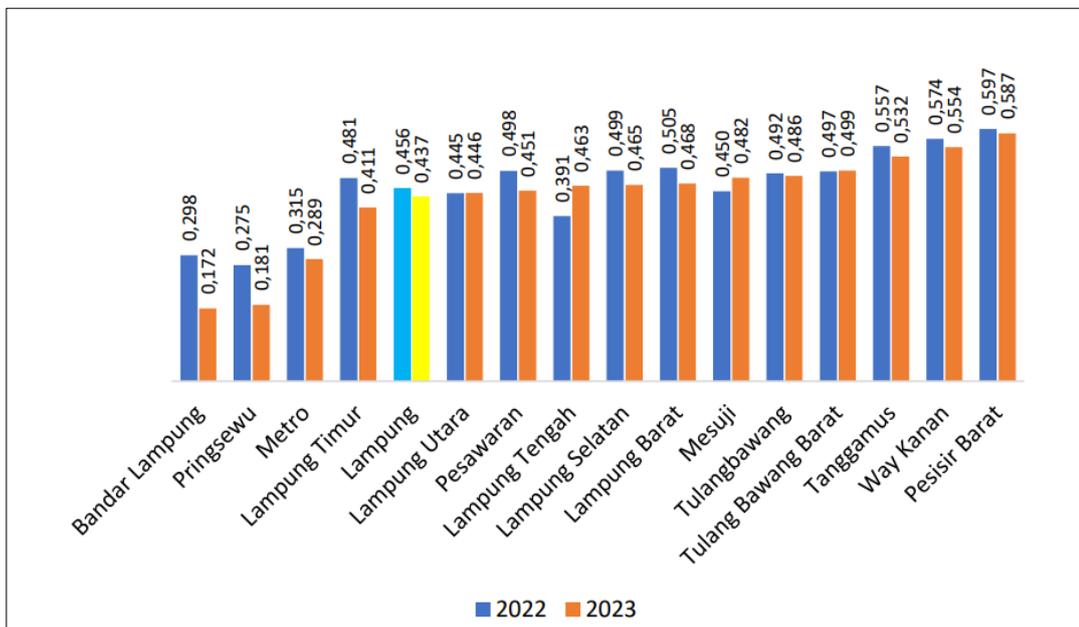


Sumber: BPS, 2024

### Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Bandar Lampung sebesar 0,172 diikuti oleh Kabupaten Pringsewu sebesar 0,181. Sebanyak 11 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Kota Bandar Lampung mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,126 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kota Bandar Lampung terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Pada dimensi kesehatan reproduksi didorong oleh indikator perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 0.026 poin dan indikator perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang turun sebesar 0,018 poin. Pada dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 57,96 persen tahun 2022 menjadi 59,04 persen pada tahun 2023. Peningkatan capaian kedua indikator ini menunjukkan adanya penurunan gap antara perempuan dan laki-laki pada dimensi pemberdayaan.

Grafik 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022-2023



Sumber: BPS, 2024

### 2.1.2.8 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami trend yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lampung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 7.003,29 ribu orang, naik sebanyak 443,04 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 70,04 persen (4,904,90 ribu orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2,098,39 ribu orang (29,96%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 4.697,66 ribu orang penduduk yang bekerja dan 207,24 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 308,97 ribu orang. penduduk bekerja bertambah sebanyak 309,69 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,72 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,04 persen atau turun 0,02 persen poin. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 2. 45 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Lampung 2019-2023

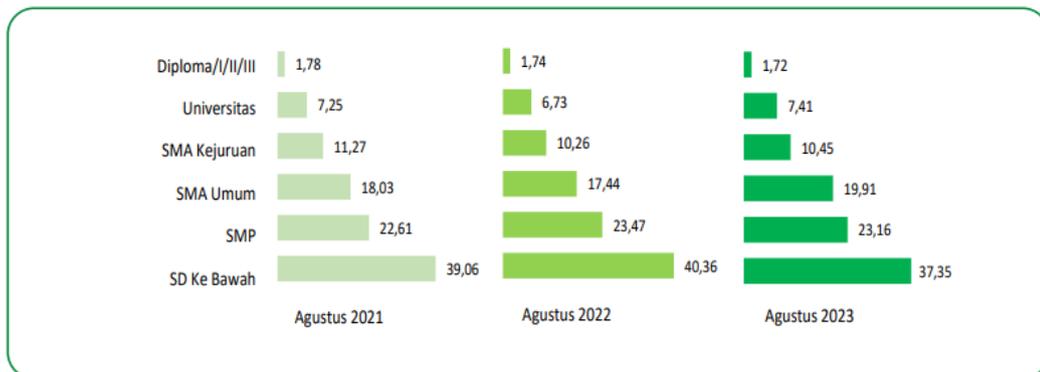
STATUS KETENAGAKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penganggur	171,5	209,6	210,6	208,0	207,24
Bukan angkatan Kerja	1.900,70	1.909,9	1.986,2	1.964,3	2.098,39
Persentase angkatan kerja yang bekerja	95,56	95,33	95,31	95,48	95,78
TPAK	69,09	70,16	69,35	70,06	70,04

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

### 2.1.2.8.1 Distribusi Tenaga Kerja

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB pada Tahun 2023 sebesar 27,90%, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 18,55% dan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 13,20%. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut yakni, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 42,32%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 18,96%. Adapun sektor pertambangan, industri pengolahan menyerap 9,51% dari total penduduk bekerja. Dari grafik II terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kondisi transformasi struktural yang terjadi, kontribusi pertanian yang terus menurun, seharusnya tenaga kerja dapat diserap oleh sektor manufaktur atau industri pengolahan. Namun terjadi “lompatan” atau *u* tenaga kerja yang seharusnya ke industri pengolahan dalam hal ini langsung ke sektor jasa. Hal ini juga terlihat dari masih tingginya sektor informal di Provinsi Lampung sebesar 70,67%. Hal ini disebabkan pula masih rendahnya tingkat Pendidikan tenaga kerja yaitu sebesar 37,35% merupakan lulusan SD kebawah. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguasaan teknologi manufaktur dan peningkatan kompetensi agar dapat mengisi permintaan pasar tenaga kerja.

Grafik 2. 41 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 26,65 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,68 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, pekerja bebas di non pertanian, buruh/karyawan/pegawai, dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar mengalami kenaikan persentase, masing-masing sebesar 1,96 persen poin, 1,04 persen poin, 0,78 persen poin, dan 0,06 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan lainnya mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan status pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebesar 1,39 persen poin dan 1,34 persen poin

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja sebesar 70,67% jauh lebih tinggi dibandingkan sektor formal yang hanya 29,33%. penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,32 juta orang (70,67%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,38 juta orang (29,33%). Bila dibandingkan Agustus 2022, jumlah pekerja informal menurun 0,84 persen poin dan pekerja formal mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen poin. Hal ini mengindikasikan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal masih sedikit menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif di sektor ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja harus diupayakan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Grafik 2. 42 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal Informal (2018-2023)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Ditinjau dari tingkat Pendidikan, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Lampung berada pada kategori pendidikan rendah yaitu lulusan SD kebawah sebesar 37,35%, dan yang merupakan tamatan SMP sebesar 23,16%. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan menengah atas atau tamatan SMA umum dan SMK kejuruan masing-masing sebesar 19,91%, dan 10,45%. Adapun untuk level Pendidikan tinggi atau DI/III dan Universitas tercatat sebesar 9,13%.

### 2.1.2.8.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin, dibandingkan dengan Agustus 2022. hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus 2022. Secara nasional, selama periode 2018-2023, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,32) pada Tahun 2023.

Tabel 2. 46 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian TPT untuk regional Sumatera relative bervariasi, TPT tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,42 persen. Provinsi Lampung



menempati TPT terendah ketiga se-Sumatera bersama sama Provinsi Bengkulu dan Riau.

Grafik 2. 43 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2023.

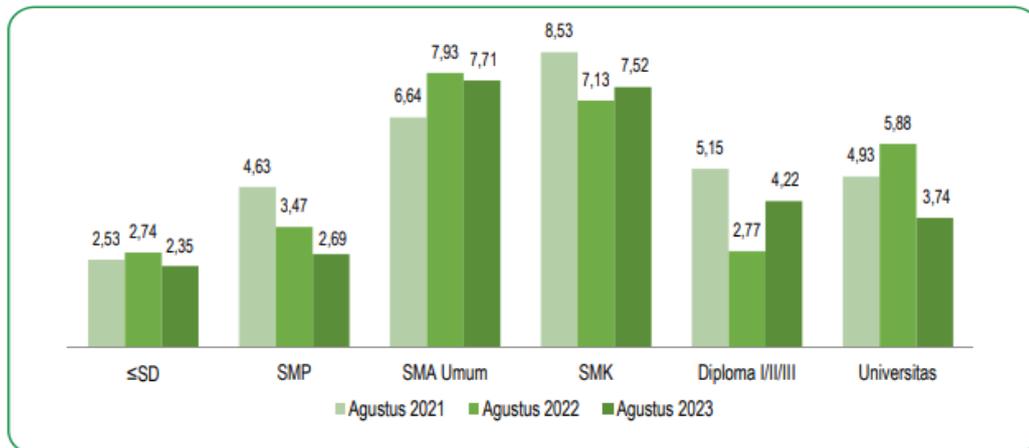


Sumber: BPS, 2023

Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar 5,71 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,46 persen), dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan menurun sebesar 2,20 persen poin sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,54 persen point.

Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,71 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,35 persen. Dibandingkan Agustus 2022, oenurunan TPT, dterjadi pada hamper semua jenjang Pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan Universitas, yaitu sebesar 2,14 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan TPT, masing-masing sebesar 0,39 persen poin dan 1,45 persen poin. .

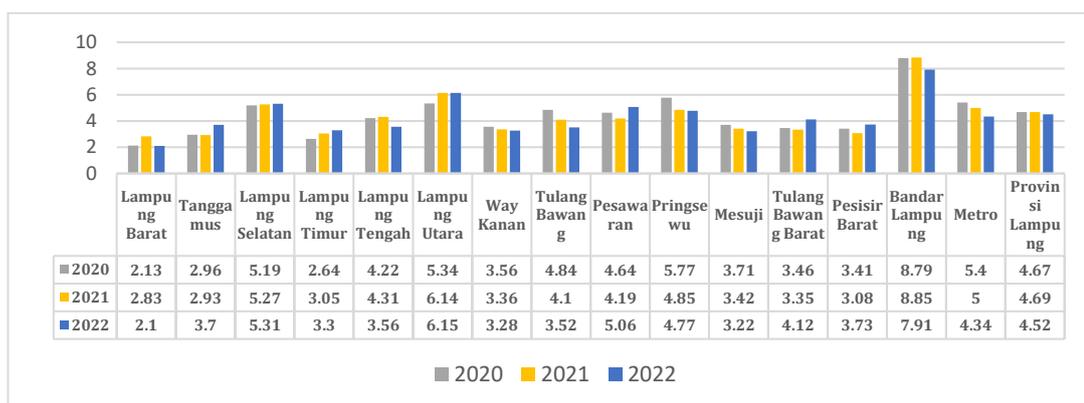
Grafik 2. 44 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik 2. 45 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



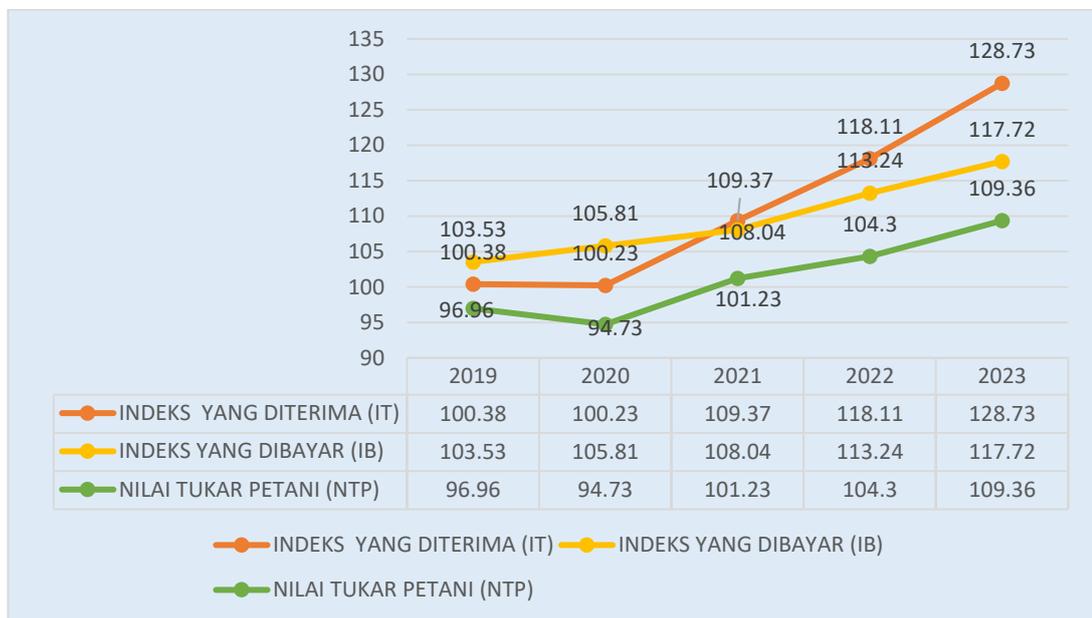
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

## 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.3.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 109,36. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (117,72). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik 2. 46 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023

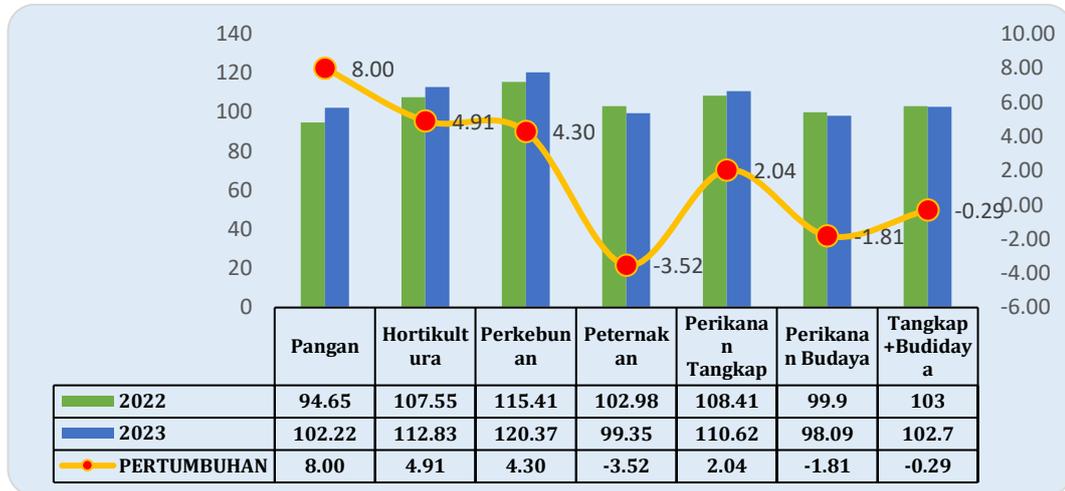


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan (8%), diikuti hortikultura (4,91) dan perkebunan (4,3) serta perikanan tangkap (2,04%). Sedangkan pada sub sektor peternakan dan perikanan budidaya terjadi penurunan (pertumbuhan negatif) masing-

masing sebesar -3,52% dan -1,81% dan total perikanan tangkap budidaya sebesar -0,29%.

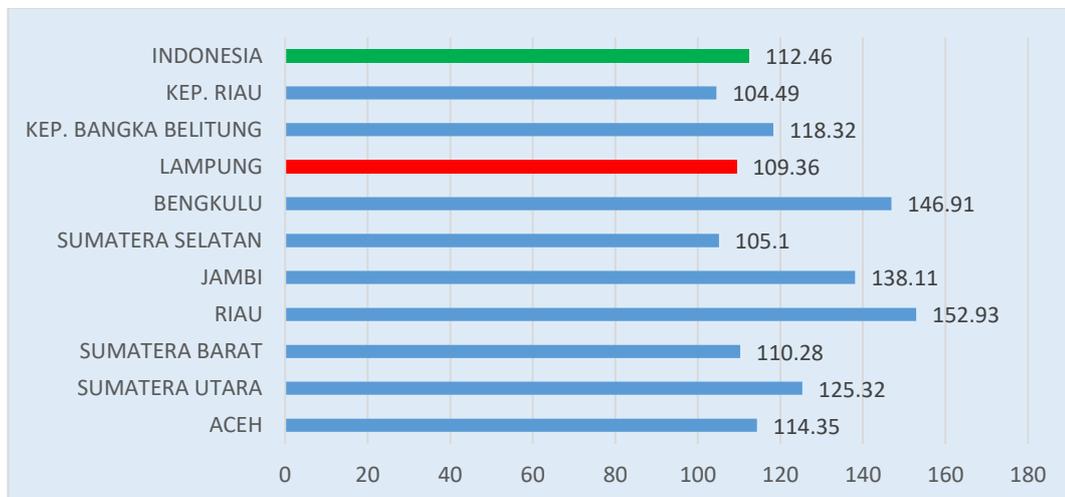
Grafik 2. 47 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Indonesiag, 2024, (diolah).

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah ketiga setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 152,93, Provinsi Bengkulu (146,91) dan Provinsi Jambi (138,11). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-20.

Grafik 2. 48 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023



Sumber: BPS Indonesiag, 2024(diolah).



Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2023, namun dengan trend yang semakin meningkat.

Grafik 2. 49 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2023)



Sumber: BPS 2023

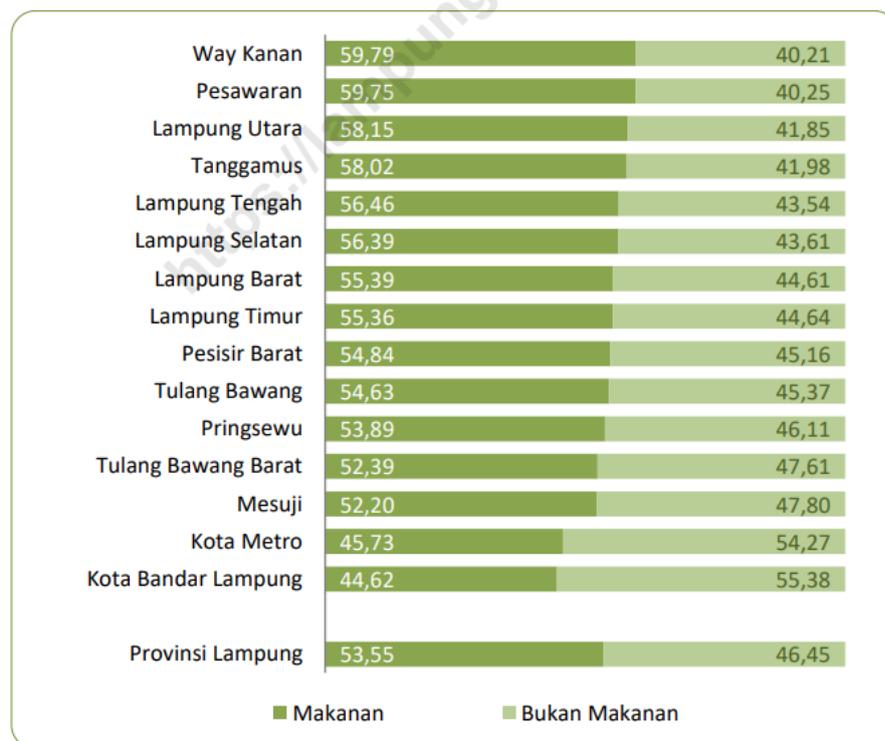
### 2.1.3.2 Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas pendapatan terhadap permintaan makanan pada umumnya rendah, begitu pula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya telah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Tabel 2. 47 Rata-rata pengeluaran per kapita per kabupaten/kota tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Komoditas Bukan Makanan (rupiah)			Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Komoditas Makanan (rupiah)			Jumlah Rata-rata Pengeluaran per Kapita Tahun 2022
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Lampung Barat	420.288	450.162	432.966	514.788	547.728	561.447	994.413
Tanggamus	338.031	350.398	341.422	449.216	458.446	507.751	849.173
Lampung Selatan	415.137	475.010	481.567	498.955	583.427	597.883	1.079.450
Lampung Timur	467.489	394.710	445.291	479.514	478.471	552.206	997.497
Lampung Tengah	422.999	404.652	440.683	480.894	497.048	530.691	971.374
Lampung Utara	397.292	357.088	360.455	447.669	470.411	498.088	858.543
Way Kanan	406.727	412.098	424.966	489.162	547.480	590.542	1.015.508
Tulang Bawang	391.296	391.114	469.578	451.001	464.238	548.783	1.018.361
Pesawaran	369.890	357.320	343.881	481.699	473.810	510.396	854.277
Pringsewu	445.611	447.975	436.932	483.571	513.611	530.499	967.431
Mesuji	452.272	472.168	517.987	441.784	485.098	569.884	1.087.871
Tulang Bawang Barat	368.032	402.713	457.858	436.451	447.793	500.064	957.922
Pesisir Barat	378.930	471.418	420.674	568.874	568.870	544.040	964.714
Bandar Lampung	818.618	990.284	917.750	660.236	766.161	773.485	1.691.235
Metro	801.558	831.870	845.758	673.115	688.263	681.370	1.527.128
Provinsi Lampung	470.448	490.615	499.315	503.976	539.964	575.673	1.074.988

Grafik 2. 50 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota, 2022



Sumber/Source : Susenas, 2022/ National Socio Economic Surveys, 2022

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Pengeluaran penduduk di daerah perkotaan cenderung digunakan untuk kebutuhan bukan makanan, yakni sebesar 51,16 persen dari

total pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2022. Sementara di daerah perdesaan, pengeluaran penduduknya masih lebih banyak digunakan untuk makanan, yakni mencapai 56,69 persen dari total pengeluarannya.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

## 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.1.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPD periode Tahun 2025-2026.

Pada Tahun Ajaran 2022-2023 jumlah peserta didik pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung berjumlah **1.442.762.000** siswa. Data tersebut terlihat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 48 Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022-2023

No	Wilayah	Total	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Lampung Tengah	404.12	122.768	49.941	20.866	18.545	192
2	Kota Bandar Lampung	750.078	88.767	45.490	27.375	22.446	566
3	Kab. Lampung Selatan	351.272	96.827	36.345	17.584	19.516	181
4	Kab. Lampung Timur	311.689	88.181	38.998	15.826	17.684	151
5	Kab. Lampung Utara	236.716	58.653	23.673	14.635	8.755	131
6	Kab. Tanggamus	205.031	56.435	18.463	9.285	7.848	113
7	Kab. Way Kanan	136.627	48.247	18.097	9.934	6.349	54
8	Kab. Pringsewu	287.804	38.382	17.174	8.831	12.417	211
9	Kab. Tulang Bawang	117.887	43.921	17.138	6.687	6.141	44
10	Kab. Pesawaran	98.143	41.936	15.556	7.093	5.558	28
11	Kab. Tulang Bawang Barat	153.549	29.434	12.483	5.050	4.582	102
12	Kab. Lampung Barat	48.36	27.717	10.541	6.273	3.829	0
13	Kota Metro	393.994	16.047	10.944	8.045	8.958	350
14	Kab. Mesuji	100.235	24.366	7.832	2.987	3.050	62
15	Kab. Pesisir Barat	50.052	17.985	6.275	3.993	1.799	20
	<b>Total</b>	<b>1.442.762.000</b>	<b>799.666</b>	<b>328.95</b>	<b>164.464</b>	<b>147.477</b>	<b>2.205</b>



*Sumber: Dapodik Provinsi Lampung Tahun, 2023*

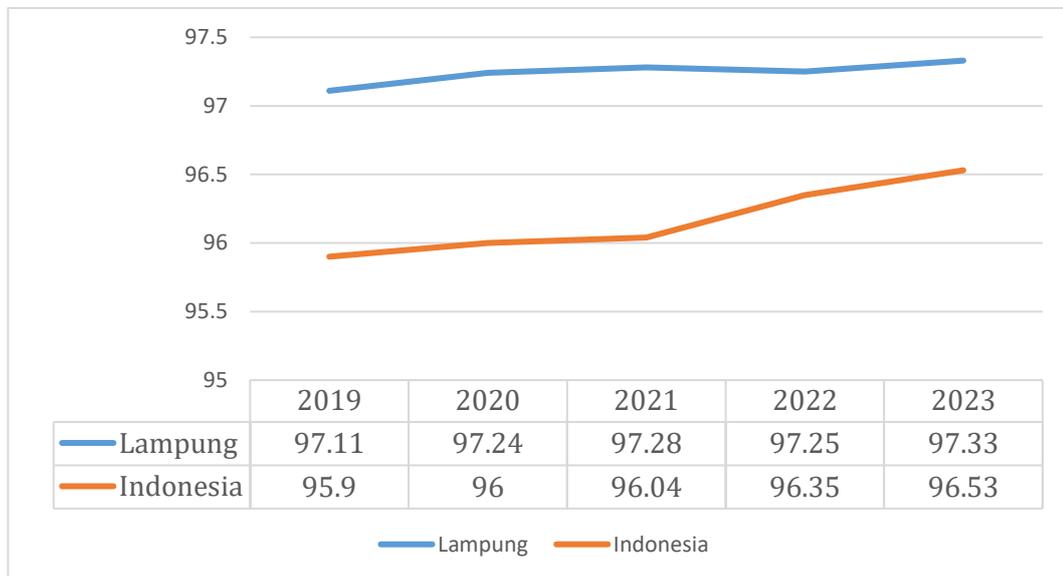
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah peserta didik terbanyak di jenjang Sekolah Menengah berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 164.464 siswa, dan diikuti peserta didik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 147.477 orang siswa. Meskipun diharapkan tersedianya SDM yang siap bekerja setelah lulus sekolah melalui jenjang vokasi, namun peminatan siswa untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA masih menjadi pilihan prioritas para siswa pada umumnya.

Ukuran keberhasilan atau kemajuan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

#### **2.1.4.1.1 Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 berada pada angka 97,11 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 menjadi 97,33 sejalan dengan kenaikan Angka Melek Huruf Nasional yang pada tahun 2023 sebesar 96,53. Kenaikan Angka Melek Huruf ini dikarenakan semakin tingginya minat penduduk di Provinsi Lampung untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis untuk ikut serta dalam program kejar paket A. Grafik Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

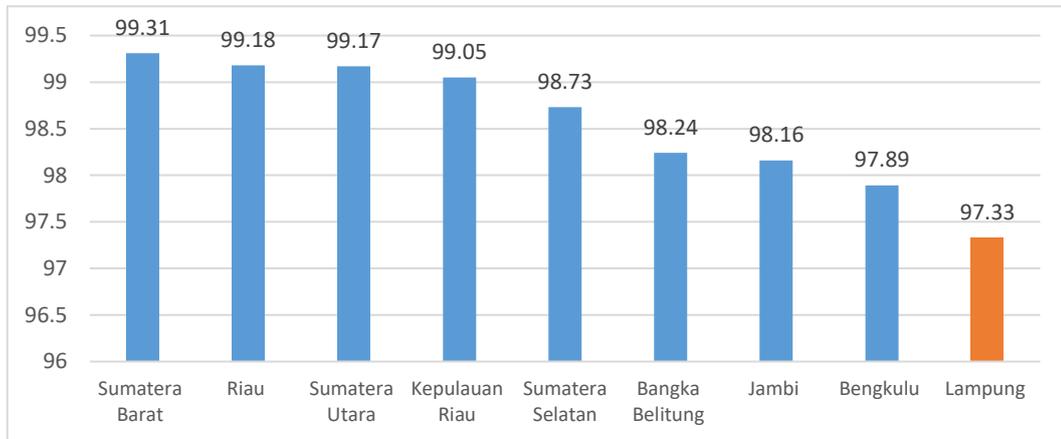
Grafik 2. 51 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Walaupun Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional, akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera dengan capaian 97,33%. Keadaan ini sangat memperhatikan, sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung sudah menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pada pasal 31. Sedangkan Provinsi dengan angka melek huruf tertinggi di Sumatera adalah Sumatera Barat dengan nilai 99,31%.

Grafik 2. 52 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

#### 2.1.4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dibanding Provinsi se Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Sumatera Tahun 2021-2023

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	99,67	99,44	99,43	98,42	97,96	97,72	83,28	83,1	83,41	32,61	31,72	33,1
SUMATERA UTARA	99,32	99,5	99,51	96,99	96,78	96,76	78,66	78,66	79,25	27,05	26,6	28,61
SUMATERA BARAT	99,61	99,55	99,76	96,63	96,52	96,79	84,07	83,71	84,33	36,41	35,41	38,08
RIAU	99,65	99,61	99,65	95,66	95,72	95,89	77,81	77,32	78,15	28,79	28,65	30,07
JAMBI	99,66	99,33	99,49	96,39	96,2	96,01	72,5	72,53	72,46	24,14	23,35	23,98
SUMATERA SELATAN	99,65	99,38	99,41	94,85	95,06	95,27	71,53	70,93	71,71	18,81	18,61	19,79
BENGKULU	99,76	99,49	99,42	97,49	97,73	97,91	79,75	79,31	79,57	30,46	29,42	30,74
LAMPUNG	99,53	99,56	99,61	95,58	95,63	95,93	71,72	71,14	71,74	21,17	20,72	21,66
KEP. BANGKA BELITUNG	99,47	99,41	99,51	93,17	93	93,2	68,15	68,42	69,53	18,02	17,68	17,59

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KEP. RIAU	99,62	99,28	99,29	98,85	99,01	99,07	84,4	84,54	84,97	19,83	19,5	20,51

Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Berdasarkan pengamatan pada grafik di atas, dilihat dari kelompok umur, Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin kecil seiring bertambahnya umur. Capaian partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan dasar yaitu pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun telah melebihi 95 persen. Dimana rentang usia 7-12 sebesar 99,61 persen. Pada rentang umur 13-15 tahun sebesar 95,93 persen. APS kelompok umur 16-18 tahun berkisar di angka 71,74 persen meningkat dibandingkan tahun 2022. Angka Partisipasi Sekolah pada rentang umur 19-24 tahun 2023 yang sebesar 21,26 persen masih cukup rendah dibanding Provinsi se Sumatera. Pemerintah perlu menekankan pentingnya pendidikan dasar untuk semua, khususnya kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan SD dan SMP.

#### 2.1.4.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2. 50 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Sumatera

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan								
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat			SM/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	98,95	99,07	98,97	86,95	88,21	84,85	70,8	71,16	71,7
SUMATERA UTARA	97,69	98	97,95	81,13	81,84	82,09	67,99	68,27	68,67
SUMATERA BARAT	98,82	98,8	98,89	78,75	78,86	80,22	68,99	68,38	69,18
RIAU	97,85	97,8	98,13	80,52	80,43	80,76	64	63,87	64,81
JAMBI	99,41	99,33	99,33	79,88	79,93	80,23	61,56	60,73	60,6

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan								
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat			SM/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SUMATERA SELATAN	98	98,08	98,12	78,31	78,68	79,12	60,53	61	61,24
BENGKULU	98,61	98,6	98,61	80,25	80,25	81,08	66,08	66,61	67,09
LAMPUNG	99,1	99,29	99,22	82,03	82,07	80,64	60,31	61,96	62,84
KEP. BANGKA BELITUNG	97,89	98,01	98,11	74,6	74,68	77	58,79	59,65	60,72
KEP. RIAU	99,26	99,2	99,29	86,6	86,76	86,78	73,36	73,54	74,11

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

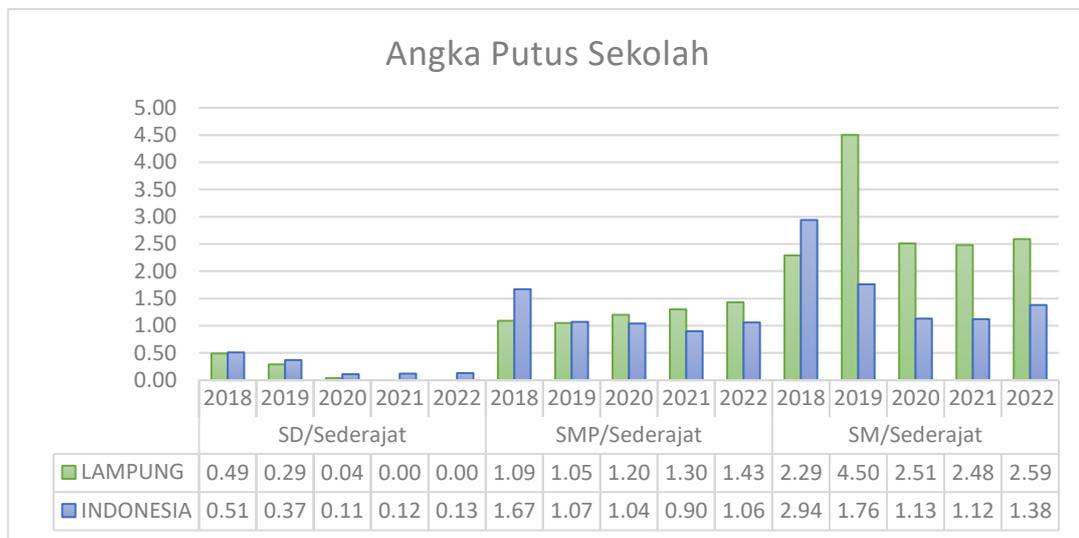
Pada tahun 2023, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas rata-rata Sumatera, sedangkan APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA masih berada di bawah rata-rata Sumatera yaitu menempati urutan ke 4 terbawah, setelah Jambi, Sumsel dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan.

#### 2.1.4.1.4 Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APS digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Grafik 2. 53 Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD di tahun 2021 dan 2022 berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum masih berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dari 1,20 persen menjadi 1,43 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan angka putus sekolah mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 51 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022

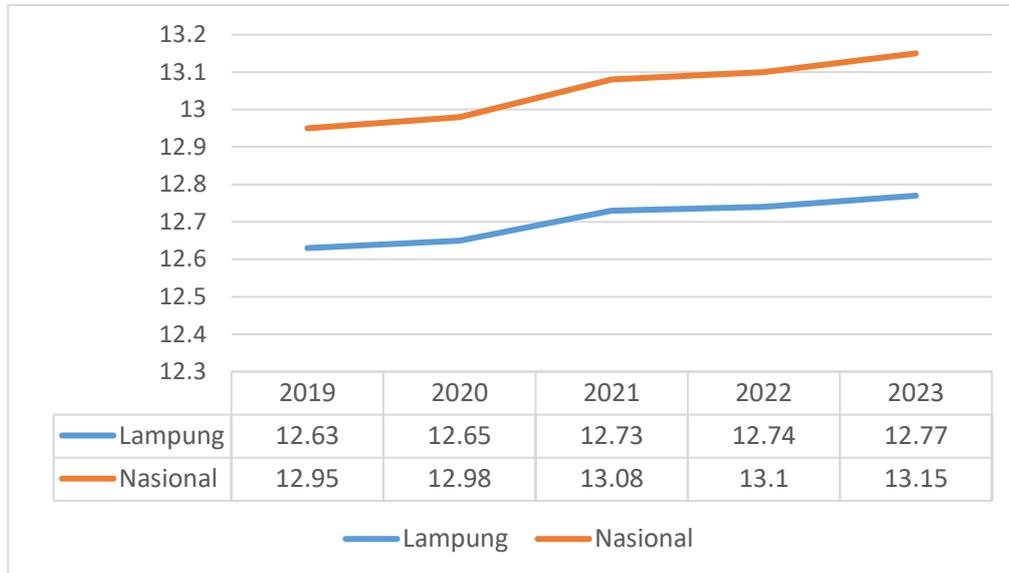
PROVINSI	SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/SEDERAJAT
Aceh	0,19	0,33	0,83
Sumatera Barat	0,10	0,60	1,28
Riau	0,11	1,08	1,25
Indonesia	0,13	1,06	1,38
Sumatera Selatan	n/a	1,34	1,36
Sumatera Utara	n/a	0,98	1,22
Jambi	n/a	0,65	1,25
Bengkulu	n/a	0,83	1,97
Lampung	n/a	1,43	2,59
Kep. Bangka Belitung	n/a	1,26	3,62
Kep. Riau	n/a	n/a	2,14

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2023, diolah

#### 2.1.4.1.5 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 54 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

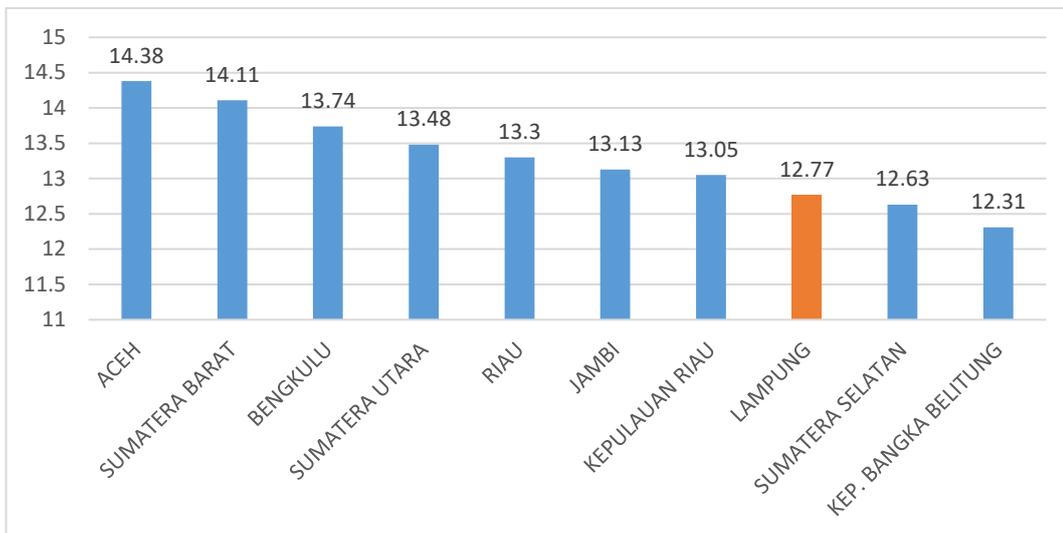


Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2023, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,77, meningkat sebanyak 0,03 poin dari tahun 2022 yang sebesar 12,74. Nilai tersebut artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,15.

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.

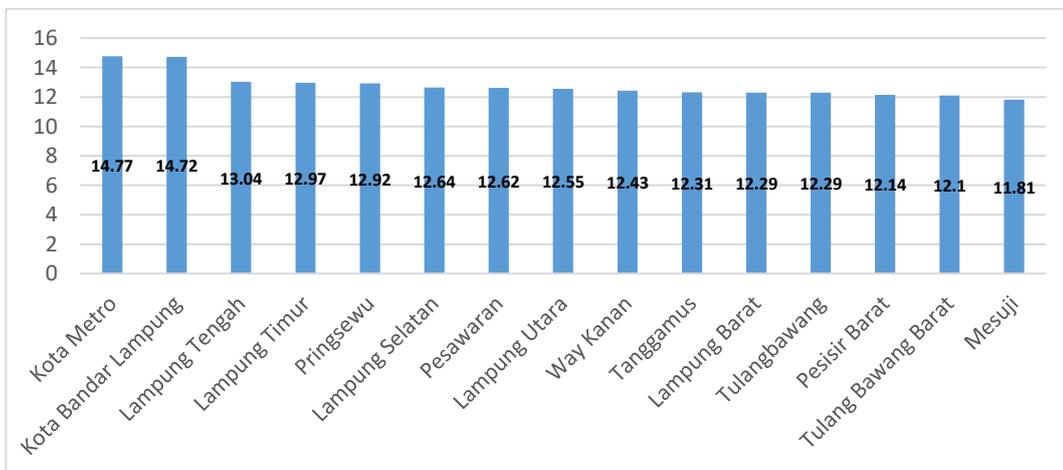
Grafik 2. 55 Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,77 dan Kota Bandar Lampung 14,72 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 11,81. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 56 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023



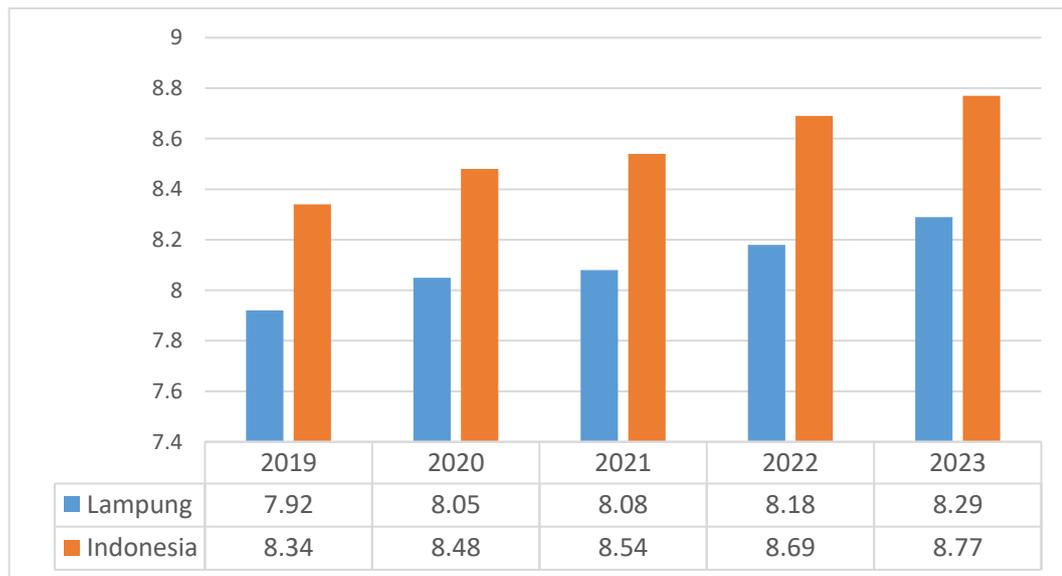
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah



#### 2.1.4.1.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

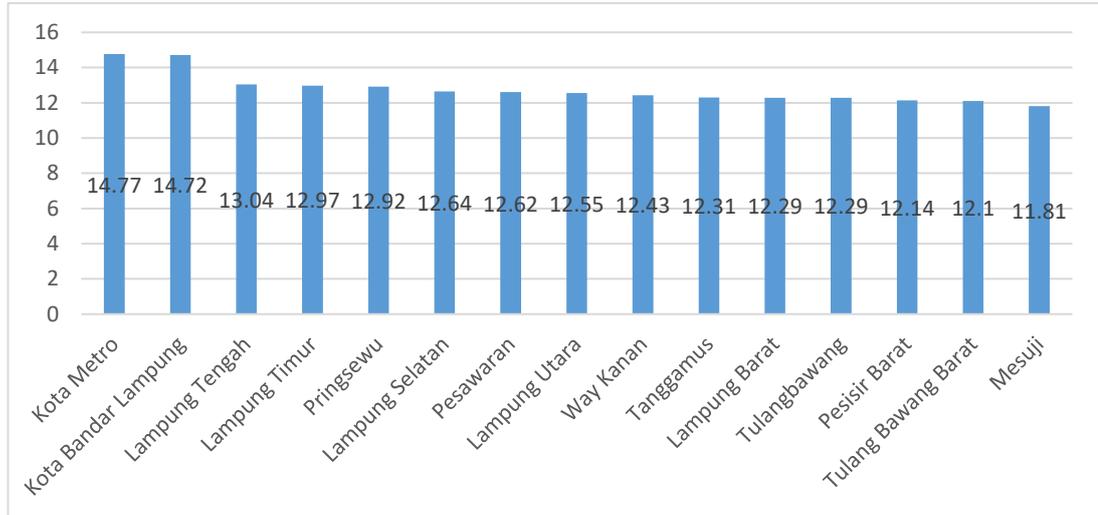
Grafik 2. 57 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,29 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,29 tahun, namun tidak menamatkan Pendidikan pada jenjang SMP atau hanya sampai kelas VIII. Angka capaian ini juga masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,77.

Grafik 2. 58 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023

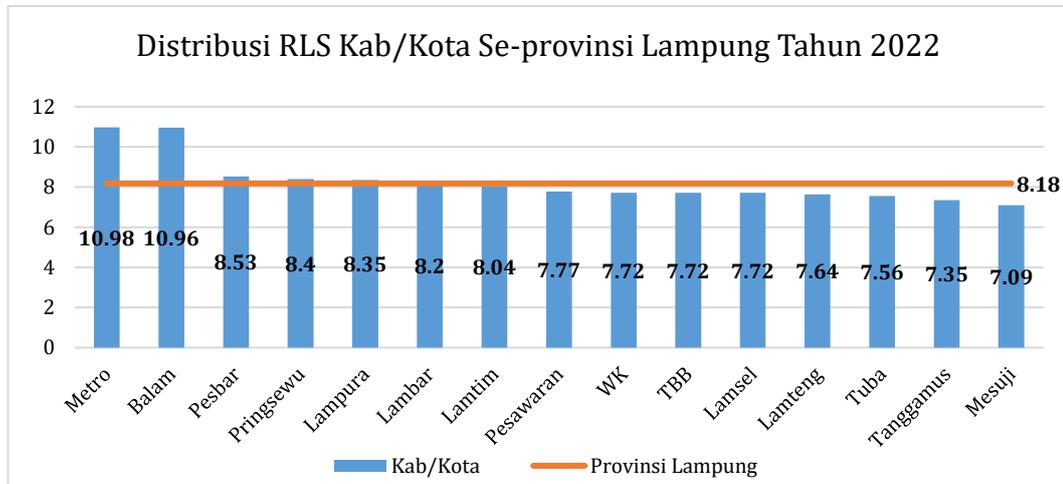


Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, posisi Lampung juga masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Lampung menempati peringkat nomor 2 terbawah se-Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,98 dan Kota Bandar Lampung 10,96 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 59 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023



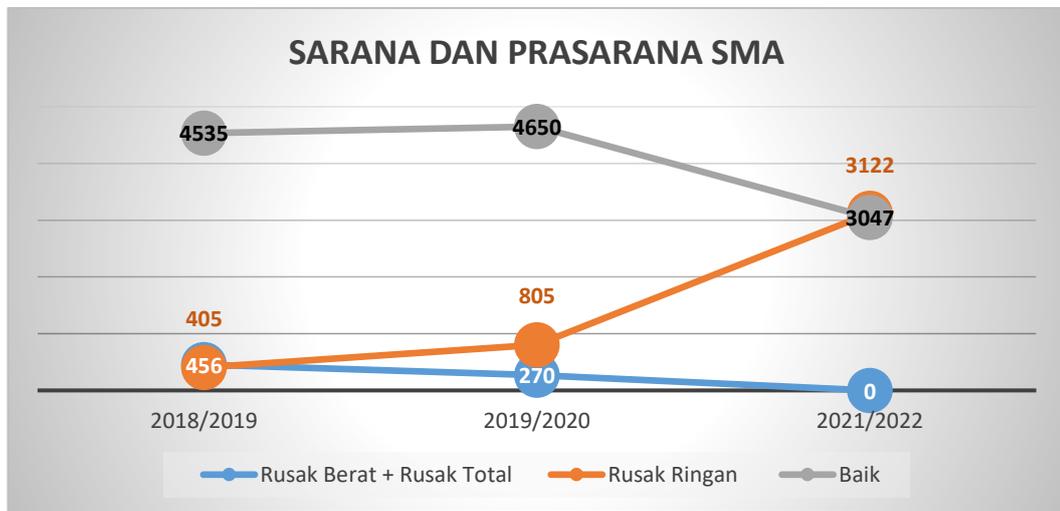
Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

#### 2.1.4.1.7 Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sarana dan prasarana ruang kelas pada jenjang SMA yang dalam kondisi baik, jumlahnya menurun di tahun ajaran 2021/2022 dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah total ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 3047. Penurunan prasarana SMA dalam kondisi baik diikuti dengan peningkatan prasarana SMA dalam kondisi rusak ringan di tahun ajaran 2021/2022. Peningkatan ini sangat signifikan menjadi berjumlah 3122 ruang kelas SMA rusak ringan dari yang sebelumnya berjumlah 805, sehingga terdapat selisih peningkatan ruang kelas SMA yang rusak ringan ditahun ajaran 2021/2022 dengan tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebanyak 2.317 ruang kelas. Meskipun jumlah ruang kelas yang rusak ringan meningkat sangat tinggi, akan tetapi pada tahun ajaran 2021/2022 keadaan menjadi lebih baik karena ruang kelas yang mengalami rusak berat mencapai angka 0 (nol), untuk itu masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut dapat masuk menjadi kategori baik.

Grafik 2. 60 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

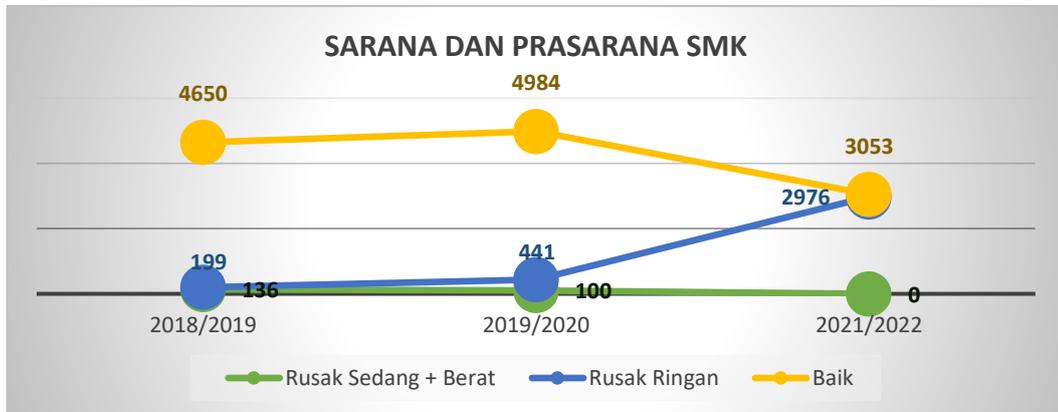


Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023, diolah

#### 2.1.4.1.8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK membaik, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat penurunan, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik menurun sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan meningkat, dan prasarana rusak berat mencapai angka 0 (nol). Meskipun tingkat kerusakan berat mencapai angka 0 (nol) namun kondisi prasarana rusak ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.976 sekolah dan prasarana dalam kondisi baik menurun menjadi 3053 sekolah di Tahun 2021. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMK karena siswa SMK dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik karena prasarana dengan kerusakan berat telah bernilai 0 (nol). Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang baik, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 3.053 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik 2. 61 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

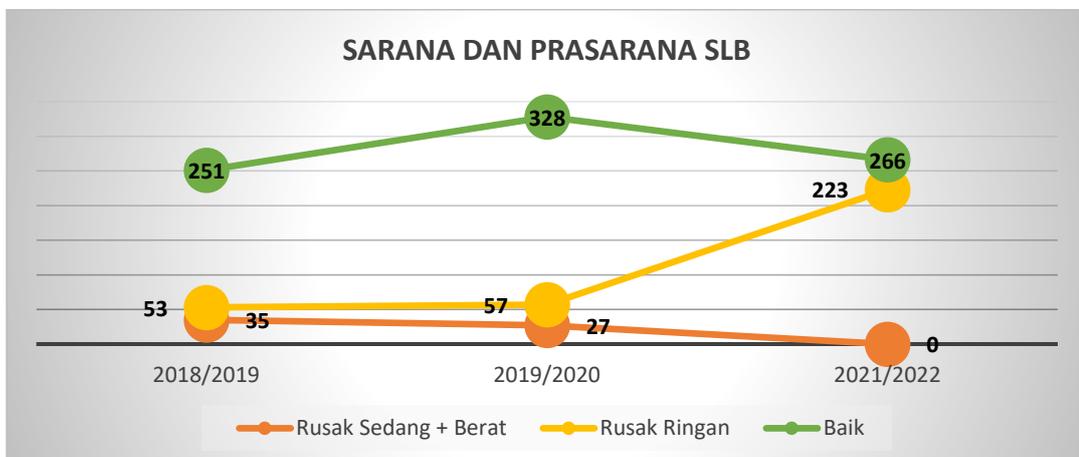


Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

#### 2.1.4.1.9 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pola yang hampir sama dengan jenjang SMA dan SMK terdapat juga pada kondisi sarana dan prasarana SLB. Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022, terdapat penurunan jumlah sarana dan prasarana SLB yang dalam kondisi baik, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan meningkat. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Dan pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol).

Grafik 2. 62 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



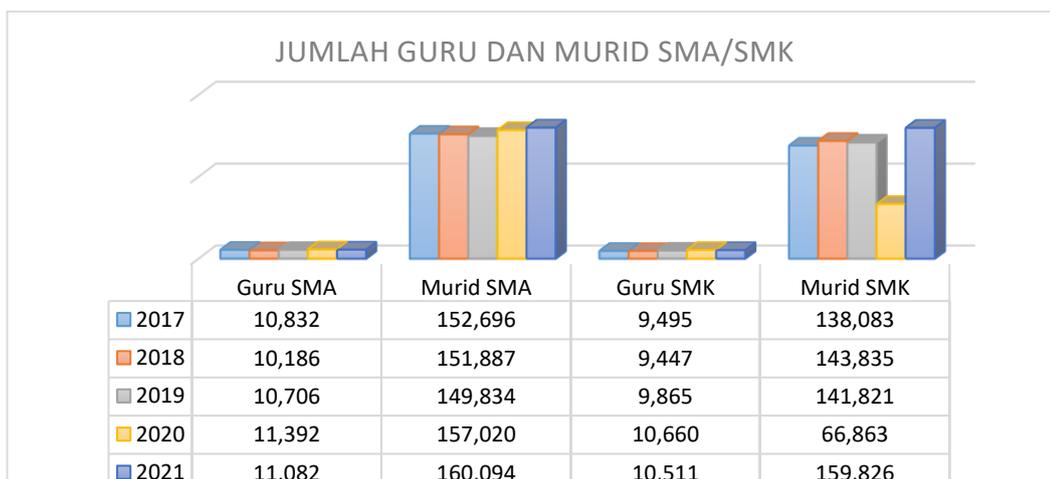
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

#### 2.1.4.1.10 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data jumlah murid SMA, terdapat peningkatan jumlah di tahun 2020 sampai 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan jumlah siswa. Jumlah siswa SMK juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018, namun pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah siswa dan terus berlanjut dengan cukup signifikan di tahun 2020 dengan jumlah siswa SMK hanya 66.863 siswa. Jumlah siswa SMK kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 159.826 siswa.

Jumlah guru SMA dan SMK dari tahun 2017 sampai tahun 2021 penambahannya berfluktuasi. Jumlah guru SMA di tahun 2018 mengalami penurunan namun di tahun 2019 kembali meningkat sampai di tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah guru kembali turun dengan jumlah 11.082 guru. Begitu juga hal yang sama terjadi pada penambahan jumlah guru di SMK, dimana penurunan jumlah guru yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 hingga berjumlah 66.863 guru dari yang sebelumnya berjumlah 141.821 guru di tahun 2019. Di tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat di angka 159.826 guru. Walaupun terjadi peningkatan jumlah guru SMA dan SMK pada tahun 2021, tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa pada tahun 2021. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 63 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

#### 2.1.4.1.11 Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA selalu mengalami naik turun per tiap tahunnya, pada tahun 2017 rasio nya 1:14 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019,

lalu turun kembali pada tahun 2021 menjadi 1:15. Hal yang sama juga dialami pada rasio perbandingan guru dengan murid pada jenjang SMK, dimana pada tahun 2017 sebesar 1:15, dan terjadi perbaikan pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi besarnya kembali naik seperti tahun 2019, yaitu 1:15. Penurunan rasio guru dan murid pada tahun 2020 disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan, sedangkan penambahan guru pada tahun tersebut sangat kecil.

Tabel 2. 52 Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa 2017 – 2021

Perbandingan	2017	2018	2019	2020	2021
Guru: Siswa SMA	1:14	1:15	1:14	1:14	1:15
Guru: Siswa SMK	1:15	1:15	1:14	1:16	1:15

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan (rasio guru SMA dan murid 1:20 dan rasio guru SMK dengan murid 1:15) tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan guru yang PNS, maka rasio ini akan turun jauh, sehingga tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 53 Perbandingan Jumlah Guru PNS dan Siswa 2017 – 2021

Perbandingan	2017	2018	2019	2020	2021
Guru: Siswa SMA	1:28	1:32	1:30	1:31	1:35
Guru: Siswa SMK	1:56	1:67	1:64	1:74	1:73

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

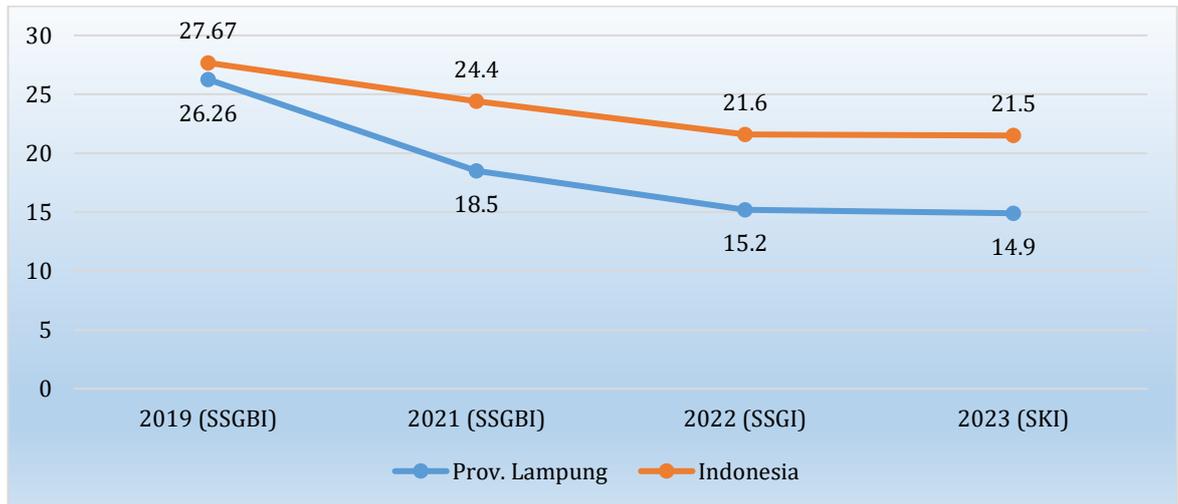
## 2.1.4.2 Kesehatan

### 2.1.4.2.1 Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Bila dibandingkan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023, prevalensi stunting Provinsi Lampung telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, hingga mencapai 11,36 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018. Akan tetapi prevalensi stunting ini harus diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan data SKI Tahun 2023, prevalensi

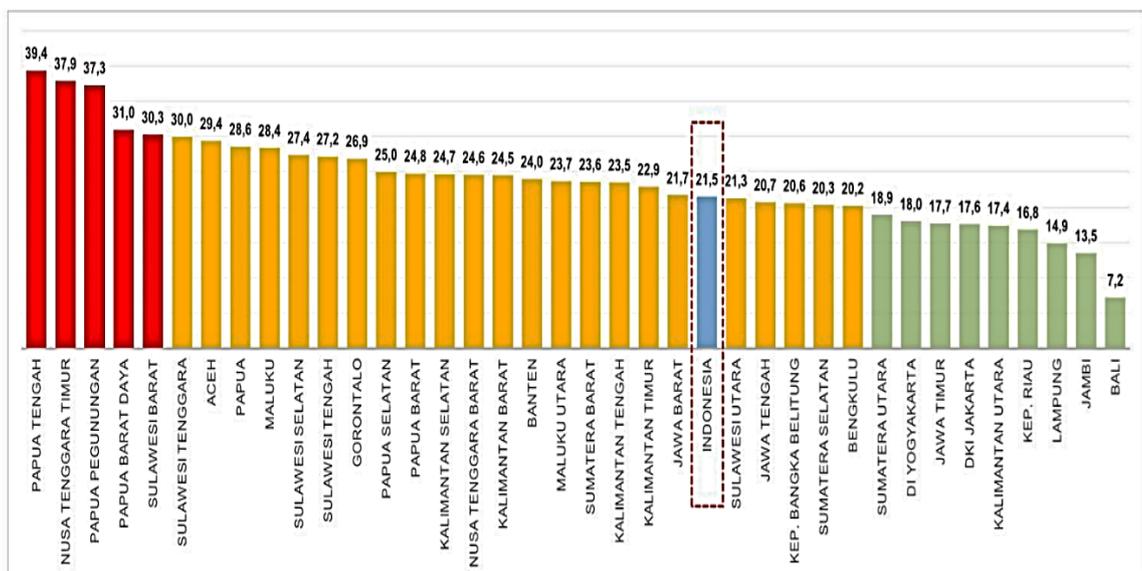
stunting menurun 0,3 persen dari kondisi tahun 2022 hingga berada di angka 14,9 persen pada Tahun 2023, sehingga Provinsi Lampung masih harus menurunkan 0,9 persen lagi di Tahun 2024.

Grafik 2. 64 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023



Sumber : SSGI 2021-2022, SKI 2023, diolah

Grafik 2. 8 Sebaran Prevalensi Stunting Per Provinsi Tahun 2023



Sumber : SKI 2023, diolah

Pada grafik di atas, terlihat bahwa Provinsi Lampung menempati urutan terbaik ke 3 se Indonesia setelah Jambi dan Bali, dengan capaian yang juga lebih baik dibandingkan nasional. Hal ini memperkuat bukti



keberhasilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting. Aksi konvergensi penurunan stunting dilakukan oleh semua pihak, baik seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota hingga tingkat desa, instansi vertikal dan lintas sektor terkait lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3 Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur dan pada tahun 2019 ditetapkan Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten lokus. Pada tahun 2020 Pemerintah pusat menambahkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran sedangkan pada tahun 2021 ditambahkan 4 Kab/Kota yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung. Untuk Tahun 2022 ditetapkan sisanya, yaitu 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro, sehingga pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi kabupaten/kota lokus penurunan stunting. Pada tahun 2024 Aksi Konvergensi Stunting telah ditentukan di 15 Kab/Kota melalui SK Bupati/Walikota dengan rincian lokus sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA KELURAHAN/DESA/PEKON 2024	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA/PEKON
1	LAMPUNG BARAT	8 Kecamatan	10 Desa
2	TANGGAMUS	9 Kecamatan	17 Desa
3	LAMPUNG SELATAN	11 Kecamatan	40 Desa
4	LAMPUNG TIMUR	7 Kecamatan	10 Desa
5	LAMPUNG UTARA	9 Kecamatan	27 Desa
6	LAMPUNG TENGAH	9 Kecamatan	30 Desa
7	WAY KANAN	12 Kecamatan	26 Desa
8	TULANG BAWANG	9 Kecamatan	30 Desa
9	PESAWARAN	8 Kecamatan	22 Desa
10	PRINGSEWU	7 Kecamatan	20 Desa
11	MESUJI	5 Kecamatan	10 Desa
12	TULANG BAWANG BARAT	5 Kecamatan	15 Desa
13	PESISIR BARAT	11 Kecamatan	32 Desa
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	4 Kecamatan	5 Kelurahan
15	KOTA METRO	5 Kecamatan	15 Kelurahan

Aksi konvergensi penurunan stunting memberikan efek positif dalam penurunan stunting seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.65 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022



Sumber: SSGI Tahun 2022

Dari grafik terlihat bahwa hanya 5 Kabupaten/Kota yang capaian angka prevalensi stunting nya berada di bawah Provinsi Lampung, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Metro dan Bandar Lampung. Pada tahun 2022 aksi konvergensi stunting telah dilaksanakan di 15 Kab/Kota, akan tetapi capaian angka prevalensi stunting di 10 Kabupaten/Kota ini masih tinggi, yaitu masih berada di atas angka prevalensi stunting Provinsi Lampung yaitu masih berada di atas angka 15,2%. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat penurunan stunting di 10 Kabupaten/Kota tersebut sehingga dapat mencapai angka 14% pada tahun 2024.

#### 2.1.4.2.2 Angka Kematian Bayi

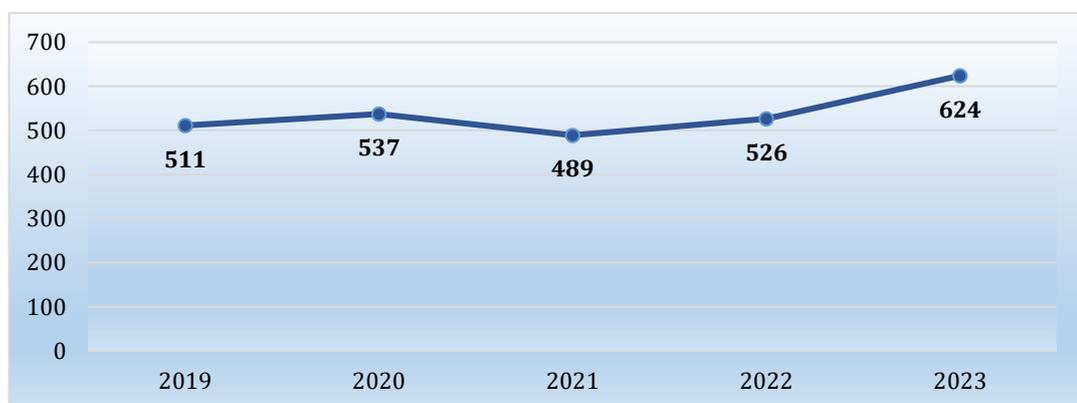
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 - 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 526 kasus

meningkat menjadi 624 kasus. Penyebab meningkatnya jumlah kasus kematian bayi dikarenakan:

- ANC Terpadu belum berjalan optimal (antara lain masih kurangnya pengetahuan nakes untuk mendeteksi dini kehamilan dengan risiko persalinan prematur);
- Keterbatasan sarpras di rumah sakit (inkubator dan sarana pendukung life support lainnya) sehingga membuat bayi harus mengantri di IGD;
- Peran dokter umum belum optimal dalam pengambilan keputusan pada saat pra rujukan neonatus;
- Keterbatasan sarpras dalam ambulance puskesmas PONED;
- Tidak ada alat Skrining bayi baru lahir untuk Penyakit Jantung Bawaan Kritis;
- Terlambatnya bayi baru lahir untuk di Inisiasi Menyusu Dini (IMD) karena berbagai alasan dari kebijakan fasilitas kesehatan maupun tenaga Kesehatan;
- Masyarakat tidak paham, tidak yakin dan merasa tidak mampu melakukan Perawatan metode kanguru pada bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
- Terjadi komplikasi saat proses kelahiran seperti kelahiran prematur, asfiksia neonatal (kekurangan oksigen saat lahir) atau cacat bawaan yg dapat menyebabkan kematian bayi;
- Terjadi infeksi dan penyakit seperti penyakit menular contoh: ISPA, diare atau penyakit menular lainnya yang dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tren kasus kematian bayi tahun 2019-2023 terlihat pada grafik berikut ini:

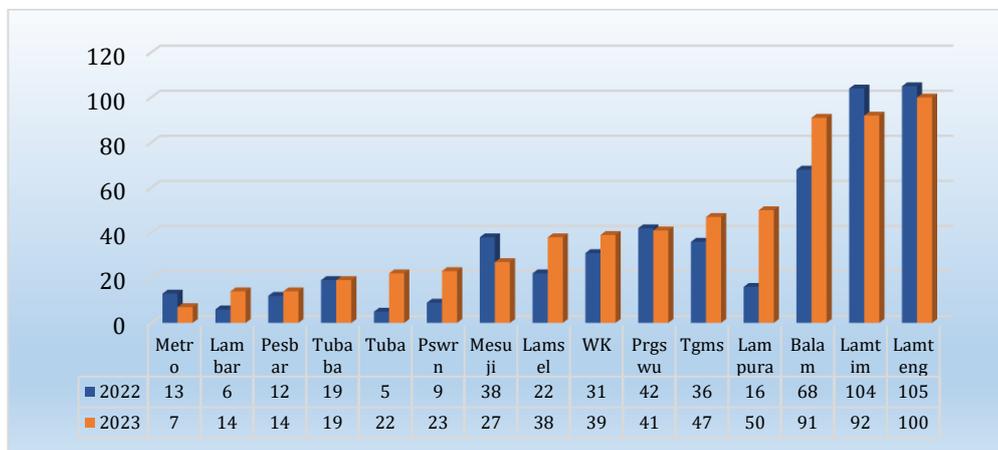
Grafik 2.66 Tren Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2023, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 100 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 92 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 91 kasus, sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kota Metro dengan kasus kematian bayi sebanyak 7 kasus. Dari data terlihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur serta Kota Bandar Lampung selalu memiliki kasus kematian bayi tertinggi, untuk itu perlu dilakukan intervensi khusus terhadap ketiga Kabupaten/Kota tersebut.

Grafik 2.67 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022 dan 2023



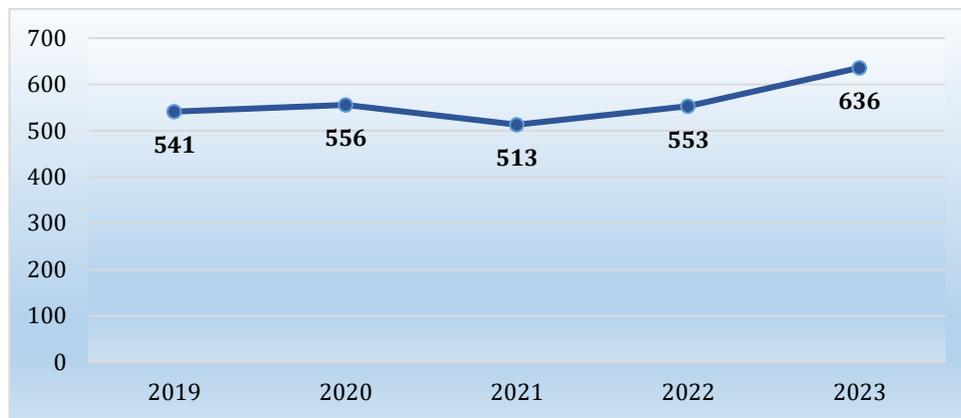
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2024

### 2.1.4.2.3 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0- <5 tahun per 100.000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Sejalan dengan meningkatnya kasus kematian bayi, jumlah kasus kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2023 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022, dimana kasus tahun 2022 sejumlah 553 kasus meningkat menjadi 636 kasus pada tahun 2023.

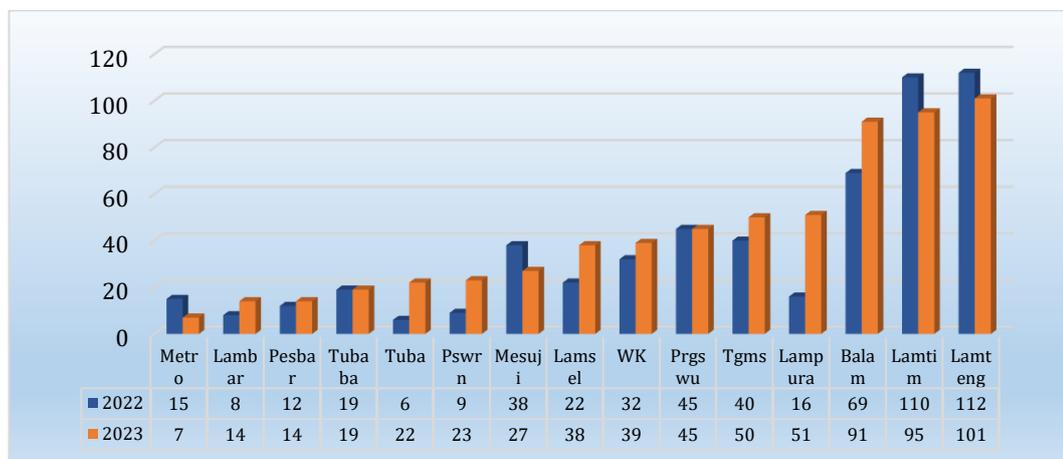
Grafik 2. 68 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Kasus kematian balita berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 101 kasus, Kabupaten Lampung Timur 95 kasus dan Kota Bandar Lampung sebanyak 91 kasus. Kasus terendah yaitu hanya 7 kasus kematian balita berada di Kota Metro. Jumlah kasus kematian balita dan kasus kematian bayi tidak terlalu berbeda jauh dan kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kasus kematian bayi juga menjadi kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kematian balita. Artinya kematian balita didominasi pada umur kurang dari 1 tahun, sedangkan kematian balita umur 1-5 tahun sangat sedikit.

Grafik 2.69 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 dan 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Lampung, 2024



#### 2.1.4.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu terus meningkat, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan, akan tetapi peningkatan jumlah kasus kematian ibu terjadi lagi pada Tahun 2023 hingga mencapai 105 kasus. Penyebab meningkatnya jumlah kasus kematian ibu disebabkan karena:

- Puskesmas PONEB tidak berjalan optimal (kekurangan nakes karena mutasi nakes yang dilatih dan tidak adanya pelatihan baru, kurangnya dukungan sarpras);
- Belum maksimalnya koordinasi lintas program ditandai dengan Skrining penyakit Menular dan PTM pada usia reproduktif masih rendah;
- Kepercayaan masyarakat yang tidak mengizinkan untuk menghadang kehendak Yang Kuasa untuk mendapat keturunan dengan menggunakan KB.

Tren jumlah kasus kematian ibu tiap tahunnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.70 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

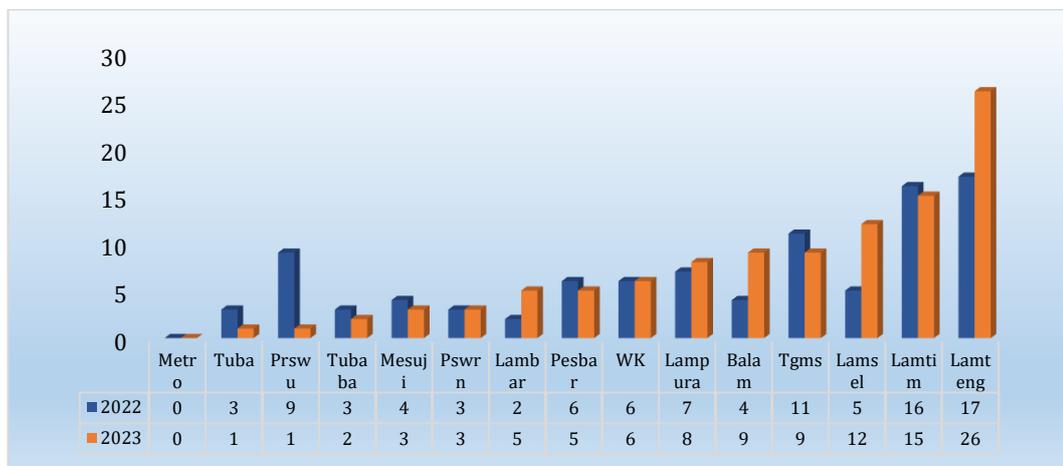


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2024

Sejalan dengan kasus kematian bayi dan balita, pada kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023, yang terbanyak juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (26 kasus), Lampung Timur (15 kasus) dan Lampung Selatan (12 kasus). Permasalahan kesehatan di 3

kabupaten/kota ini harus segera dibenahi agar jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus kematian balita di kabupaten/kota ini dapat diturunkan. Sedangkan di Kota Metro pada tahun 2022 tidak terdapat kasus kematian ibu. Penurunan jumlah kasus kematian ibu terlihat di Kabupaten yaitu dari 9 kasus pada Tahun 2022 menjadi hanya 1 kasus pada Tahun 2023. Distribusi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 71 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2024

#### 2.1.4.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

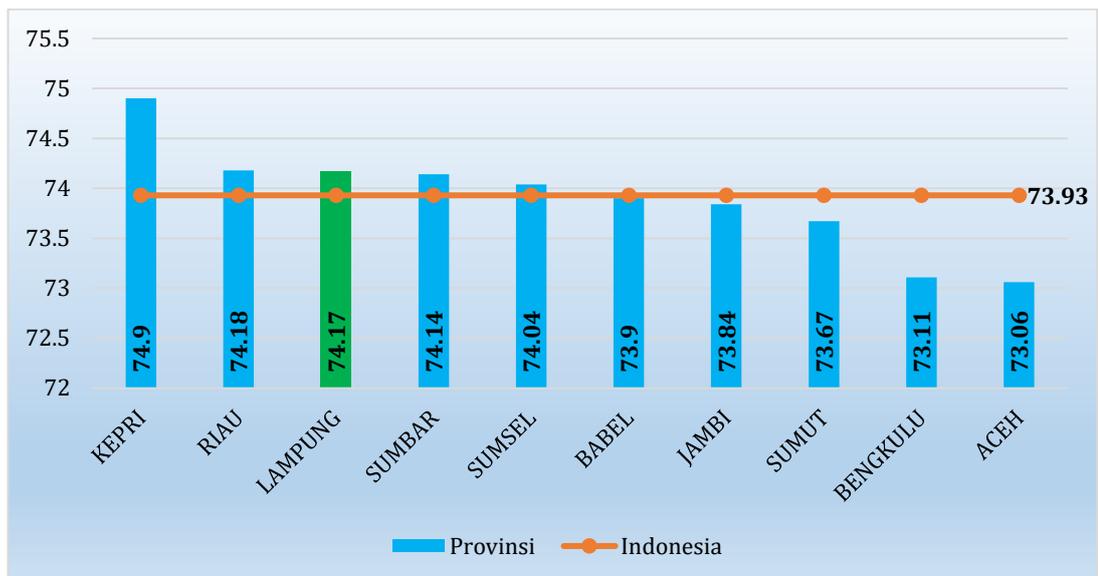
AHH Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, AHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Setelah menggunakan metode perhitungan baru (Metode SP2020), maka AHH Provinsi Lampung Tahun 2020 meningkat dari 70,65 tahun menjadi 73,66 tahun. Dengan menggunakan metode baru ini, maka capaian AHH Provinsi mulai tahun 2020 otomatis berada di atas capaian Nasional. Angka Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung 2023 mencapai 74,17 tahun. Dibandingkan Tahun 2022, AHH Provinsi Lampung meningkat dari 73,95 menjadi 74,17 Tahun atau tumbuh sebesar 0,30 persen.

Grafik 2. 51 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode SP2020) Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2. 72 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023



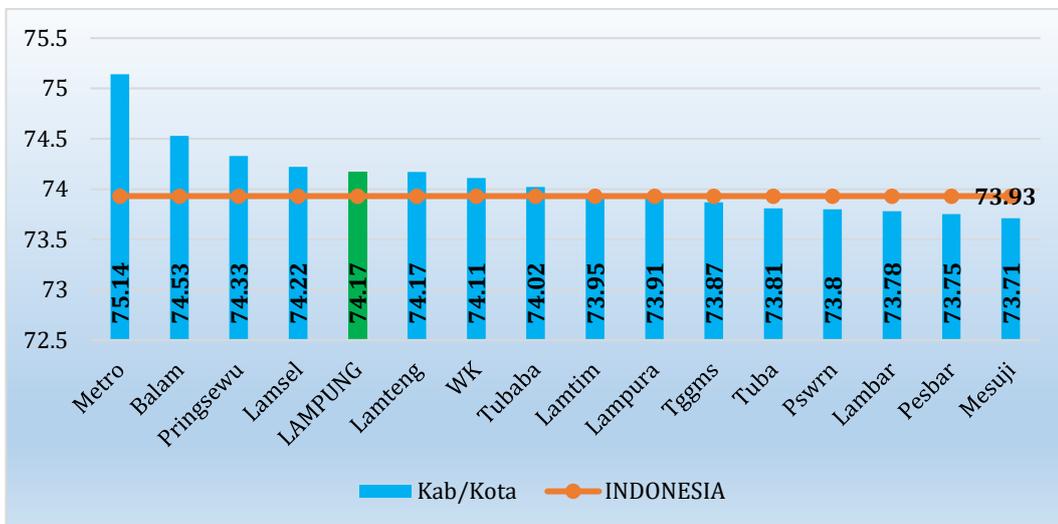
Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera, dan capaiannya berada di atas angka Nasional. Hal ini menandakan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung semakin baik dan meningkat.

Melalui perubahan perhitungan menggunakan metode baru (SP 2020), maka saat ini terdapat 5 (lima) Provinsi di Sumatera yang AHH nya berhasil melampaui angka Nasional.



Grafik 2. 73 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung telah mencapai angka yang tinggi yaitu >73 tahun. Capaian AHH di 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Lampung berada di atas atau sama dengan AHH Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan 10 Kab/Kota lainnya masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung. Walaupun begitu diantara 10 Kabupaten ini, masih terdapat 3 Kabupaten yang capaiannya berada di atas capaian nasional, yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Lampung Timur.

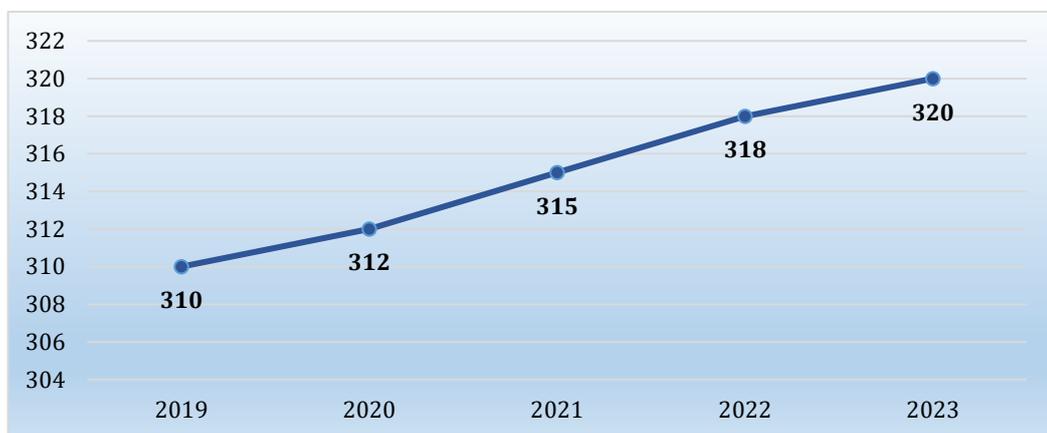
Sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Mesuji (73,71 tahun) dan Pesisir Barat (73,75). Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

#### 2.1.4.2.6 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal.

Jumlah Puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dari 310 unit pada tahun 2019 meningkat menjadi 320 unit pada tahun 2023. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah.

Grafik 2. 74 Trend Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggapi 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Mulai Tahun 2022, Provinsi Lampung mulai mengejar ketertinggalannya, sehingga capaian rasio puskesmas semakin meningkat, bahkan pada tahun 2023, rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung mencapai 1,39 mendekati angka capaian nasional yang telah mencapai 1,4.

Grafik 2. 75 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung

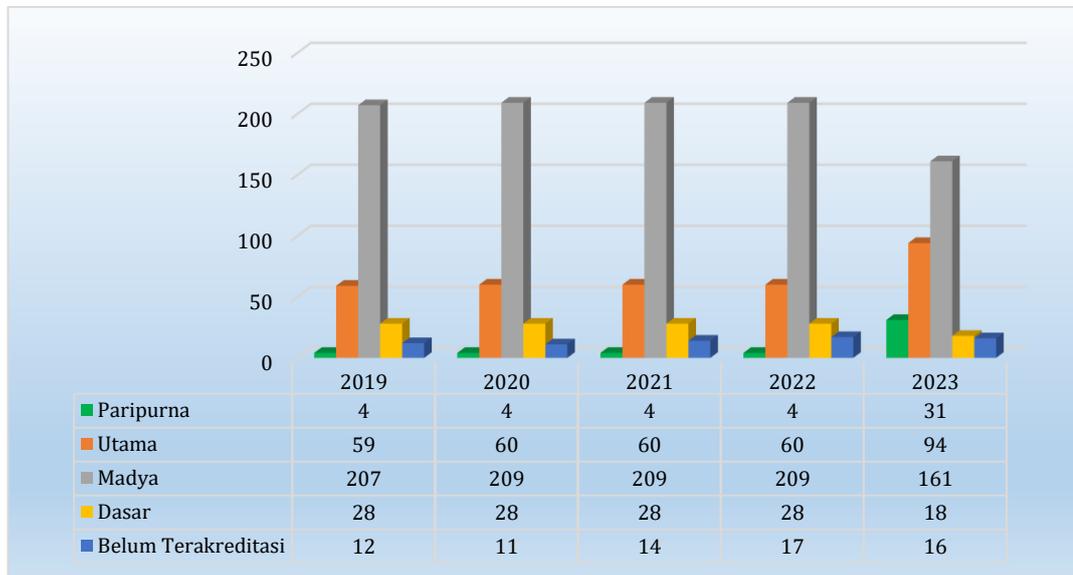


Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Rasio puskesmas adalah gambaran pelayanan kesehatan dasar atau primer. Penguatan layanan kesehatan primer ini juga merupakan kebijakan nasional dimana Kementerian Kesehatan menargetkan agar terjadi peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan dalam upaya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas harus didorong untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan dasar melalui penguatan pada upaya promotif dan preventif, selain tetap memberikan pelayanan kesehatan kuratif kepada masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan primer serta keselamatan pasien, diwujudkan melalui akreditasi Puskesmas. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Dari seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Lampung, hingga saat ini belum semuanya melaksanakan akreditasi Puskesmas. Hingga Tahun 2023, hanya 304 Puskesmas yang telah terakreditasi sedangkan 16 Puskesmas, belum terakreditasi, dengan rincian 31 Puskesmas dengan status Paripurna, 94 Puskesmas dengan status Utama, 161 Puskesmas dengan status Madya dan 18 Puskesmas dengan status Dasar. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas dengan Status Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan Akreditasi Paripurna dan Utama diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer.

Grafik 2. 76 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024, diolah

Pada Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas wajib memiliki 9 tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, ahli gizi, apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian dan ahli teknologi laboratorium medik. Hingga saat ini Provinsi Lampung telah memiliki 37,81% Puskesmas yang telah memiliki minimal 9 tenaga Kesehatan. Capaian ini masih belum mencapai target Tahun 2023 (47%). Untuk itu diharapkan Puskesmas di Provinsi Lampung dapat melengkapi ketersediaan minimal 9 tenaga Kesehatan agar pelayanan di Puskesmas dapat ditingkatkan lagi. Capaian Puskesmas yang telah memiliki minimal 9 tenaga kesehatan di Provinsi Lampung sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 terlihat dari grafik di bawah ini.

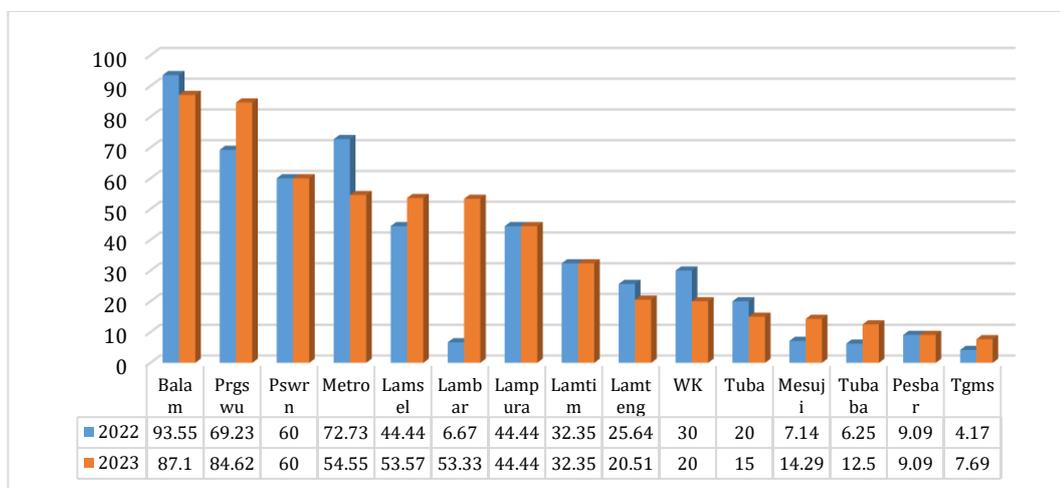
Grafik 2. 77 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024, diolah

Hingga Tahun 2023, Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas dengan minimal 9 tenaga Kesehatan terbanyak berada di Kota Bandar Lampung yang telah mencapai 87,1%, sedangkan paling sedikit berada di Kabupaten Tanggamus dengan capaian 7,69%. Kota Bandar Lampung menerapkan sistem tenaga kontrak untuk pemenuhan 9 tenaga Kesehatan di Puskesmas. Dengan sistem ini pada Tahun 2022, persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung bahkan telah mencapai 93,55%. Capaian indikator ini di tiap Kabupaten/Kota terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 78 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2022-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024, diolah



#### 2.1.4.2.7 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/I/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2019 s.d 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD hanya 15 daerah, pada tahun 2023 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri dan jumlahnya telah mencapai 17 RSUD di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk jumlah RS Swasta, pada tahun 2019 berjumlah 58 sarana, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 60 Rumah Sakit terdiri dari 41 RS Umum dan 19 RS Khusus.

Tabel 2. 54 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung  
Tahun 2019-2023

No.	Parameter	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Rumah Sakit Pemerintah</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
	a RSUD Provinsi	2	2	2	2	1
	b RSUD Kabupaten/Kota	15	15	17	16	17
	c RS. Khusus Provinsi	1	1	1	1	1

No.	Parameter	2019	2020	2021	2022	2023
	d RS. Polri	1	1	1	1	1
	e RS. Tentara	1	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>Rumah Sakit Swasta</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	a RS. Umum	36	36	39	40	41
	b RS. Khusus	22	23	20	20	19

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2023, diolah

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit serta meningkatkan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, maka rumah sakit wajib melaksanakan akreditasi. Dari 81 rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung, sarana yang telah terakreditasi berjumlah 80 sarana, dengan status akreditasi paripurna berjumlah 68 sarana, akreditasi utama berjumlah 12 sarana.

#### 2.1.4.2.8 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

#### 2.1.4.2.9 Rasio Dokter

Capaian rasio dokter di Provinsi Lampung sejak Tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan (15) yaitu 15,38 dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 15,99 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 21,2 pada tahun 2023. Rasio dokter menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan gambaran ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya rasio dokter, akan semakin baik juga pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mengingat peran dokter yang sangat penting dalam menentukan diagnosa dan pengobatan kepada pasien.

Grafik 2. 79 Tren Capaian Ratio Dokter Per satuan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah

#### 2.1.4.2.10 Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Capaian rasio ketersediaan Dokter spesialis di Provinsi Lampung terhadap 100.000 penduduk sejak tahun 2019 telah memenuhi standar target yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu di angka 6 hingga mencapai 9 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Angka ini terus meningkat hingga mencapai angka 14,8 pada Tahun 2023.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan dokter spesialis, maka peningkatan rasio dokter spesialis ini semakin penting. Keberadaan dokter spesialis akan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin spesifik terlebih dengan semakin banyaknya kasus-kasus penyakit yang secara kewenangan harus ditangani oleh dokter spesialis.

Grafik 2. 80 Tren Capaian Rasio Dokter Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019 – 2023



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah

#### 2.1.4.2.11 Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Pada tahun 2019 rasio bidan telah mencapai 103,1 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sebesar 95. Akan tetapi pada Tahun 2023, Rasio Bidan terhadap penduduk menunjukkan penurunan hingga mencapai 99,2, akan tetapi masih berada di atas target yang ditetapkan. Artinya pada tahun 2023 setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 99,2 bidan.

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Dengan semakin meningkatnya rasio bidan akan dapat mencapai target angka kematian ibu, kematian bayi dan kasus stunting. Ketiga indikator tersebut masuk kedalam indikator RPJMD perubahan Provinsi Lampung 2019-2024.

Grafik 2. 81 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah

#### 2.1.4.2.12 Rasio Apoteker Terhadap 100.000 Penduduk

Pada tahun 2019 dan Tahun 2020, rasio Apoteker masih berada di bawah target yang ditetapkan (4,5), yaitu hanya mencapai 2,7 dan 3,73. Akan tetapi sejak tahun 2021 hingga Tahun 2023, capaian rasio Apoteker terhadap 100.000 penduduk telah mencapai 7,6 Apoteker per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,5. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 7,6 Apoteker.

Apoteker berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satunya adalah memberikan konseling kepada pasien

dan masyarakat terkait penggunaan obat yang benar. Konseling oleh apoteker kepada pasien, sangat diperlukan dalam rangka mengubah perilaku pasien..

Grafik 2. 82 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2022, diolah

#### 2.1.4.3 Pertanian

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian dan perumahan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan yang memegang peranan penting bagi Indonesia. Kelapa sawit sebagai komoditas andalan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Produksi kelapa sawit Indonesia sekarang ini memenuhi 60% kebutuhan konsumsi dunia. Diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hingga Tahun 2019 mencapai 14,67 juta hektar termasuk didalamnya perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai terlihat kurang lebih 20 tahun terakhir, dengan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) 42,86 juta ton pada Tahun 2019 (Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2017-2019). Khususnya di Provinsi Lampung perkebunan kelapa sawit, menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, luas areal Perkebunan Rakyat (PR) tanaman kelapa sawit di Provinsi Lampung pada Tahun 2019 tercatat 109.609 hektar dengan nilai ekspor dari hasil olahan kelapa sawit senilai US\$ 863.129.123. Adapun sentra perkebunan kelapa sawit berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji.

Kegiatan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dilakukan antara lain :

1. Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, dana bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan.
2. Kegiatan Rintisan Penertiban STDB Perkebunan Sawit, dana bersumber dari Tugas Pembantuan Provinsi Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: 163/SR.140/M/11 Tanggal 05 November 2020 hal Pengembangan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani, Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 03/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor : 01/M/KH.07.01/1/2020 dan Surat Gubernur Lampung Kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 520/4082/04/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung.

Usulan lokasi Kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Usulan Lokasi Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Lampung

No	Nama Kawasan	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)	Komoditi Utama	Komoditi Terintegrasi	Dukungan
1.	Mesuji	- Mesuji Timur (KTM) - Rawa Jitu Utara - Mesuji	28.988	Padi	- Mina Padi - Holtikultura - Ternak Sapi - Perikanan	Sebagai Kawasan KTM akan disinergikan dengan KTM

No	Nama Kawasan	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)	Komoditi Utama	Komoditi Terintegrasi	Dukungan
2	Way Kanan	- Balambangan Umpu (KTM) - Bahuga - Buay Bahuga - Bumi Agung - Way Tuba	7.570	Padi	- Perkebunan (sawit, Karet) - Hortikultura - Peternakan (Sapi)	- Sebagai Kawasan KTM akan disinergikan dengan KTM - Akan diintegrasikan dengan kegiatan bantuan irigasi dan alsintan melalui kerjasama dengan korea

Pengembangan Kawasan Food Estate tersebut direncanakan akan bersinergi dengan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri sebagai Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga diharapkan dapat berkembang lebih cepat. Bappeda Provinsi Lampung diminta untuk melakukan pemetaan dan integrasi program kegiatan yang mendukung pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung.

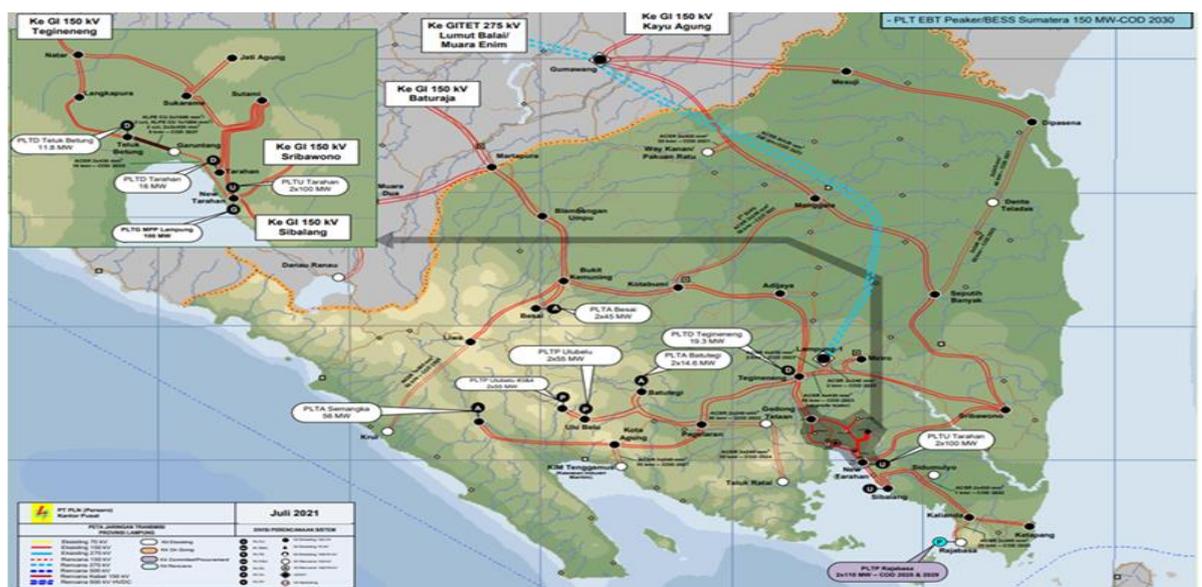
#### 2.1.4.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi penyediaan energi di Indonesia khususnya Provinsi Lampung saat ini masih didominasi oleh energi fosil, terutama Minyak bumi dan batu bara. Hal tersebut dikarenakan energi pembangkit listrik didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Tenaga Uap (PLTU) batu bara, selain batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar industri. Hal tersebut menjadikan batu bara merupakan pangsa penyediaan energi primer kedua setelah minyak bumi. Pengurangan energi pembangkit listrik fosil dalam draf RUPTL 2021-2030 sejalan dengan upaya mendorong masifnya peningkatan pembangkit listrik EBT yang ditargetkan baurannya mencapai 23 pada 2025, meskipun hingga 2020 capaian secara nasional baru sebesar 11,51% dari

target sebesar 13,4% (Kementerian ESDM, 2020). Target tersebut selanjutnya akan dicapai melalui tiga jalur, yakni listrik, pemanfaatan bahan bakar berbasis non-energi fosil atau biofuel, dan pemanfaatan langsung EBT. Dari sisi biofuel, pemanfaatan biofuel telah menjadi tertinggi di dunia karena pemanfaatan biodiesel di Indonesia sudah mencapai 30% atau B30. Dari sisi kelistrikan berbasis EBT, dalam lima tahun ke depan kapasitas pembangkit listrik ditargetkan bertambah 2.000-3.000 mega watt (MW) pertahun untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025.

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2022 mencapai sekitar konsumsi 5,37 Twh. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,99 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,94 persen, namun demikian pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar  $\pm 9$  % per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1211,1 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 1429,2 MW sehingga Provinsi Lampung tidak mengalami kekurangan jumlah pasokan listrik, karena ketersediaannya sampai dengan saat ini masih aman masih surplus 15,3 persen dari total daya mampu atau setara dengan 218,1 MW.

Gambar 2. 30 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung



Sumber Peta : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN

Namun demikian Ketersediaan energi listrik di Provinsi Lampung tersebut masih dibantu oleh jaringan trans interkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksi energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

Tabel 2. 56 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
<b>PLN</b>					
PLTA	Sumatera	4	118,6	117,6	118,0
PLTD	Sumatera	8	59,3	26,9	37,7
PLTG	Sumatera	1	21,4	14,8	15,0
PLTP	Sumatera	2	110,0	103,8	99,5
PLTD	Sumatera	4	400,9	290,0	309,4
	Pulau Sebesi	5	0,5	0,4	0,4
<b>Jumlah PLN</b>		<b>24</b>	<b>710,7</b>	<b>553,5</b>	<b>580,0</b>
<b>IPP</b>					
PLTA	Sumatera	2	55,0	55,0	57,3
PLTP	Sumatera	2	90,9	90,9	101,7
PLTU	Sumatera	3	24,0	24,0	21,3
<b>Jumlah IPP</b>		<b>7</b>	<b>169,9</b>	<b>169,9</b>	<b>180,3</b>
<b>SEWA</b>					
PLTG	Sumatera	4	112,9	112,9	112,1
PLTMG	Sumatera	2	54,0	54,0	55,8
Jumlah SEWA		6	166,9	166,9	167,9
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>1047,5</b>	<b>890,3</b>	<b>928,2</b>

Sumber : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang. Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 atau meningkat sekitar 5,2% per tahun dengan tiga sektor energi final tertinggi dari sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Pada tahun 2015 bauran EBT Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu kurang dari 11% dan setelah dilakukan skenario RUED ini maka bauran EBT diproyeksikan akan meningkat menjadi 36% pada Tahun 2025 dan pada tahun 2050 sebesar 47%. Sedangkan capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2021 baru sebesar 29,88%. Untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan

penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), selain itu juga pemanfaatan tenaga air, Biogas, Biomass.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran, maka dikembangkan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). Total kapasitas terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 sebesar 395 Kwp.

Gambar 2. 31 Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 – 2022



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PLTS ROOFTOP	
PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
NAMA GEDUNG/KANTOR MILIK PROV. LAMPUNG	KAPASITAS DAYA
BAPPEDA	50 KWp
DINAS ESDM	30 KWp
GEDUNG HAEMODIALISA RSUD ABDUL MULIK	50 KWp
PEMBANGUNAN TAHUN 2021	
GEDUNG PAVILION BETIK HATI RSUD ABDUL MULIK	100 KWp
DINAS BMBK	50 KWp
DINAS PM&PTSP	30 KWp
SEKRETARIAT DPRD PROV. LAMPUNG	30 KWp
GEDUNG BPKAD SEKRETARIAT PROV. LAMPUNG	30 KWp
PEMBANGUNAN TAHUN 2022	
GEDUNG KOMINFOTIK PROV. LAMPUNG	25 KWp
<b>TOTAL KAPASITAS DAYA PLTS ROOF TOP PADA</b>	<b>395 KWp</b>
<b>GEDUNG KANTOR MILIK PROV. LAMPUNG</b>	<b>JUMLAH (UNIT)</b>
<b>KABUPATEN</b>	
LAMPUNG BARAT	723
LAMPUNG SELATAN	95
PESAWARAN	200
PESISIR BARAT	367
TANGGAMUS	1655
TULANG BAWANG	1232
<b>JUMLAH</b>	<b>4272</b>

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan instalasi biogas tidak kurang dari 1.184 unit kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 57 Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung

Kapasitas Biogas Rumah Tangga		Jumlah Unit	m3/tahun	
Lokasi		Ukuran Digester (m3)	Produksi Biogas (m3/hari)	
1	Desa/Kec/Kab/Kota Metro	77	149	3.441,90
2	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Barat	29	17	147,9
3	Desa/Kec/Kab/Kota Pesawaran	36	27	291,6
4	Desa/Kec/Kab/Kota Tanggamus	33	27	267,3
5	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Selatan	86	134	3.457,20
6	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Timur	51	269	4.115,70
7	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Tengah	89	316	8.437,20
8	Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Utara	3	11	9,9
9	Desa/Kec/Kab/Kota Way Kanan	3	11	9,9
10	Desa/Kec/Kab/Kota Pringsewu	19	76	433,2
11	Desa/Kec/Kab/Kota Pesisir Barat	12	50	180
12	Desa/Kec/Kab/Kota Mesuji	3	11	9,9
13	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang	9	11	29,7
14	Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang Barat	29	75	652,5
<b>Total Konsumsi (m3/tahun)</b>			<b>1184</b>	<b>7.841.623,50</b>

Sumber : Dinas ESDM 2021

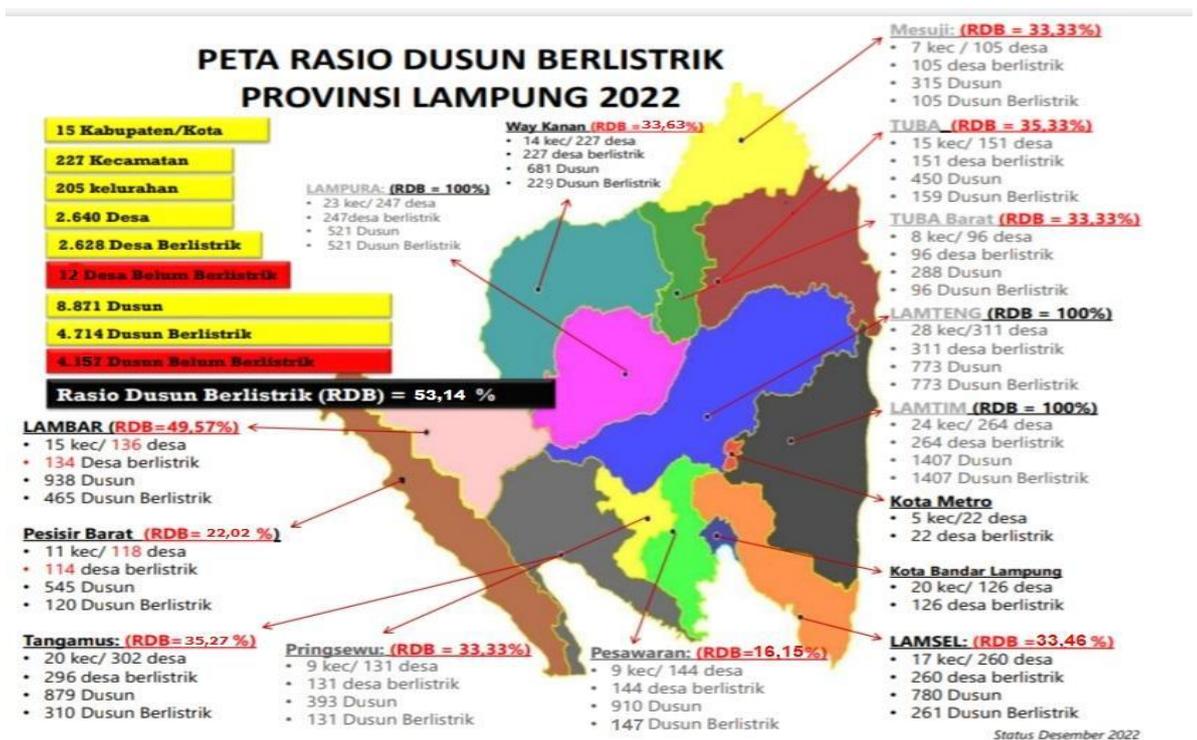
Capaian rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2022 telah mencapai 99,99% dari target 97%. Dari data terlihat bahwa capaian kinerja telah mencapai 103,08%. Sedangkan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,54%, dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.628 desa dari total desa yang ada di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.640 desa. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam menaikkan capaian persentase desa teraliri listrik tersebut.

Tabel 2. 99 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2022

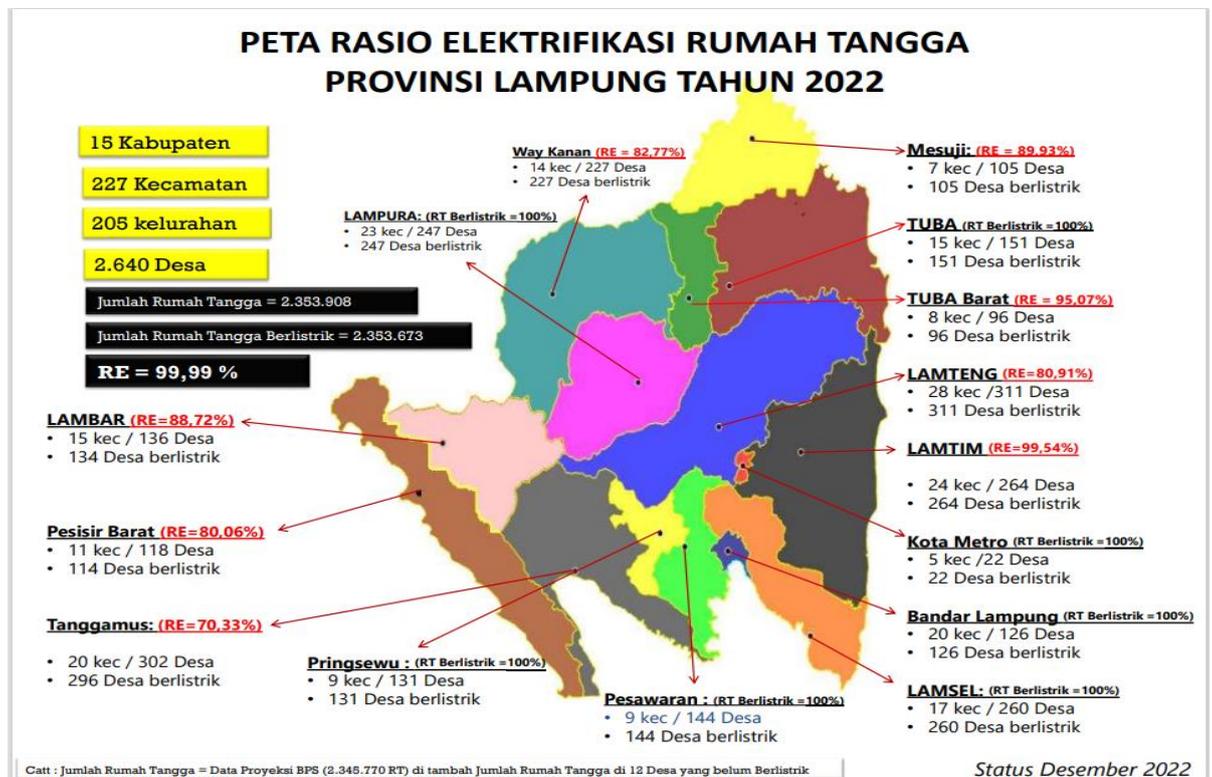
No	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	99,94	97,00	99,99	103	99,00	101
2.	Persentase Dusun Berlistrik	99,47	100	53.14	100,26	55	96.62

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2023

Gambar 2. 32 Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022



Gambar 2. 33 Peta Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2022



Dalam rangka upaya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil telah dilakukan:

- Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA
- Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV.
- Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasista 18 Kilowatt peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran

#### 2.1.4.5 Pariwisata

Di tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 5.507.000 orang per tahun dan realisasinya sebesar 260,53% atau sebanyak 14.347.536 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2022, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini di tahun 2023 mencapai 300,8%. Peningkatan ini dipastikan akibat kondisi yang sudah kembali normal pasca pandemic covid-19.

Secara nasional, dari Januari hingga Oktober tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,048 juta kunjungan naik 183,91 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini terjadi akibat mulai longgarnya pembatasan perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia akibat semakin menurunnya pandemic Covid-19. Semakin menurunnya dampak pandemic ini tidak hanya berpengaruh pada wisatawan mancanegara saja, tapi juga pada pergerakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung realisasi di tahun 2023 sudah mencapai target yaitu selama 3,11 hari dari target 2,88 hari. Dan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 0,82 hari. Begitu juga dengan rata-rata pengeluaran wisatawan, terjadi peningkatan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 dengan selisih capaian sebesar Rp. 137.250,-. Untuk capaian di tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 137.87% dari target di tahun 2023.

Tabel 2. 58 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Sektor Pariwisata

Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Jumlah kunjungan wisatawan	4.604.548 orang	5.507.000 orang	14.347.536 orang	260,53	15.000.000 orang	9.742.988 orang
Rata-rata lama tinggal wisatawan	2.29 hari	2.63 hari	3.11 hari	118,25	2,88 hari	0,83 hari

Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp. 965.750,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.103.000,-	122,56	Rp. 900.000,-	Rp. 137,250,-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov Lampung, 2024

Berdasarkan data dari jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dan menurun cukup drastis pada tahun 2020 karena pandemic Covid-19. Selisih jumlah wisatawan mancanegara dalam periode 6 tahun yang berkunjung ke Provinsi Lampung adalah sebesar 193.636 orang wisatawan. Sedangkan untuk selisih jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2018 sampai 2023 adalah sebesar 2.333.223 orang.

Tabel 2. 59 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2018 – 2023

No.	TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
		NUSANTARA	MANCANEGERA	
1.	2018	11.933.207	274.742	14.207.949
2.	2019	10.445.855	298.063	10.743.918
3.	2020	2.911.406	1.647	2.913.053
4.	2021	2.937.395	1.757	2.939.152
5.	2022	4.597.534	7.014	4.604.548
6.	2023	14.266.430	81.106	14.347.536

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2024

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk menarik wisatawan yang berkunjung tetap dilakukan di tahun 2023 dengan membangun Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Integrated Tourism Complex*, dimana beberapa *specific-magnet* yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata.

Sejak tahun 2021 sampai 2023, banyak progress yang telah dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata Bakauheni Harbour City sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

2. Pembahasan final masterplan dan feasibility Study (FS) Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
3. Lahan yang belum dikuasai pada Vision Masterplan, saat ini sudah dikuasai oleh PT. GKI. PT. GKI sudah menyatakan bersedia masuk dalam konsorsium Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
4. Telah dilaksanakan *Grand Breaking* Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN dan Gubernur Lampung. *Grand Breaking* meliputi Pembangunan Masjid BSI, Revisi Menara Siger, Pembangunan UMKM Menara Center, Creatif Hub dan *Housing Development Entrepreneur Center* (HDEC).
5. Telah selesai Pembangunan Siger Park Tahap I, Masjid BSI, Selasar Siger, Siger Market, dan Taman Rekreasi Krakatau Park. Untuk selanjutnya telah dilakukan tahap perencanaan untuk pembangunan Siger Sport, Amphiteather, dan Museum Siger.

Namun demikian, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang diukur oleh Kemenparekraf/Baparekraf menunjukkan Lampung masih pada posisi 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya-upaya optimalisasi dan langkah kongkrit dalam meningkatkan capaian Indeks *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) terutama pada 5 pilar pembangunan pariwisata, yaitu : *enabling environment, travel and tourism policy condition, infrastructure, travel and tourism demand drivers dan travel and tourism sustainability*.

#### **2.1.4.6 Kelautan dan Perikanan**

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Lampung lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 60 Perkembangan Produksi Perikanan 2018-2023

NO.	Jenis Perikanan	TAHUN (TON)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 *
1.	Perikanan Budidaya	160.582	181.129	182.259	181.220	191.120	154.465
2.	Perikanan Tangkap	141.537	157.209	142.974	142.650	158.122	188.721
	<b>Total Produksi</b>	302.119	338.338	325.233	323.870	349.242	343.186

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2023

### Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung sangat menjanjikan, yaitu sebesar 388.000 ton/tahun yang tersebar di wilayah pantai timur (Laut Jawa) sebesar 21.124 ton/tahun, Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Selat Sunda) sebesar 88.958 ton/tahun dan Wilayah Pantai Barat sebesar 277.918 ton/tahun.

Tabel 2. 61 Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung 2018

Wilayah Perairan Laut	Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)		
	Pantai	Lepas Pantai dan ZEE	Total Kelimpahan
Wilayah Pantai Timur (Laut Jawa)	11.082	10.042	21.124
Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Selat Sunda)	49.918	39.040	88.958
Wilayah Pantai Barat	154.000	123.918	277.918
Jumlah	215.000	173.000	388.000
Presentase (%)	55,41	44,59	100,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

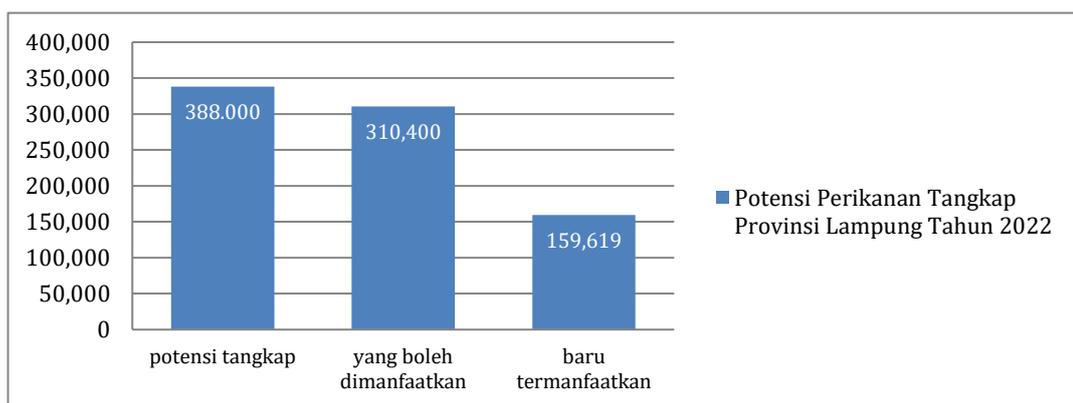
Dengan sumberdaya perikanan tangkap sebesar itu, Provinsi Lampung memiliki beberapa jenis sumberdaya yang dapat menjadi komoditas andalan antara lain ikan demersal, ikan pelagis, tuna dan cakalang, udang, ikan karang dan rajungan. Tuna dan rajungan merupakan komoditas perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekspor.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Lampung sebesar 388.000 ton/tahun, jumlah tangkapan diperbolehkan berdasarkan FAO 80 % dari potensi sehingga yang boleh dimanfaatkan sebesar 310.400 ton/tahun. Dari jumlah tersebut yang baru dimanfaatkan sebesar 188.721 ton pada tahun

2023. Belum termanfaatkannya potensi perikanan tangkap dikarenakan antara lain :

1. SDM Nelayan di provinsi Lampung masih melakukan penangkapan secara tradisional, menggunakan armada-armada kecil dimana 9.702 kapal perikanan yang ada dilampung merupakan kapal ukuran <10 GT dan melakukan penangkapan hanya satu malam dalam sekali trip (*One Day Fishing*). Ini dikarenakan ketidakmampuan SDM Nelayan di provinsi Lampung dalam alih armada penangkapan yang lebih besar, karena keterbatasan permodalan dan penggunaan Alat Penangkap Ikan (API).
2. Pendataan Produksi yang kurang optimal karena banyak nelayan perikanan tangkap yang tidak mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan atau tidak melaporkan produksi hasil tangkapannya sehingga data produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Tidak mendaratkannya nelayan ke pelabuhan perikanan karena hasil tangkapan harus dijual ke juragan/Pembina nelayan.
3. Penggunaan API yang tidak ramah lingkungan baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang mengakibatkan terjadinya overfishing di perairan pesisir timur provinsi Lampung dan rusaknya perairan provinsi Lampung yang akan mengakibatkan susah nya kegiatan penangkapan.
4. Kegiatan andon perikanan tangkap yang tidak dilaporkan ke instansi terkait juga mempengaruhi produksi perikanan tangkap, karena nelayan andon akan mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan asal mereka.

Grafik 2. 83 Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022

Dari grafik pemanfaatan perikanan tangkap masih banyak peluang yang yang belum termanfaatkan kurang dari setengah yang diperbolehkan untuk

dimanfaatkan oleh FAO. Berikut ini Capaian perikanan tangkap seperti tergambar pada matrik berikut ini :

Tabel 2. 62 Matrik Produksi Perikanan Tangkap

No.	Tahun	Produksi (ton)
1.	2019	157.209
2.	2020	142.974
3.	2021	142.650
4.	2022	158.122
5.	2023	188.721

Matrik diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan Tangkap belum mencapai target yang diinginkan hal ini akan berdampak pada pendapatan baik pada nelayan maupun pada pendapatan PDRB Provinsi Lampung, perlu ada sebuah terobosan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap mengingat potensi perikanan tangkap yang begitu besar.

### **Perikanan Budidaya**

Pengembangan perikanan budidaya menjadi alternatif yang penting untuk mengantisipasi tingkat permintaan sumber daya ikan yang akan meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Lampung antara lain Lele, Nila, Mas, Patin, Gurame (budidaya ikan air tawar); Kerapu bebek, kerpau macan, kerang hijau, rumput laut (budidaya laut); udang windu, udang vanname, bandeng, mujair, nila, rumput laut (budidaya air payau). Komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekspor antara lain Udang dan Rumput Laut. Negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas perikanan Provinsi Lampung ini antara lain USA, Japan, China, Belanda, United Kingdom.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2038 Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memanfaatkan wilayah perairan laut sepanjang 0-12 mill dari bibir pantai menjadi 4 kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. (sudah terintegrasi dalam RTRW).

## Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi perairan (KKP) yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu KKP Teluk Kiluan, Tanggamus, KKP Way Kambas, Lampung Timur, KKP Pulau Batang dan Pulau Segama, Lampung Timur dan KKP Ngambur, Pesisir Barat dengan luas total 152.096 Ha di tahun 2023, dan masih ada  $\pm$  16.601,83 Ha yang sudah dicadangkan untuk ditetapkan. (Sebagaimana Amanat RZWP3K Provinsi Lampung).

## Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan perikanan di provinsi Lampung sebagian besar telah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Koperasi Perikanan. Pembentukan KUB dan Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan, yaitu dengan cara pemupukan modal bersama.

SDM Nelayan di Provinsi Lampung masih menggunakan armada kecil berupa kapal dengan ukuran <10 GT dikarena nelayan masih melakukan penangkapan secara tradisional dan *One Day Fishing* serta kurangnya pemahaman nelayan akan teknologi penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim yang akan mengakibatkan berkurangnya produksi perikanan tangkap pada musim tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menjaga pendapatan keluarga nelayan pada musim-musim paceklik dan cuaca ekstrim dilakukan pelatihan diversifikasi usaha, yang melibatkan keluarga nelayan terutama istri dan anak perempuan nelayan.

Pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi menyiapkan asuransi khusus nelayan, yang akan melindungi nelayan dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan jaminan hari tua bagi nelayan. Peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan juga dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan supaya memperoleh pendidikan yang tinggi dan dapat melakukan usaha perikanan tangkap yang lebih baik daripada orang tuanya.

## Produksi Garam

Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai mencapai 400 Km<sup>2</sup>, yang bisa dikembangkan untuk berbagai kegiatan perikanan, salah satunya yaitu tambak garam. Usaha tambak garam sudah dimulai di beberapa lokasi antara lain Pulau Legundi dan Desa Sidodadi, Pesawaran serta Pulau Rimau, Ketapang, Lampung Selatan. Total produksi garam Provinsi Lampung tahun 2023 mencapai 106,68 ton. Pemerintah Provinsi Lampung kini melakukan pemberdayaan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Garam di 4 Kabupaten yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Pesawaran dengan fokus peningkatan nilai ekonomis/nilai jual garam.

## Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut

Terdapat 3 (tiga) fokus utama dalam hal perencanaan pengelolaan laut di Provinsi Lampung, yang adalah :

1. Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut sesuai UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
2. Memiliki kepastian hukum Investasi
3. Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.

Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi laut di Provinsi Lampung menghadapi beberapa tantangan dan kendala antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas nelayan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut di atas 12 mil / perairan samudera.
2. Masih adanya tindak IUU fishing yang terjadi di perairan Provinsi Lampung yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Keterbatasan SDM dan sarana untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan diseluruh provinsi.
3. Dinamika perubahan kebijakan penggunaan alat tangkap dan perizinan dari pusat menjadi tantangan saat pelaksanaan di daerah. Berdasarkan UU Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan ruang laut 0 s.d. 12 mil berada di provinsi, namun perizinan dan potensi PNBPN diambil alih oleh KKP.

## Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Dalam pelaksanaannya, pengawasan SDKP menekankan pada tindakan preventif (pembinaan, sosialisasi, koordinasi), kolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait, dan penegakan hukum. Tugas tersebut dilaksanakan oleh petugas pengawas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan dibantu oleh kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota, yaitu :

- Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, 10 Orang
- PPNS, 13 Orang
- Polsus, 3 Orang
- Pokmaswas Aktif, 100 Kelompok

Pelaksanaan pengawasan didukung dengan sarana operasional pengawasan yang terbatas. Jumlah kapal pengawas yang aktif dan dioperasikan berupa 1 (satu) unit *Speedboat sea rider*.

### 2.1.4.7 Lingkungan Hidup

#### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Walaupun konsepsi indeks termasuk IKLH memiliki sifat *komparatif* yang berarti posisi satu kabupaten relatif terhadap kabupaten lainnya namun semangat IKLH bukan untuk mendapatkan peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan dari kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikannya titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, semakin harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Selain itu dapat juga mengacu pada angka nasional, yang apabila berada dibawahnya berarti masuk dalam kategori upayanya harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya berada dalam kategori pemeliharaan. Idealnya IKLH Provinsi merupakan gabungan dari IKLH masing-masing kabupaten/kota namun karena tidak tersedianya data masing-masing komponen IKLH pada setiap kabupaten/kota maka IKLH Provinsi Lampung belum dapat menggambarkan IKLH kabupaten/kota.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. berikut merupakan tabel capaian target IKLH Provinsi Lampung tahun 2021-2022

Tabel 2. 63 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021-2022

		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
		Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		68,23	68,56	68,66	69,10	69,09	69,51
1	Kabupaten Lampung Barat	64,74	65,99	65,36	68,31	65,99	66,61
2	Kabupaten Lampung Selatan	60,89	63,67	61,41	61,99	61,93	62,45
3	Kabupaten Lampung Tengah	61,83	60,47	62,41	57,63	63,00	63,58
4	Kabupaten Lampung Timur	62,97	65,04	63,38	64,16	63,79	64,19
5	Kabupaten Lampung Utara	63,19	62,38	63,88	62,38	64,58	65,28
6	Kabupaten Mesuji	61,20	63,44	61,72	65,09	62,24	62,67
7	Kabupaten Pesawaran	61,83	65,39	62,48	64,21	63,13	63,77
8	Kabupaten Pesisir Barat	73,21	71,56	73,54	71,06	73,87	74,20
9	Kabupaten Pringsewu	62,16	63,83	62,71	59,33	63,26	63,80
10	Kabupaten Tanggamus	64,27	63,42	64,92	62,06	65,56	66,21
11	Kabupaten Tulang Bawang	62,01	63,09	62,64	61,64	63,27	63,91
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	63,27	62,23	63,87	60,64	64,48	65,09
13	Kabupaten Way Kanan	67,22	56,50	67,83	68,22	68,43	69,04
14	Kota Bandar Lampung	60,94	62,98	61,39	58,86	61,84	62,28
15	Kota Metro	60,45	55,62	60,65	57,87	60,84	61,04



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Esensi dari IKLH Provinsi Lampung 2022 yang dilihat berdasarkan pada 4 (Empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data IKLH Tahun 2022 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>). Pemerintah Provinsi akan memverifikasi data yang disampaikan oleh kabupaten dan kota, apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan data provinsi diverifikasi oleh pemerintah pusat.

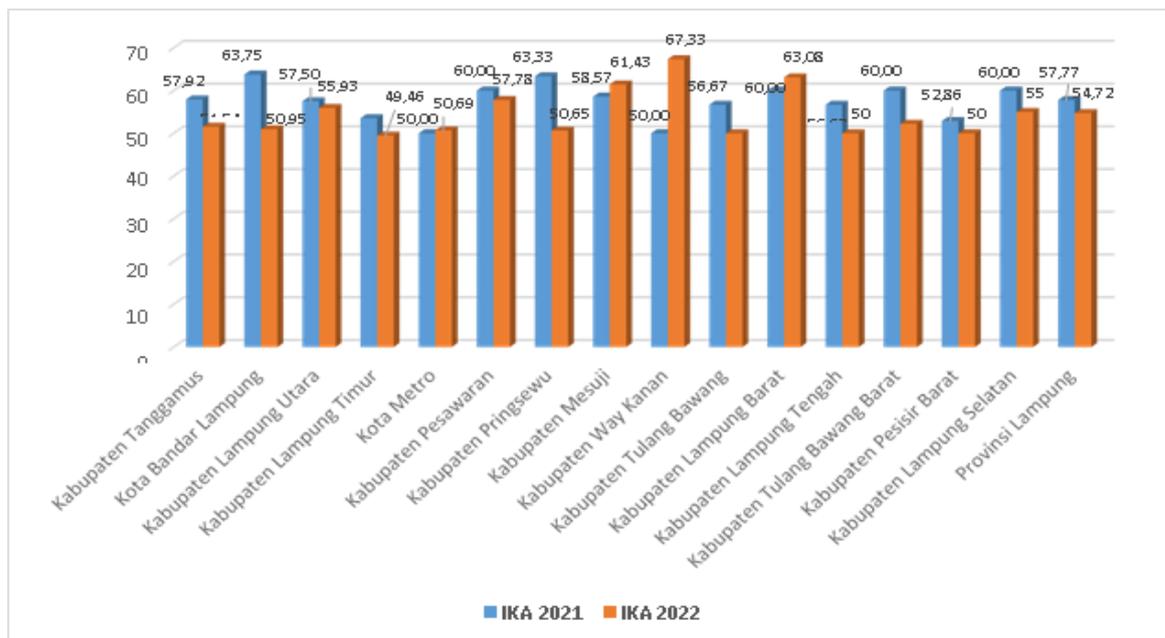
### Indeks Kualitas Air (IKA)

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>), dengan pemantauan sungai yang tersebar di Provinsi Lampung. Pemerintah pusat memverifikasi data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi memverifikasi data

yang disampaikan oleh kabupaten/kota, apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah Provinsi Lampung berjumlah 373 data pemantauan (17 titik sampel level Pusat 3 kali pemantauan; 21 titik sampel level Provinsi 2 kali pemantauan; dan sisanya 280 data pemantauan level Kabupaten/kota yang tersebar pada masing wilayah sungai di Provinsi Lampung.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 54,72 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu (90 data pemantauan); tercemar ringan (281 data pemantauan); dan tercemar sedang (2 data pemantauan).

Grafik 2. 84 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022

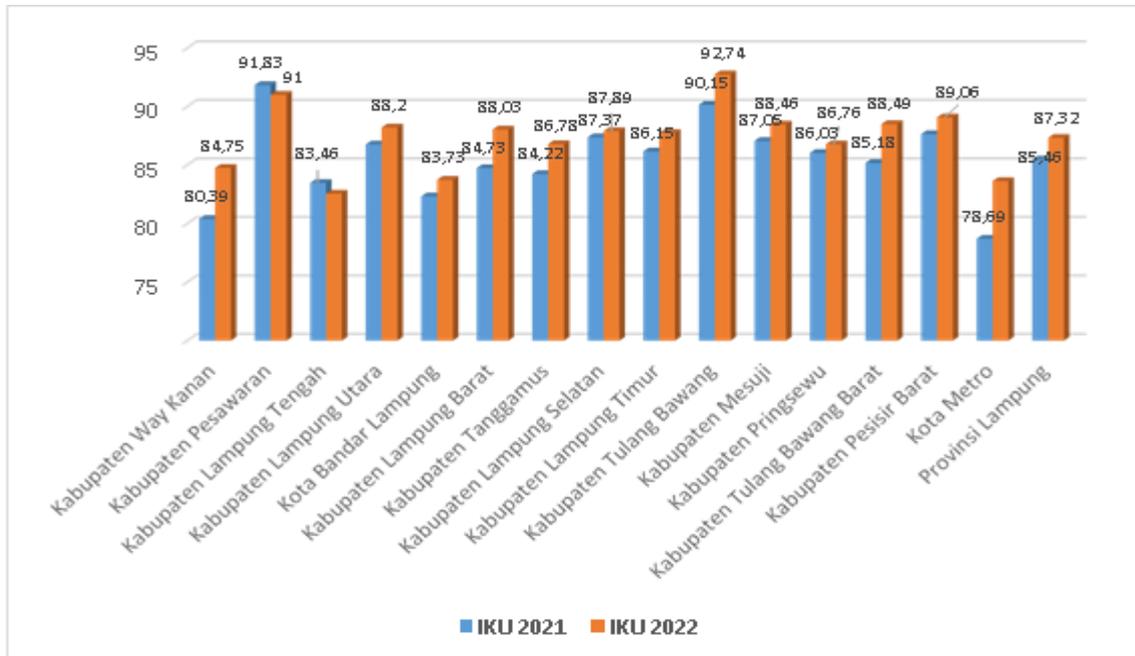


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas air Provinsi Lampung selama periode 2021-2022 terdapat 4 kabupaten/kota mengalami kenaikan diantaranya Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat. 11 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian lebih terhadap upaya perbaikan kualitas air melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan persampahan.

## Indeks Kualitas Udara (IKU)

Grafik 2. 85 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas udara Provinsi Lampung selama periode 2021-2022 terdapat 2 kabupaten mengalami penurunan diantaranya Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. 13 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas udara melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

## Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 31,58 menjadi 31,89. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kerusakan tutupan hutan walaupun tidak terlalu besar kenaikan indeksnya. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan penanaman yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

### **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Provinsi Lampung sudah menerapkan penilaian PROPER untuk 86 perusahaan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Ada 4 (empat) perusahaan yang mendapatkan predikat PROPER HIJAU, 77 mendapatkan predikat PROPER BIRU, serta 5 (lima) perusahaan mendapatkan predikat PROPER MERAH.

Perusahaan yang dinilai bergerak di sektor Agro industry (Agro), manufaktur prasarana dan jasa (MPJ), serta pertambangan energi dan migas (PEM). Penilaian tersebut sudah memperhitungkan komponen limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat ini program PROPER terus dikembangkan untuk perusahaan lain yang belum tergabung, mengingat belum semua perusahaan memiliki peralatan pengelolaan limbah seperti yang dipersyaratkan.

#### **2.1.4.8 Kebencanaan**

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pada tahun 2022 terdapat 70 potensi konflik yang terpetakan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsohubud sebanyak 9 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 55 kasus, dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari 70 potensi konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya:

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik.
3. Tersedianya buku pemetaan dan penanganan daerah rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, serta dapat menjadi pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Kondisi demokrasi di Provinsi Lampung juga cukup baik. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara.

Tabel 2. 64 Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah DPT	Prosentase
1	Lampung Selatan	457.537	704.367	64,96%
2	Lampung Tengah	654.189	922.398	70,92%
3	Lampung Timur	528.942	770.477	68,65%
4	Pesisir Barat	90.097	107.150	84,08%
5	Way Kanan	241.609	323.068	74,79%
6	Pesawaran	239.366	318.793	75,09%
7	Bandar Lampung	447.445	649.790	68,86%
8	Metro	98.857	115.844	85,34%
<b>Rata-rata partisipasi</b>				<b>74,09%</b>

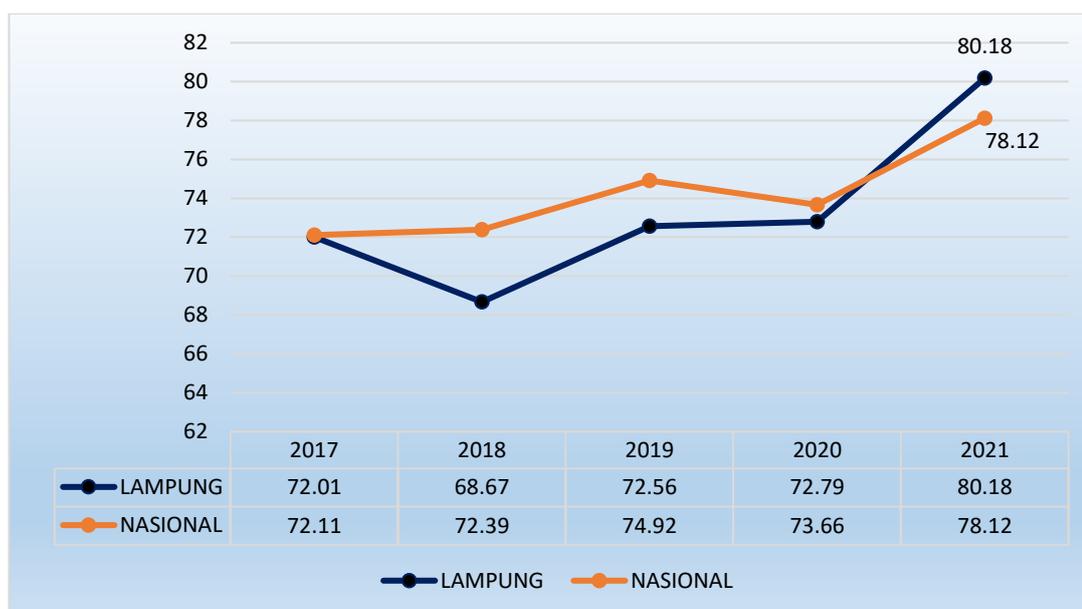
Sumber : Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat khususnya pemilih pemula sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di lihat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2021 (data termutakhir) adalah 80,18. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Sedangkan di Sumatera, IDI Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai peringkat ke 2 tertinggi se-Sumatera, setelah Provinsi Aceh. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

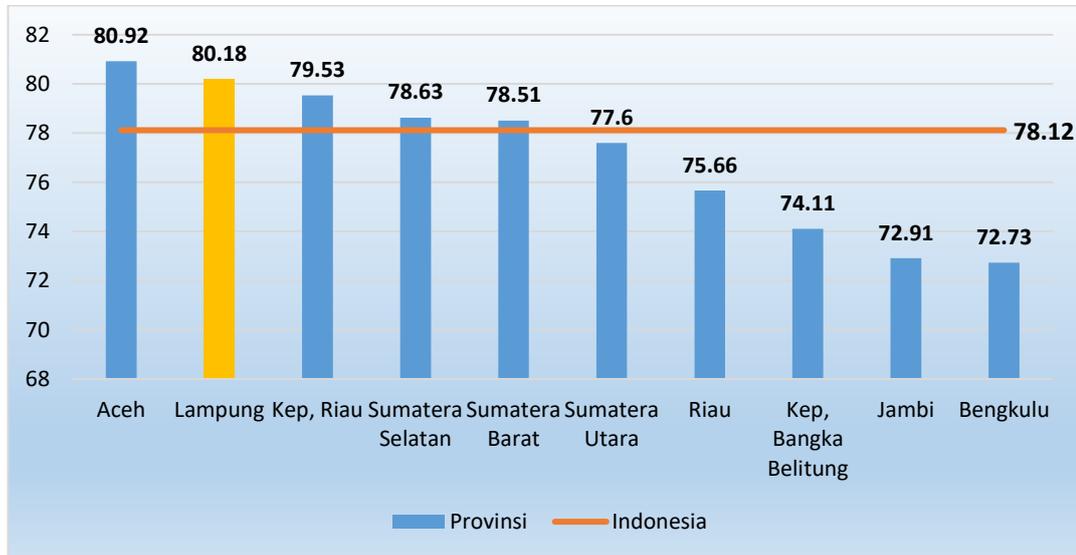
Grafik 2. 86 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 (data termutakhir)



Sumber: BPS RI, 2018-2021, diolah



Grafik 2. 87 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera  
Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

#### 2.1.4.9 Perindustrian dan Perdagangan

Faktor-faktor yang mendorong dan upaya peningkatan kinerja sector perindustrian di Provinsi Lampung antara lain:

1. Sektor Industri di Provinsi Lampung sangat di pengaruhi oleh Industri Pertanian seperti Gula (7 pabrik), Nenas (GGPC), CPO, Pakan ternak (jagung) dan Udang.
2. Meningkatkan produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Lampung.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terus mendorong kegiatan produksi, sehingga terus berkembang ke luar negeri dan mendapat keuntungan lebih.
4. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain; masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan

teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk; kemudian belum tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku penyedia dengan dunia industri selaku user, hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah; serta masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah.

Tabel 2. 65 Capaian kinerja Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN														NASIONAL	
			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2023			
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	8.24	-	-	-	5	4.57	91.4	5.8	0.47	8.1	6	1.4	23.33	6.3	22.222	4,64
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	8.26	-	-	-	5.3	8.26	100	6.3	15.35	243.7	6.8	9.76	143.5	7.2	135.56	4,85
3	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	2.13	-	-	-	3.33	4.83	100	3.48	5.61	161.2	3.65	4.65	127.4	3.8	122.37	258,82
4	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0.3	-	-	-	≤1,5	1.1	100	≤1,5	0.91	100	≤1,5	2,74	82,66	≤2	37	1,60

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

#### 2.1.4.10 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan infrastruktur tidak terlepas terhadap tinjauan dan arahan Perda RTRW 2019-2029, yang memuat tentang arahan Pola Ruang, Struktur Ruang dan Arahan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung, sebagai berikut :

##### 2.1.4.12.1 Struktur Ruang

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah provinsi. Pengembangan pusat - pusat kegiatan diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.

## **9. Pola Ruang**

Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di wilayah Lampung yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Provinsi Lampung yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut :

- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Pengelolaan kawasan-kawasan tersebut harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatannya. Untuk menuju perkembangan wilayah yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penetapan kawasan lindung, selanjutnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.

## **10. Infrastruktur Jalan**

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan

konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relatif terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2022-2023 adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. 66 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2023

Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi
Kemantapan Jalan Provinsi	76,85 %	77,00 %	78,67	102,16%

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2024 diolah

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 78,67% dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi

pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada Tahun 2023 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57 Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km.

Tabel 2. 67 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2019 – 2023

No	Tahun	Panjang Ruas Provinsi (Km)	Kondisi							
			Mantap				Tidak Mantap			
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2019	1.693,273	1.100,718	65,005	153,709	9,078	84,104	4,967	354,742	20.950
2	2020	1.693,273	1.091,243	64,446	196,398	11,599	239,435	14,140	166,197	9,815
3	2021	1.693,273	882,798	52,136	393,697	23,251	164,725	9,728	252,053	14,886
4	2022	1.693,273	832,659	49,175	468,629	27,676	126,51	7,471	265,475	15,678
5	2023	1.695,479	975,50	57,54	358,37	21,14	78,44	4,63	283,13	16,70

Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung, 2023

## 11. Irigasi

Provinsi Lampung memiliki 19 (sembilan belas) Daerah Irigasi Permukaan dengan luas baku 21.045 Ha dan luas fungsi 17.440 Ha, panjang saluran primer 75.102 M & panjang saluran sekunder 96.009 M sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Provinsi Lampung telah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi. Sasaran Pembangunan adalah meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dan indikator Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan  $IP > 2$ .

Tabel 2. 68 Pencapaian Sasaran kinerja Sektor Pengairan Tahun 2023

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air		
<b>IKU</b>	Persentase luas areal sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2		
<b>Satuan</b>	Persentase (%)		
Capaian Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 Provinsi Lampung Tahun 2020-2023			
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2020	37	37	100
2021	40	40	100
2022	45	45	100
2023	50	50	100

**Grafik Pencapaian**

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2023

## 12. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik. Kinerja di bidang perumahan pada Tahun 2018-2022 di provinsi Lampung :

Tabel 2. 69 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap air minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

<b>Kabupaten/Kota</b> <i>Regency/Municipality</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Lampung Barat	74,15	71,15	56,64	70,96	65,08
Tanggamus	79,15	79,15	72,18	63,90	59,82
Lampung Selatan	79,37	89,69	81,03	87,92	90,81
Lampung Timur	56,61	73,02	79,32	84,35	85,85
Lampung Tengah	53,84	74,49	67,44	78,90	83,26
Lampung Utara	25,86	45,28	53,11	62,78	70,31
Waykanan	33,39	38,61	49,24	65,12	63,31

<b>Kabupaten/Kota</b> <i>Regenacy/Municipality</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tulang Bawang	79,95	73,04	78,30	80,65	81,47
Pesawaran	75,94	87,35	89,43	87,07	88,37
Pringsewu	87,19	95,45	95,45	96,68	93,38
Mesuji	70,48	84,05	81,41	80,27	80,76
Tulang Bawang Barat	46,35	27,40	35,12	42,81	51,87
Pesisir Barat	74,34	79,65	80,08	74,53	63,53
Bandar Lampung	92,83	88,45	97,57	98,47	98,33
Metro	89,87	86,39	91,51	94,53	96,19
<b>Lampung</b>	<b>66,17</b>	<b>73,30</b>	<b>74,97</b>	<b>80,20</b>	<b>81,60</b>

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2023

Di Tahun 2022, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki Akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 81,60% dari 66.17% di Tahun 2018.

Tabel 2. 70 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018–2022

<b>Kabupaten/Kota</b> <i>Regenacy/Municipality</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Lampung Barat	57,22	63,79	73,08	76,50	83,75
Tanggamus	64,06	66,52	69,81	68,96	63,99
Lampung Selatan	82,22	86,29	82,25	94,40	94,29
Lampung Timur	77,69	80,35	83,53	86,29	85,27
Lampung Tengah	80,21	82,43	66,89	79,37	81,25
Lampung Utara	69,84	76,16	79,69	75,03	80,82
Waykanan	63,68	71,88	74,03	78,66	73,86
Tulang Bawang	72,77	72,22	79,81	84,83	85,60
Pesawaran	67,44	78,87	77,28	83,73	86,20
Pringsewu	81,23	83,03	84,64	88,91	84,22
Mesuji	61,52	67,96	75,79	78,98	84,63
Tulang Bawang Barat	65,45	76,08	75,21	75,33	77,89
Pesisir Barat	64,50	69,78	70,42	76,68	77,74

<b>Kabupaten/Kota Regenacy/Municipality</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bandar Lampung	86,41	89,01	92,32	95,45	89,07
Metro	96,77	88,33	99,35	94,64	98,77
<b>Lampung</b>	<b>75,25</b>	<b>79,22</b>	<b>79,81</b>	<b>83,89</b>	<b>83,65</b>

*Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2023*

Untuk persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2018 s.d 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 75,25% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 83,65 % di Tahun 2022.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1 Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Lampung**

#### **2.2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023**

Pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024, terdapat 20 Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama. Terjadi penyederhanaan terhadap indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung dari 33 indikator menjadi hanya 20 indikator. Penyederhanaan indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target kinerja setiap tahunnya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan/menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

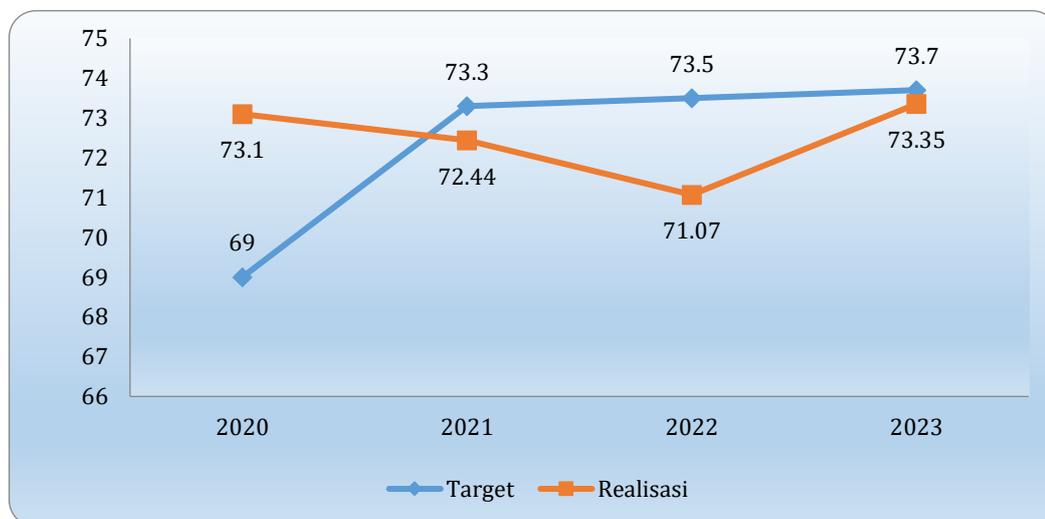
##### **2.2.1.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Indeks KUB menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang

dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Capaian indikator Indeks KUB Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 73,35. Angka ini masih berada di bawah target tahun 2023 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (73,7). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian indeks KUB Provinsi Lampung tidak tercapai sebanyak 2,43 poin sehingga capaian kinerja hanya mencapai 99,53% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

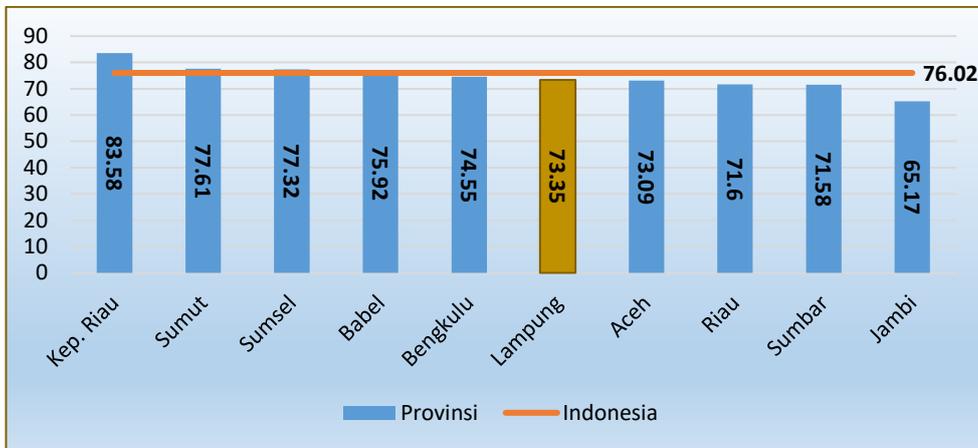
Grafik 2. 88 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Indeks KUB Provinsi Lampung menempati posisi ke 6 tertinggi di Sumatera dan indeks KUB Provinsi Lampung lebih rendah bila dibandingkan angka nasional yang telah mencapai 76,02.

Grafik 2. 89 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi di Sumatera dan Nasional Tahun 2023



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Grafik 2. 90 Trend Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Bila dibandingkan capaian tahun 2022, maka terlihat terdapat peningkatan nilai IKUB, walaupun begitu capaiannya masih berada di bawah capaian nasional. Hal-hal yang berpengaruh terhadap capaian indeks kerukunan umat beragama, diantaranya yang membuat daerah mendapatkan nilai intoleran, yaitu:

- Keberatan bila penganut agama lain membangun rumah ibadat di sekitar tempat tinggal meski telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

- Keberatan bila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan, dan tidak setuju WNI, apa pun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah, atau Presiden.

Walaupun begitu kerukunan beragama di Provinsi Lampung masih baik. Kerukunan di Provinsi Lampung terus tercipta, berkat adanya komunikasi antar kelompok agama serta organisasi kemasyarakatan yang terus dijalin serta dijaga dengan sangat baik, misalnya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Untuk meningkatkan kualitas indeks KUB tahun 2023, maka telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akan dibentuk Forum Pemuda Lintas Agama dan Perempuan Lintas Agama, agar dapat berperan untuk mensosialisasikan pentingnya kerukunan antar umat beragama serta moderasi beragama. Untuk meningkatkan indeks KUB juga diperlukan media-media yang aktif serta turut memberikan sosialisasi serta menginformasikan pentingnya kerukunan umat beragama.

#### **2.2.1.1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 22 indikator demokrasi.

Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 78,32. Angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 74. Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 91 Target dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022

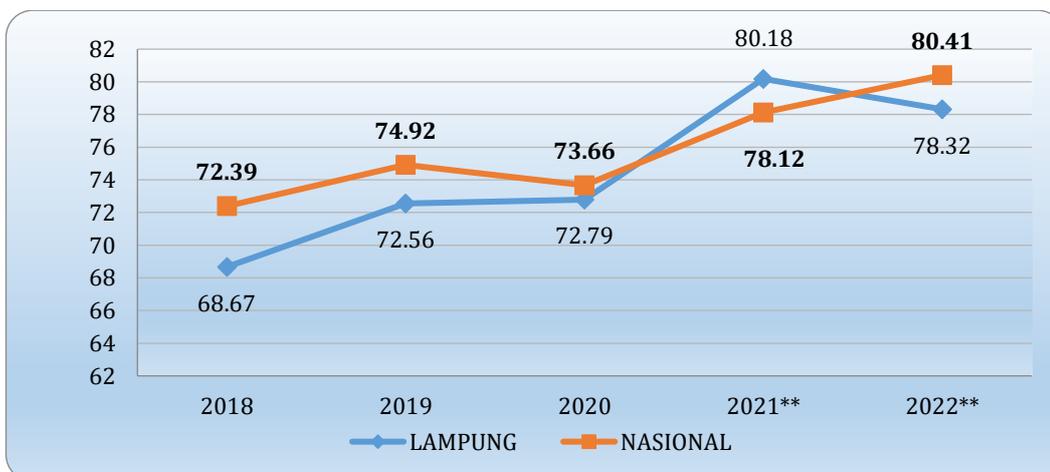


Sumber: BPS RI, 2024, diolah

\*\* 2021 dan 2022 metode baru

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di lihat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, akan tetapi sedikit menurun pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. IDI Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai peringkat ke 5 tertinggi se-Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

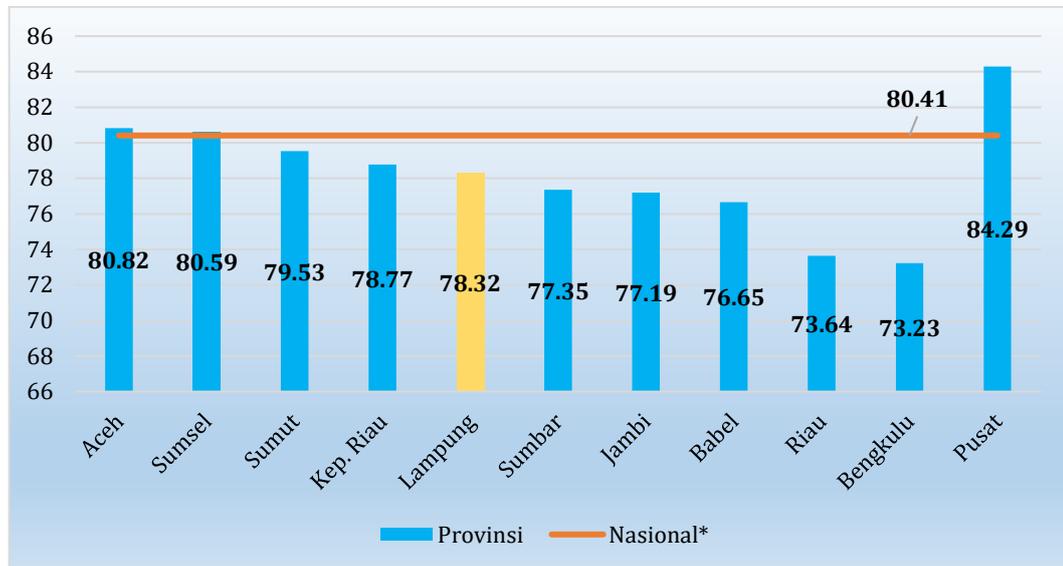
Grafik 2. 92 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, 2024, termutakhir

\*\* 2021 dan 2022 metode baru

Grafik 2. 93 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera Tahun 2022 (Metode Baru)



Sumber: BPS RI, 2024, diolah

### 2.2.1.1.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.

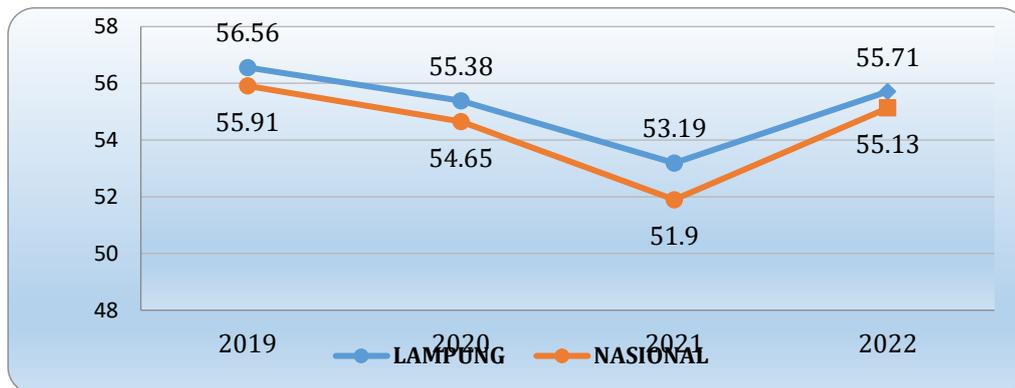
Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71. Angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (55,3). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 94 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, diolah

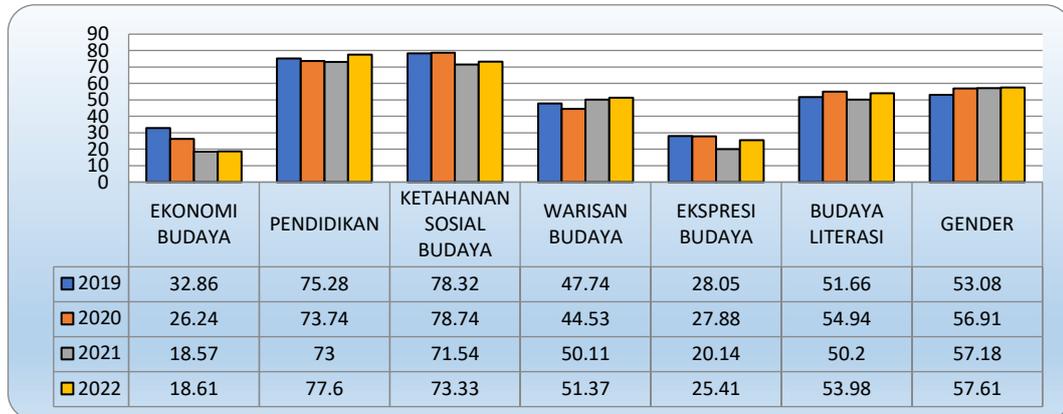
Grafik 2. 95 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2022



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, diolah

IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2019 (56,56) selalu mengalami penurunan, hingga tahun 2021 mencapai 53,19, akan tetapi terlihat capaian positif pada Tahun 2022, yaitu meningkat mencapai 55,71. Peningkatan capaian indikator ini disebabkan karena terjadi peningkatan di semua dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Tren capaian IPK per dimensi sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.

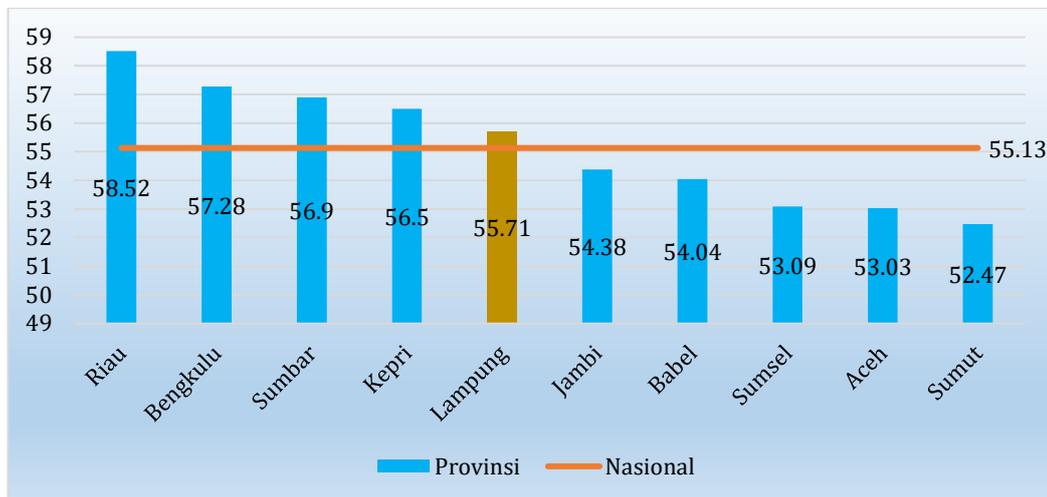
Grafik 2. 96 Trend Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung berada pada urutan ke-5 tertinggi se-Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini juga berada di atas capaian nasional yang mencapai 55,13 poin. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 97 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi se-Sumatera dan Indonesia Tahun 2022



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, diolah



#### 2.2.1.1.4 Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Penilaian reformasi birokrasi diklasifikasikan menjadi 7 peringkat, yaitu:

Tabel 2. 71 Indeks Reformasi Birokrasi

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi	Keterangan
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi	Keterangan
				unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 68,79 dengan kategori "B". Nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2023, yaitu B. Sehingga capaian indikator Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 100 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

Sejak Tahun 2020-2022, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung tidak mencapai target yang ditetapkan (B), yaitu hanya mencapai predikat CC (Cukup/Memadai). Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 72 Rincian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi  
Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Komponen	Sub. Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1.	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,08	1,08
2.	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	24,08	0,89
3.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99	1,98
4.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,2	2,56
6.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,43
7.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68,1	2,72
8.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	81,01	2,03
9.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0,4
10.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	89,27	2,23
11.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah	2,5	2	1
12.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2		

No	Komponen	Sub. Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
13.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2		
14.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	1,89	0,38
15.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	71,78	1,08
16.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	279,5	2,73
17.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,05	1,21
18.	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	65,58	0,98
19.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,81	6,86
20.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	2	99	1,98
21.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	8	35	1,9
22.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
23.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	79,3	3,17
24.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAhlak	4	60,02	2,41

No	Komponen	Sub. Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
25.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	68,45	6,85
26.	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survey Kepuasan Masyarakat	8	86,51	6,92
27.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2
28.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2
29.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2
30.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
31.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laji Unflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,17	0,17
32.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	0	0
33.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	100	0,34
34.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	16,7	0,09
35.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0
36.	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Output)	0,6	100	0
37.	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,87	1,87
38.	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	0,9	0,9

No	Komponen	Sub. Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
39.	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,98	2,98
40.	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,65	0,65
41.	RB Tematik	Koefesien	Koefesien	10		0
42.	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	2	2

Sumber : Kemenpan RB, tahun 2024, diolah

Berdasarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2023, terlihat bahwa pada skor indeks tertinggi didapatkan pada indikator penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (6,92), Indeks SPBE (6,86) dan Survey Penilaian Integritas (6,85), dimana ketiga indikator penilaian ini memiliki bobot penilaian yang juga tinggi, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (8), Indeks SPBE (9) dan Survey Penilaian Integritas (10). Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung harus ditingkatkan pada setiap indikator penilaian. Agar capaian skor indeks dapat lebih meningkat lagi, maka peningkatan dapat lebih diarahkan kepada indikator penilaian yang memiliki bobot penilaian tinggi.

Masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum memiliki skor (masih kosong), yaitu Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum dan Koefisien pada RB Tematik. Untuk itu diharapkan pada Tahun berikutnya, capaian indikator penilaian sudah dapat terisi.

#### 2.2.1.1.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung (menggunakan metode perhitungan sensus penduduk Tahun 2020) bila dibandingkan dengan target selama 4 tahun terakhir, selalu mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator Angka harapan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 74,17

angka capaian ini berada di atas target tahun 2023 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (71,2). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 98 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2023



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

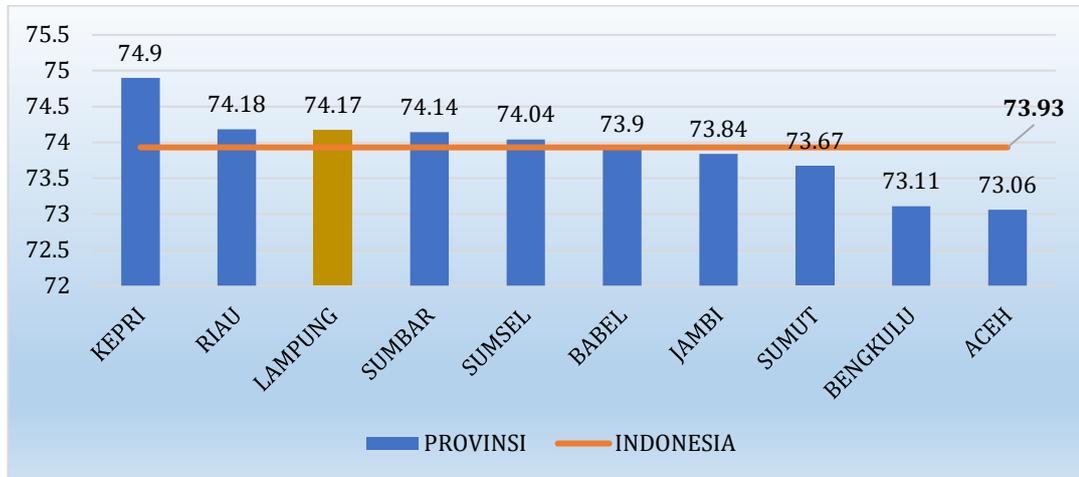
Selama 4 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 73,66 pada tahun 2020, menjadi 74,17 pada tahun 2023, dan berada di atas rata-rata AHH Nasional. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup di suatu daerah.

Grafik 2. 99 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode SP2020) Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2. 100 Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera dan Indonesia Tahun 2023

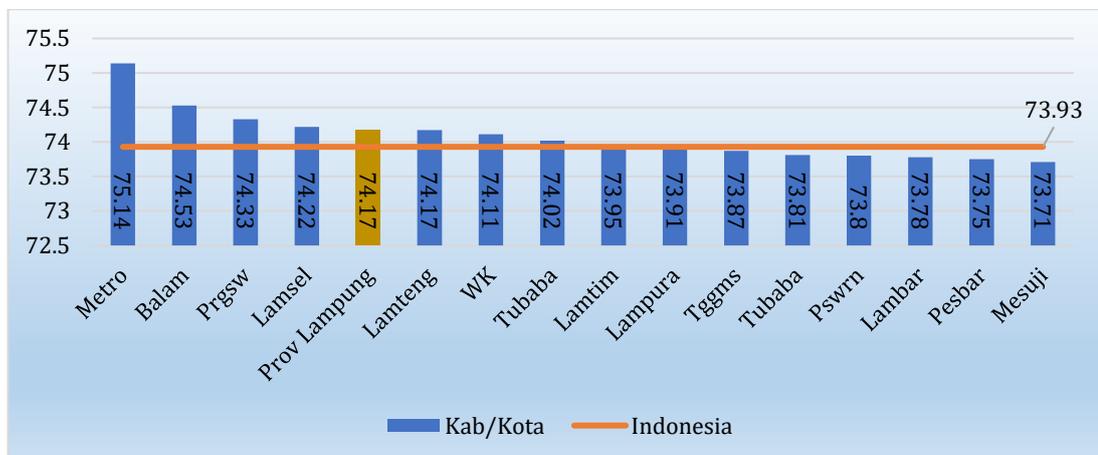


Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera dan besarnya berada di atas angka Nasional. Sebagian besar Provinsi di Sumatera, AHH nya telah berhasil melampaui angka Nasional.

Hanya 4 Kabupaten /Kota yang capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro (75,14), Kota Bandar Lampung (74,53), Kabupaten Pringsewu (74,33) dan Kabupaten Lampung Selatan (74,22) sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 73,71. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 101 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2022



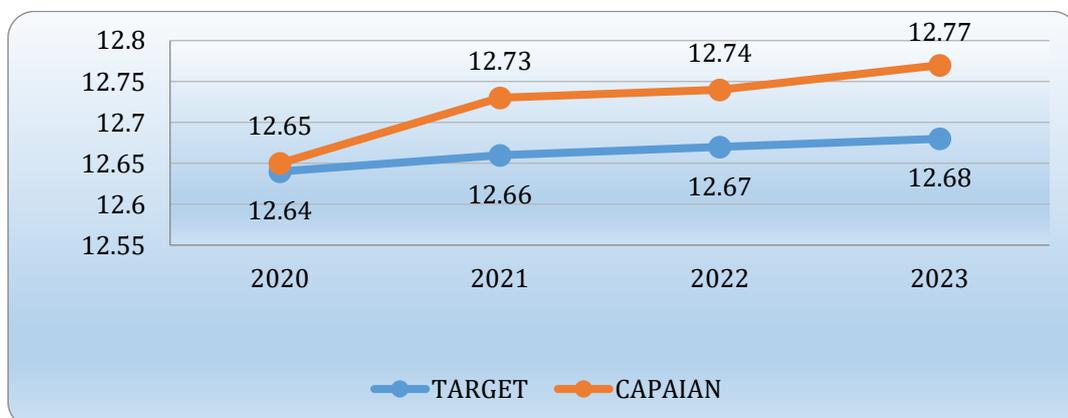
Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

### 2.2.1.1.6 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sejak tahun 2020-2023, capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung adalah 12,77, angka capaian ini berada di atas target tahun 2023 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (12,68). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung telah tercapai sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

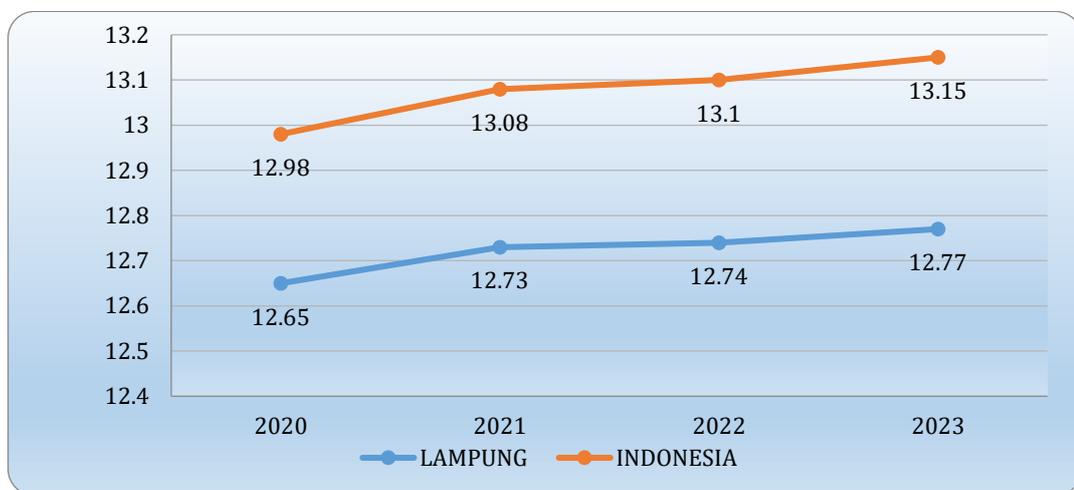
Grafik 2. 102 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2023, HLS Provinsi Lampung telah mencapai 12,77, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada di bawah angka Nasional yaitu 13,15.

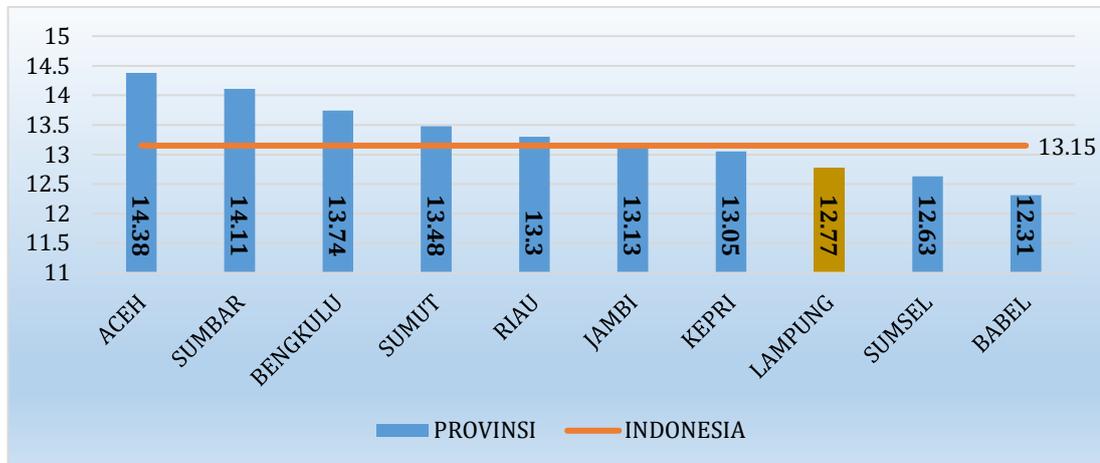
Grafik 2. 103 Tren Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung masih berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.

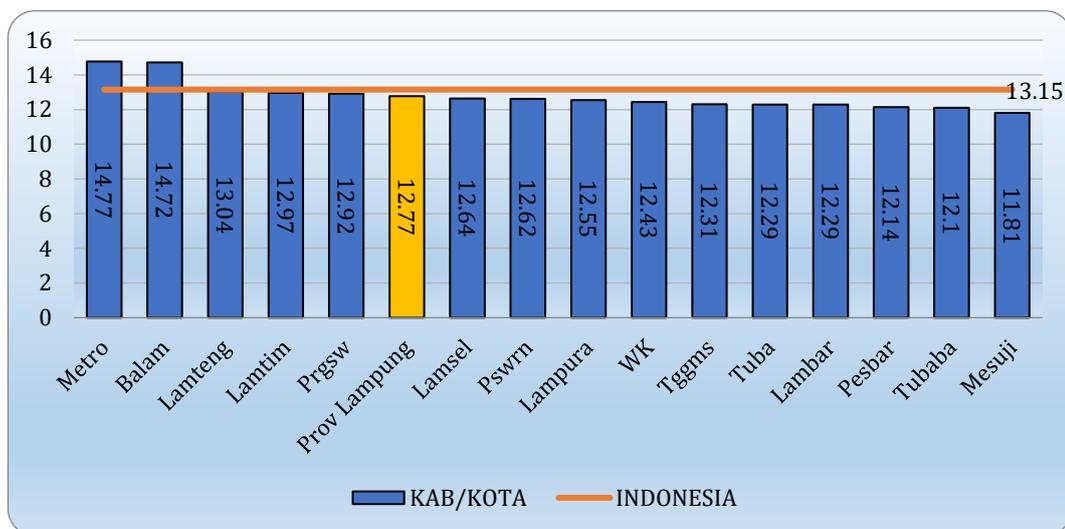
Grafik 2. 104 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,77 dan Kota Bandar Lampung 14,72 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu 11,81. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 105 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Provinsi Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2024, diolah

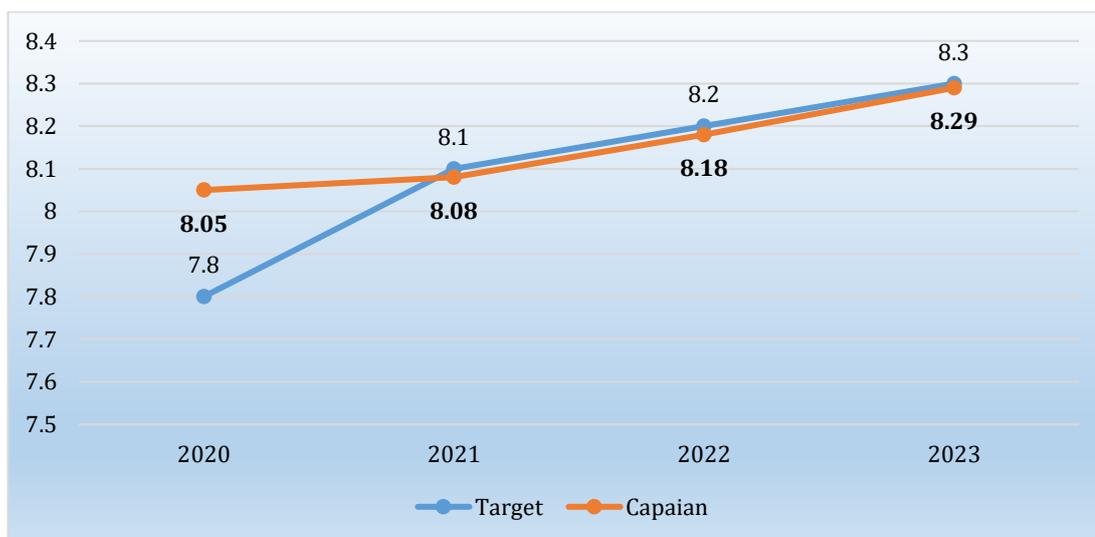


### 2.2.1.1.7 Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

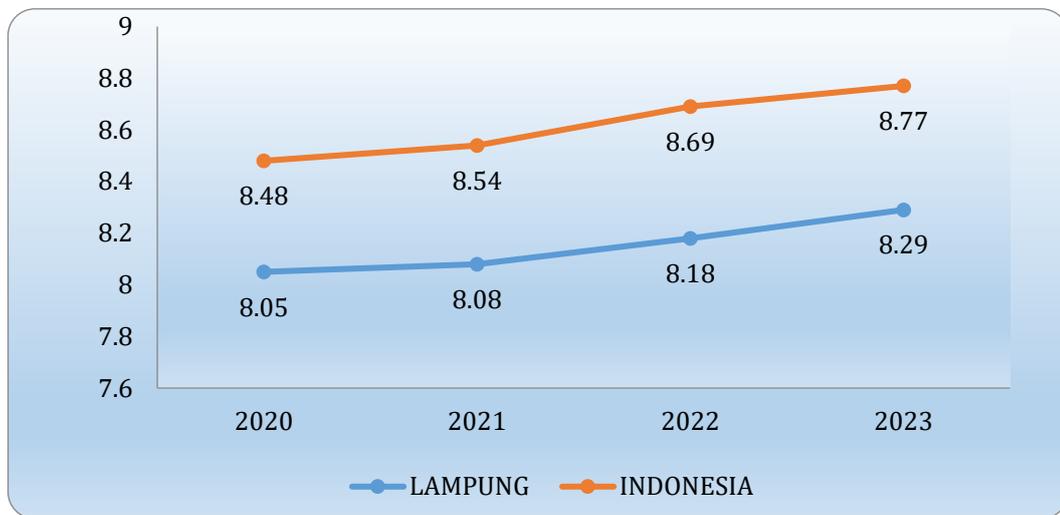
Pada tahun 2020, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2021 hingga Tahun 2023, target indikator tersebut tidak tercapai. Pada Tahun 2023 capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung adalah 8,29, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (8,3). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tidak tercapai sehingga capaian kinerja mencapai 99,88% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 106 Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Grafik 2. 107 Tren Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023

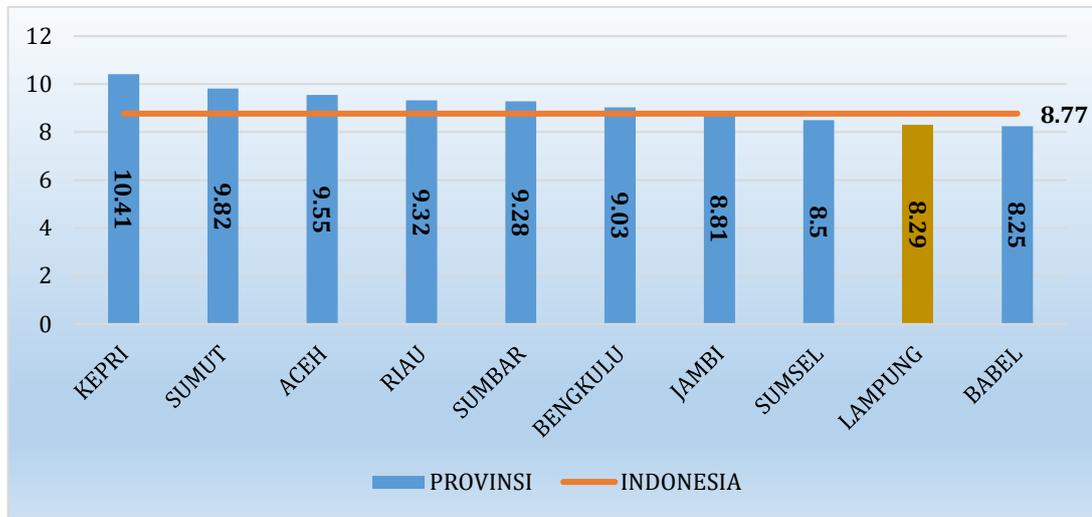


Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,29 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,29 tahun. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,77.

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, maka posisi Lampung pun masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2023, Provinsi Lampung menempati peringkat ke-2 terbawah di Sumatera, setelah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Grafik 2. 108 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023

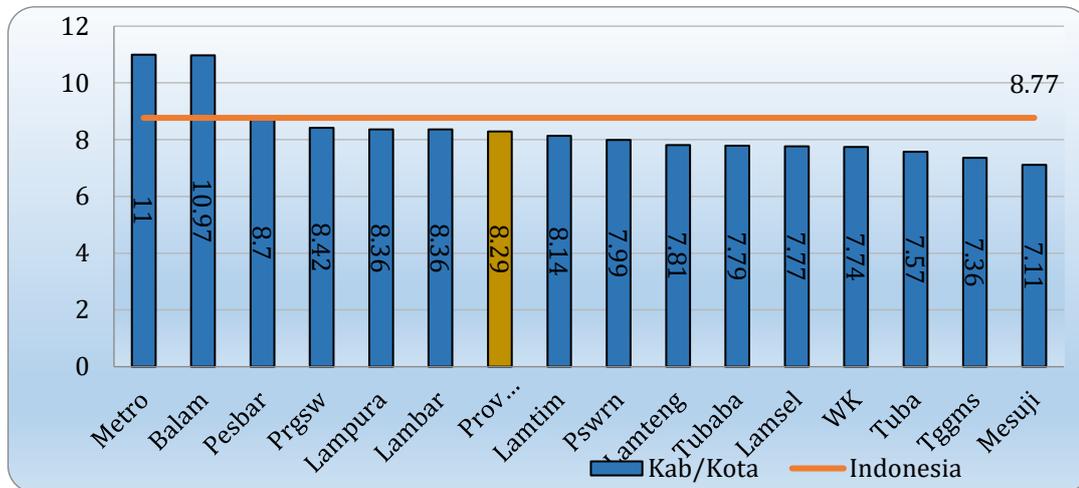


Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 11 dan Kota Bandar Lampung 10,97 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji (7.11). Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

Grafik 2. 109 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023



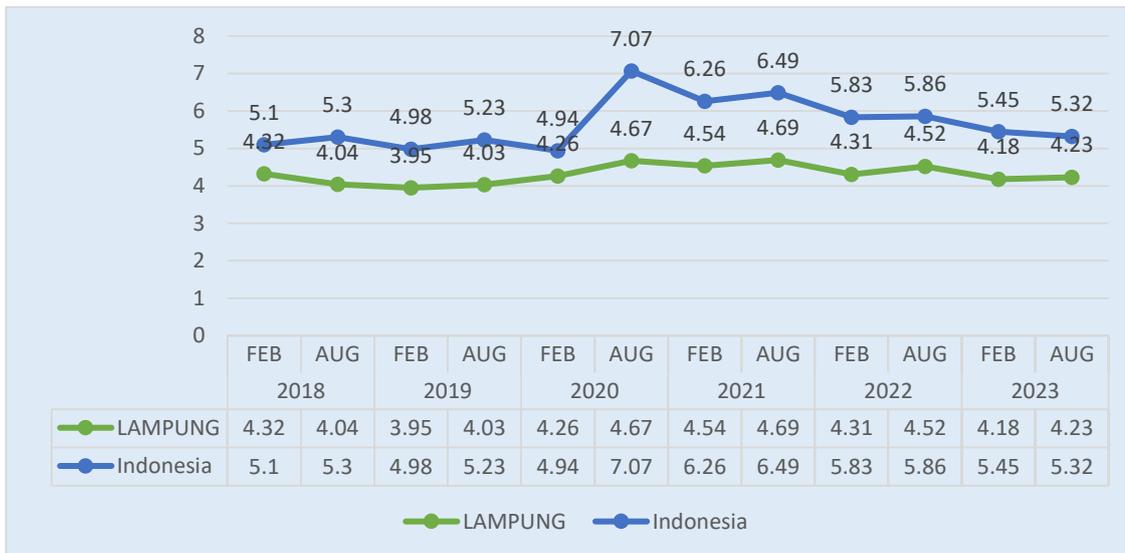
Sumber: BPS RI, 2022, diolah

#### 2.2.1.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin, dibandingkan dengan Agustus 2022. Hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus 2022. Secara nasional, selama periode 2018-2023, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,32) pada Tahun 2023.

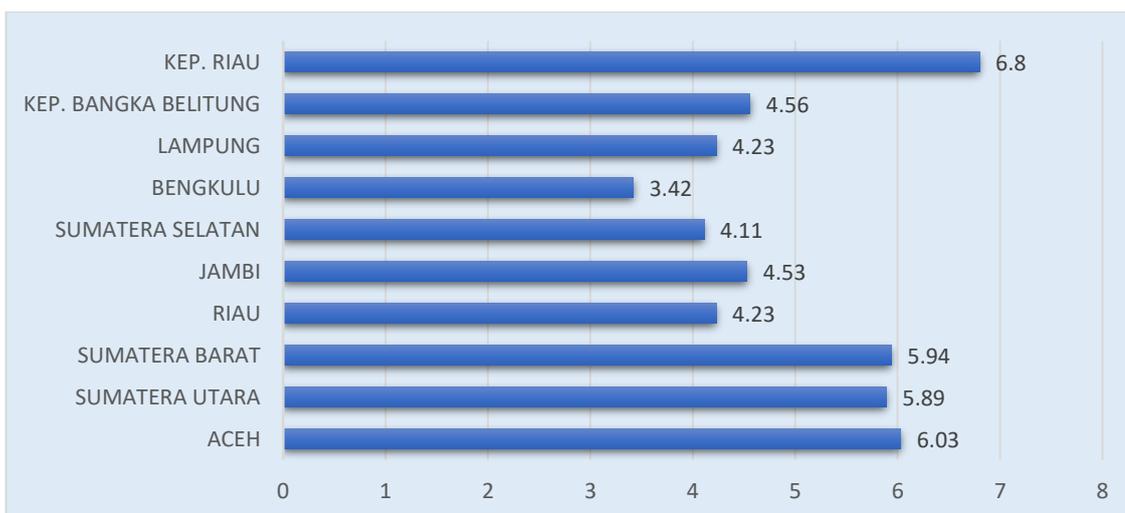
Tabel 2. 73 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian TPT untuk regional Sumatera relative bervariasi, TPT tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,42 persen. Provinsi Lampung menempati TPT terendah ketiga se-Sumatera bersama sama Provinsi Bengkulu dan Riau.

Grafik 2. 110 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2018-2023.

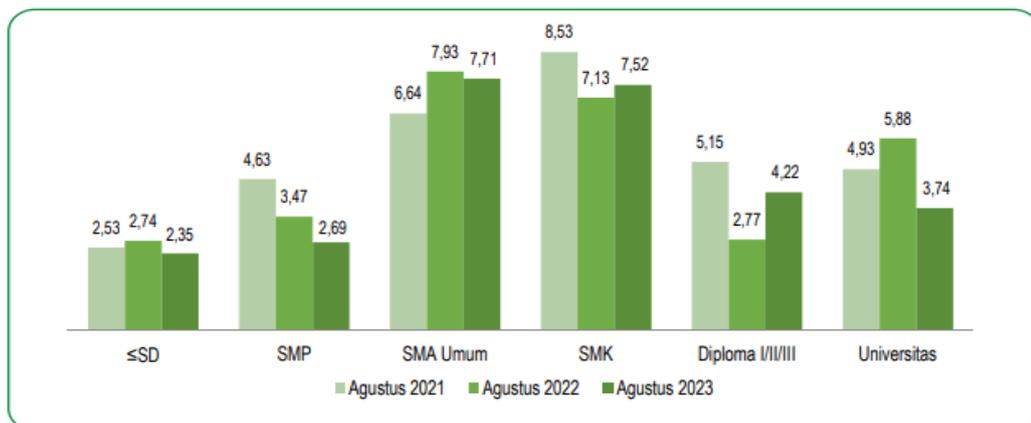


Sumber: BPS, 2023

Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar 5,71 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,46 persen), dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan menurun sebesar 2,20 persen poin sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,54 persen poin.

Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,71 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,35 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT, terjadi pada hampir semua jenjang Pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan Universitas, yaitu sebesar 2,14 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan TPT, masing-masing sebesar 0,39 persen poin dan 1,45 persen poin. .

Grafik 2. 111 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,43 persen diikuti Lampung Utara (5,73), Lampung Selatan (4,95), Lampung Selatan (5,27%) dan Pesawaran (4,76) dan Pringsewu . Selain lima Kabupaten/Kota ini, semua Kabupaten/Kota memiliki nilai TPT lebih rendah daripada Provinsi Lampung. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah dengan angka 2,25 persen.

Grafik 2. 112 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

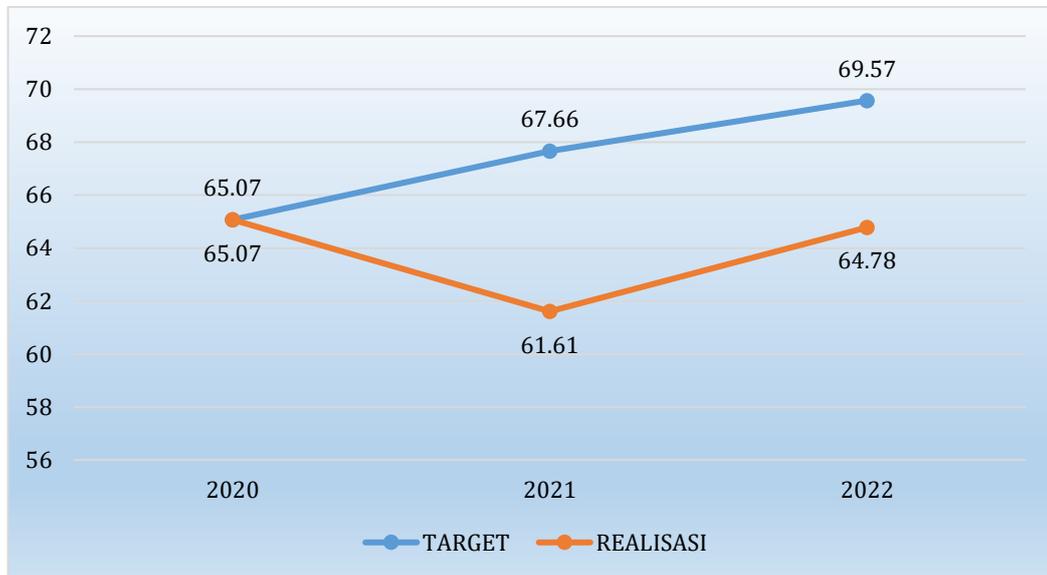
### 2.2.1.1.9 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA dibentuk dari 5 klaster, yaitu:

- Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan
- Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- Klaster 5 : Perlindungan Khusus

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 64,78, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,57). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 93,11% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 113 Capaian dan Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2024, diolah

Grafik 2. 114 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2024, diolah

Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 64,78. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (61,61), maka terjadi peningkatan mencapai 3,17 poin. Walaupun terjadi peningkatan, masih belum dapat mengejar capaian Tahun 2020 (65,07),

sehingga dari grafik terlihat bahwa IPA Provinsi Lampung tahun 2019-2020 masih berada di bawah capaian nasional, sedangkan pada tahun 2021 capaian IPA Provinsi Lampung berada di atas capaian nasional (61,38) dan pada Tahun 2022 juga melampaui capaian nasional (63,3) yaitu 64,78. Walaupun capaian IPA Provinsi Lampung telah berada di atas capaian nasional, akan tetapi capaian ini masih rendah sehingga Provinsi Lampung harus tetap bekerja lebih keras untuk dapat mengejar ketertinggalan ini. Untuk meningkatkan nilai IPA di Provinsi Lampung, maka harus diamati dari setiap variabel pembentuknya.

Bila diamati secara nasional, klaster pembentuk IPA dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sedangkan capaian terendah pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya. Pada tahun 2022, semua klaster penyusun IPA Nasional mengalami kemajuan bila dibandingkan capaian Tahun 2021.

#### **2.2.1.1.10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

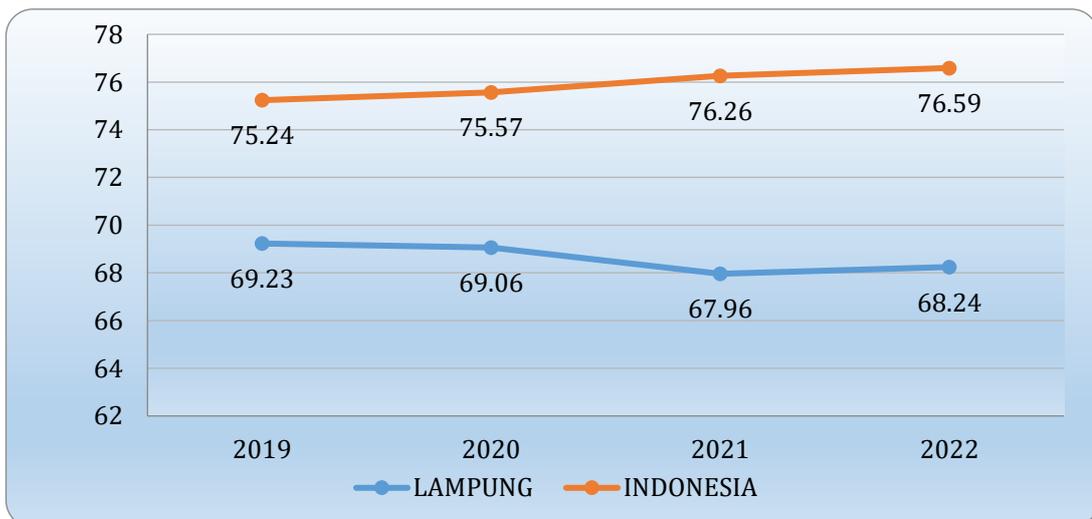
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 68,24, capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,14). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian IDG Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 98,70% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 115 Capaian dan Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Lampung, 2024, diolah

Grafik 2. 116 Tren Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa IDG Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 68,24, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,59. Pada tahun 2019-2022, capaian IDG Provinsi Lampung selalu berada di bawah capaian IDG nasional. Pada Tahun 2022, capaian IDG Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebanyak 0,28 poin dibanding tahun 2021. Dari grafik capaian Provinsi Lampung dan Nasional, terlihat bahwa jarak antara capaian Provinsi Lampung dan Nasional semakin lebar, yang artinya

kesenjangan antara IDG Nasional dan IDG Provinsi Lampung semakin tinggi.

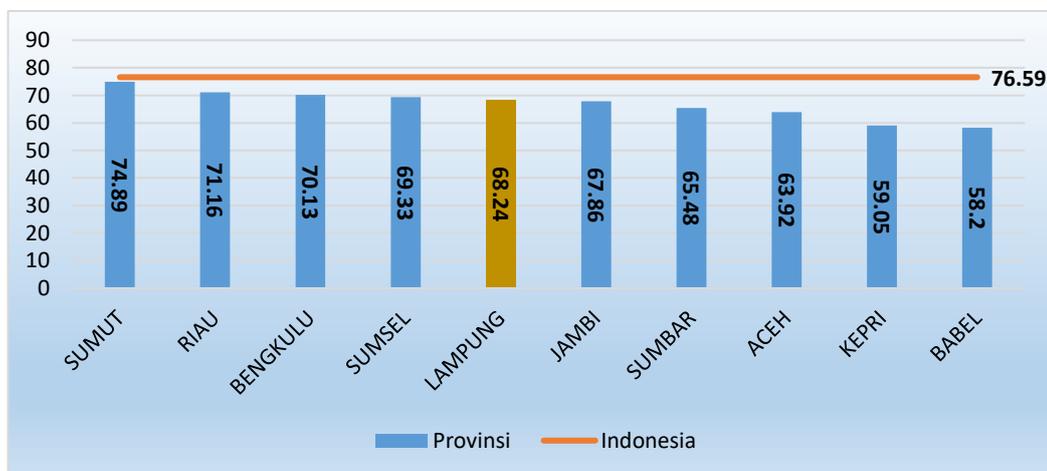
Variabel penyusun IDG adalah Persentase Keterlibatan Wanita Di Parlemen, Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan capaian pada komponen Perempuan Sebagai Tenaga Profesional sebanyak 0,13 poin. Agar dapat meningkatkan capaian IDG Provinsi Lampung, maka diperlukan akselerasi untuk meningkatkan IDG Provinsi Lampung, khususnya pada komponen Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan komponen Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Grafik 2. 117 Trend Variabel Penyusun IDG Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber : BPS RI, 2024, diolah

Grafik 2. 118 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2021



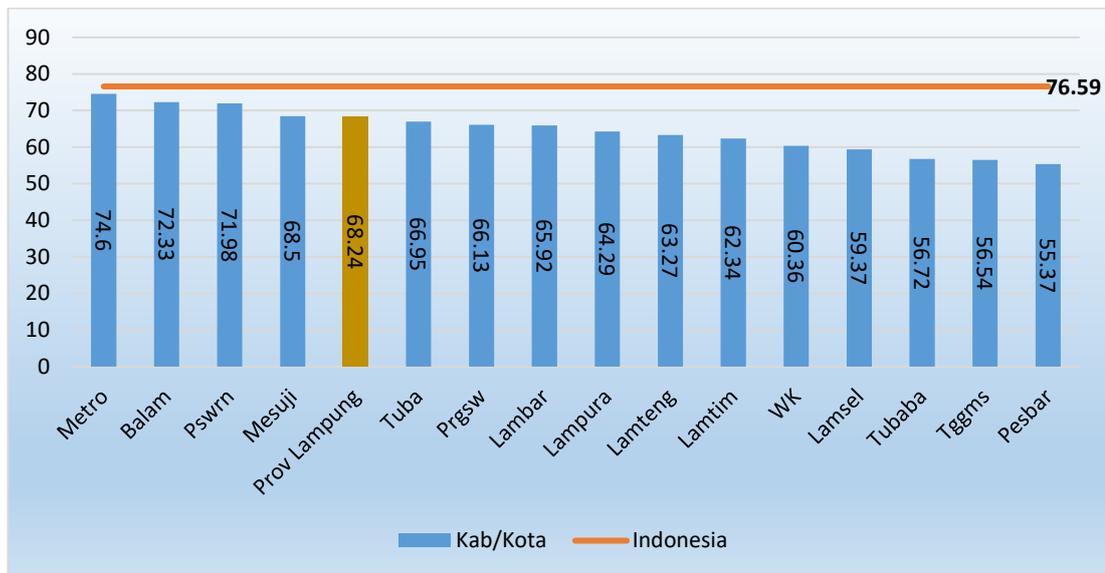
Sumber : BPS RI, 2024, diolah



Berdasarkan capaian IDG Provinsi di Sumatera, terlihat bahwa Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke lima di pulau Sumatera, menurun bila dibandingkan Tahun 2021 dimana Provinsi Lampung menduduki posisi keempat. Pada Tahun 2022 ini, capaian seluruh Provinsi di pulau Sumatera berada di bawah capaian nasional (76,59)

Di lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 74,6 diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 72,33 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 71,98. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 55,37. Akan tetapi tidak satupun Kabupaten/Kota ini yang melebihi capaian nasional, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2. 74 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

#### 2.2.1.1.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu,

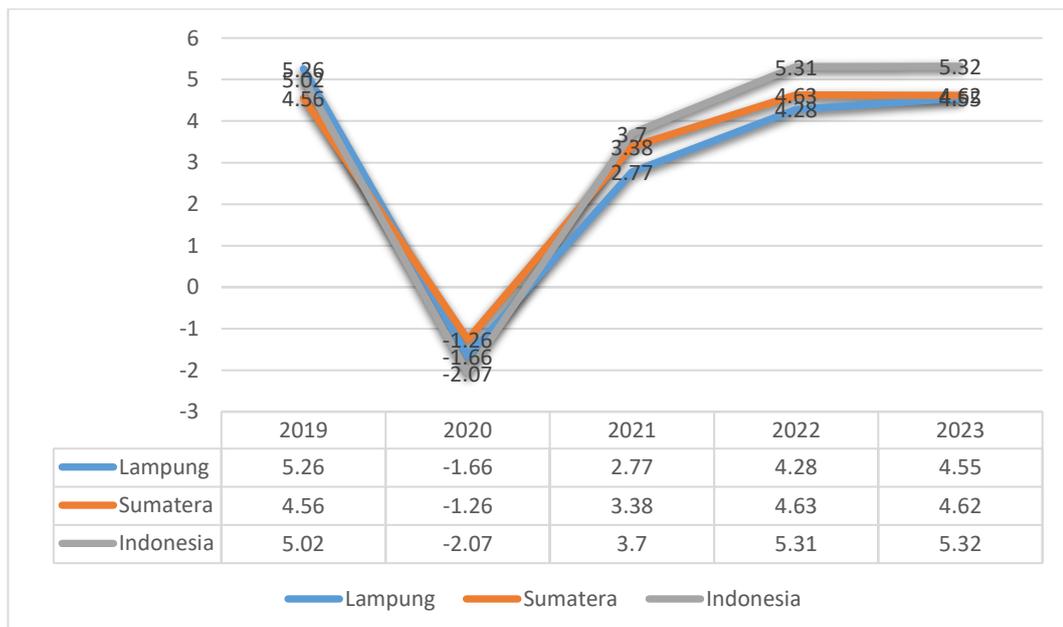


adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami *recovery*, untuk Tahun 2023, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,55 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,28 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Grafik 2. 119 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia



Sumber : BPS Indonesia, 2024



## A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen, menguat dibanding tahun 2022 (c-to-c) yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50 persen. Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2023 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,29 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,98 persen; serta Konstruksi sebesar 9,86 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,14 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,34 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,97 persen, serta Konstruksi sebesar 0,72 persen. Sementara sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 1,52 persen

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 dibanding periode yang sama tahun 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen, menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,93 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Konstruksi, Jasa Keuangan, serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 15,16 persen, 13,26 persen, dan 11,80 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan juga mengalami pertumbuhan cukup pesat mencapai 11,03 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,78 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan

Gas yang berkontraksi sebesar 7,74 persen serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi sebesar 2,33 persen.

## **B. PDRB Menurut Pengeluaran**

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,59 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,14 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,06 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 6,18 persen. Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,34 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,79 persen; Komponen PMTB sebesar 32,33 persen; Komponen PK-P sebesar 6,60 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,72 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,02 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 17,36 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 7,08 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,64 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,44 persen; dan Komponen PK-P sebesar 3,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,80 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.

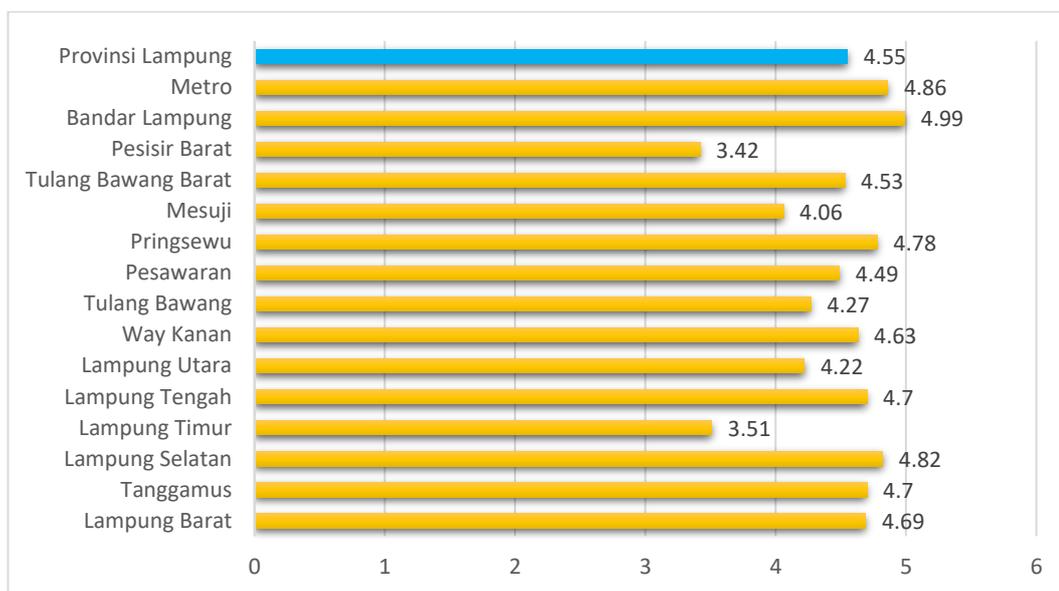
Grafik 2. 120 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan sebanyak 8 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (4,99), Kota Metro (4,86), Kabupaten Lampung Selatan (4,82), Kabupaten Pringsewu (4,78), Kabupaten Lampung Tengah (4,70), Kabupaten Tanggamus (4,70), Kabupaten Lampung Barat (4,69) dan Kabupaten Way Kanan (4,63).

Tabel 2. 75 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah (2024)

Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus mampu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provinsi Lampung.

Tabel 2. 76 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	5.18	-1.16	2.55	4.09	4.69
Tanggamus	5.02	-1.77	2.34	4.16	4.70
Lampung Selatan	5.13	-1.73	2.6	4.81	4.82
Lampung Timur	3.79	-2.26	0.24	2.02	3.51
Lampung Tengah	5.35	-1.02	2.88	4.65	4.70
Lampung Utara	5.33	-1.45	2.82	3.16	4.22
Way Kanan	5.17	-1.16	2.9	4.41	4.63
Tulang Bawang	5.41	-1.34	2.88	3.85	4.27
Pesawaran	5	-1.26	2.08	4.55	4.49

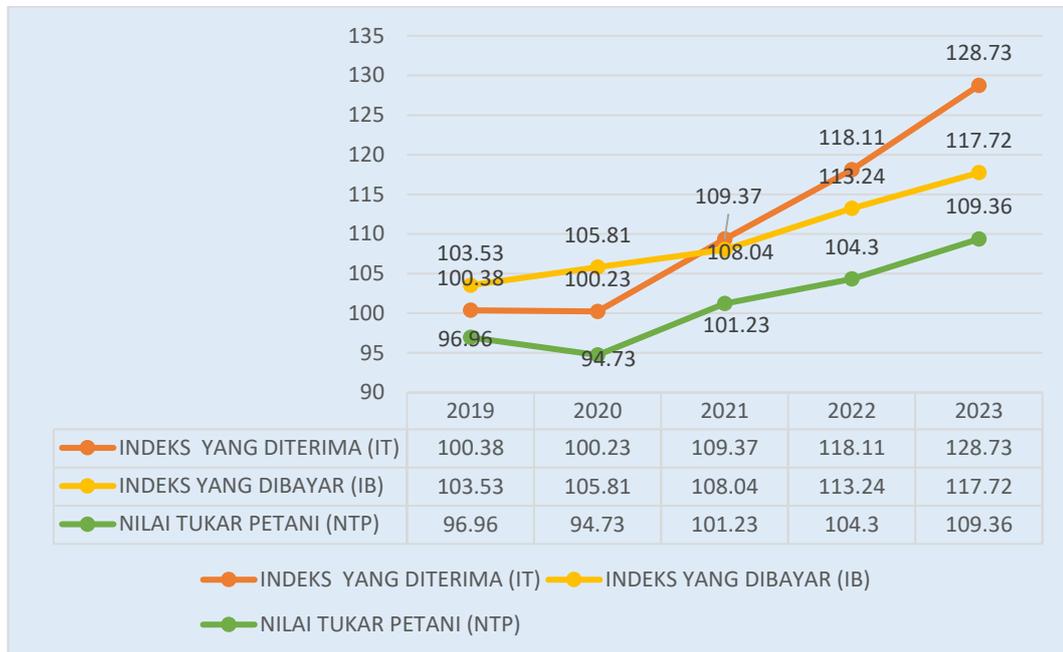
Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pringsewu	5.03	-1.21	2.91	4.37	4.78
Mesuji	5.26	-1.35	2.84	3.49	4.06
Tulang Bawang Barat	5.36	-1.32	2.89	4.49	4.53
Pesisir Barat	5.47	-1.18	2.06	2.82	3.42
Bandar Lampung	6.17	-1.88	3.12	4.93	4.99
Metro	5.57	-1.79	2.91	4.51	4.86
Provinsi Lampung	5.26	-1.67	2.77	4.28	4.55
Nasional	5.02	-2.07	3.69	5.31	5.05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

#### 2.2.1.1.12 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 109,36. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (117,72). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

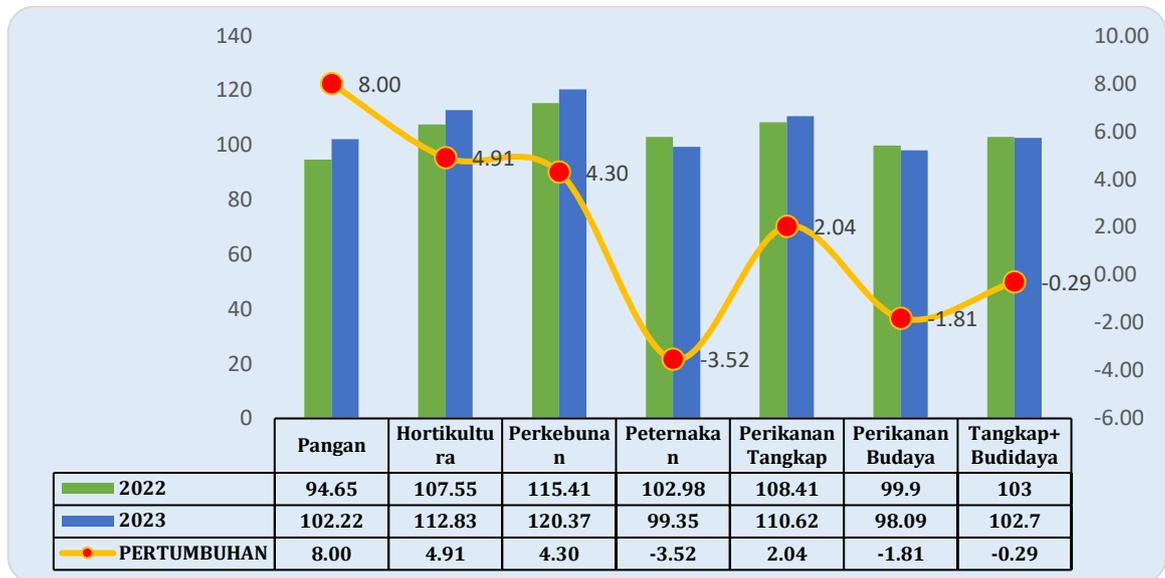
Grafik 2. 121 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan (8%), diikuti hortikultura (4,91) dan perkebunan (4,3) serta perikanan tangkap (2,04%). Sedangkan pada sub sektor peternakan dan perikanan budidaya terjadi penurunan (pertumbuhan negatif) masing-masing sebesar -3,52% dan -1.81% dan total perikanan tangkap budidaya sebesar -0,29%.

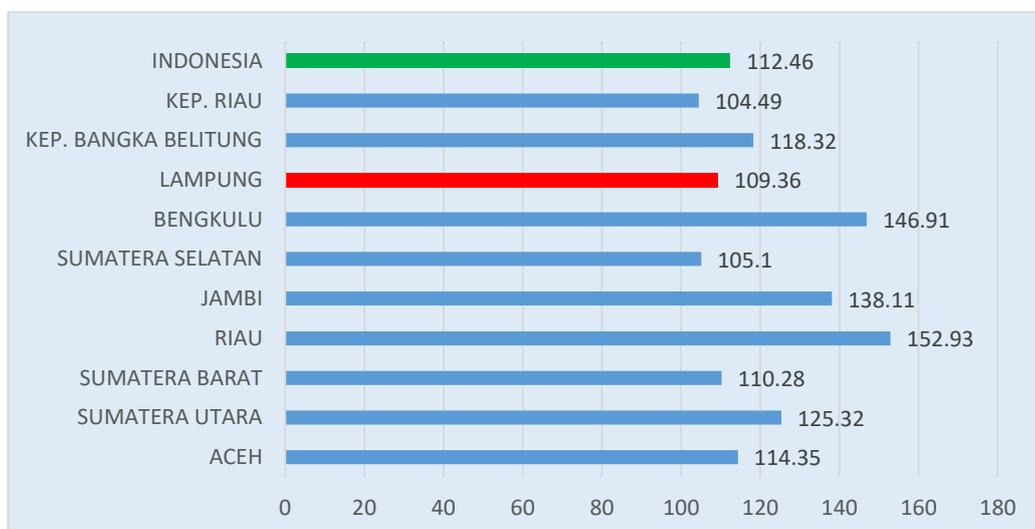
Grafik 2. 122 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Indonesiag, 2024, (diolah).

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah ketiga setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 152,93, Provinsi Bengkulu (146,91) dan Provinsi Jambi (138,11). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-20.

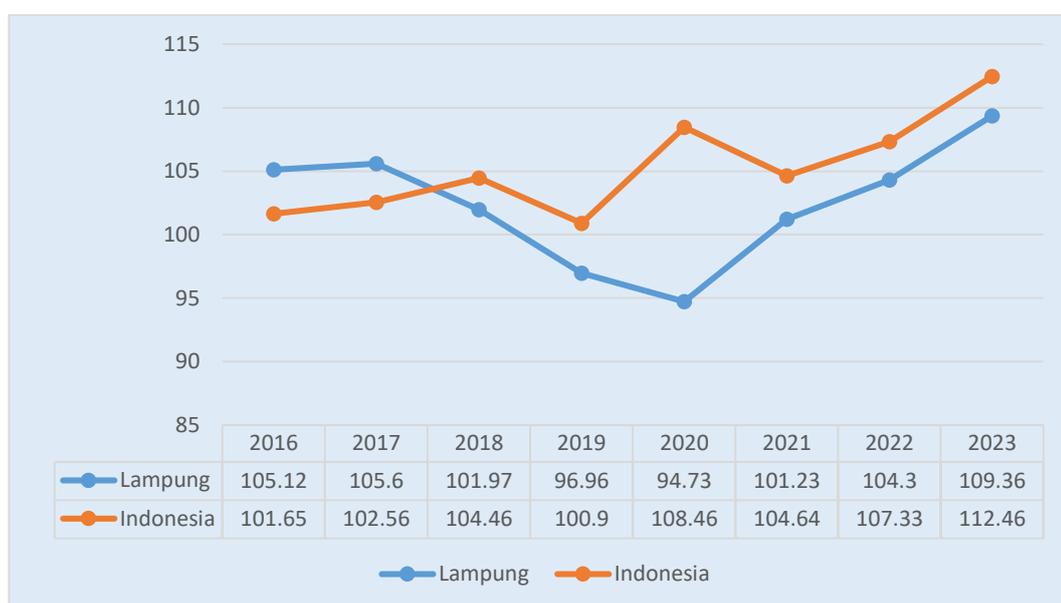
Grafik 2. 123 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023



Sumber: BPS Indonesiag, 2024(diolah).

Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2023, namun dengan trend yang semakin meningkat.

Grafik 2. 124 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2023)

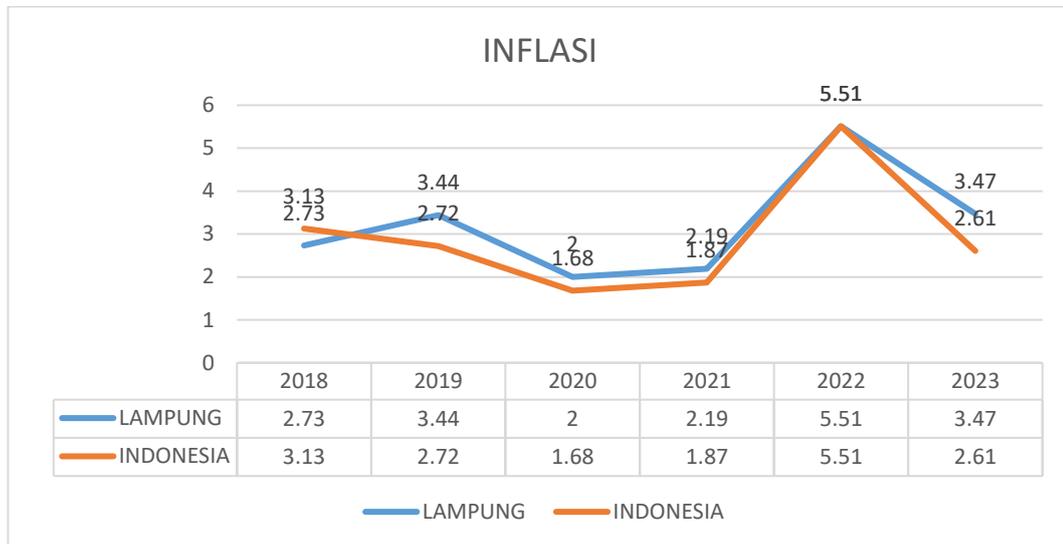


Sumber: BPS 2023

#### 2.2.1.1.13 Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

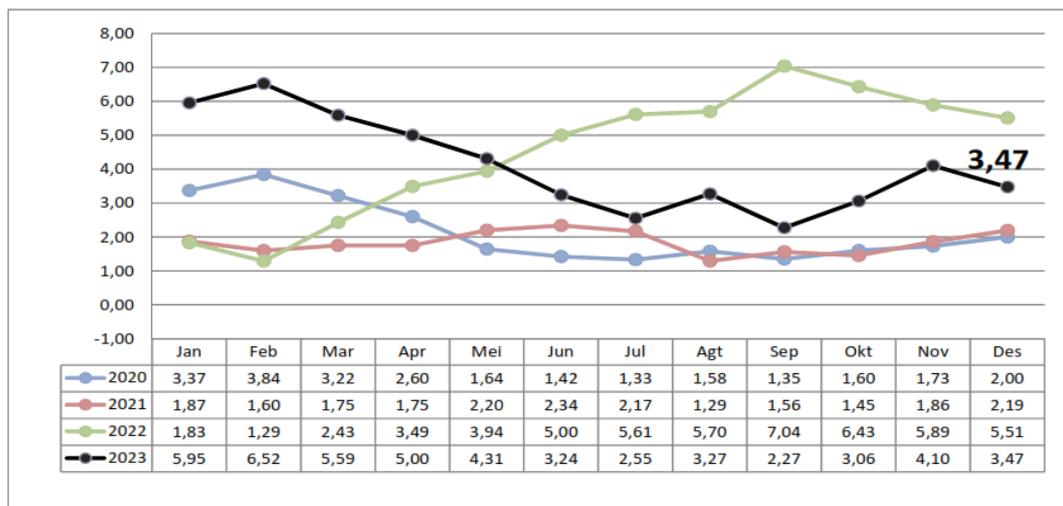
Grafik 2. 125 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Secara tahunan (*y to d*), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2023 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi yaitu  $3\% \pm 1$ , yaitu senilai 3,47%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 5,51% yang merupakan angka inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Capaian Tahun 2023 tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (*y on y*), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (*y to d*).

Gambar 2. 34 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber : Data BPS, 2023



Secara tahunan (*years to date*), penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan IV 2023 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,27% dan Nilai Inflasi 9,36 % (*ytd*), diikuti oleh kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,12% dan nilai inflasi 3,68% serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,11% dan nilai inflasi 2,15% (*ytd*).

Tabel 2. 77 Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Tqhun Kalender 2023	Andil Inflasi Tqhun Kalender 2023
Umum (Headine)	118,65	3,47	3,47
Makanan, MInuman, dan Tembakau	131,25	9,36	2,77
Pakaian dan Alas Kaki	111,29	1,55	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,90	0,70	0,12
Perlengkapan, Peralatann & Pemeliharaan Rutin Rmh Tangga	116,39	2,15	0,11
Kesehatan	118,65	1,10	0,03
Transportasi	121,98	-0,27	-0,04
Informasi, Komunikasi< dan Jasa Keuangan	94,07	-0,28	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	116,15	1,41	0,03
Pendidikan	125,67	3,68	0,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	118,53	0,98	0,08
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,06	1,57	0,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada Desember 2023, tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 3,47 persen, lebih rendah bila dibandingkan inflasi tahun ke tahun Desember 2022 terhadap Desember 2021 yang sebesar 5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).

Sedangkan Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19 persen. Tingkat inflasi bulan ke bulan pada Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,01 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan bulan Desember 2022 dengan tingkat inflasi sebesar 0,62 persen. Sedangkan bulan Desember 2021 mengalami inflasi tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 0,99 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 3,47 persen, lebih rendah jika dibandingkan Desember 2022 dengan inflasi sebesar 5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir). Sementara tahun kalender Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,19 persen.

Tabel 2. 78 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2021–2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
Desember (m-t-m terhadap bulan sebelumnya)	0,99	0,62	0,01
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,19	5,51	3,47
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,19	5,51	3,47

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila dibandingkan regional Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan yang tertinggi. Walaupun masih dalam rentang target inflasi Tahun 2023 yang sebesar  $3 \pm 1$ , namun hal ini patut pula menjadi perhatian, terutama pada intervensi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga terutama pada komoditas pangan. Secara teori, Inflasi yang tinggi juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2. 35 Inflasi di Sumatera



Sumber : BPS Indonesia, 2023 (diolah).

Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok *Core Inflation*, *Volatile Food*, dan *Administered Price*. Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

#### 2.2.1.1.14 Angka Kemiskinan

##### 2.2.1.1.17.1 Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 11,11, capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (12,4). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung telah tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 126 Tren Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Lampung, 2024, diolah

Grafik 2. 127 Tren Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 11,57 persen di tahun 2021 menjadi 11,11 persen di Tahun 2023, namun RB Provinsi Lampung masih berada di atas angka nasional (9,36 persen).

Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu orang

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di perdesaan

mencapai 737,71 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 756,48 ribu jiwa. Begitu juga di perkotaan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 menurun dari 239,11 ribu jiwa menjadi 232,96 ribu jiwa pada Tahun 2023.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid 19. Untuk kemiskinan di pedesaan, tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 79 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2023 (Ribu Jiwa)

<b>LOKASI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 (Mar)</b>
<b>Kota</b>	230,20	224,69	259,28	236,48	239,11	232,96
<b>Desa</b>	861,40	816,79	831,86	770,54	756,48	737,71
<b>Kota + Desa</b>	1.091,60	1041,48	1.091,14	1.007,02	995,59	970,67

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Selanjutnya kondisi kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (17,17 %), Kabupaten Lampung Timur (13,80 %) dan Kabupaten Pesisir Barat (13,49 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS, terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 lebih baik daripada Nasional, yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu serta Kota Metro dan Bandar Lampung.

Grafik 2. 128 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023



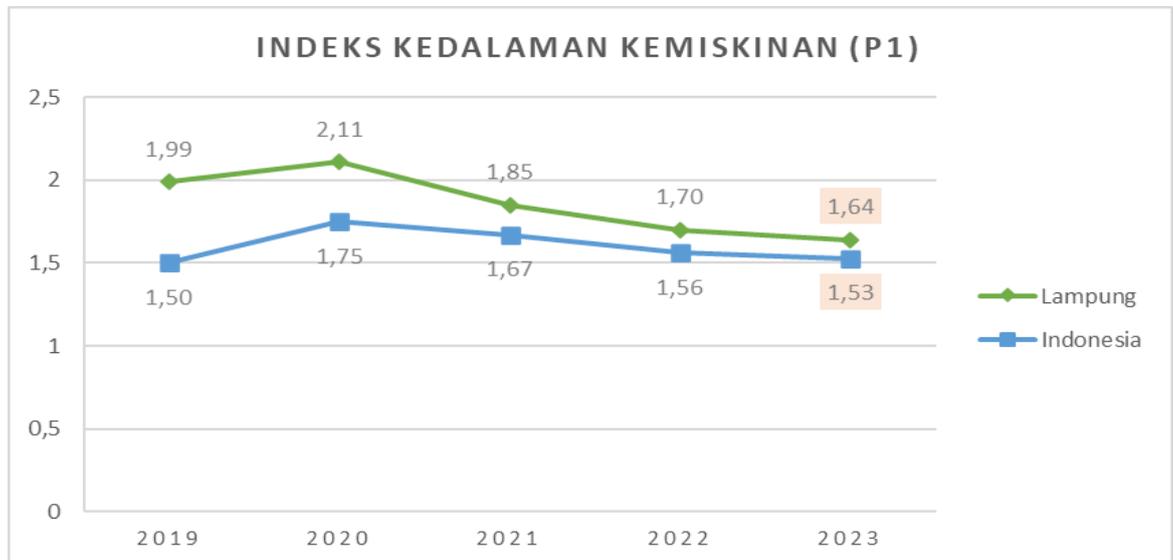
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

#### 2.2.1.1.17.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Perlu juga diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 1,99 di tahun 2019 menjadi 1,64 pada Maret 2023. Pada periode September 2022 sampai Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) pada Maret 2023 sebesar 1,64 turun dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,70. Penurunan nilai  $P_1$  ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks  $P_1$  Nasional yang pada tahun 2023 berada pada angka 1,53.

Grafik 2. 129 Indeks Kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Indonesia dan Lampung Tahun 2019 - 2023 (persen)

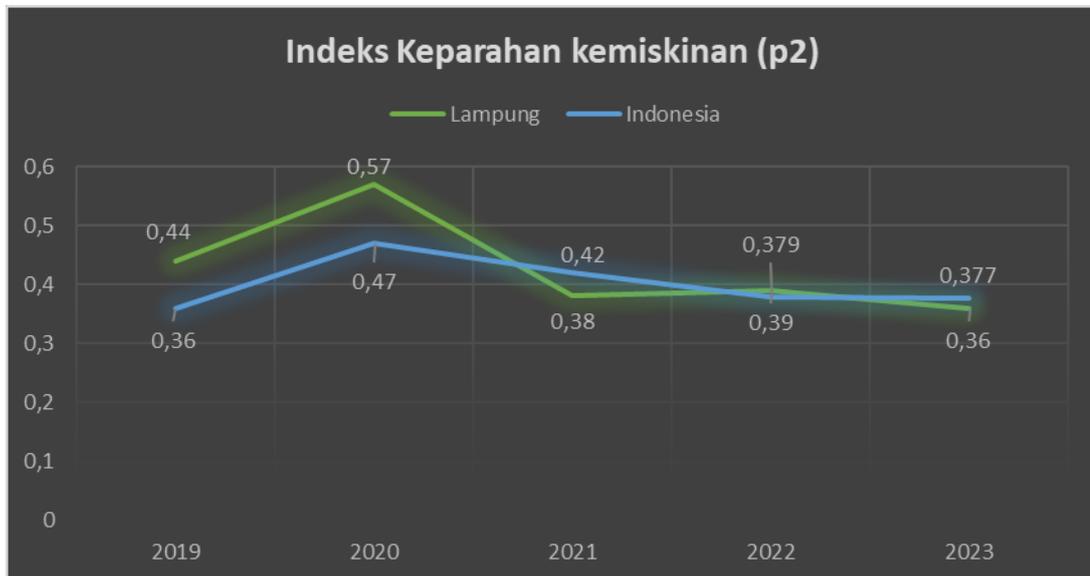


Sumber: BPS Indonesia dan Susenas, 2023 (diolah)

### 2.2.1.1.17.3 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,44 di Tahun 2019 menjadi 0,36 di 2023. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid 19, meningkat dari 0,47 di tahun 2019 menjadi 0,57 di tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38, dan sedikit meningkat di Tahun 2022 menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2019-2023 Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Provinsi Lampung selalu berada di atas Nasional, hanya di Tahun 2021 dan 2023 capaiannya dibawah capaian nasional.

Grafik 2. 130 Indeks Keparahan kemiskinan (P<sub>2</sub>) Indonesia dan Lampung Tahun 2019 - 2023 (persen)



Sumber: BPS Indonesia dan Susenas, 2023 (diolah)

### 2.2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Dalam melakukan penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi
3.	66 % ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat berjumlah 24 indikator, dimana pada akhir tahun 2023 terdapat 15 indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja rata-rata telah mencapai angka 97,40 persen (Sangat Tinggi). Terdapat 7 indikator yang tidak dilaksanakan lagi di tahun 2023, 1 indikator dengan capaian kinerja 85,12 persen (Tinggi), dan 1 indikator dengan capaian kinerja 60 persen (Rendah).

Meskipun Indikator Nilai SAKIP telah mencapai kategori Tinggi pada angka 85,12 persen dengan predikat B, namun tetap belum mencapai target Predikat BB yang ditetapkan. Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan adanya kendala-kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas, masih terdapat perangkat daerah yang kurang memahami akan pentingnya SAKIP, koordinasi antar instansi yang belum sepenuhnya berjalan, komitmen pimpinan yang belum optimal, dan kurang solidnya Tim SAKIP Provinsi Lampung.

Indikator yang tidak mencapai target adalah Indikator Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah. Kendala dari tidak tercapainya indikator ini karena sulitnya melakukan observasi dilapangan untuk melakukan peninjauan lapangan. Dimana kondisi wilayah dikuasai oleh tetua adat atau pribumi keturunan yang berasumsi bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah nenek moyang atau peninggalan orang tua mereka yang diklaim milik pribadi. Meskipun begitu pemerintah telah membentuk Tim Penegasan Batas melalui SK gubernur No. G/19/B/HK/2021 dan SK Gubernur Lampung No. G/139/B.03/HK/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria Provinsi Lampung Tahun 2021, dan di Tahun 2023 berhasil mendapatkan penghargaan sebagai daerah Provinsi yang telah menyelesaikan batas desa.

Tabel 2. 80 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	13
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>										
1	Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian		87.19	90		100	97,22	<b>97,22</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	58.92	B	B	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	BB	Biro Organisasi
3	Nilai SAKIP (TPB)	Predikat	B	BB	67.11	BB	B	<b>85,12</b>	<b>Tinggi</b>	BB	Biro Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai	82	84	85.13	86	86	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	88	Biro Organisasi
5	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial			3.2		3,3				3.4	Sekretariat Daerah
6	Nilai SKM untuk Fasilitas Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan			3.2		3,3				3.4	Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
	hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum										
7	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtangaan di Sekretariat Daerah			3.2		3,3				3.4	Sekretariat Daerah
8	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan			3.2		3,3				3.4	Sekretariat Daerah
9	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B			70		75				80	Sekretariat Daerah
10	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	75.11	97.5	94.69	98	92,67	<b>94,56</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
11	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan. Pemahaman. Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan			89		89				90	Sekretariat Daerah
12	Persentase Pelayanan Kerumahtangaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	99.23	100%	49.69%	100	100	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	100%	Biro Umum



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
13	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	98.27	100%	50.13%	100	100	100	Sangat Tinggi	100%	Biro Umum
14	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	98.3	100%	51.92%	100	93,75	93,75	Sangat Tinggi	100%	Biro Umum
15	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai (skor)	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Biro Pem Otda
16	Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Persen	33.33	100	100	100	60	60	Rendah	100	Biro Pem Otda
17	Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Persen	97.75	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Biro Pem Otda
18	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	Persen	91.6	80%	91%	85	90,06	100	Sangat Tinggi	90%	Biro Adbang
19	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	100	80	100	87,5	100	100	Sangat Tinggi	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
20	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Persen	74.09	72.5	74.09	72,75	74,09	100	Sangat Tinggi	73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	%	102.2	92	80	93	102,5	100	Sangat Tinggi	94	Biro PBJ
22	Persentase pelayanan keprotokolan	%	91	92	98.5	93	93	100	Sangat Tinggi	94	Biro Administrasi Pimpinan
23	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	Persen	100	100	100					100	Biro Perekonomian
24	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	Persen	78	80	100	85	85	100	Sangat Tinggi	90	Badan Penghubung
	Total							97,40			



## 2. Aspek Pelayanan Umum

### a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar berjumlah 25 indikator, dan terdapat pada 6 bidang, yaitu 1 indikator pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6 indikator pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 1 indikator pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, 2 indikator pada bidang Pendidikan, 11 indikator pada bidang Kesehatan, 2 indikator pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 2 indikator pada bidang sosial.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar berada angka 90,15 persen dengan kategori Tinggi. Terdapat 22 indikator yang mencapai kategori Sangat Tinggi, 2 indikator dengan kategori Tinggi, dan 1 indikator dengan kategori Rendah. Indikator dengan kategori Tinggi adalah Indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan, serta Indikator dengan kategori Rendah adalah Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Capaian kinerja indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi masuk dalam kategori Tinggi dengan mencapai angka 86,55 persen, namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 550 kasus. Sedangkan jumlah Kasus Kematian Bayi yang terjadi di tahun 2023 masih sebanyak 624 kasus. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator ini karena masih tingginya angka BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan Asfiksia, penanganan balita sakit belum menerapkan standar pemeriksaan yang benar, keterbatasan jumlah dokter spesialis anak di Kabupaten/Kota, sistem rujukan maternal yang belum efektif, dan terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan pendukung pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Indikator lain dengan capaian kinerja Tinggi yaitu Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan berada pada angka 88,62 persen. Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 87 persen dan hanya tercapai 77,1 persen di tahun 2023. Hal ini disebabkan belum dilakukan penilaian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga, meskipun begitu perangkat daerah tetap melakukan survey secara internal dengan melalui Elektronik Survey Kepuasan Pasien Online.

Selanjutnya, Indikator Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023 dengan target 886 dan realisasi 525 orang dengan capaian 59,26 persen (Rendah). Kendala tidak tercapainya indikator ini karena adanya perubahan anggaran sehingga pelayanan terhadap Rehabilitasi NAPZA tidak optimal. Meskipun begitu, bagi masyarakat kurang mampu pelayanan tetap dilakukan dengan pembayaran untuk pasien NAPZA dapat difasilitasi dengan menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Tabel 2. 81 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum  
(Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	13
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>										
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1.1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	75	76	76.85	77	78,67	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>78</b>	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
<b>2</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>										
2.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	Persen	100	86	86	86	90	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>95.00%</b>	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	82.27	83.75	85.74	85,47	87,22	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>87.19%</b>	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	77.49	79.97	83.88	82,44	88,1	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>84.52%</b>	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.4	Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	71.11	71.66	72.59	72,74	75,7	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>73.83%</b>	Dinas Perumahan Kawasan



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
											Pemukiman dan Cipta Karya
2.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	Persen	100	97.38	97.01	97,92	93,05	95,03	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>98.47%</b>	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
<b>3</b>	<b>PSDA</b>										
3.1	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2	Persen	40	45	45	50	50	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>55</b>	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
<b>4</b>	<b>Pendidikan</b>										
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat	Persen	87.59	96.33	97.16	97,83	98,89	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>99.33</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Indeks	63.55	67.24	71.37	68,24	74	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>69.24</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>5</b>	<b>Kesehatan</b>										
5.1	Prevalensi stunting	Persen	18.5	18.4	15.2	16	15,2	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>14</b>	Dinas Kesehatan
5.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	187	150	96	130	105	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>110</b>	Dinas Kesehatan
5.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	489	570	526	550	624	86,55	<b>Tinggi</b>	<b>520</b>	Dinas Kesehatan
5.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	Persen	94	90	96	90	96	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>90</b>	Dinas Kesehatan
5.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	667	806	462	886	525	59,26	<b>Rendah</b>	<b>974</b>	Rumah Sakit Jiwa Daerah



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
5.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100	Sangat Tinggi	Akreditasi Tingkat Paripurna	Rumah Sakit Jiwa Daerah
5.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	75	82	80.63	84	80,63	95,99	Sangat Tinggi	86	Rumah Sakit Jiwa Daerah
5.8	Akreditasi rumah sakit		Paripurna SNARS Nilai Rara-rata Pokja 88%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 90%	Paripurna SNARS Nilai Rata-rata Pokja 93%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93%	Paripurna SNARS Nilai Ratarata Pokja 88%	94,62	Sangat Tinggi	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95%	RSUAM
5.9	Nilai SPM	Persen	84.51%	85%	85%	88	85,1	96,70	Sangat Tinggi	91%	RSUAM
5.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	Persen	90%	77%	77%	88	92	100	Sangat Tinggi	95%	RSUAM
5.11	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	persen	73.20%	85%	73%	87	77,1	88,62	Tinggi	88%	RSUAM
<b>6</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>										
6.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	Persen	65	70	75	75	75	100	Sangat Tinggi	80	Satpol PP
6.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan		65	70	75	75	75	100	Sangat Tinggi	80	Satpol PP
<b>7</b>	<b>Sosial</b>										
7.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	0.14	1.72	5.6	1,74	1,72	98,85	Sangat Tinggi	1.76	Dinas Sosial



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
7.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen	20	20	20	20	20	100	Sangat Tinggi	20	Dinas Sosial
<b>TOTAL</b>								<b>90,15</b>			



## **b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berjumlah 40 indikator, yang tersebar pada 17 bidang, yaitu 2 indikator bidang tenaga kerja, 5 indikator bidang Pangan, 2 indikator bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 1 indikator bidang Penanaman Modal, 6 indikator bidang Lingkungan Hidup, 1 indikator bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 3 indikator bidang Perhubungan, 5 indikator bidang Komunikasi dan Informatika, 1 indikator bidang Persandian, 3 indikator bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 indikator bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 indikator bidang Kepemudaan dan Olahraga, 1 indikator bidang Kebudayaan, 1 indikator bidang Perpustakaan, dan 1 indikator bidang Kearsipan.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berada pada angka 100 persen (Sangat Tinggi). Terdapat 8 indikator yang tidak dilaksanakan yaitu 4 indikator pada bidang pangan, 1 indikator pada bidang penanaman modal, 2 indikator pada bidang lingkungan hidup, dan 1 indikator pada bidang komunikasi dan informatika. Tiga indikator belum mencapai target yaitu indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian 89,29 persen (Tinggi), indikator Persentase Desa Mandiri dengan capaian 44,39 persen (Sangat Rendah), dan Indikator Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-Event Nasional Rata-Rata dengan capaian 55,87 persen (Rendah).

Pada indikator bidang Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) belum mencapai target meskipun tingkat capaian kinerja termasuk pada kategori Tinggi. Berdasarkan data trend perubahan Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung selama periode 2021-2023, mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target dengan capaian 38,42. Hal ini merupakan upaya pemangku kepentingan terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dan Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melakukan inventarisasi dan deleniiasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Tutupan vegetasi lainnya yang relevan di Provinsi Lampung. Terdapat 14 kabupaten/kota mengalami peningkatan dan hanya kabupaten Way Kanan

mengalami penurunan dikarenakan titik RTH No 1-1329 rata-rata tidak memiliki tutupan vegetasi pepohonan/memiliki tutupan vegetasi pepohonan <50%, dan tidak memiliki deliniasi/polygon serta beberapa titik pada tutupan vegetasi duplikat titik. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas lahan melalui survei lokasi Ruang Terbuka Hijau dan tutupan vegetasi relevan lain dan peningkatan melalui program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati). Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung, Tahun 2023 masih berada dibawah target (38,42) dan terdapat 7 kabupaten yang mencapai target, antara lain Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Kota Metro serta terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Keberhasilan terhadap tutupan lahan di Provinsi Lampung dengan adanya kegiatan/program tersebut belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung secara signifikan. Hal ini disebabkan karena tutupan lahan tersebut teridentifikasi sebagai lahan pertanian lahan kering campuran. Harapan kedepan penilaian Indeks Kualitas Lahan juga memperhatikan pembobotan dan penilaian terhadap tutupan lahan yang lainnya sehingga setiap tutupan lahan memberikan kontribusi terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan.

Ketidaktercapaian indikator Persentase Desa Mandiri disebabkan karena belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan Desa Mandiri, selain itu masih terdapatnya desa yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga menyulitkan operasional *Smart Village* yang merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa mandiri. Penyebab sulitnya pengembangan program *Smart Village* juga disebabkan karena penambahan jumlah desa *user* yang



terintegrasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam program *Smart Village* sehingga memiliki resiko penurunan aksesibilitas ke *server/over load*.

Penyebab tidak tercapainya Indikator Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-Event Nasional antara lain masih kurangnya atlet yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung untuk diikutsertakan pada event kejuaraan pelajar nasional, dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pembinaan olahraga prestasi.

Tabel 2. 82 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum  
(Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	13
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>										
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>										
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	95.31	96.34	95.48	96,43	95,77	99,32	Sangat Tinggi	96.52	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Persen	80.97	84	82.64	86	86	100	Sangat Tinggi	88	Dinas Tenaga Kerja
<b>2</b>	<b>Pangan</b>										
2.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.25	78	78.61	79	83,04	100	Sangat Tinggi	80	Dinas KPTPH
2.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	1.27	cv ≤ 5%	4.21	cv ≤ 5%				cv ≤ 5%	Dinas KPTPH
2.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	2.63	14.4%	6%	1				1%	Dinas KPTPH
2.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	85.3	87	90.6	88				89	Dinas KPTPH
2.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	100	99	100	99,5				100	Dinas KPTPH
<b>3</b>	<b>Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah</b>										
3.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Persen	2.28	3.29	3.98	4,47	4,31	96,42	Sangat Tinggi	5.71	Dinas Koperasi dan UKM



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
3.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	35.17	34.26	32.61	35,22	35,35	100	Sangat Tinggi	36.18	Dinas Koperasi dan UKM
<b>4</b>	<b>Penanaman Modal</b>										
4.1	Realisasi investasi			12 Trilyun	9.36 Trilyun	13,5 Trilyun	7,9 Trilyun (S.d TW III)			16 Trilyun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
5.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57.77	58.44	54.72	58,54	55,36	94,57	Sangat Tinggi	58.64	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85.46	84.34	87.32	84,44	88,04	100	Sangat Tinggi	84.54	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79.56	73.32	86.48	73,94	83,87	100	Sangat Tinggi	74.56	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33.54	40.85	34.29	43,03	38,42	89,29	Tinggi	45.21	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	15.23	8.07	2.61	8,42	12,31	100	Sangat Tinggi	8.83	Dinas Lingkungan Hidup
5.7	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup	Persen	94.32	89	99.03	91				93	Dinas Lingkungan Hidup



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
	(PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah										
<b>6</b>	<b>BPBD</b>										
6.1	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		4.8	5.83	5.29	6,21	6,49	100	Sangat Tinggi	6.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>7</b>	<b>Perhubungan</b>										
7.1	Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Indeks	0.68	0.7	0.68	0,72	0,7	97,22	Sangat Tinggi	0.73	Dinas Perhubungan
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	72.62	84	83.34	85	83	97,65	Sangat Tinggi	86	Dinas Perhubungan
7.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persen	29	35	33	40	37	92,50	Sangat Tinggi	45	Dinas Perhubungan
<b>8</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>										
8.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.76	3.0 (Baik)	0	Baik	Baik	100	Sangat Tinggi	3.5 (Baik)	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
8.2	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	Persen	80	85	85	90	90	100	Sangat Tinggi	95	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
8.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	87.98	75 (cukup informatif)	0	80	91,57	100	Sangat Tinggi	85 (menuju informatif)	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
8.4	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Cukup Informatif						Informatif	Sekretariat Daerah
8.5	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional			Tinggi	N/A			N/A		Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8.6	Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah	Persen	90	91	100	92	92	100	Sangat Tinggi	93	Biro Administrasi Pimpinan
<b>9</b>	<b>Persandian</b>										
9.1	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	4	6	6	8	8	100	Sangat Tinggi	10	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
10.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	persen	4.59	3	2.02	3,1	6,35	100	Sangat Tinggi	3.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung		86.67	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif		100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
<b>11</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
11.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		103.31	82	98.26	88	100	100	Sangat Tinggi	92	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		53	65	61.53	82	79,49	96,94	Sangat Tinggi	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>12</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>										
12.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	16.58	12.76	68.89	31,89	130,92	100	Sangat Tinggi	31.89	Dinas PMDT
12.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	3.33	23.44	4,3	16,67	75	100	Sangat Tinggi	23.44	Dinas PMDT
12.3	Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	Persen				23,44	70,31	100	Sangat Tinggi		Dinas PMDT
<b>13</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
13.1	Cakupan KB Aktif		74.52	67.29	67.21	67,71	70,8	100	Sangat Tinggi	68.24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>14</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>										
14.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	50	40.00%	52.54%	45	24,14	55,87	Rendah	50.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	73.08	52.49%	34.13%	53,82	50	92,9	Sangat Tinggi	55.15%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>										



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
15.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	persen	67.5	72.5	70	76,25	80	100	Sangat Tinggi	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>16</b>	<b>Perpustakaan</b>										
16.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan		142	38.5	37.85	48,2	47,1	100	Sangat Tinggi	55.6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>17</b>	<b>Kearsipan</b>										
17.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK		50	30	30	35	40	100	Sangat Tinggi	40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>TOTAL</b>							<b>100</b>			



### c. Urusan Pilihan

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pilihan berjumlah 29 indikator, yang tersebar pada 8 bidang, yaitu 4 indikator bidang Pariwisata, 5 indikator bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan), 3 indikator bidang Perdagangan, 1 indikator bidang Perindustrian, 3 indikator bidang Kelautan dan Perikanan, 7 indikator bidang Perkebunan, 3 indikator bidang Kehutanan, dan 1 indikator bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Pilihan berada pada angka 100 persen (Sangat Tinggi). Satu indikator tidak dilaksanakan yaitu indikator pada bidang Kehutanan, dengan Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik Dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi Maupun Restorasi. Terdapat 19 indikator dengan Capaian Sangat Tinggi, 4 indikator dengan capaian Tinggi, 3 indikator dengan capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator dengan capaian Sangat Rendah.

Indikator dengan capaian Sangat Rendah terdapat di bidang Perdagangan, pada Indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan target 6 persen dan realisasi 1,4 persen. Oleh karena itu tingkat capaian pada indikator ini hanya sebesar 23,33 persen (Sangat Rendah). Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ini menggunakan dasar perhitungan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Hasil perhitungan di tahun 2023 menunjukkan progress capaian dari indikator ini masih jauh dari target yang ditetapkan karena beberapa komoditas mengalami penurunan harga.

Indikator dengan capaian Rendah terdapat pada bidang Pariwisata yaitu Indikator Persentase Peningkatan Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan dengan Target 12 persen di tahun 2023 dan realisasi sebesar 7,2 persen dengan tingkat capaian 60 persen (Rendah). Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya indikator ini karena terdapat perubahan target yang disesuaikan dengan dokumen review Renstra Dinas Pariwisata, sehingga target yang ditetapkan pada Dinas Pariwisata lebih rendah daripada target yang ditetapkan pada RKPD. Perubahan target ini berdasarkan pada

kondisi pariwisata yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak dari pandemi covid-19.

Tingkat capaian kinerja dengan kategori Sedang dicapai oleh 3 indikator antara lain pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor Pariwisata dan (Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi Lampung, Bidang Pertanian dengan Indikator Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura, dan pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Persentase Ekspor Perikanan. Permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian Indikator Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura antara lain disebabkan oleh :

1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian
2. Konversi lahan yang tidak terkendali
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani
4. Tingkat kehilangan hasil yang cukup tinggi, penanganan pasca panen yang belum optimal, dan rendahnya daya saing terhadap produk impor.
5. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses sumber permodalan, penurunan tenaga kerja dan minat pemuda pada pengembangan tanaman hortikultura, dan kemampuan petani mengadopsi teknologi masih kurang.
6. Dalam pengembangan produksi tanaman hortikultura dapat sekaligus menjadi lokasi pariwisata, namun sinkronisasi sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura dengan pariwisata masih belum terjalin dengan baik.

Pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor Pariwisata dan (Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi Lampung, capaian kinerja kategori sedang dan belum mencapai target mengalami hambatan dikarenakan masih belum pulih secara menyeluruh kondisi pariwisata yang terdampak dari pandemi covid-19. Kemudian pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Persentase Ekspor Perikanan capaian kinerja pada kategori sedang namun belum mencapai target. pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian ekspor perikanan, berupa bantuan dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan berupa paket sarana rantai dingin (cheest freezer,



coolbox), dan sarana pengolahan (vacuum sealer), bazar perikanan, dan pemantauan produk perikanan.



Tabel 2. 83 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	13
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>										
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>										
1.1	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	8.9	33	37.9	37	315	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>42</b>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.2	Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	9.7	12	11.24	14	12,1	86,43	<b>Tinggi</b>	<b>17</b>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.3	Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	4.8	7	7.9	12	7,2	60,00	<b>Rendah</b>	<b>17</b>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persen	2.16	3.5	2.18	3,75	2,7	72,00	<b>Sedang</b>	<b>4</b>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
<b>2</b>	<b>Pertanian (Tanaman pangan. Perkebunan dan Peternakan)</b>										
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu)	Persen	99.48	100	80	100	100,98	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>100</b>	Dinas KPTPH
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis)	Persen	91.3	100	70	100	71,19	72,19	<b>Sedang</b>	<b>100</b>	Dinas KPTPH

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
2.3	Jumlah Populasi Ternak	Jumlah	860.951								Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	-Sapi Potong		94.254.495	857.657	907.606	936.865	968.364	100	Sangat Tinggi	909.888	
	- Ayam Pedaging		13.230.147	86,291.69	114,422.47	88.017.528	101.457.332	100	Sangat Tinggi	89.777.878	
	- Ayam Petelur		14,827,441	9644.31	16,599.64	13.634.285	15.708.329	100	Sangat Tinggi	10.033.943	
2.4	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	Jumlah	108.286	110.302	147,533	115.293	145.920	100	Sangat Tinggi	114.758	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	Jumlah Produksi Telur	Jumlah	195.204	172.863	213.206	203.090	235.556	100	Sangat Tinggi	179.847	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>3</b>	<b>Perdagangan</b>										
3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4.57	5.8	15.35	6	1,4	23,33	Sangat Rendah	6.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.2	Nilai Ekspor Non Migas	Indeks	4.83	3.48	5.18	3,65	4,65	100	Sangat Tinggi	3.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Indeks	1.1	≤1.5	5.51	≤1,5	2,74	100	Sangat Tinggi	≤2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>4</b>	<b>Perindustrian</b>										
4.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	8.26	6.3	0.47	6,8	9,76	100	Sangat Tinggi	7.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
<b>5</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
5.1	Pentase Produksi Perikanan	Persen	90	100	100.5	100	96,7	96,7	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>100</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2	Prosentase Ekspor Perikanan	Persen	84.7	100	106.5	100	70,09	70,09	<b>Sedang</b>	<b>100</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Patuh Kepada Alokasi Pemanfaatan Ruang	Persen				95	95	100	<b>Sangat Tinggi</b>		
<b>6</b>	<b>Perkebunan</b>										
6.1	Jumlah produksi lada rakyat	TON	15.412	15464	15455	15.695	15.036	95,80	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>15.932</b>	Dinas Perkebunan
6.2	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	TON	117.311	117780	118139	119.546	113.739	95,14	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>121.34</b>	Dinas Perkebunan
6.3	Jumlah produksi tebu rakyat	TON	148.549	189606	184006	192.450	197.823	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>195.337</b>	Dinas Perkebunan
6.4	Jumlah produksi Karet rakyat	TON	192.601	164706	192395	167.177	192.616	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>169.684</b>	Dinas Perkebunan
6.5	Jumlah produksi kakao rakyat	TON	57.507	61250	53991	62.170	48.198	77,53	<b>Tinggi</b>	<b>63.101</b>	Dinas Perkebunan
6.6	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	TON	197.639	199959	202216	202.958	203.104	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>206.003</b>	Dinas Perkebunan
6.7	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	TON	81.475	86225	78319	87.519	78.571	89,78	<b>Tinggi</b>	<b>88.831</b>	Dinas Perkebunan
<b>7</b>	<b>Kehutanan</b>										
7.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam. Rehabilitasi maupun Restorasi	Persen	2.63	1.275	538 Ha					<b>1.275</b>	Dinas Kehutanan



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
7.2	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen				0,05	0,5	100	<b>Sangat Tinggi</b>		
7.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks				43,03	38,42	89,29	<b>Tinggi</b>		
<b>8</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>										
8.1	Rasio Dusun Berlistrik	Indeks	52.96	53	53.14	54	54,01	100	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>55</b>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



#### **d. Urusan Penunjang**

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum pada Urusan penunjang berjumlah 21 indikator, yang tersebar pada 5 bidang, yaitu 3 indikator bidang Keuangan, 5 indikator bidang Perencanaan Pembangunan, 2 indikator bidang Penelitian dan Pengembangan, 4 indikator bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, 7 indikator bidang Pengawasan.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Penunjang berada pada angka 99,61 persen (Sangat Tinggi). Satu indikator tidak dilaksanakan yaitu indikator pada bidang Pengawasan, dengan Indikator Level Kematangan/Maturitas PBJ. Terdapat 16 indikator dengan Capaian Sangat Tinggi, 1 indikator dengan capaian Tinggi, 1 indikator dengan capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator belum mencapai 100 persen yaitu Indikator Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Belum tercapainya indikator ini karena pada saat dokumen evaluasi ini disusun, evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh BPK sedang dalam proses pelaksanaan. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimuat dalam Lampiran BAB VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah halaman 387 Point B.h bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksaa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian belum dapat dinyatakan mengenai opini BPK untuk tahun anggaran 2023 sehingga capaian kinerja belum tercapai.

Pada Bidang Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 57,89 persen dengan kategori capaian kinerja Rendah. Pada indikator ini terdapat kesepakatan peningkatan target PAD antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung menjadi sebesar 8,9 Trilyun, dan di akhir tahun 2023 tercapai sebesar 7,097 Trilyun atau 87,69 persen, sehingga masih ada selisih 1 Trilyun yang belum terpenuhi dari target yang ditetapkan. Secara rinci berikut komponen PAD yang tidak tercapai :

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNBMK), hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan kendaraan bermotor secara nasional pada

Periode Agustus – Desember 2023, dan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor listrik, dimana kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak BBN-1.

2. Pajak Rokok, disebabkan tertundanya penyaluran pajak rokok Tri Wulan IV oleh Kementerian Keuangan sebesar lebih kurang 80 Milyar.
3. Sektor lain-lain PAD yang Sah, yang tidak tercapai disebabkan oleh penerimaan pendapatan dari pelepasan Aset Tanah Way Dadi.
4. Sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak tercapai karena tidak terpenuhinya Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal BUMD pada PT. Lampung Jasa Utama (LJU).

Pada Bidang Perencanaan Pembangunan, terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja Sedang (70,68 persen), yaitu Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang Target Tahunannya Tercapai. Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini telah dilakukan oleh Bappeda dengan didampingi oleh PD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) yang terus bersinergi untuk melakukan evaluasi capaian kinerja kepada Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kepala Daerah dan melakukan penyesuaian jumlah dari target indikator kinerja perangkat daerah dengan kemampuan fiskal daerah.

Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penunjang)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
	<b>Penunjang Urusan</b>										
<b>1</b>	<b>Keuangan</b>										
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian		WTP(2020)	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	WTP	BPKAD
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14.81	2	13.64	4,75	2,75	57,89	Rendah	5	Badan Pendapatan Daerah
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	85.02	85	86.22	88,3	89,46	100	Sangat Tinggi	88.5	Badan Pendapatan Daerah
<b>2</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>										
2.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Sangat Tinggi	Tepat Waktu	Bappeda
2.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	23.92	30	42.77	31	48,3	100	Sangat Tinggi	32	Bappeda
2.3	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Bappeda
2.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Bappeda
2.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	45*	90	90	95	70	70,68	Sedang	95	Bappeda
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
3.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	80	82	82	85	85	100	Sangat Tinggi	87	Balitbangda

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
3.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Balitbangda
4	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>										
4.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi		64.5	70	70.3	75	73,15	97,53	Sangat Tinggi	80	BKD
4.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik		50	79	70.83	91	87,5	96,15	Sangat Tinggi	100	BKD
4.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat		23.49	32.39	32.39	38,3	38,4	100	Sangat Tinggi	48.4	BPSDM
4.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat		B	A	B	A	B	89,50	Tinggi	A	BPSDM
5	<b>Pengawasan</b>										
5.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level	3	3 (3.03)	3(3.192)	3 (3,05)	3,19	100	Sangat Tinggi	3 (3.08)	Inspektorat
5.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	persen	96	84%	96%	86	94	100	Sangat Tinggi	88%	Inspektorat
5.3	Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan.	persen	58.3	70	78.57	80	80,68	100	Sangat Tinggi	90	Sekretariat DPRD
5.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Biro Hukum
5.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi		100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	Biro Hukum
5.6	Level Kematangan/Maturitas PBJ			3						5	Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021	2022		2023				TARGET	Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	2024	
5.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Tatalaksana)	persen	80	85	85	90	90	100	Sangat Tinggi	100	Biro Organisasi
	TOTAL							99,61			

### **2.2.1.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung**

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial



Tabel 2. 85 Capaian Jenis pelayanan SPM Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	Bidang	Capaian (%)	Rank
1.	Pendidikan	85,1	6
2.	Kesehatan	90,9	3
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,7	5
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90,6	4
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	94,0	2
6.	Sosial	96,0	1

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan realisasi yang cukup tinggi. Capaian SPM diatas 90 % terdapat 4 bidang yaitu : 1). Bidang bidang Sosial mencapai 96 %; 2). Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mencapai 94 %; 3). Bidang Kesehatan mencapai 90,9 %, dan 4). Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 90,6 %, sedangkan 2 bidang SPM dibawah 90 % yaitu : 1) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 88,7 % dan Bidang Pendidikan mencapai 85%.

#### 2.2.1.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung di tahun 2022 ini masih terkendala dengan adanya pandemi *COVID-19*, walaupun memang kondisinya sudah berangsur-angsur mulai membaik yang terlihat melalui berkurangnya jumlah penderita *COVID-19* Provinsi Lampung tahun 2022.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun 2022 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2022

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan	24	3	1	4	32	13%
2	Tanpa Kelaparan	8	5	1	1	15	6%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	4	0	1	34	14%
4	Pendidikan berkualitas	18	4	0	6	28	12%
5	Kesetaraan Gender	11	2	0	3	16	7%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	1	1	3	12	5%
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	0	3	1%
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	9	5	0	24	10%
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	2	0	0	6	2%
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	2	0	1	11	5%
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	2	0	2	9	4%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	1%
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	0%
14	Ekosistem Laut	3	3	0	0	6	2%
15	Ekosistem Darat	4	1	0	0	5	2%
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16	5	0	10	31	13%
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	0	0	0	6	2%
	<b>JUMLAH</b>	<b>158</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>242</b>	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>65%</b>	<b>19%</b>	<b>3%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung mencapai yaitu 65%, sedangkan yang belum tercapai hanya 19% dan tidak ada data 3% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%. Sedangkan capaian 242 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial dan pilar hukum dan tata kelola, dari 4 pilar TPB tersebut dilihat indikator capaian menurut tujuan TPB dapat pada table dibawah ini:

Tabel 2. 87 Tabel Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	0	3	6,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	9	5	0	24	48,00
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	2	0	0	6	12,00
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	2	0	1	11	22,00
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	0	0	0	6	12,00
	<b>TOTAL PILAR EKONOMI</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10% serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.

Tabel 2. 88 Tabel Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	1	1	3	12	33,33
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	2	0	2	9	25,00
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	8,33
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	2,78
14	Ekosistem Laut	3	3	0	0	6	16,67
15	Ekosistem Darat	4	1	0	0	5	13,89
	<b>TOTAL PILAR LINGKUNGAN</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>100,00</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>61,11</b>	<b>22,22</b>	<b>2,78</b>	<b>13,89</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%, sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

Tabel 2. 89 Tabel Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	(%)
1	Tanpa Kemiskinan	24	3	1	4	32	25,60
2	Tanpa Kelaparan	8	5	1	1	15	12,00
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	4	0	1	34	27,20
4	Pendidikan berkualitas	18	4	0	6	28	22,40
5	Kesetaraan Gender	11	2	0	3	16	12,80
	<b>TOTAL PILAR SOSIAL</b>	<b>90</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>72</b>	<b>14,4</b>	<b>1,6</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih menggunakan data sebelumnya 12%.

Tabel 2. 90 Tabel Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGS Provinsi Lampung Tahun 2022

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Total	16	5	0	10	31	100,00
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	16	5	0	10	31	100,00
	PERSENTASE	51,6	16,1	-	32,3	100,0	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar hukum dan tata kelola dengan 1 TPB dengan indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 51,6%, sedangkan yang belum tercapai hanya 16,1% dan tidak ada data 0 serta masih menggunakan data sebelumnya 32,3%.

## 2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas

pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang terangkum dalam uraian sebagai berikut:

**a. Bidang Pendidikan**

- Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk Lampung pada tahun 2023 adalah 8,29 tahun masih di bawah angka nasional sebesar 8,77.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,77, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada di bawah angka Nasional yaitu 13,15.
- Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,33 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,53), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarnya tetap rendah, yaitu pada tahun 2023 hanya mencapai 71,74 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,42 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.
- Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 62,84 tetapi pada tahun 2023 berada di atas rata-rata Nasional sebesar 62,53.
- Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen
- Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

**b. Bidang Kesehatan**

- Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 14,9% jauh dibawah angka nasional 21,5% akan tetapi masih diperlukan kerja keras agar target stunting tahun 2024, yaitu sebesar 14% dapat tercapai.
- Kasus Kematian Bayi sepanjang tahun 2023 mencapai 624 kasus dan Kasus Kematian Ibu sebanyak 105 kasus sehingga diperlukan

tindakan agar kasus kematian bayi dan ibu dapat terus ditekan.

- Meski Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung terus meningkat, AHH Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 74,17 namun masih jauh di bawah rata-rata AHH Nasional sebesar 73,93.
- Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan.

**c. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat**

- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
- Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
- Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan;
- Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

**d. Bidang Kebudayaan**

- Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang belum tersertifikasi;
- Masih banyaknya warisan budaya benda sebagai objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai kebudayaan dalam pembangunan;
- Kurangnya tenaga ahli yang memahami tentang kebudayaan (Pamong Budaya);
- Masih rendahnya apresiasi generasi muda terhadap perlindungan dan pelestarian kebudayaan.

**e. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:**

- Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam berwirausaha;
- Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dalam hal kepemimpinan dan kepeloporan;
- Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional di sentra-sentra pembinaan;
- Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
- Belum tertatanya sistem maupun pola pembinaan dan pembibitan

terhadap atlet;

- Belum terfasilitasinya kegiatan olahraga secara berkesinambungan yang melibatkan masyarakat.

#### **f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung
- Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak hak anak. Belum optimalnya penanganan masalah *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

#### **g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
- Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
- Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

#### **h. Bidang Sosial**

- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi
- Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (**DTKS**) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi

- Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan
- Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.

**i. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah**

- Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

**j. Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

- Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
- Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
- Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
- Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

**k. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

**2.3.2 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Lampung tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan

dinamika isu strategis global dan nasional seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 7 (tujuh) isu strategis, yaitu 1) Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal; 2) Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan Kesehatan masih perlu ditingkatkan; 3) Angka Kemiskinan Lampung masih lebih tinggi dibanding Nasional; 4) Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal terutama wilayah barat Lampung; 5) Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 6) Pemantapan kehidupan masyarakat lampung yang aman, berbudaya dan demokratis; dan 7) Pembangunan Berkelanjutan. Keenam isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan 7) Membangun Kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan demokrasi.

Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 91 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024

Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</li> <li>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</li> </ul>	<p>Komoditi unggulan Provinsi Lampung terutama komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini menjadi sector dengan kontribusi dominan terhadap PDRB Provinsi Lampung, namun belum memberikan nilai tambah yang signifikan. Dampaknya adalah tingkat kesejahteraan petani masih rendah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertanian sebagai sektor unggulan di Provinsi Lampung belum memberikan capaian yang berarti terlihat dari produksi yang menurun serta produktivitas hasil pertanian yang belum mengalami peningkatan yang berarti.</li> <li>Hal yang sama juga terjadi pada sektor perikanan dan budidaya, yaitu terjadi penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu, dan rajungan</li> <li>Kontribusi Sektor Pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil sebesar 2,16% dalam PDRB Provinsi Lampung</li> </ol>	<p><b>Daya Saing dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Belum Optimal</b></p>
<p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran</p>	<p>Lampung mengalami bonus demografi yang salah satu keuntungannya adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>IPM Lampung sebesar 72,48 terendah se Sumatera dan dibawah rata-rata nasional sebesar 74,39;</li> <li>Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata rata lama sekolah penduduk lampung pada tahun 2023 adalah 8,29 tahun masih dibawah angka nasional sebesar 8,77.</li> </ol>	<p><b>Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan Kesehatan masih perlu ditingkatkan</b></p>



Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,77, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,15.</li> <li>7. Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,33 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,53), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.</li> <li>8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi capaian Tahun 2023 tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,74 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,42 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.</li> <li>9. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 62,84 masih berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 62,53.</li> <li>10. Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai</li> </ol>	



Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
		<p>2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, Provinsi Lampung menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.</li> <li>12. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.</li> <li>13. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>14. Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan</li> <li>15. Kasus Kematian Bayi sepanjang tahun 2023 mencapai 624 kasus dan Kasus Kematian Ibu sebanyak 105 kasus serta masalah stunting yang mencapai 14,9, walaupun lebih baik daripada angka nasional yaitu 21,5%.</li> </ol>	
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi	Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS Tahun 2020 berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung Tahun 2023 masih tinggi sebesar 11,11 dibandingkan</li> </ol>	<b>Angka Kemiskinan Lampung masih lebih tinggi dibanding Nasional</b>



Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
dan pemberantasan kemiskinan	12,76% masih berada dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional.	<p>dengan presentase Nasional sebesar 9,36.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>3. Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik</li> <li>4. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.</li> <li>5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi</li> <li>6. Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan</li> <li>7. Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.</li> <li>8. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja di Provinsi Lampung dengan kategori pendidikan rendah dibandingkan dengan Nasional.</li> <li>9. Keterbatasan tenaga pengajar / instruktur Balai Latihan Kerja.</li> </ol>	



Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja yang terbatas dan perlu peremajaan.</li> <li>11. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;</li> <li>12. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;</li> <li>13. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.</li> <li>14. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.</li> </ol>	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat – Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 76% dibandingkan dengan Nasional masih perlu ditingkatkan.</li> <li>2. Infrastruktur yang menghubungkan jalan lintas nasional pada sisi utara, tengah dan selatan masih minim</li> <li>3. Exit toll Trans Sumatera belum terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah</li> </ol>	<b>Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal terutama wilayah barat Lampung</b>



Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
		4. Pengembangan pelabuhan utama belum optimal	
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Diperlukan penguatan tata Kelola pemerintahan melalui upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai target. 68,79 dengan kategori "B" (Cukup Memadai) dibandingkan dengan nasional.</li> <li>2. Indeks SPBE masih perlu ditingkatkan.</li> <li>3. Nilai SAKIP pemerintah daerah Provinsi Lampung sekitar 68,10 dengan predikat "B" (Baik).</li> <li>4. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai pendorong perekonomian desa.</li> <li>5. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.</li> </ol>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</li> <li>• Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</li> </ul>	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Lampung yang Aman, Berbudaya dan Demokratis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Lampung Tahun 2023 mencapai 73,35 masih di bawah nasional (76,02), dan menempati peringkat 6 di Sumatera.</li> <li>2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2021, sehingga mencapai 78,32 sehingga mencapai target yang ditetapkan (74). Jika dibandingkan dengan nasional Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional.</li> </ol>	<b>Pemantapan Kehidupan Masyarakat Lampung yang Aman, Berbudaya dan Demokratis</b>

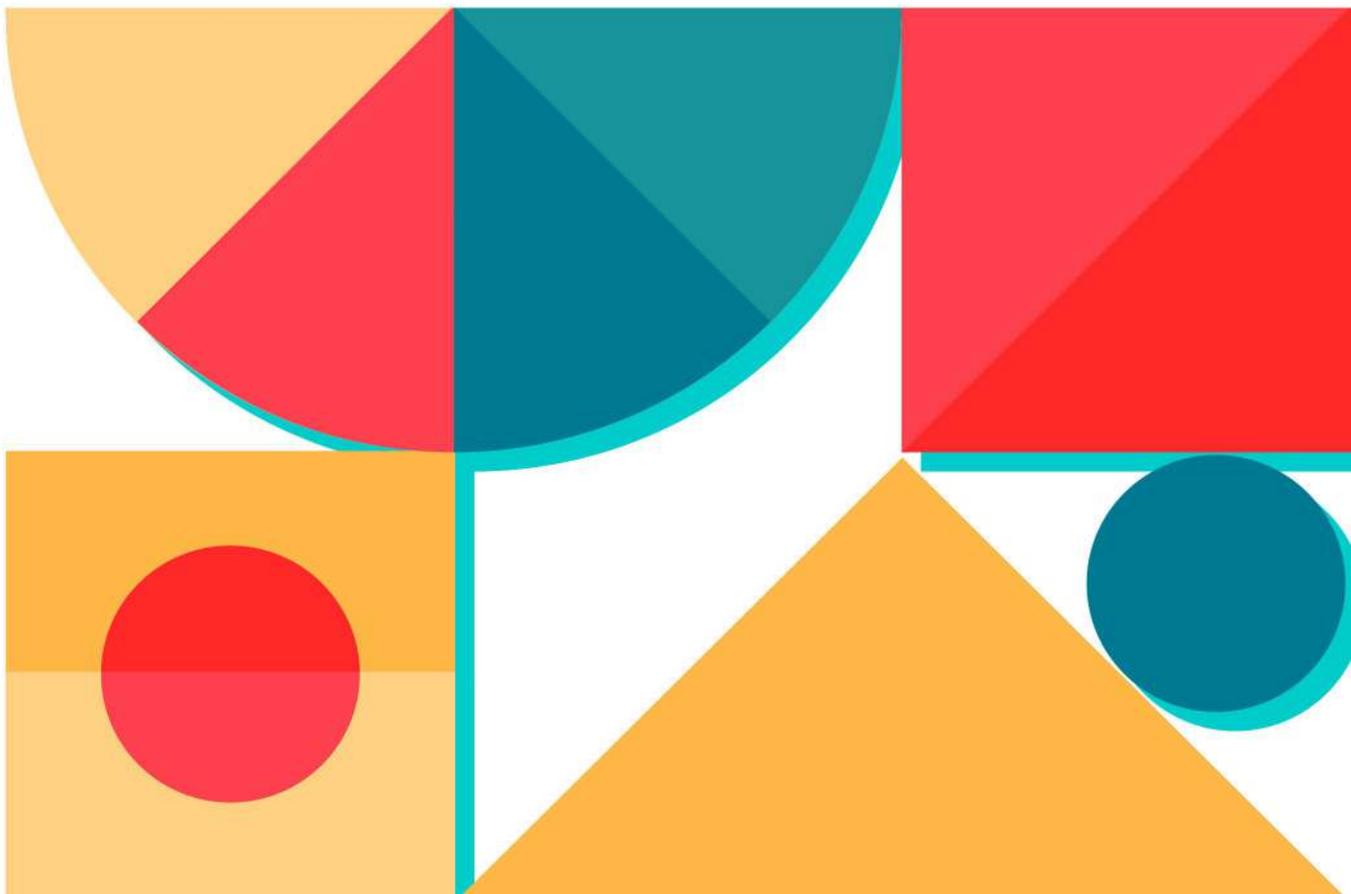
Prioritas Nasional pada RKP 2025	Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025 -2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
		<p>3. IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2022 mencapai target (55,3) yang ditetapkan yaitu 55,71 dan berada di atas angka nasional (55,13). Bila dibandingkan Tahun 2021, maka semua capaian di tiap dimensi mengalami peningkatan (dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ekspresi budaya, dimensi ketahanan sosial budaya dan dimensi budaya literasi serta dimensi gender).</p> <p>4. Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas (berdasarkan data tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 11.194 kasus);</p>	
Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam	Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang ditunjukkan dengan angka IKLH yang masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya daya dukung lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Masih Tingginya lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam.</li> <li>• Masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kualitas tutupan lahan.</li> </ul>	<b>Pembangunan Berkelanjutan</b>



RKPD PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN  
2025



# BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan dukungan perencanaan pembangunan wilayah yang memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional.

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Menyadari bahwa perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor



perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Lampung.

### **3.1.1 Dinamika Perekonomian Global**

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena dampak luka memar (scarring effect) di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (Advanced Economies, AEs).

Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya AS. Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal dunia dalam jumlah besar. Di negara Emerging Market and Developing Economies



(EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar.

Proses pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan perubahan iklim (el nino), struktur demografi, dan digitalisasi. Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun makin memperburuk dampak terbatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia di Ukraina terhadap pemulihan ekonomi di kawasan itu. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El Nino sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya terhadap inflasi dan pemulihan ekonomi.

Tuntutan dari negara maju untuk segera menurunkan emisi karbon dengan gerakan ekonomi-keuangan hijau makin mempersempit ruang gerak negara EMDEs, khususnya dalam mendorong pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua (*aging population*) kian memberikan beban pada anggaran fiskal pemerintahnya, sementara kenaikan tabungan masyarakat makin terbatas. Negara EMDEs yang masih menikmati bonus demografi dari kalangan muda belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja maupun kemampuan teknis bekerja. Sementara itu, kecepatan digitalisasi di satu sisi memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan *financial technology* (*FinTech*), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi blockchain dalam perdagangan internasional, hingga penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Akan tetapi, di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber.

Kinerja dan prospek ekonomi global ke depan diwarnai oleh 5 (lima) karakteristik berikut ini yang perlu diwaspadai, diantisipasi, dan direspons secara tepat dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar (*divergent slow growth*). Pemulihan ekonomi dunia diprakirakan akan memakan waktu yang lebih lama dan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. *Kedua*, meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi tetap tinggi dan harga pangan meningkat sehingga mengakibatkan lambatnya



penurunan inflasi global (gradual disinflation). *Ketiga*, untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR), diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher interest for longer). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan yield obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (term premia). *Keempat*, berlanjutnya arus modal keluar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid (*cash is the king*) karena tingginya suku bunga negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. *Kelima*, nilai tukar dolar AS yang masih akan tetap kuat (strong dollar) dan memberikan tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk EMDEs. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan proyeksi IMF (*International Monetary Fund*) pada tahun 2025 diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar. Setelah mencatat tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan turun ke 3,0%, dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah.

Tabel 3. 1 Kinerja dan Prospek Ekonomi Global (%)

Negara	2021	2022	2023*	2024*	2025*
Dunia	6,3	3,5	3,0	2,8	3,0
<b>Negara Maju</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
Amerika Serikat	5,9	2,1	2,3	1,3	1,8
Kawasan Eropa	5,6	3,3	0,6	0,8	1,3
Jepang	2,2	1,0	1,5	1,3	1,1
<b>Negara Berkembang</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Tiongkok	8,4	3,0	5,2	4,3	4,1
India <sup>1</sup>	8,3	6,8	6,7	5,8	6,0
ASEAN-5	4,0	5,5	4,4	4,4	4,6
Amerika Latin	7,4	4,1	2,0	2,0	2,1

<sup>1</sup> Asumsi PDB India BI disesuaikan menjadi Tahun Kalender (estimasi)

Keterangan: \*Proyeksi Bank Indonesia, angka 2021-2022 berdasarkan realisasi terkini

Sumber: IMF *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2023, Bank Indonesia



### 3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap solid berada di atas 5 Persen. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy) pada Q4-2023 dan 5,05 persen (yoy) tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh intensitas kegiatan pemilihan umum, terkendalinya inflasi yang menjaga daya beli masyarakat, dan positifnya pertumbuhan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan didorong oleh empat sektor dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan infokom.

Hampir semua subsektor industri mampu tumbuh positif pada tahun 2023 kecuali subsektor tekstil, kulit, karet, furnitur dan pengolahan lainnya. Subsektor logam dasar dan barang logam mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi pada tahun 2023. Secara keseluruhan sektor industri pengolahan pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 4,64 persen, yoy dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi.

Aktivitas industri manufaktur tetap ekspansi pada Januari 2024 sebesar 52,9, tercermin dari Indeks PMI Manufaktur yang bertahan di atas 50 sejak September 2021. Kapasitas produksi terpakai mengalami penurunan pada triwulan IV-2023 dibandingkan triwulan sebelumnya, namun di atas level triwulan IV pada tahun 2021 dan 2022.

Investasi publik pada tahun 2023 mengalami peningkatan tinggi, tercermin dari pertumbuhan belanja modal pemerintah yang meningkat 27,7 persen, yoy. Di sisi investasi swasta juga terindikasi meningkat, tercermin dari pemulihan konsumsi semen domestik yang tumbuh positif 2,8 persen, yoy pada tahun 2023, setelah berkontraksi pada tahun sebelumnya.

Ekspor tetap mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 1,32 persen (yoy) di tengah penurunan harga komoditas, ditopang utamanya oleh peningkatan ekspor barang migas serta pemulihan ekonomi China sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia. Kinerja ekspor juga didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, impor mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen (yoy) pada tahun 2023.

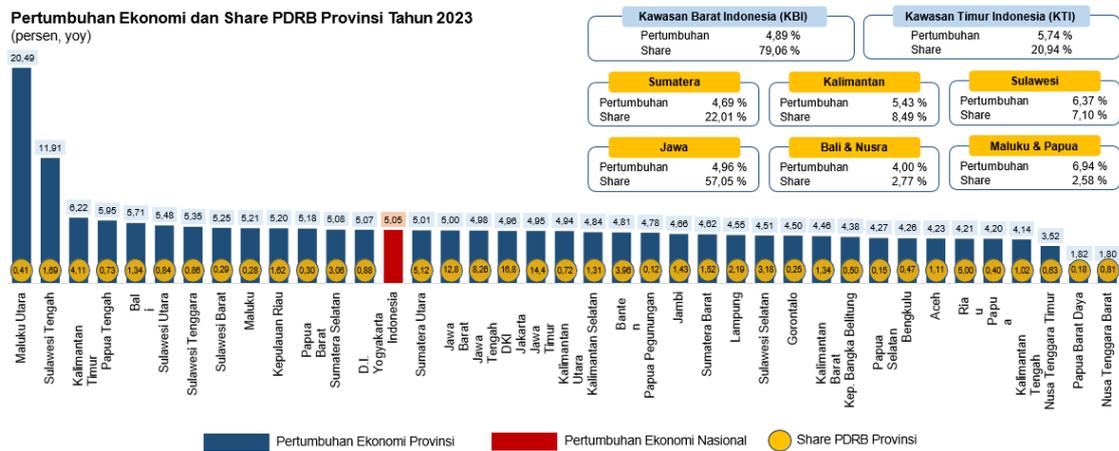
Kunjungan wisatawan mancanegara mendekati level prapandemi. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan mendekati level prapandemi. Secara kumulatif kunjungan wisman Januari-Desember 2023 meningkat 98,3 persen, yoy menjadi 11,7 juta kunjungan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) juga mengalami peningkatan hingga level di atas prapandemi.



Inflasi terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1$  persen. Inflasi IHH pada Februari 2024 terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1$  persen, didorong oleh penurunan pada komponen inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah. Sementara itu, komponen harga pangan bergejolak masih mencatatkan peningkatan harga yang tinggi, seiring dengan kenaikan harga beras yang persisten pada Februari 2024.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi provinsi terus menguat. Kawasan Timur Indonesia Tumbuh Lebih Akseleratif. Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2023. Secara spasial, tiga kelompok provinsi yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Maluku & Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun, struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Share PDRB Provinsi Tahun 2023



Saat ini, Ekonomi Indonesia relatif resilien dibandingkan dengan negara lain terhadap risiko global. *Outlook* pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2024, Pemerintah bersama swasta akan kembali meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk pertambahan nilai tambah produk. Restriksi pada ekspor bahan mentah akan dilanjutkan untuk mendorong industri turunan dari Bauksit.

Inflasi domestik semakin terkendali seiring dengan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi yang kontinu serta akomodatif. Dengan realisasi rata-rata inflasi 2023 sebesar 3,69 persen, usaha pengendalian inflasi diharapkan dapat mengurangi laju inflasi ke dalam sasaran inflasi tahun 2024 sebesar  $2,5 \pm 1$  persen. Kebijakan moneter negara lainnya juga diharapkan akan semakin efektif dalam mengurangi laju inflasi, yang akan berdampak pada pengurangan *imported inflation*.



Pemerintah mendorong pembentukan sumber pertumbuhan baru ke arah yang lebih hijau melalui berbagai insentif dan kebijakan, seperti subsidi dan insentif pendukung EV (*Electric Vehicle*).

Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan target sasaran pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,379 – 0,382
5.	Indek Modal Manusia (Nilai)	0,56
6.	Nilai Tukar Petani (kumulatif)	113 – 115
7.	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	104 – 105
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i> ): Akhir Periode	1,5–3,5 <sup>a)</sup>
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 <sup>b)</sup>
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 <sup>c)</sup>
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) <sup>d)</sup>
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,9–20,0
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70–11,20
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 <sup>e)</sup>
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) <sup>d)</sup>
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78–39,98
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Tiliun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Tiliun Rp)	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

### 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (ctc) sesuai dalam range target RPJMD 2019-2014. Nilai tersebut menguat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (ctc). Namun, capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (ctc). Capaian ini mampu diraih, meskipun Lampung menghadapi *downside risk* seperti konflik geopolitik, *scarring effect* pandemi COVID-19, kebijakan suku bunga global, perubahan nilai tukar, dan kondisi El Nino.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Lampung dengan kontribusi di tahun 2023 sebesar Rp122.511,10 miliar atau 27,29 persen dari total PDRB, disusul oleh Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,01 persen dan 13,98 persen. Namun demikian, kontribusi sektor basis di Lampung yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan kinerja pertumbuhan, karena dampak El Nino, serta penurunan kinerja produksi dan permintaan global.

Selama 2023, inflasi Lampung tetap terjaga di level sasaran  $3,0\pm 1$  persen (yoy) dengan capaian sebesar 3,47 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen (yoy). Tantangan utama inflasi berasal dari komoditas beras, dipengaruhi oleh cuaca panas El Nino yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan harga gabah. Secara bulanan, inflasi tahun 2023 mencapai 0,29 persen (mtm), lebih rendah dari tahun sebelumnya (0,45 persen mtm). Peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Suku bunga acuan dipertahankan pada 5,75% dari triwulan I hingga III 2023 untuk menjaga inflasi IHK tetap sekitar  $3,0\pm 1\%$  hingga akhir tahun 2023. Pada triwulan IV 2023, suku bunga naik menjadi 6,00% untuk mengendalikan inflasi menjadi  $2,5\pm 1\%$  pada 2024. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD meningkatkan harga barang impor, tetapi impor bahan baku dan barang modal di Lampung meningkat, menunjukkan investasi yang positif di sektor manufaktur. Hal ini mencerminkan kepercayaan pelaku industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Lampung meskipun nilai tukar mata uang fluktuatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020 hingga 2023 terus mengalami kemajuan. IPM Lampung pada tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,96 persen dan meningkat 0,69 basis poin dibandingkan capaian tahun 2022. Provinsi Lampung telah masuk ke dalam kategori IPM "tinggi". Peningkatan ini didorong oleh semua dimensi IPM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Namun, IPM Lampung masih di bawah capaian IPM pada level nasional dan regional Sumatera.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 970,67 ribu orang (11,11 persen), menurun 24,92 ribu orang dari September 2022. Namun, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional (9,36 persen). Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan (12,65 persen) daripada perkotaan (8,02 persen). Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat di pedesaan. Lampung memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dan regional Sumatera. Indeks Gini Ratio Lampung pada Maret 2023 adalah 0,324, naik 3,51 persen dari September 2022. Lampung menempati peringkat kelima terendah di Sumatera dalam hal Gini Ratio, disebabkan oleh ketimpangan sumber daya alam, demografi, mobilitas barang dan jasa, serta konsentrasi ekonomi di kota besar seperti Bandar Lampung.



NTP Lampung naik menjadi 109,32 pada 2023 dari 104,34 pada 2022. Meskipun di bawah rata-rata nasional dan regional, terjadi peningkatan yang konsisten setiap tahun. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komoditas, terutama pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mendukung petani, seperti subsidi benih dan akses permodalan. NTN perikanan tangkap Lampung juga mengalami peningkatan, menempati peringkat keempat di Sumatera dengan nilai 110,61 pada 2023.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Lampung Tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,9 - 5,3 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 - 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Lampung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,5 - 10 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,0 - 3,86 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,6 - 54,6 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,282 - 0,293 di Tahun 2025.

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,30
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86 - 4,00
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,5 - 10
4.	Rasio Gini	Rasio	0,318 - 0,321
5.	Indeks Modal Manusia (IMM)*	Indeks	0,54
6.	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	%	62,79

\*) Indikator baru. IMM penyempurnaan dari IPM – mengacu pada indikator RPJPN dan RKP 2025

Pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 diarahkan dengan tema Pembangunan : **"Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia"**. Arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan bagian



dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yaitu:

- a. **Peningkatan kapasitas perekonomian** yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan **didukung dengan infrastruktur** yang merata dan berkualitas.
- b. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. **Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
- d. **Perbaikan tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

### **1) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.**

Upaya meningkatkan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perekonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

## **2) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat**

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

## **3) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.**

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment*. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

## **4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil**

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersediaan barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

## **5) Pemerataan distribusi pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan **kebijakan strategis** dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar instansi dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).
4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui *behaviorally informed policy intervention*) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan

produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS). Lebih lanjut, kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi pendapatan yang terukur dan realistis, belanja berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan



keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

### 3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda **transformasi ekonomi** Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.



Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung dalam tahun 2021-2023 cenderung meningkat, hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah, selain itu adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat pada penyaluran dana BOS yang mengakibatkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer mengalami penurunan karena alokasi transfer dana BOS yang langsung disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pada tahun 2023 target pendapatan daerah kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 bahwa Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut :

- 1) Mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
- 2) Mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang berfokus pada tiga pilar yaitu *promoting growth*, pemerataan ekonomi, dan penguatan *wellbeing*;
- 3) Mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional;
- 4) Menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi antara pusat dan daerah serta mendukung arah kebijakan yang berfokus pada prioritas dan orientasi hasil, efisiensi belanja nonprioritas pusat dan daerah, penajaman belanja barang. Arah kebijakan pemanfaatan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :



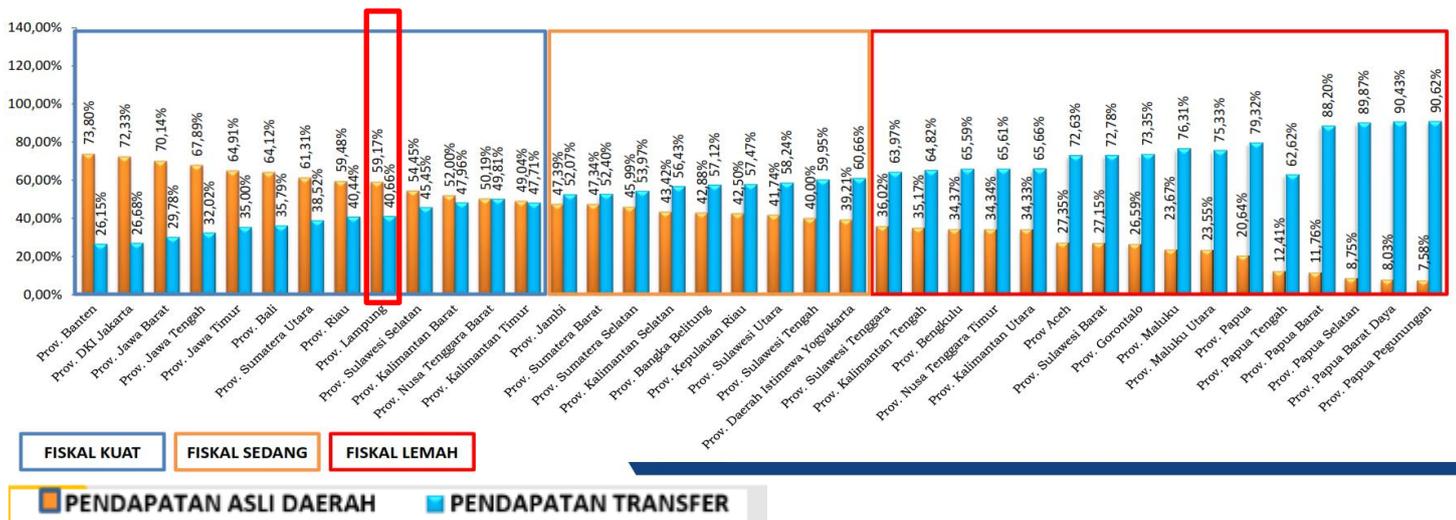
- 1) Dana Alokasi Umum, adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan Pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal di daerah; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal; (3) Melanjutkan kebijakan *hold harmless* (mengharuskan pemerintah menyediakan dana penyesuaian kepada daerah-daerah agar DAU yang diterima daerah yang bersangkutan tidak mengalami penurunan DAU) sampai dengan tahun 2027, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta, (4) Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan program prioritas nasional.
- 2) Dana Alokasi Khusus, adalah sebagai berikut :
  1. Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan arah kebijakan antara lain (a) mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (b) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui penyaluran untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu; (c) menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya (APBN) sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (d) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta (e) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.
  2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan arah kebijakan antara lain (a) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; (b) meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya; (c) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta (d) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia bidang kesehatan.



Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 di Provinsi Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung terus membaik ini ditandai dengan kapasitas fiskal atau anggaran yang menjadi indikator penyusunan perencanaan yang strategis. Menteri Dalam Negeri dalam paparan Musrenbangnas Tahun 2024 membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu :

- 1) Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.
- 2) Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- 3) Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).

Grafik 3. 2 Kapasitas Fiskal Daerah APBD Provinsi TA 2024.



Sumber : Data 544 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024

Berdasarkan data diatas bahwa di Sumatera ada 3 Provinsi yang termasuk dalam Kapasitas Fiskal Kuat adalah Sumatera Utara, Riau dan Lampung. **Provinsi Lampung termasuk kedalam Kapasitas Fiskal Kuat** dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 59,17 persen dan Pendapatan Transfer 40,66 persen. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri bahwa dalam menyusun perencanaan bagaimana APBD itu posturnya Pendapatan Asli Daerahnya meningkat. Kuncinya dengan menghidupkan peran swasta yang dimulai



dengan program-program untuk membuat swasta hidup dimulai dari perizinan, kejelasan mengenai lahan RTRW, RDTR harus dikerjakan betul dan membuat birokrasi lebih mudah. APBD hanya untuk memancing untuk swasta bangkit sehingga PAD bisa naik sehingga pemerintah daerah buat banyak program yang membangkitkan kesehatan dan pendidikan.

Berikut disampaikan kondisi keuangan daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 1,028 triliun rupiah meningkat sebesar 99,05 miliar rupiah (3,16 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2023 sebesar 660,93 miliar rupiah menurun 34,11 miliar rupiah (4,9 persen) dibandingkan penerimaan Tahun 2022 yang sebesar 695,05 miliar rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 877,49 miliar rupiah mengalami peningkatan 70,18 miliar rupiah (10,09 persen) dibanding penerimaan Tahun 2022 sebesar 807,30 miliar rupiah.

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Tahun 2023 sebesar 9,47 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 2,3 miliar rupiah (33,12 persen) dibanding penerimaan Tahun 2022 sebesar 7,12 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 30,79 miliar rupiah dari realisasi tahun 2022 sebesar 687,16 miliar rupiah menjadi 656,36 miliar rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada Tahun 2023 sebesar 7,06 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 464,12 juta rupiah dibandingkan penerimaan Tahun 2022 sebesar 6,60 miliar rupiah. Selain retribusi, pos penerimaan lainnya yakni Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 51,11 miliar rupiah dibandingkan realisasi penerimaan Tahun 2022 yang sebesar 45,56 miliar atau tumbuh 12,1 persen. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 tumbuh negatif sebesar 11,45 persen yaitu sebesar 488,54 miliar dibanding tahun 2022 yang sebesar 499,99 miliar.



## 2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 3,11 triliun rupiah pada Tahun 2022 menjadi 3,30 triliun rupiah pada Tahun 2023, meningkat sebesar 188,41 milyar (6,04%).

## 3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 – 2023 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 10,91 miliar rupiah mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 39,71 miliar rupiah.

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	7,469,469,346,029.05	6,836,946,972,193.71	6,987,319,981,739.03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,249,669,847,265.05	3,678,302,294,580.71	3,766,194,060,533.03
Pajak Daerah	2,721,138,045,704.00	3,126,137,885,658.00	3,232,821,385,715.00
Retribusi Daerah	14,664,095,996.00	6,602,045,154.00	7,066,246,737.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33,335,927,752.08	45.568.658.794,74	51,110,035,229.39
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	480,531,777,812.97	499,993,704,973.97	475,196,392,851.64
PENDAPATAN TRANSFER	4,209,156,682,009.00	3,118,930,589,890.00	3,210,209,160,206.00
Dana Bagi Hasil Pajak	183,140,967,609.00	151,118,931,842.00	113,149,097,214.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	42,401,390,658.00	102,319,151,202.00	92,480,749,140.00
Dana Alokasi Umum	1,726,296,248,000.00	1.719.175.460.727,00	1,801,100,499,930.00
Dana Alokasi Khusus (fisik)	2,232,553,876,742.00	1,126,520,832,623.00	1,109,218,409,720.00
Dana Alokasi Khusus (non fisik)			
Dana Insentif Daerah	17,389,748,000.00	1.441.174.000,00	62,061,396,000.00

Uraian	Jumlah (Rp.)		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Dana Penyesuaian			
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,642,816,755.00	39,714,087,723.00	10.916.761.000,00
Pendapatan Hibah	10,565,423,805.00	39,714,087,723.00	10,916,761,000.00
Lain lain pendapatan	77,392,950.00		

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,9 – 5,3 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2021-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 7, 114 Triliun rupiah.

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.114.050.629.066,21</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.710.910.739.734,21</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.817.166.899.379,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	419.450.084.328,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.148.941.374,21
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.144.814.653,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.389.348.990.597,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.339.582.362.597,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.081.955.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	34.684.673.000,00
4.2.2.2.4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot	34.684.673.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.790.898.735,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-
4.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2024

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada **sisi Belanja Daerah** tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 terserap dengan realisasi serapan sebesar 85,5 persen dari target APBD 2023. Meskipun sudah dirasa cukup optimal dalam penyerapan APBD Tahun 2023, masih terdapat beberapa kendala di pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
<b>Belanja Daerah</b>	<b>7,097,651,401,591.13</b>	<b>6,786,374,070,612.94</b>	<b>7,048,993,246,382.40</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>5,151,247,340,067.92</b>	<b>4,407,709,739,253.61</b>	<b>4,628,237,542,975.71</b>
Belanja Pegawai	1,934,758,007,514.97	1,970,940,686,655.00	2,066,144,093,644.00
Belanja Barang dan Jasa	1,506,510,161,999.83	1,816,423,482,989.79	1,972,392,255,140.04
Belanja Bunga	22.161.585.802,00	12,829,045,899.00	3,112,977,135.00
Belanja Subsidi	-	-	2,800,000,000.00
Belanja Hibah	1,682,887,389,922.12	587,127,478,959.82	570,388,618,056.67
Belanja Bantuan Sosial	4.930.194.829,00	20,389,044,750.00	13,399,599,000.00
<b>Belanja Modal</b>	<b>849.692.114.832,21</b>	<b>1,025,325,883,958.33</b>	<b>1,207,289,357,586.99</b>
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>126.400.000,00</b>	<b>223,500,000.00</b>	<b>2,794,882,500.00</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.096.585.546.691,00</b>	<b>1,353,114,947,401.00</b>	<b>1,210,671,463,319.70</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah **“SINERGI MEMPERKUAT KAPASITAS DAN KETAHANAN EKONOMI BERKELANJUTAN SERTA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA”** dengan 7 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Reformasi Birokrasi; 2) Peningkatan kualitas hidup SDM; 3) Pembangunan Infrastruktur; 4) Penanggulangan kemiskinan; 5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan; 6) Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis dan 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2025 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi berdasarkan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.
- Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

- Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan.
- Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
- Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.139.050.629.066,21</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.364.896.299.500,91</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.396.919.427.785,08
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.967.976.871.715,83
5.1.3	Belanja Bunga	
5.1.4	Belanja Subsidi	
5.1.5	Belanja Hibah	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>31.500.000.000,00</b>
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.455.240.740.088,00</b>
	<b>Selisih Pendapatan dan Belanja</b>	<b>25.000.000.000,00</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024



### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (*zero deficit*),

Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	182,638,158,429.09	383,279,770,163.01	292,676,358,793.37
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	171,176,332,704.00	141,176,332,704.00	105,882,243,536.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>11,461,825,725.09</b>	<b>242,103,437,459.01</b>	<b>186,794,115,257.37</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>383,279,770,163.01</b>	-	<b>125,120,850,614.70</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

#### **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis,

#### **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan, Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya;

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2025

Uraian	Proyeksi Tahun 2025
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024

### 3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3. 10 Realisasi Dana APBN Dekonsentrasi Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	NAMA SATKER (KODE SATKER)	DIPA	REALISASI	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (690710)	4,418,335,000.00	4,284,478,989.00	96.97%
2	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (129074)	1,019,577,000.00	1,016,345,663.00	99.68%
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung (129098)	120,240,000.00	116,390,400.00	96.80%
4	Bappeda Provinsi Lampung (484124)	213,689,000.00	212,597,250.00	99.49%



NO	NAMA SATKER (KODE SATKER)	DIPA	REALISASI	%
5	Inspektorat Provinsi Lampung (484125)	150,628,000.00	150,623,800.00	100.00%
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (129065)	11,009,871,000.00	10,878,399,757.00	98.81%
7	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129072)	725,728,000.00	718,745,600.00	99.04%
8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (418020)	6,693,010,000.00	6,637,112,730.00	99.16%
9	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung (129024)	1,310,400,000.00	1,304,283,200.00	99.53%
10	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (120012)	11,455,806,000.00	10,696,383,375.00	93.37%
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (129011)	527,514,000.00	523,891,280.00	99.31%
12	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung (129067)	2,697,395,000.00	2,599,204,620.00	96.36%
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (129036)	2,831,550,000.00	2,817,358,643.00	99.50%
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung (120010)	458,879,000.00	457,767,894.00	99.76%
15	Bappeda Provinsi Lampung (120022)	1,163,594,000.00	1,140,756,118.00	98.04%
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung (120063)	351,971,000.00	350,342,000.00	99.54%
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung (120020)	298,997,000.00	295,779,756.00	98.92%
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (129069)	758,651,000.00	722,698,076.00	95.26%
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung (120067)	2,176,000,000.00	2,165,141,100.00	99.50%
<b>JUMLAH DANA DEKONSENTRASI</b>		<b>48,381,835,000.00</b>	<b>47,088,300,251.00</b>	<b>97.33%</b>

Tabel 3. 11 Realisasi Dana APBN Tugas Pembantuan Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	NAMA SATKER (KODE SATKER)	DIPA	REALISASI	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung (129113)	39,448,204,000.00	39,062,686,933.00	99.02%
2	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129114)	2,890,682,000.00	2,799,145,156.00	96.83%
3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (129115)	59,493,097,000.00	59,148,830,711.00	99.42%
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung (129119)	3,005,759,000.00	2,984,953,726.00	99.31%
5	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (129120)	359,680,000.00	357,760,600.00	99.47%
6	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129121)	366,400,000.00	346,550,700.00	94.58%
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung (129123)	507,100,000.00	506,707,000.00	99.92%
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung (129218)	30,728,304,000.00	30,340,737,233.00	98.74%

NO	NAMA SATKER (KODE SATKER)	DIPA	REALISASI	%
9	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (129236)	166,907,014,000.00	166,901,441,020.00	100.00%
10	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (640037)	1,380,000,000.00	1,367,198,250.00	99.07%
11	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung (125105)	1,728,735,000.00	1,618,022,497.00	93.60%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung (350183)	2,166,596,000.00	2,161,706,782.00	99.77%
13	Dinas Koperasi Dan Ukm, Perindustrian, Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus (120645)	15,730,000.00	14,560,000.00	92.56%
14	Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan Kab. Pesisir Barat (403728)	3,000,000,000.00	2,953,428,061.00	98.45%
	<b>JUMLAH DANA TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>311,997,301,000.00</b>	<b>310,563,728,669.00</b>	<b>99.54%</b>

Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Lampung Tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 97,33 %, sedangkan realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Lampung Tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 99,55 %. Dana Dekonsentrasi ini tersebar pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan jumlah 19 kode Satker, sedangkan Tugas pembantuan ini tersebar pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi di 3 kabupaten dengan jumlah 14 kode Satker.

Tabel 3. 12 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	DK/TP	Pagu
1	Bappeda Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1,507,667,000.00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	106,000,000.00
3	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	7,223,932,000.00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	15,497,487,000.00
5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	650,305,000.00
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	2,000,000,000.00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	437,348,000.00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	481,423,000.00
9	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	657,600,000.00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	298,993,000.00

No	Perangkat Daerah	DK/TP	Pagu
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	383,913,000.00
12	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	3,096,108,000.00
13	Inspektorat Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	166,148,000.00
14	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1,392,278,000.00
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	11,689,876,000.00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	3,465,119,000.00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	202,945,389,000.00
18	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1,430,000,000.00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	756,397,000.00
20	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	30,679,664,000.00
21	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1,212,120,000.00
22	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	4,350,007,000.00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	10,646,902,000.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>301.074.676.000,00</b>

Sumber : Bappeda, 2024

Mulai Tahun 2023 bidang Infrastruktur sesuai dengan arahan Presiden menjadi salah satu prioritas yang dianggarkan dalam APBN. Berkenaan hal tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang **Percepatan Peningkatan Konektivitas jalan Daerah**. Kepala Daerah dapat mengusulkan ruas jalan dan jembatan yang akan diajukan perbaikan, dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Usulan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sedang dalam proses penajaman sesuai dengan kriteria dalam intruksi presiden tersebut. Diharapkan pelaksanaan dari instruksi presiden ini dapat meningkatkan perekonomian dan pemerataan kondisi jalan mantap.

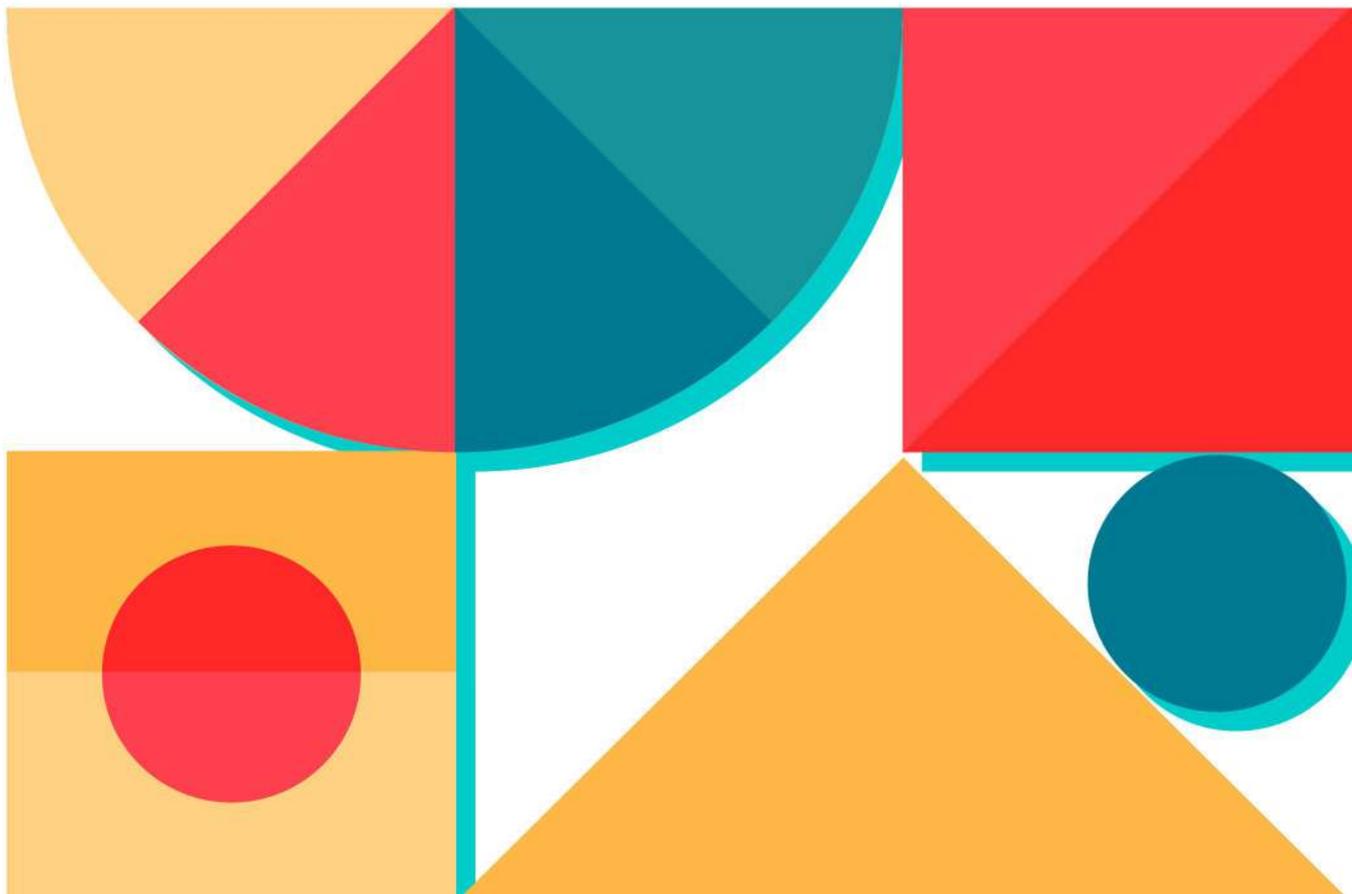


Selain itu, Provinsi Lampung telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD dengan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat bermanfaat dan berkontribusi guna memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan CSR adalah bentuk sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah dan dunia usaha sehingga swasta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta diharapkan dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dan mengurangi potensi konflik.





# BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Tahun 2025 menjadi tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045. RKPD 2025 sebagai dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPD 2005-2025 dengan RPJPD 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik 2025-2029. Visi "**Lampung SMART 2045: Sejahtera, maju, Merata dan Berkelanjutan**", untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, karena itu, RKPD 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, teknokratis RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penjabaran tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 sebagai berikut:



Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1 LPE Sektor Pertanian	
				2 LPE Sektor Industri	
				3 LPE Sektor Perdagangan	
				4 LPE Sektor Pariwisata	
		2 Indeks Gini	2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	5 Tingkat Pengangguran Terbuka	
				3 Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	6 Pertumbuhan PMTB
				4 Meningkatnya daya beli masyarakat	7 Pengeluaran per kapita/th
				8 Inflasi	
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3 Indeks Pembangunan Manusia	5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	9 Angka Harapan Hidup	
				10 Prevalensi Stunting	
				6 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	11 Rata-rata Lama Sekolah
					12 Harapan Lama Sekolah
				7 Meningkatnya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	13 Indeks Perlindungan Anak

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran				
			8	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			9	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	15	Indeks Pembangunan Pemuda		
			10	Meningkatnya pengarusutamaan gender	16	Indeks Ketimpangan Gender		
3	Menurunkan Kemiskinan	Angka 4	Persentase Kemiskinan	Angka	11	Pengembangan sektor UMKM	16	UMKM naik kelas
					12	Menurunnya wilayah kantong kemiskinan	17	Persentase status desa mandiri
					13	Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin	18	Persentase Masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial
					14	Meningkatkan Kualitas Jalan	19	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah		15	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	20	Rasio Konektivitas Angkutan Umum
					16	Meningkatnya Ketahanan Energi	21	Persentase EBT dalam Bauran Energi
					17	Menguatnya Kualitas Jaringan Irigasi	22	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik
					18	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	28	Persentase Permukiman Layak Huni



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran				
		6	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	
				20	Meningkatnya Kesiapsiagaan, Tanggap Bencana	Mitigasi, dan Darurat	30	Indeks Resiko bencana
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	7	Indeks Reformasi Birokrasi	21	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas	31	Opini BPK
				22	Meningkatnya pengendalian pemerintah	sistem intern	32	Maturitas SPIP
				23	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas	33	Nilai SAKIP
				24	Meningkatnya Publik Prima	Pelayanan	34	Indeks Pelayanan Publik
				25	Meningkatnya Implementasi Pemerintah Elektronik	Kualitas Sistem Berbasis	36	Indeks SPBE
				26	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Digital	Kualitas	38	Digitalisasi Arsip
				27	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Penguatan	39	Indeks Sistem Merit

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran			
6	Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	8	Indek Demokrasi Indonesia	28	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	40	Indeks Kerukunan Umat Bergama
				29	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	41	Indeks Pembangunan kebudayaan
				30	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	43	Indek Kewaspadaan dini



Tabel 4. 2 Tujuan Sasaran Indikator Target Dalam Pencapaian RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)			
					2025	2026				
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4.9-5.3	5.0-5.4	5.0-5.4			
			Indeks Gini	0,313	0.28-0.29	0.27-0.29	0.27-0.29			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		LPE Sektor Pertanian (%)	2,02	1,78 - 2,20	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5			
			LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	0,47	2,50- 4,75	3,2 - 5,13	3,2 - 5,13			
			LPE Sektor Perdagangan (%)	15,35	6,31- 8,99	6,52- 10,06	6,52- 10,06			
			LPE Sektor Pariwisata	2,51	2,5	2,7	2,7			
			2	Meningkatnya Tenaga Kerja	Penyerapan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	3.8-3.5	3.7-3.4	3.7-3.4
			3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha		Pertumbuhan PMTB (%)	2,38	2,9-5,6	2,1-6,4	2,1-6,4
			4	Meningkatnya masyarakat	daya beli	Pengeluaran per kapita/th	10,336	13 - 14	14 - 15	14 - 15
						Inflasi	5,51	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,45	71,59	71,97	71,97			
			5	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Derajat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,99	71,5	71,67	71,67

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan 2025	Target Pembangunan 2026	Kondisi Akhir (2026)
			Prevalensi Stunting (%)	15,2	10,00	9,00	9,00
6	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,18	8,36	8,42	8,42
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,74	12,86	12,90	12,90
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak	61,61	69,8	70,1	70,1
8	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	64.48	68.93	70.64	70.64
9	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Serta	Indeks Pembangunan Pemuda	53.00	56.99	58.32	58.32
10	Meningkatnya pengarusutamaan gender		Indeks Ketimpangan Gender	68,24	69,08	69,36	69,36
3	Menurunkan Kemiskinan	Angka	Persentase Kemiskinan	11,57	9.5-10	9.25- 9.75	9.25- 9.75
11	Meningkatnya pendapatan Masyarakat miskin		Persentase Masyarakat miskin yang meningkat pendapatannya (%)	-	0,39	0,39	1,56
12	Pengembangan koperasi dan UMKM	Sektor	UMKM naik kelas (unit)	3.334	6.334	7.334	7.334
13	Menurunnya wilayah kantong kemiskinan	wilayah kantong kemiskinan	Persentase status desa mandiri (IDM)	7.4	9,85	11,08	11,08



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan 2025	Target Pembangunan 2026	Kondisi Akhir (2026)		
		14	Meningkatnya jaminan sosial Masyarakat miskin	kualitas sosial bagi Masyarakat miskin	Persentase Masyarakat miskin yang memiliki jaminan social (%)	86,08	100	100	100
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	-	74,9	75,9	75,9
		15	Meningkatkan Kualitas Jalan	Kondisi Jalan Provinsi (%)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	76.85	78	79	79
		16	Meningkatnya Transportasi	Konektivitas	Rasio Konektivitas Angkutan Umum	0.68	0,50	0,55	0,55
		17	Meningkatnya Energi	Ketahanan	Persentase EBT dalam Bauran Energi (%)	33,42	36,2	36,6	36,6
		18	Meningkatnya Jaringan Sumber Daya Air	Kapasitas	Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	15	35	39	39
		19	Meningkatnya dasar wilayah	infrastruktur	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	85.62	94.83	96.83	96.83
					Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	13.25	13.25
		20	Meningkatnya lingkungan hidup	kualitas	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	69,10	69,93	70,35	70,35



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)
			Tujuan/Sasaran			2025	2026	
		21 Meningkatkan Kesiapsiagaan, Tanggap Bencana	Mitigasi, dan Darurat	Indeks bencana Resiko	142,55	141,85	141,15	141,15
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	BB	BB
		22 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		23 Meningkatnya pengendalian pemerintah	sistem intern	Maturitas SPIP	3,19	3,25	3,27	3,27
		24 Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB
		25 Meningkatnya Publik Prima	Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A	A
		26 Meningkatnya Implementasi Pemerintah Elektronik	Kualitas Sistem Berbasis	Indeks SPBE	3,37 (BAIK)	3,6 (SANGAT BAIK)	3,7 (SANGAT BAIK)	3,7 (SANGAT BAIK)
		28 Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Penguatan	Indeks Sistem Merit	258.5	295	306	306



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)		
					2025	2026			
		29	Meningkatnya Capaian SPM	Nilai Skor SPM	84.1	92	93	93	
6	Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia	80,18	79.26 – 82.61	80-83	92,18		
		30	Meningkatnya Umat Beragama	Kerukunan Umat Bergama	71,07	74,13	75,15	75,15	
		31	Meningkatnya masyarakat yang berbudaya	Kehidupan kebudayaan	Indeks Pembangunan	55.71	57.91	59.01	59.01
		32	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	keaspadaan dini	Indeks	90,89 (2023)	91.89	92.39	92.39



Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif berbasis pertanian	
			Meningkatkan produksi dan produktivas dan nilai tambah komoditi pertanian	
			Meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan kualitas genetik ternak; penyediaan benih ternak berSNI; penyediaan pakan berkualitas; penyediaan alat, mesin, dan teknologi peternakan.	
			Meningkatkan produktivitas ternak melalui pembangunan/rehabilitasi prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan	
			Melakukan pengendalian kesehatan hewan melalui pengobatan, pemberian vitamin, dan vaksinasi pada hewan; pelaksanaan biosecurity pada kandang; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; serta pengawasan obat hewan.	
			Menjamin kualitas dan kuantitas faktor - faktor produksi	
			Meningkatkan kualitas produk	
			Melakukan perluasan pasar dalam dan luar negeri	
			Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata guna mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan	
			Mengembangkan dan mendorong Kab/Kota untuk membangun Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata, serta pengembangan ekonomi kreatif daerah sehingga mampu meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.	
			Peningkatan produktifitas penangkapan dan kualitas hasil tangkapan.	
			Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan	
			Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Memperluas pasar melalui kemitraan dan jaringan serta mendorong produk olahan hasil perikanan.
				Penerapan blue ekonomi dan pembangunan berketahanan iklim sektor kelautan dan perikanan.
				Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berkelanjutan
				Optimasi peningkatan mutu, daya saing produk perkebunan dengan penerapan GMP
				Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra
				Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan
				Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas, dan petani pekebun
				Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi
				Meningkatkan kinerja agribisnis perkebunan
		2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penyediaan latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang
				Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi
				Meningkatkan kompetensi tenaga instruktur dan tenaga kepelatihan
				Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
				Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan
		3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Mengembangkan Potensi dan Peluang Investasi
				Memberikan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung
				Meningkatkan Efektivitas Strategi dan Upaya Promosi Investasi
				Menciptakan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang kondusif melalui Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Meningkatkan Jumlah Perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban melaporkan LKPM
				Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan
				Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
		4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif berbasis pertanian
				Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan
				Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital
				Stabilisasi harga barang pokok
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan sumber daya kesehatan
				Meningkatkan pelayanan kesehatan
				Meningkatkan perilaku hidup sehat
				Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
				Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa
				Mengembangkan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan Kesehatan Jiwa
				Mengembangkan Sumber Daya Manusia
				Mengembangkan Infrastruktur dan Teknologi
				Pengurangan Stigma dan meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Meningkatkan Kolaborasi dengan Instansi terkait
				Mengembangkan Riset dan Inovasi terkait kesehatan jiwa
				Pemenuhan standar pelayanan prima
				Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dari semua sektor
				Meningkatkan pembinaan, pendampingan, pengawasan penyelenggaraan KLA
		6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Capaian Literasi dan Numerasi
				Peningkatan Penyerapan lulusan SMK
				Peningkatan Kualitas Pendidikan
				Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
		7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Komitmen bersama untuk kepala daerah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus anak di daerah
				Peningkatkan publikasi tentang PPPA /Isu terkini PPPA kepada masyarakat Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Penyebarluasan informasi tentang buruknya pernikahan di bawah umur
		8	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Meningkatkan minat baca dan pengembangan perpustakaan daerah
		9	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterampilan dan Kreatifitas serta Peran Aktif Pemuda dalam Organisasi.
				Meningkatkan Prestasi olahraga melalui Program Pembibitan dan Pembinaan Atlet pelajar berbasis IPTEK
		10	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan	
3	Menurunkan Kemiskinan	Angka	11	Meningkatnya pendapatan Masyarakat miskin	Mengembangkan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
			12	Pengembangan sektor UMKM	Meningkatkan kompetensi SDM UMKM
					Meningkatkan Kretifitas, pemasaran dan daya saing pelaku usaha
					Meningkatkan kualitas Managemen UMKM dan Sumber daya manusia pelaku UMKM
					Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organiasi, kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian
					Meningkatnya kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian dan kesehatan Koperasi
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi, Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan dan perluasan akses pemasaran, Fasilitasi akses pembiayaan koperasi		
13	Menurunnya wilayah kantong kemiskinan	Pengembangan Ekonomi, investasi Desa dan Perdesaan, Penguatan Kelembagaan dan Pemanfaatan TTG dengan membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.			
14	Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PPKS.			
		Peningkatan Penguatan Pemahaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.			
		15	Meningkatkan Kualitas Jalan		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata		
				16	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Pengembangan Jaringan Transportasi Antar Moda Dengan Meningkatkan Keterpaduan Jaringan Transportasi Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pedesaan Sebagai Penghubung Antar Pusat Produksi dan Pasar
				17	Meningkatnya Ketahanan Energi	Modernisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan
						Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system administrasi perkantoran
						Pemetaan zona konservasi dan pemanfaatan cekungan air tanah (CAT)
						Pemetaan jaringan sumur pantau di daerah padat pengusahaan air tanah dan industry
						Penerapan kewajiban jaminan reklamasi kepada pemegang IUP operasi produksi sesuai UKL/UPL serta rencana produksi pertambangan
						Pemanfaatan potensi mineral logam
						Meningkatkan Explorasi Sumber Daya,Potensi dan atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun Energi Baru Terbarukan {EBT}
						Meningkatkan pemanfaatan biogas
						Meningkatkan Upaya Konservasi Energi
						Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi
						Pengembangan kemampuan pengelolaan energi
						Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru terbarukan).
		Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung yang aman dan ramah lingkungan				
		Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi				

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
	18	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air		Pendekatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berkelanjutan dengan berpedoman pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) berbasis partisipasi masyarakat.
				Pengembangan Pola Kerjasama Operasional Sumber Daya Air, Sistem Informasi Sumber Daya Air.
				Pembentukan dan optimalisasi fungsi Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air : TKPSDA WS (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai), Komisi Irigasi, dan Dewan Sumber Daya Air.
				Pengelolaan dan pengembangan prasarana air baku berupa embung atau tampungan air
				Pembangunan dan pengelolaan prasarana SDA yang berkelanjutan dengan berpedoman pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) berbasis partisipasi masyarakat
				Peningkatan pelayanan masyarakat dengan membangun sistem informasi SDA didukung kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal
				Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA
	19	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah		Meningkatkan jumlah pembangunan prasarana dan sarana (PSU)
				Meningkatnya jumlah pembangunan PSU pada kawasan Permukiman
				Meningkatkan kesesuaian pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional
				Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan menurunkan kawasan permukiman kumuh
				Pengumpulan data dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
				Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
				Meningkatkan penanganan rumah tangga rawan sanitasi
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya yang sesuai standar dan berkelanjutan
Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya				

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan tata ruang	
				Meningkatkan kesesuaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum	
				Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan pertanahan	
				Meningkatkan kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian tanah sesuai dengan aturan	
		20	Meningkatnya lingkungan hidup	kualitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
					Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
					Peningkatan Ketahanan Iklim (dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas)
					Penurunan emisi karbon dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
					Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
					Pemantapan dalam pengelolaan persampahan
					Percepatan peningkatan nilai IKL
					Peningkatan jumlah penyerapan dan pencadangan karbon (Carbon sequestration)
					21
Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
5		22	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas	Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi				Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan <u>peraturan perundang-undangan yang berlaku</u>	
				Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi kabupaten/kota	
				Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen Pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan	
				Memperbaiki dan menyetatkan Pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi	
		23	Meningkatnya pengendalian pemerintah	sistem intern	Peningkatan Peran APIP dalam pelaksanaan (Assurance Activities) dan (consulting Activities)
		24	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas	Meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
					Penyusunan produk hukum daerah harus sesuai kewenangan.
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah.
					Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penyusunan produk hukum daerah
					Pelaksanaan Penyelesaian sengketa hukum dalam rangka mendukung pemerintah dan pembangunan
			Peningkatan penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam perumusan kebijakan membangun perekonomian daerah		
			Meingkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				<p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan SOP yang tersedia</p> <p>Memaksimalkan pengendalian pembangunan (pelaporan) melalui system informasi berbasis teknologi</p> <p>Pendekatan kualitas perencanaan dan monitoring pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>
				<p>Meningkatnya keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi kelitbangan</p> <p>Penguatan diseminasi hasil – hasil riset dan inovasi</p> <p>Penguatan Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagai lembaga perumus kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi</p> <p>Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah</p>
		25	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	<p>Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas</p> <p>Meningkatkan sistem serta sarana prasara pemanfaatan data berbasis teknologi informasi</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal secara maksimal</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal pada Biro Administrasi Pimpinan</p>

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				Membantu Kelancaran Tugas dan Administrasi DPRD	
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,	
				Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik	
		26	Meningkatnya Implementasi Pemerintah Elektronik	Kualitas Sistem Berbasis Elektronik	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Implementasi e-government
					Meningkatkan Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
					Meningkatkan Penyelenggaraan Data Statistik Sektor
					Meningkatkan Kematangan Keamanan Siber (Cyber Security Maturity)
		27	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Digital	Kualitas	Meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.
		28	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Penguatan	Peningkatan pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur
					Peningkatan kualitas mutu layanan pelatihan klasikal dan non klasikal
Penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen ASN					
29	Meningkatnya capaian SPM		Peningkatan keberhasilan sinergitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
6	Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	30	Meningkatnya Umat Beragama	Kerukunan	
				Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat	
				Perumusan rekomendasi kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	
				Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		31	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	Pelestarian Warisan Budaya Asli Lampung
		32	meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	Peningkatan implementasi nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Penguatan kebhinnekaan berbangsa dan bernegara melalui ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
				Peningkatan kewaspadaan nasional
				Peningkatan kualitas sistem politik dalam negeri
				Peningkatan sinergi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan Pemerintah Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dengan memperhatikan bahwa Tahun 2025 menjadi tahun awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2019-2024. Untuk mengarahkan pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2025, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas Perekonomian menuju Transformasi Ekonomi didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Prioritas pembangunan pada tahun 2025 ditujukan untuk:

- a. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas perekonomian sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

## **4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

### **4.2.1 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2025**

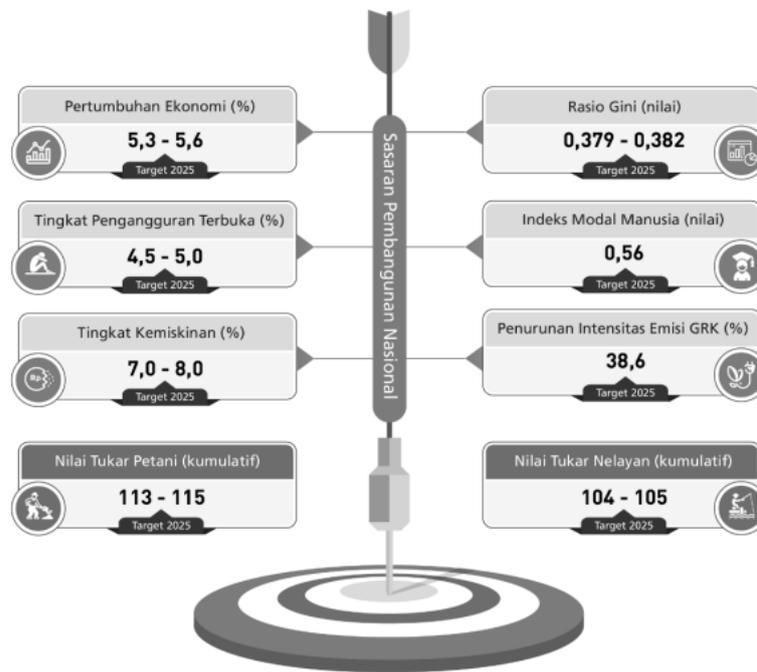
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk **mewujudkan Indonesia Emas 2045**. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4. 2 Prioritas Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

#### 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

**Prioritas Nasional 1** berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang pemererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

**Prioritas Nasional 2**, Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem

tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

**Arah kebijakan swasembada air** dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

**Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah** dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu,

konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

**Prioritas Nasional 3**, Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

**Prioritas Nasional 4**, Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

**Prioritas Nasional 5** ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

**Prioritas Nasional 6** ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

**Prioritas Nasional 7** dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

**Prioritas Nasional 8** diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

#### **4.2.3 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025**

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 : **“SINERGI MEMPERKUAT KAPASITAS DAN KETAHANAN EKONOMI BERKELANJUTAN SERTA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA”**.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan kualitas hidup SDM;
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan;
6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Tujuan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPD 2025-2026

Tujuan Pembangunan Lampung dalam RPD 2025 - 2026	Prioritas RKPD 2025		Sasaran RKPD 2025		Indikator Sasaran
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	LPE Sektor Pertanian
				2	LPE Sektor Industri
				3	LPE Sektor Perdagangan
				4	LPE Sektor Pariwisata
		2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	5	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	6	Pertumbuhan PMTB
		4	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Pengeluaran per kapita/th
				8	Inflasi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan kualitas hidup SDM	5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup
				10	Prevalensi Stunting
		6	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	11	Rata-rata Lama Sekolah
				12	Harapan Lama Sekolah
		7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	13	Indeks Perlindungan Anak

Tujuan Pembangunan Lampung dalam RPD 2025 - 2026	Prioritas RKPD 2025		Sasaran RKPD 2025		Indikator Sasaran
		8	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		9	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	15	Indeks Pembangunan Pemuda
		10	Meningkatnya pengarusutamaan gender	16	Indeks Ketimpangan Gender
Menurunkan Angka Kemiskinan	3. Penanggulangan kemiskinan	11	Pengembangan sektor UMKM	16	UMKM naik kelas
		12	Menurunnya wilayah kantong kemiskinan	17	Persentase status desa mandiri
		13	Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin	18	Persentase Masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Pembangunan Infrastruktur	14	Meningkatkan Kualitas Jalan	19	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
		15	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	20	Rasio Konektivitas Angkutan Umum
		16	Meningkatnya Ketahanan Energi	21	Persentase EBT dalam Bauran Energi
		17	Menguatnya Kualitas Jaringan Irigasi	22	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

Tujuan Pembangunan Lampung dalam RPD 2025 - 2026	Prioritas RKPD 2025		Sasaran RKPD 2025		Indikator Sasaran
		18	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	28	Persentase Permukiman Layak Huni
	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29	Indek Kualitas Lingkungan Hidup
		20	Meningkatnya Kesiapsiagaan, Tanggap Bencana Mitigasi, dan Darurat	30	Indeks Resiko bencana
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	6. Reformasi Birokrasi	21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	31	Opini BPK
		22	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	32	Maturitas SPIP
		23	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	33	Nilai SAKIP
		24	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	34	Indeks Pelayanan Publik
		25	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	36	Indeks SPBE
		26	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	38	Digitalisasi Arsip

Tujuan Pembangunan Lampung dalam RPD 2025 - 2026	Prioritas RKPD 2025		Sasaran RKPD 2025		Indikator Sasaran
		27	Meningkatnya Penguatan Implementasi Sistem Merit	39	Indeks Sistem Merit
Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	7. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	28	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	40	Indeks Kerukunan Umat Bergama
		29	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	41	Indeks Pembangunan kebudayaan
		30	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	43	Indek Kewaspadaan dini



Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan pembahasan dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri), maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penetapan target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Penetapan target indikator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Indikator Makro Pembangunan	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,90 - 5.30
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	52.6-54.6
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,97
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4 .0 - 3. 86
5	Kemiskinan (Persen)	10.0 – 9,50
6	Gini Rasio (Poin)	0,318 – 0,321
7	Inflasi (Persen)	1,50 – 3,50
8	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	78
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	116 - 117
10	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	2,59
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen)	13

Tabel 4. 4 Sasaran Makro Provinsi Lampung Tahun 2025 (Hasil pembahasan di Forum Rakortekrenbang Tahun 2024)

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.1-1.3
2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	73,21
3.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21-23
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.42-0.43
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	32,5
6.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5.15
7.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5.8
8.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	680
9.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	27.65
10.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	18.5-19.4
11.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.63
12.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	3.9
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	-
14.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	70
15.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	75,56
16.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	79.36-82.61
17.	PDRB per kapita	Rp Juta	52.6-54.6
18.	Tingkat Kemiskinan	%	9.5-10
19.	Rasio Gini	Indeks	0,318 - 0,321
20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	26.69
21.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22
22.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	2.19-2.23
23.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.54
24.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	62.79
25.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.9-5.3
26.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,0-3,86
27.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53-54
28.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.4
29.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.1
30.	Tingkat Inflasi	%	1.5-3.5
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	6.2

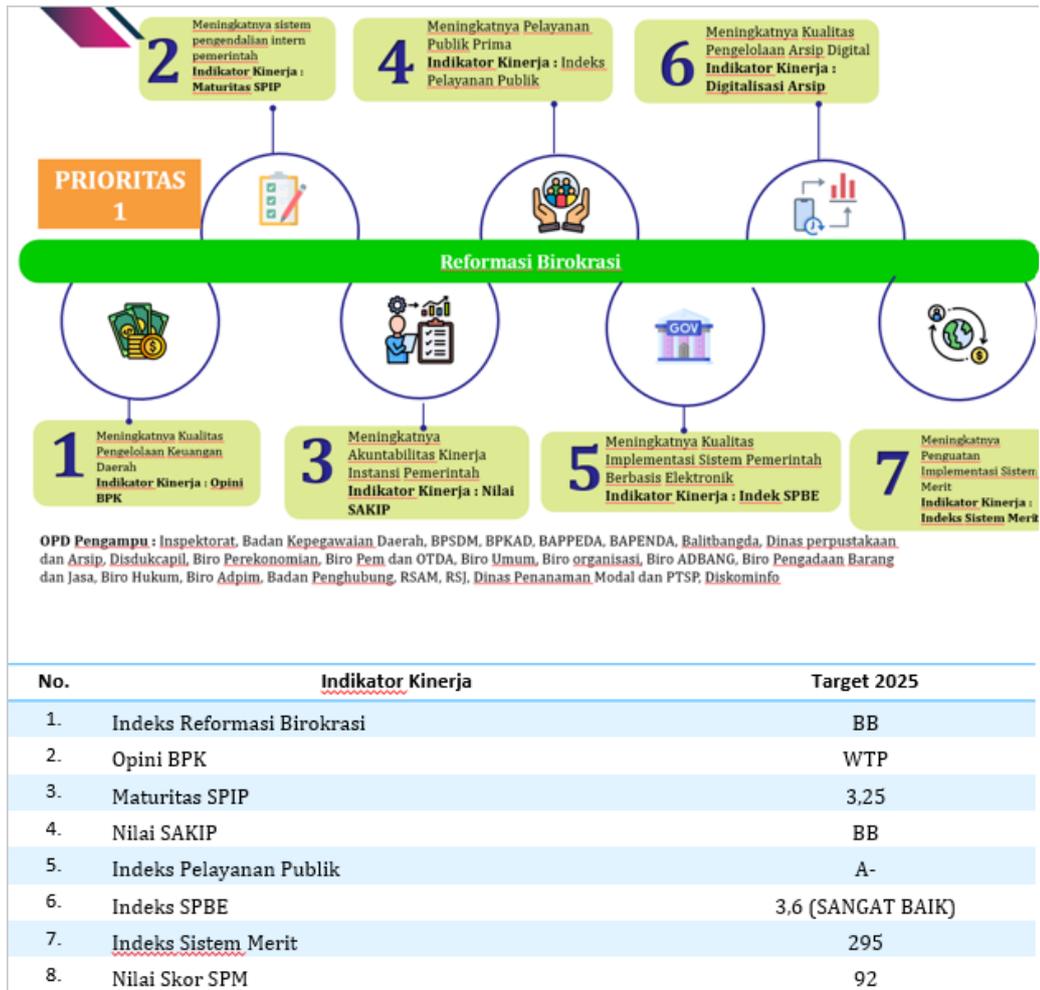
Sumber : Desk Pembahasan Indikator Makro di Forum Rakortekbang Tahun 2024 dan Pemutakhiran Target Indikator Makro Provinsi Lampung

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional;



Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi



#### Arah Kebijakan :

1. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan
3. Pendataan aset secara menyeluruh dan memperbaiki tatakelola aset dengan memanfaatkan sistem informasi
4. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dan Peningkatan kapasitas SDM di bidang



- pengawasan serta Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan
5. Melakukan Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
  6. Produk hukum daerah harus sesuai dengan kewenangan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan produk hukum, melalui aspirasi masyarakat dan uji publik.
  7. Memberikan perumusan, penelaahan, kajian dan rekomendasi berbasis hasil riset terhadap isu – isu strategis dalam proses perencanaan daerah.
  8. Penguatan inovasi daerah
  9. Pembinaan Sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan
  10. Mengoptimalkan Tata Kelola, Potensi dan Aksesibilitas Pajak Daerah
  11. Mengembangkan Sistem Informasi berbasis web dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
  12. Mengembangkan Pengelolaan Statistik Sektorial agar Menghasilkan data yang Berkualitas
  13. Penyempurnaan kebijakan kearsipan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arsip, dan transformasi digital kearsipan.
  14. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur yang terpadu dan Peningkatan kualitas sarana prasarana pelatihan
  15. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kinerja perangkat daerah dalam menyusun LPPD dan SPM
  16. Membuat pelayanan penyusunan LPPD dan SPM melalui aplikasi (secara online) dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai perangkat daerah pengampu



## Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)



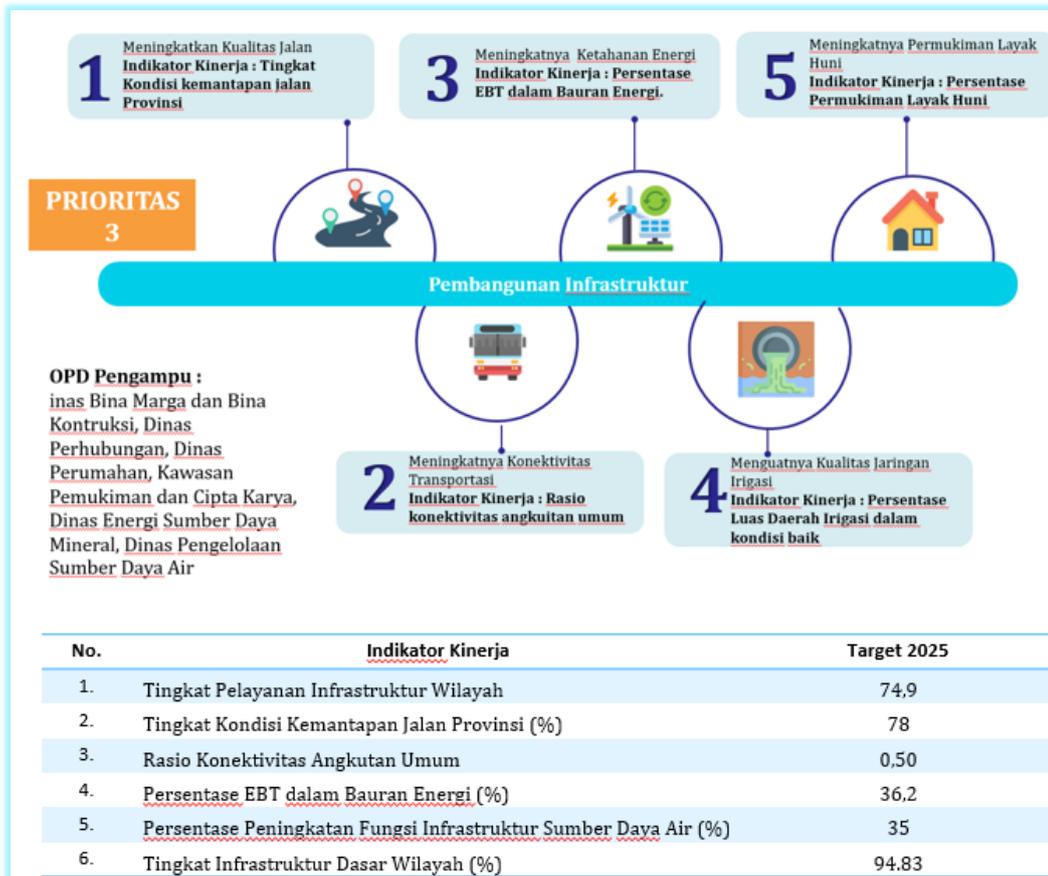
### Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat diantaranya melalui pelayanan kesehatan, pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan
2. Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan kesehatan jiwa dan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis serta ketersediaan fasilitas Rumah Sakit.
3. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas, lingkungan ramah anak).

4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Provinsi dan Kab/kota
5. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Minat Bakat Peserta Didik
6. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
7. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak
9. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam pecegahan pernikahan di bawah umur
10. Pengembangan perpustakaan berbasis elektronik dan Replikasi Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
11. Meningkatkan Peran Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda, Organisasi Kepemudaan dan Kepemimpinan.
12. Memperkuat pemahaman dan komitmen OPD dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan peningkatan persentase anggaran responsif gender terhadap APBD
13. Memperkuat kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
14. Memperkuat kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan



### Prioritas 3 : Pembangunan Infrastruktur



#### Arah Kebijakan :

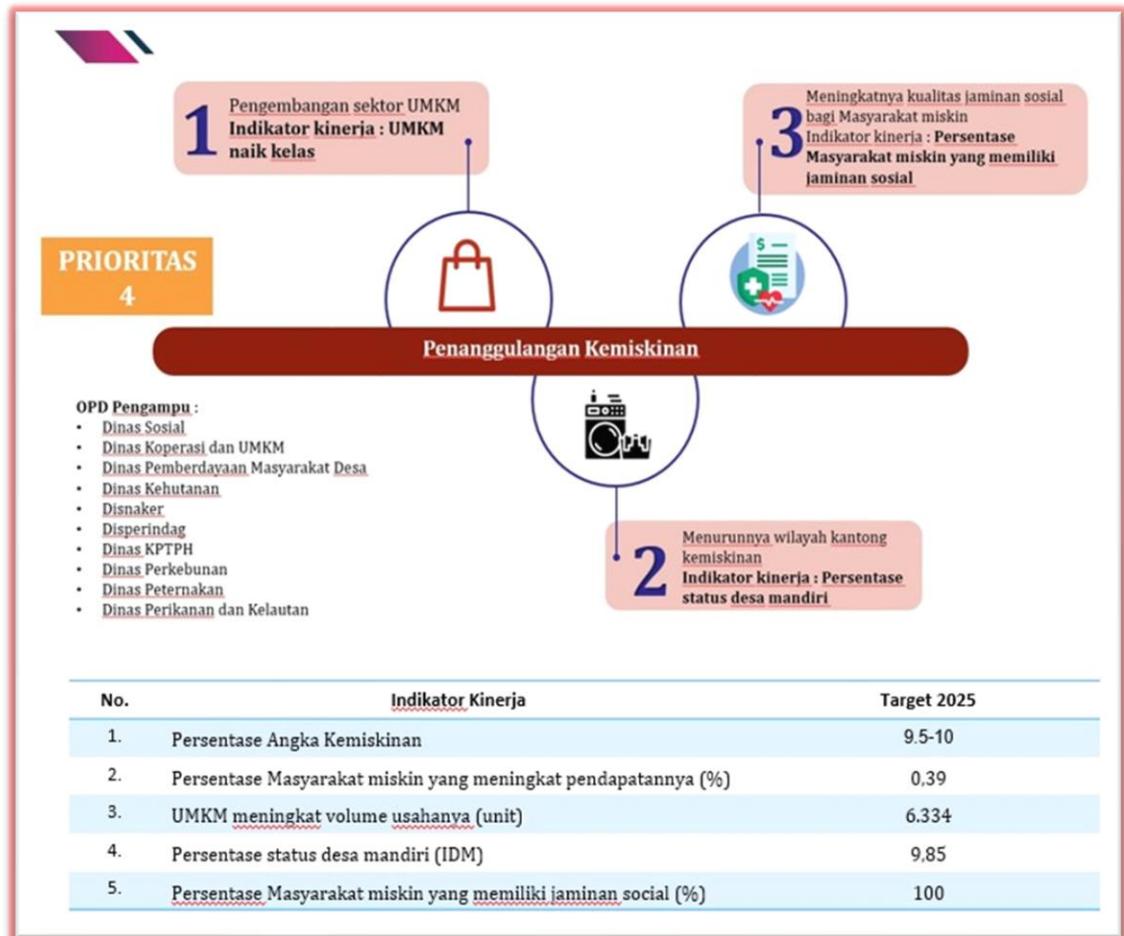
1. Prioritas penanganan jalan pada ruas-ruas yang memberikan dampak untuk pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, pusat-pusat kegiatan serta ruas-ruas jalan yang masih dalam kondisi tidak mantap
2. Meningkatkan keterhubungan wilayah timur-barat dan wilayah utara-selatan Provinsi Lampung
3. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Darat, Laut dan Perkeretaapian) Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Pergerakan Orang, Barang, dan Jasa
4. Peningkatan SDM dan Akuntabilitas Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan pengusahaan air tanah berwawasan lingkungan
6. Pengelolaan Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta Konservasi dan Diversifikasi Energi



7. Peningkatan fungsi sarpras irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA.
8. Peningkatan fungsi sarpras air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan sarpras konservasi SDA untuk kelestarian air dan sumber air.
9. Peningkatan fungsi sarpras pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak.
10. Peningkatan fungsi sarpras pengendali banjir dan pengamanan pantai.
11. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha serta Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
12. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
13. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota



## Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan



### Arah Kebijakan:

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan ketrampilan masyarakat miskin.
2. Peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi
3. Peningkatan kualitas manajemen UMKM dan SDM pelaku UMKM melalui pelatihan yang dimulai dari peningkatan produksi, perluasan jaringan pemasaran, akses pembiayaan, dan kemitraan dengan para pelaku usaha lainnya

4. Peningkatan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan dan pemeriksaan serta peningkatan kesehatan koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi
5. Peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui pelatihan dan pendampingan, Perluasan akses pemasaran koperasi, Meningkatkan akses permodalan koperasi
6. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di level pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan.
7. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan potensi yang ada adalah dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
8. Pembangunan kawasan pedesaan, dengan konsep pengembangan kawasan pedesaan yang berkelanjutan.
9. pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kewenangan Provinsi.
10. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, dan LK3



## Prioritas 5 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan



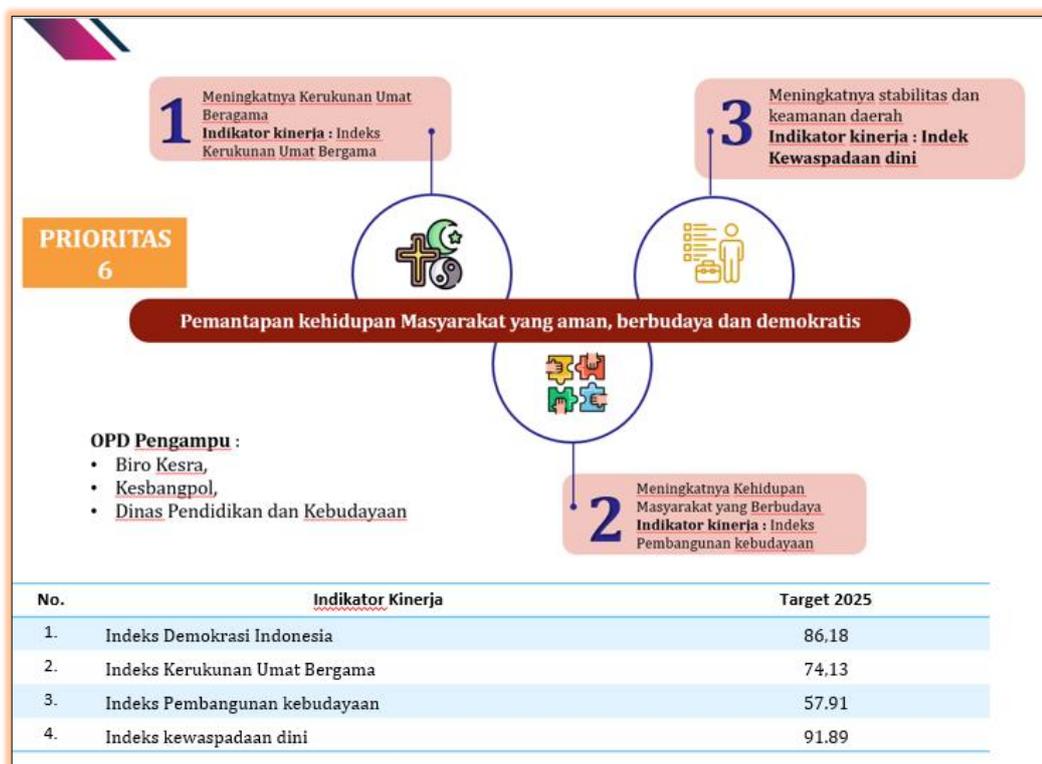
### Arah Kebijakan :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas.
3. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
4. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi
5. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan



6. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.
7. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
8. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
9. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
11. Pemberian kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
12. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

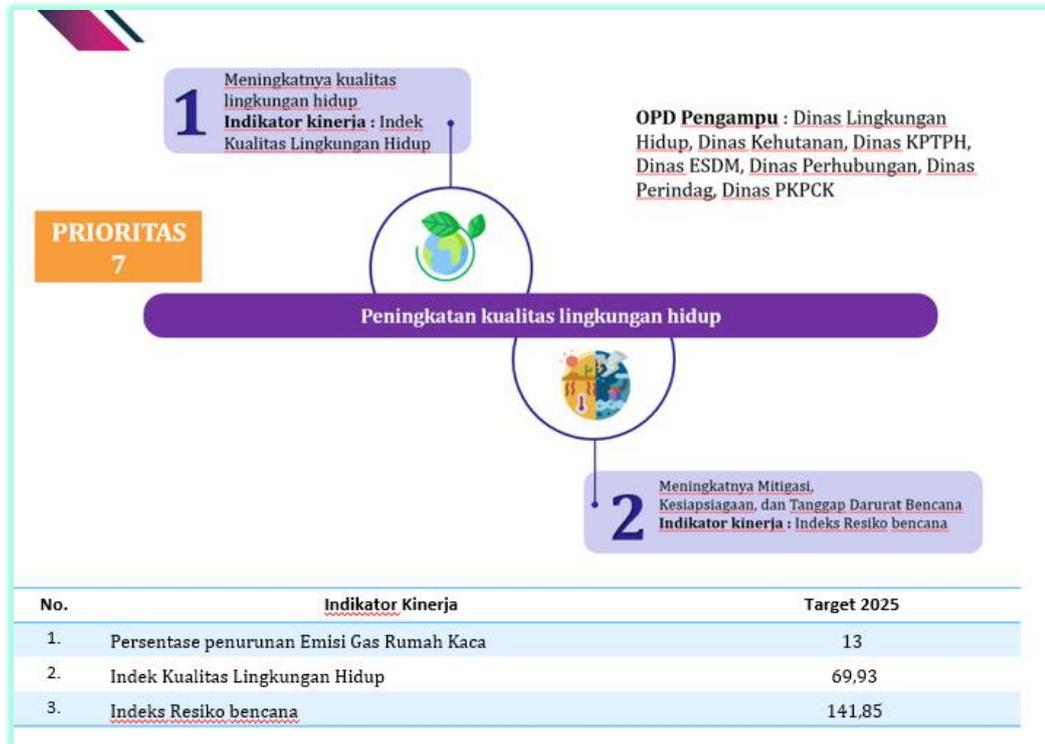
**Prioritas 6 : Kehidupan masyarakat yang Religious, Aman, dan Berbudaya**



Arah Kebijakan :

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam Penegakan Perda dan meningkatkan Kualitas Anggota Pol PP dan PPNS
2. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar
3. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar
4. Pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Lampung
5. Penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
6. Melaksanakan pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan
7. Meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah
8. Meningkatkan upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di daerah
9. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di daerah
10. Melaksanakan forum-forum dialog kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah
11. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi dini
12. Mengoptimalkan koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah
13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah
14. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil di daerah dan
15. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah
16. Meningkatkan kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan Ormas
17. Melaksanakan kemitraan pemerintah dengan Ormas dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

## Prioritas 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup



### Arah Kebijakan :

1. Pembinaan dan pemberian bibit secara stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim
2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim
3. Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air
4. Mendorong Implementasi perdagangan karbon di tingkat provinsi
5. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan
7. Penurunan tindak pidana kehutanan, dan kerusakan kawasan hutan

8. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
9. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
10. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

#### **4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung**

DPRD adalah representasi langsung dari masyarakat. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD diharapkan dapat memahami dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Aspirasi DPRD menjadi sangat penting dalam proses penyusunan perencanaan tahunan.

Dalam Pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 – DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan RESES. Selama masa reses, terjadi komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Ini memungkinkan anggota DPR untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Isu dan permasalahan masyarakat masih banyak ditemukan permasalahan dibidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan usulan yang masuk dalam aplikasi Sipd.ri sampai dengan 1 minggu sebelum Musrenbang Provinsi dilakukan telah dilakukan desk pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bersama Perangkat Daerah terkait yang telah dilaksanakan tanggal 13-14 Mei 2024 dapat djabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 6 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Usulan POKIR	DITERIMA	DITOLAK	PERANGKAT DAERAH
1	Reformasi Birokrasi	2	0	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Peningkatan kualitas hidup SDM	8	4	4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		5	1	4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		28	17	11	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	1	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pembangunan Infrastruktur	114	6	108	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		63	10	53	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		32	14	18	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		1	1	0	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Penanggulangan Kemiskinan	30	12	18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1	1	0	Dinas Sosial
5	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan	96	0	96	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		90	30	60	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		104	33	71	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		17	0	17	Dinas Perkebunan
		17	16	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	0	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		1	0	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	8	4	4	Dinas Lingkungan Hidup
		2	0	2	Dinas Kehutanan
<b>Total</b>		<b>622</b>	<b>150</b>	<b>472</b>	

Kriteria usulan Pokir DPRD adalah kegiatan yang diusulkan adalah kewenangan provinsi dan diusulkan sebagai respon terhadap isu strategis dan permasalahan sektoral perangkat daerah. Usulan diinput ke dalam aplikasi system informasi pembangunan daerah Kemendagri dengan alamat

<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> sampai dengan 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan.

#### **4.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2025**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2025 terhadap RKP 2025 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:



Tabel 4. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025	Prioritas Daerah (PD) pada RKPD 2025
<b>PN 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<b>PD 6 :</b> Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis
<b>PN 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru  <b>PN 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	<b>PD 5 :</b> Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan
<b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	<b>PD 3 :</b> Pembangunan Infrastruktur
<b>PN 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	<b>PD 2 :</b> Peningkatan kualitas hidup SDM



Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025	Prioritas Daerah (PD) pada RKPD 2025
<b>PN 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<b>PD 6 :</b> Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis
<b>PN 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	<b>PD 4 :</b> Penanggulangan kemiskinan
<b>PN 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	<b>PD 1 :</b> Reformasi Birokrasi
<b>PN 8:</b> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<b>PD 7 :</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup



Tabel 4. 8 Keselarasan Prioritas Nasional, Sasaran pembangunan nasional dan target nasional pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas daerah, Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Daerah pada RKPD Tahun 2025

RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
1.	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69-85,23	PD 6 : Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia	79.36-82.61
2.	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asia Power Index (Military Capability)	20	PD 5 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan		
		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	61,54			
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67,5		Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/Penurunan Kasus Konflik	85
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21		Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	6.2
		Indeks Ketahanan Energi	6,77		Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	36

RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	65,18		Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	35
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	14
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	7
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	2337
		Indeks Ekonomi Hijau	70,80			
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20,00		Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	36
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	70



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,70
		Persentase Penurunan Emisi GRK			Penurunan intensitas emisi GRK(%)	62.79
		- Tahunan (%)	32,65			
		- Kumulatif (%)	28,12			
3.	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	PD 3 : Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	37.93
		Rasio Kewirausahaan (%)	3,14		Pertumbuhan Wirausaha	31.05
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,26		Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	3.14
		Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60		Rasio PDB Pariwisata (%)	3
		Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10			
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif(%)	-
		Aset Perbankan/PDB (%)	59,50			
		Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,10			



RKP 2025				RKPD 2025			
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah	
	Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Aset Asuransi/PDB (%)	8,78				
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	56,7				
		Total Kredit/PDB (%)	36,1				
		Inklusi Keuangan (%)	90,6				
4.	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran:		PD 2 : Peningkatan kualitas hidup SDM			
		a. Rata-rata nilai PISA				Indek modal Manusia	0,54
		i. Membaca	396				
		ii. Matematika	404				
		iii. Sains	416				
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46			Rata-rata lama sekolah	8,36
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,37			Harapan lama sekolah	12,86
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94					
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya danditempatkan (%)	72		



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
		Tingkat Penguasaan Iptek:				
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30		Indeks Inovasi Daerah	58
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global	60		Persentase peningkatan penerapan inovasi daerah	81
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-3,86
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53-54
		Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43		Angka Harapan Hidup (tahun)	71,5
		Kesehatan Ibu dan Anak				
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122		Angka Kematian Ibu (AKI)	110
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80		Prevalensi Stunting (%)	10,00
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272		Penemuan Kasus TBC	90



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (%)	26,69
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	73,21
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.42-0.43
5.	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			PD 5 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pertumbuhan Ekonomi	4.9-5.3
		Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,9-20,0		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	18.5-19.4
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,5
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21-23
		Biaya Logistik (% PDB)	13,50			
6.	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan			PD 4 : Penanggulangan kemiskinan	Persentase Kemiskinan	10,0 – 9,50
		Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang	15		Indeks Gini	0,318 – 0,321



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
	Ekonomi, Pemerataan dan Pemberantasan Kemiskinan	adaptif bagi seluruh penduduk (%)				
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26.69
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,34		Kontribusi PDRB Provinsi	2.19-2.23
		Persentase desa mandiri (%)	4		Persentase status desa mandiri (IDM)	9,85
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67,00		Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	68,95
7.	PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,45	PD 1 : Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Indeks Integritas Nasional	74,52		Indeks Integritas Nasional	75,56



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
	Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Materi Hukum	0,51			
		Indeks Pelayanan Publik	3,68		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,4
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,1
		Indeks Persepsi Korupsi	38			
		Indeks Pembangunan Hukum	0,69		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70
		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,1 - 1,3
		Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5		Tingkat Inflasi (%)	1.5-3.5
8.	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	PD 7 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Pembangunan kebudayaan	57,91
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77		Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,13
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137			



RKP 2025				RKPD 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Target Daerah
	Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					



Tabel 4. 6 Sinkronisasi Prioritas Nasional RKP 2025 dan Dukungan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
1	Prioritas Nasional 4	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
2			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	800,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	Prioritas Nasional 4	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	13.5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13,516,613,240	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	58,530,203	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	800,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1,022,084,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
7					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	45,966,906	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
8					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	974,942,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
9					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	861,822,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
11					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	161,403,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
12					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	577,951,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
14					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	518,553,640	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
15					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	48,850,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
16					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
17					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
18					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	35,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
19					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
20	Prioritas Nasional 4	Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate)	Penemuan Kasus TBC	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,624,955,286	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
21					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	577,951,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
22	Prioritas Nasional 4	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1,022,084,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
23					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	577,951,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
24	Prioritas Nasional 4	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	96	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	154,424,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
25					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13,516,613,240	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
26					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	58,530,203	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
27	Prioritas Nasional 4	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
28					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,162,180,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
29					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	480,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
30					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
31	Prioritas Nasional 4	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	50	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
32					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	518,553,640	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
33					Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	88,400,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
34	Prioritas Nasional 4	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	35,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
35					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
36			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	99.5	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
37					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
38			Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
39					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
40			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	100	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
41					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
42			Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	62	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
43					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
44	Prioritas Nasional 4	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
45					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
46	Prioritas Nasional 4	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	2	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	145,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
47	Prioritas Nasional 2	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	5	Penyusunan Rencana Industri Provinsi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
48					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	450,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
49					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
50					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
51					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
52					Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
53	Prioritas Nasional 2	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	4,0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
54					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
55					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
56	Prioritas Nasional 3	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	450 ribu	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
57					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
58	Prioritas Nasional 2	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	2.8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	450,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
59					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
60					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
61					Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
62					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
63	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18.15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
64					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	450,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
65					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
66					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
67					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
68					Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
69	Prioritas Nasional 4	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
70					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
71					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
72					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
73					Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
74	Prioritas Nasional 4	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
75					Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
76					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
77					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
78					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	330,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
79					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
80					Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
81					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
82					Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
83					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
84					Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
85					Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
86					Penerbitan Katalog Induk Daerah	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
87					Penerbitan Bibliografi Daerah	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
88					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
89	Prioritas Nasional 2	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provins	35,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
90			Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	35,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
91			Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	35,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
92			Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	20	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
93					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
94					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
95					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	27,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
96	Prioritas Nasional 3	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
97			Jumlah bidang tanah yang didistribusi				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
98	Prioritas Nasional 2	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	87	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
99					Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
100					Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	60,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
101					Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
102					Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
103			Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
104			Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	99.6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
105					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	550,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
106			Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	90	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
107					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	550,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
108			Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	45	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
109					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	550,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
110			Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	80	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
111			Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	70	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
112	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	16171	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
113					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
114					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
115					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
116					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
117					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
118					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
119			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	172229	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
120					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
121					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
122					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
123					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
124					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
125					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
126			Jumlah Produksi Telur	314520	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,425,858,600	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
127					Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	60,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
128					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2,400,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
129					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	3,420,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
130					Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
131					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
132					Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
133					Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
134					Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
135			Jumlah Produksi Susu	3751	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,425,858,600	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
136					Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	60,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
137					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2,400,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
138					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	3,420,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
139					Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
140					Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Laboratorium Hewan dan Masyarakat	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
141					Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
142					Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
143					Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
144			Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	155932	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,425,858,600	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
145					Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	60,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
146					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2,400,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
147					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	3,420,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
148					Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
149					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
150					Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
151					Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
152					Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
153			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
154					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
155					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
156					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
157					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
158					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
159					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
160			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
161					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
162					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
163					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
164					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
165					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
166					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
167			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	64048	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
168					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
169					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
170					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
171					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
172					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
173					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
174			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	90163	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
175					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
176					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
177					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
178					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
179					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
180					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
181			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	123160	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
182					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
183					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
184					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
185					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
186					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
187					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
188			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	3187	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3,500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
189					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
190					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
191					Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
192					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
193					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
194					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
195					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	847,881,222	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
196			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	46038	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3,500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
197					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
198					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
199					Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
200					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
201					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
202					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
203					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	847,881,222	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
204			Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	755526	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
205					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
206					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
207					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
208					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
209					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
210					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
211					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
212					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
213					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
214					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
215			Jumlah Produksi Kedelai	12603	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
216					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
217					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
218					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
219					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
220					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
221					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
222					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
223					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
224					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
225					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
226			Jumlah Produksi Jagung	3115265	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
227					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
228					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
229					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
230					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
231					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
232					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
233					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
234					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
235					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
236					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
237			Jumlah Produksi Padi	3358643	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
238					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
239					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
240					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	898,650,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
241					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
242					Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
243					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,930,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
244					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
245					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
246					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
247					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
248	Prioritas Nasional 3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
249					Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
250					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	9,310,775,006	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
251	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
252			Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
253			Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
254			Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
255			Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
256	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
257	Prioritas Nasional 6	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	0.25	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
258					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	170,560,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
259	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	5	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
260					Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	319,640,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
261	Prioritas Nasional 1	Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat	Indeks Kinerja Ormas		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27,296,800	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
262					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	181,629,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
263	Prioritas Nasional 1	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	225,000,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
264	Prioritas Nasional 1	Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125,000,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
265					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	483,515,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
266					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	444,628,500	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
267	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125,000,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
268					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	483,515,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
269					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	444,628,500	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
270					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	405,368,400	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
271	Prioritas Nasional 1	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,165,369,000	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
272	Prioritas Nasional 4	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	118,448,640	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
273					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	65,804,800	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
274	Prioritas Nasional 4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	61,486,360	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
275					Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	75,541,854	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
276					Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	118,448,640	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
277			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)		Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	75,541,854	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
278			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
279			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	75,541,854	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
280	Prioritas Nasional 4	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	70,966,364	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
281			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
282					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	144,824,026	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
283					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	153,407,440	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
284					Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	264,247,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
285					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	67,861,200	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
286					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	125,954,500	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
287	Prioritas Nasional 4	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	112,380,204	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
288					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	386,448,970	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
289					Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	167,545,190	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
290					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
291					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	144,824,026	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
292			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provins	112,380,204	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
293					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	386,448,970	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
294					Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	167,545,190	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
295					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	214,379,700	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
296					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	337,249,600	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
297					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
298					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	144,824,026	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
299			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	242,120,536	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
300					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	111,045,600	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
301	Prioritas Nasional 4	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Provinsi Layak Anak (Provila)	100	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100,312,015	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
302					Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	80,496,955	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
303					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	153,407,440	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
304					Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	264,247,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
305					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	67,861,200	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
306					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	125,954,500	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
307			Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	112,380,204	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
308					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	386,448,970	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
309					Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	167,545,190	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
310					Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100,312,015	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
311					Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	80,496,955	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
312			Persentase ARG	3.3	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi PUG	112,380,204	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
313					Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100,312,015	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
314					Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provins	80,496,955	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
315	Prioritas Nasional 4	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Penyediaan Permakanan	16,114,601	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
316					Penyediaan Sandang	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
317					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	216,464,789	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
318					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
319					Pelayanan Dukungan Psikososial	378,770,087	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
320			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Penyediaan Perumahan	329,206,866	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
321					Penyediaan Sandang	33,675,307	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
322					Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	12,564,217	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
323					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	7,408,965	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
324					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	60,610,141	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
325					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	153,157,641	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
326					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	41,658,648	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
327					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
328					Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6,133,169	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
329					Pemulangan ke Daerah Asal	33,071,009	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
330			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Pengasuhan	381,687,552	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
331					Penyediaan Makanan	1,914,443,454	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
332					Penyediaan Sandang	328,632,633	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
333					Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	147,357,202	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
334					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	52,963,885	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
335					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	336,229,342	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
336					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	199,766,575	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
337					Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	20,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
338					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	909,072,142	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
339					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	83,411,099	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
340					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
341			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Penyediaan Permakanan	1,104,202,521	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
342					Penyediaan Sandang	77,832,561	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
343					Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	30,064,554	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
344					Penyediaan Alat Bantu	16,866,215	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
345					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	58,039,501	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
346					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	207,493,526	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
347					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
348					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2,500,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
349					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8,418,075	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
350					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
351					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
352					Pemulasaraan	24,051,643	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
353			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Penyediaan Permakanan	674,140,741	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
354					Penyediaan Sandang	105,659,855	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
355					Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	56,587,624	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
356					Penyediaan Alat Bantu	83,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
357					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	62,414,014	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
358					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	324,722,894	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
359					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
360					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
361					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
362					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16,460,944	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
363					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
364	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	468,344,420	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
365	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	337,954,449	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
366			Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	105,395,985	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
367					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	105,912,613	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
368	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	1440	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	50,754,379	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
369					Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	468,344,420	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
370					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
371	Prioritas Nasional 6	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	126,331,256	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
372	Prioritas Nasional 4	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	70,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
373					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
374					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	70,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
375					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	50,876,400	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
376					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	40,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
377	Prioritas Nasional 4	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	72	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2,200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
378			Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	70	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
379	Prioritas Nasional 3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	12	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
380			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	20000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
381			Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	4500	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
382			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	4500	Pelayanan Antar Kerja	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
383			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	35	Job Fair/Bursa Kerja	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
384	Prioritas Nasional 3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	16000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
385			Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	88	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
386					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
387					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
388			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	8000	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
389					Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
390					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
391	Prioritas Nasional 3	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
392	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	46	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
393					Penyuluhan Transmigrasi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
394					Pelatihan Transmigrasi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
395			Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	54	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
396					Penyuluhan Transmigrasi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
397					Pelatihan Transmigrasi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
398	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	66,481,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
399			Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	-	-	-	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
400			Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	2	-		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
401			Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	100%	-		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
402			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100	-		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
403			Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	75%	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	70,184,400	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
404					Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	-	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
405			Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	1	-	-	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
406			Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	1	-	-	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
407	Prioritas Nasional 1	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	133,765,900	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
408					Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
409					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Serta Perlindungan Masyarakat
410			Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"		Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3,547,050,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
411					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
412	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	-	-	-	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
413	Prioritas Nasional 7	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	70,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
414					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
415					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	70,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
416					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	50,876,400	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
417					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	40,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
418	Prioritas Nasional 8	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
419					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
420					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,061,208,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
421					Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
422					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	520,200,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
423					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1,184,291,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
424					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2,359,539,700	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
425					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	992,454,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
426			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
427					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
428					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,061,208,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
429			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
430					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
431					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,061,208,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
432					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1,184,291,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
433			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
434					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
435					Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
436					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	520,200,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
437					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1,184,291,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
438					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2,359,539,700	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
439					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	992,454,900	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
440			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
441					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
442					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	363,585,500	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
443					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,061,208,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
444	Prioritas Nasional 8	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
445					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
446					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1,061,208,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
447					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1,184,291,200	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
448					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2,359,539,700	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
449			Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,055,138,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
450					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,290,673,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
451					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	520,200,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
452					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2,359,539,700	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
453	Prioritas Nasional 2	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	279061908850			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
454	Prioritas Nasional 2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	279.061.908.851	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	469,867,020	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
455	Prioritas Nasional 2	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	220.629,84	Penyiapan Perhutanan Sosial	600,357,300	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
456	Prioritas Nasional 2	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun				Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
457			Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	1000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	68,750,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
458					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
459					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	341,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
460					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
461			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	4 ha	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	68,750,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
462					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
463					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	341,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
464					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
465	Prioritas Nasional 2	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	5	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
466	Prioritas Nasional 2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	168698.08	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	125,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
467	Prioritas Nasional 2	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	1 ha	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
468	Prioritas Nasional 2	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	190567.49	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
469					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
470					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
471			Produksi Perikanan Tangkap	172223.44	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40,000,000	Urusan Pemerintahan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Bidang Kelautan Dan Perikanan
472					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
473					Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
474					Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
475			Produksi Garam				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
476	Prioritas Nasional 2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	38.18	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
477					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
478					Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
479	Prioritas Nasional 2	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
480					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
481					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
482	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	130,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
483			Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	70	Relasi Media	5,722,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
484					Penyusunan Konten	650,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
485					Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
486					Diseminasi Informasi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
487					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	100,000,000	Urusan Pemerintahan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Bidang Komunikasi Dan Informatika
488					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
489					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	800,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
490			Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	20			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
491			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1,477,127,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
492					Pelayanan Informasi Publik	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
493			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	75	Relasi Media	5,722,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
494					Penyusunan Konten	650,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
495					Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
496					Diseminasi Informasi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
497					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
498					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
499					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	800,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
500		Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	100			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
501			Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	100			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
502			Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
503			Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	26	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
504					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	614,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
505					Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
506					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
507					Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
508					Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
509					Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
510					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
511			Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	67	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
512			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
513			Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	25	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	9,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
514			Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	25	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	9,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
515			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	9,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
516	Prioritas Nasional 4	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	20	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
517			Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
518	Prioritas Nasional 3	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	9.28	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
519					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	360,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
520					Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
521					Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
522					Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
523					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Usaha Kecil, Dan Menengah
524					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
525					Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
526					Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
527					Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
528					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
529	Prioritas Nasional 3	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	31.05	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
530			Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	37.93	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
531					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
532			Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	3.14	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
533					Pengembangan Usaha Kecil	450,000,000	Urusan Pemerintahan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
534					Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
535	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	700,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
536	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	70			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
537	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	15,32			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
538	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,70	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	292,765,625	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
539					Pemantauan dan Evaluasi KLHS	78,540,000	Urusan Pemerintahan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Bidang Lingkungan Hidup
540					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	122,314,150	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
541					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	277,154,850	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
542					Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	240,440,000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
543					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	223,560,000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
544	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	50	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
545					Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	275,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
546	Prioritas Nasional 6	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
547	Prioritas Nasional 6	Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	5.2-5.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
548	Prioritas Nasional 6	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
549					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
550	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	400,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
551					Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
552					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
553					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
554	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
555					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	950,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
556					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
557					Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
558					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	900,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
559					Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	125,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
560					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2,150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
561					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	850,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
562					Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	850,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
563					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
564					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1,200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
565			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2,150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
566					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	850,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
567			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	850,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
568					Pengembangan Sistem Pemasaran	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
569					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	105,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
570					Fasilitasi Kekayaan Intelektual	95,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
571					Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
572	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	66,481,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
573			Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
574			Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	2			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
575			Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	100%			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
576			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
577			Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	75%	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	70,184,400	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
578					Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
579			Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	1%			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
580			Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	1			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
581			Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	1%			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
582	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	133,765,900	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
583					Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Serta Perlindungan Masyarakat
584					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
585			Tercapainya penyelenggaraan sub indeks urusan trantibum kategori "baik"	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3,547,050,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
586					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
587	Prioritas Nasional 7	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
588	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	99.99	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
589					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
590					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	724,668,800	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
591					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
592					Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
593	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	36.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
594					Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	32,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
595					Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	89,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
							Sumber Daya Mineral
596					Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	25,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
597					Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	430,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
598					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
599					Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	80,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
600					Perencanaan kegiatan konservasi energi	108,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
601					Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	92,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
602	Prioritas Nasional 2	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	100	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
603					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
604					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	724,668,800	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
605					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
606					Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
607	Prioritas Nasional 4	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	80	Penyusutan Arsip Dinamis	110,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
608					Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
609					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
610					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	455,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
611		Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
612					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	1,200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
613	Prioritas Nasional 7	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	100%	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	193,820,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
614					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	208,385,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
615	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1,465,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
616					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	14,303,224,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
617					Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2,499,912,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
618					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
619					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	950,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
620					Seleksi Atlet Daerah	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
621					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	240,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
622					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	560,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
623					Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	450,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
624	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	100%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	950,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
625					Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	4,700,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
626					Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	30,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
627					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	135,788,000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
628	Prioritas Nasional 2	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	13	Pengawasan Penanaman Modal	300,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
629					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	400,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
630					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	90,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
631	Prioritas Nasional 4	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	100	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
632					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24,056,670,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
633					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
634					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	15,705,878,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
635					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
636					Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
637					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	7,820,625,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
638			Iklm kebinekaan SMPLB	72.38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
639			Iklm keamanan SMALB	78.63	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
640			Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
641					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24,056,670,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
642					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
643					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	15,705,878,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
644					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
645					Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
646					Pembangunan Ruang Praktik Siswa	29,555,780,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
647					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
648					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	21,474,295,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
649					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
650					Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
651					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	7,820,625,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
652			Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	69.97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18,314,572,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
653					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
654					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
655					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
656					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
657					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
658			Iklm inklusivitas SMALB	65.62	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
659			Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6,787,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
660					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
661					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	5,992,085,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
662					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
663					Pembangunan Ruang Kelas Baru	718,437,100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
664					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
665					Pembangunan Ruang Kelas Baru	718,437,100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
666					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
667			Rata-rata kompetensi SMALB berdasarkan Nasional	Numerasi Asesmen 58.49	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
668					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
669					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
670					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
671					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
672			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	54.96	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
673					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
674					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
675					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
676					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
677					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
678			Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	57.86	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18,314,572,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
679					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
680					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
681					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
682					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
683					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
684			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	87.85	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	21,474,295,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
685					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,540,400,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
686					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
687					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
688					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
689			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	80.48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
690					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
691					Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3,431,385,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
692			Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	63.69	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
693					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
694					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
695					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
696					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
697			Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	66.65	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
698					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
699					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
700					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
701					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
702			Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	59.08	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
703					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
704					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
705					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
706					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
707			Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	71.80	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
708					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
709					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
710			Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	64.36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
711					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
712					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
713					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
714					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
					Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
715					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
716			Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	65.57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
717					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
718					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
719					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,777,422,400	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
720					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	7,040,738,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
721			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6,787,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
722					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
723					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	5,992,085,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
724					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
725					Pembangunan Ruang Kelas Baru	718,437,100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
726					Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
727			Iklim inklusivitas SMPLB	67.39	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
728			Iklim keamanan SMA	81.14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	18,479,968,500	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
729			Iklim keamanan SMK	76.74	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
730			Iklim keamanan SDLB	81.60	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
731			Iklim keamanan SMPLB	80.23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
732			Iklim kebinekaan SMA	75.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	18,479,968,500	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
733			Iklim kebinekaan SMK	73.32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
734			Iklim kebinekaan SDLB	76.53	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
735			Iklim kebinekaan SMALB	71.32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
736			Iklim Inklusivitas SMA	64.71	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	18,479,968,500	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
737			Iklim Inklusivitas SMK	61.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,600,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
738			Iklim Inklusivitas SDLB	65.35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	190,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
739		Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5	Pameran Dagang Internasional/Nasional	750,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
740					Peningkatan Citra Produk Ekspor	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
741		Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	persentase kepatuhan berusaha				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
742		meningkatkan perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
743					Pengembangan Layanan Kalibrasi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
744					Pengembangan Layanan Pengujian	350,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
745					Pemantauan Mutu Produk	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
746					Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	150,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
747					Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
748		Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Simpul	0.37	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
749					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
750					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
751					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
752					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
753					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
754					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
755					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
756		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	87	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	500,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
757					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	200,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
758					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	650,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
759					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Usaha Jasa Terkait	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
760					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
761	Prioritas Nasional 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	60,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
762	Prioritas Nasional 3	Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	1			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
763	Prioritas Nasional 3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi		21%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,000,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
764					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
765					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
766					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	250,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Rancangan RKP 2025					Dukungan Kegiatan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025		
No.	Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator kinerja	Target Lampung 2025 (Rakortek 2024)	Sub kegiatan	Pagu	Keterangan
767					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
768					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	75,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

**A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi :

**1. Bidang Pendidikan**

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan



- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel 4. 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Khusus</li> <li>2. Pendidikan Menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa</li> <li>2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan</li> <li>3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;</li> <li>2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;</li> </ol>

## 2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 4. 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
KESEHATAN	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>2. Standar jumlah dan kualitas</li> </ol>	1. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
	<p>dan/atau berpotensi bencana ns; dan</p> <p>2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB</p>	<p>personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;</p> <p>2. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</p>

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 4. 11 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PEKERJAAN UMUM	1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah	1. Standar jumlah dan kualitas	Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
	lintas kab/kota; dan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/kota	barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan

Selain itu, perumusan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

**4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :**

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan :

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
  - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
  - b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
  - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
  - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;

- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

Tabel 4. 12 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan</li> <li>2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;</li> <li>2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</li> </ol>

## 5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan, antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
- 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tabel 4. 13 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
SOSIAL	1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar 2. rehabsosdas anak telantar; 3. rehabsosdas lansia telantar 4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan 5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sum ber daya manusia; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam; 5. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

#### 6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain :

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 4. 14 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
TRANTIBUMLIN MAS	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan</li> <li>3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol>	Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

#### 4.2.6 Rencana Pengembangan Wilayah

##### Rencana Kawasan Strategis

Pola ruang ditinjau berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, sebagai berikut :

##### Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungannya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.
2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

### **Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi

tinggi. Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan**

**Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

a. **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

- Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.
- Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung

yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).

- Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.
- Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.
- Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung.

**b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat.**

Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

- 2) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :

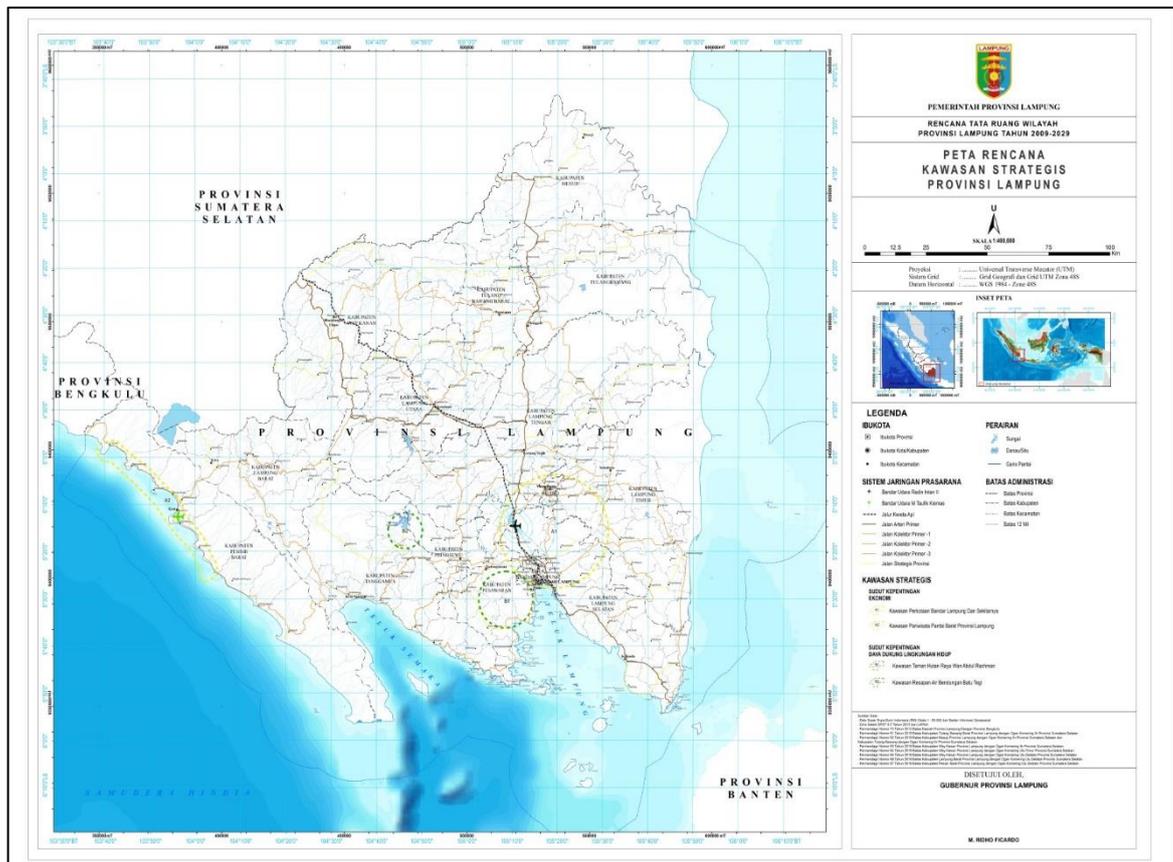
- a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan

Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli.

- b. Kawasan Batutegi di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolannya

Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Lampung dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, disajikan pada Gambar II-16 di bawah ini.

Gambar 4. 3 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung



#### 4.2.7 Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca)

Dalam rangka menindaklanjuti komitmen pemerintah Indonesia yang dikenal dengan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dalam menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca,



maka Provinsi Lampung ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 hingga sebesar 8,40%. Sehingga seluruh aksi adaptasi dan mitigasi harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2030 hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 7, kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri atas 6 (enam) sektor yaitu energi, limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO<sub>2</sub>), dinitro oksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), sulfur-heksaflorida (SF<sub>6</sub>), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online. Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK tahun 2024 sebesar 7,29%.

**a. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Pertanian & Peternakan**

Aksi Mitigasi dari Subsektor Pertanian tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,188% atau setara dengan 6.584.309,20 ton CO<sub>2</sub>-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak

7.908.650,65 ton CO<sub>2</sub>-eq atau sebesar 0,156 % dengan aksi mitigasi antara lain:

1. Optimasi Lahan
2. Pelatihan dan Penerapan Metode SRI (*System of Rice Intensification*)
3. Pengaturan Pola dan Teknik Pengairan
4. Pengembangan Embung
5. Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik dan Biomasa

Adapun untuk Aksi Mitigasi dari Subsektor peternakan tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,0152% atau setara dengan 702.561,75 ton CO<sub>2</sub>-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 721.435,59 ton CO<sub>2</sub>-eq atau sebesar 0,050 % dengan aksi berikut:

1. Pengembangan Pengolahan Biogas Limbah Ternak
2. Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Fermentasi
3. Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik

**a. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Kehutanan**

Sasaran utama terkait penurunan emisi sektor kehutanan adalah meningkatkan luasan atau kualitas tutupan lahan yang akan berperan dalam penyerapan emisi GRK dan mengurangi perubahan lahan yang menghasilkan emisi GRK. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial
2. Meningkatkan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Memantapkan Status Kawasan Hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif diubah sebagai kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan sesuai potensi komoditas
5. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan emisi GRK, strategi yang ditempuh meliputi :

1. Melakukan penanaman untuk meningkatkan penyerapan emisi GRK
2. Melakukan penurunan perambahan dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan
3. Melakukan penataan batas & pembangunan unit KPH
4. Melakukan pemanfaatan lahan tidur dan kurang produktif untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan emisi GRK
5. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan maka Program dan Kegiatan di Provinsi Lampung yang diusulkan menjadi aksi mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
3. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM) & Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
4. Perlindungan dan Pengamanan hutan, melalui kegiatan patrol pengamanan, pencegahan kebakaran hutan, penurunan perambah dan berbagai macam kegiatan & penyuluhan
5. Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
6. Peningkatan Promosi Kehutanan dan Pembinaan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
7. Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.

**c. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Energi**

Emisi dari bidang energi meliputi emisi penggunaan bahan bakar fosil dan pemakaian listrik di sektor industri, rumah tangga, komersial dan pemerintah. Konsumsi energi di Provinsi Lampung akan seiring meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan laju ekonomi. Pada Tahun 2021 penggunaan energi di Provinsi Lampung menghasilkan emisi 11.450.000,00 CO<sub>2</sub>-eq setara dengan 10,83%. Diprediksi tahun 2030 akan menghasilkan emisi sebesar 17.870.000 CO<sub>2</sub>-eq setara dengan 12,087%.

Skenario yang paling mempengaruhi besarnya emisi GRK sektor energi di Provinsi Lampung adalah faktor pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan pemakaian energi. Hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya seperti (industri, transportasi dan lain-lain). Dan sebagai konsekuensi, maka pemakaian energi di sektor lain juga akan meningkat.

Faktor yang mempengaruhi Produksi GRK pada Sektor Energi di luar energi pada Industri dan Transportasi :

1. Konsumsi Energi Rumah Tangga dengan menghitung pemakaian minyak tanah dan LPG
2. Konsumsi Energi pada Pembangkit Listrik (PLN): PLTD dan PLTU

Terkait rencana aksi yang diusulkan oleh satker penanggung jawab sektor energi (Dinas ESDM Provinsi Lampung) telah merencanakan



langkah-langkah strategis terkait rencana penurunan emisi sebagai tabel berikut:

1. Bantuan PLTS
2. Bantuan PLTMH
3. Bantuan PLTBayu
4. Bantuan Biogas
5. Sosialisasi Koordinasi Hemat Energi dan Konservasi Energi
6. *Road Map* Biogas (Sosialisasi)

Jika tidak ada upaya mitigasi di sektor transportasi, maka diperkirakan emisi GRK dari sektor ini akan meningkat hingga sebesar hampir 4 (empat) kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan aksi mitigasi yang pada dasarnya mengadopsi rencana mitigasi GRK nasional. Adapun rencana aksi mitigasi di sektor transportasi Provinsi Lampung akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan angkutan umum berbasis sistem transit (BRT)
2. Manajemen Parkir untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi
3. Peremajaan Armada Angkutan Umum

Pada industri-industri yang menggunakan banyak energi pada saat melakukan proses produksi, Dinas Perindustrian memberikan usulan mitigasi yang lebih terkait kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang bertujuan untuk meminimalisir emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan. Berikut Rencana Aksi Mitigasi Sektor Industri di Provinsi Lampung:

1. Kegiatan sistem monitoring & manajemen energi di sector industri.
2. Penggunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
3. Penggunaan bahan bakar alternatif (biomasa) pada proses produksi di sektor industri.
4. Proses daur ulang hasil produk dan limbah
5. Peningkatan Efisiensi dan Mutu Proses Produksi.



# BAB V

# ARAH KEBIJAKAN

# PEMBANGUNAN

# KABUPATEN/KOTA

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 mengacu pada Arah Pembangunan Kewilayahah Nasional dan mencakup arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pencapaian indikator makro pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kewilayahah, dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam program-program prioritas.

#### **5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2025**

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian **visi Indonesia Emas 2045**, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahah dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.

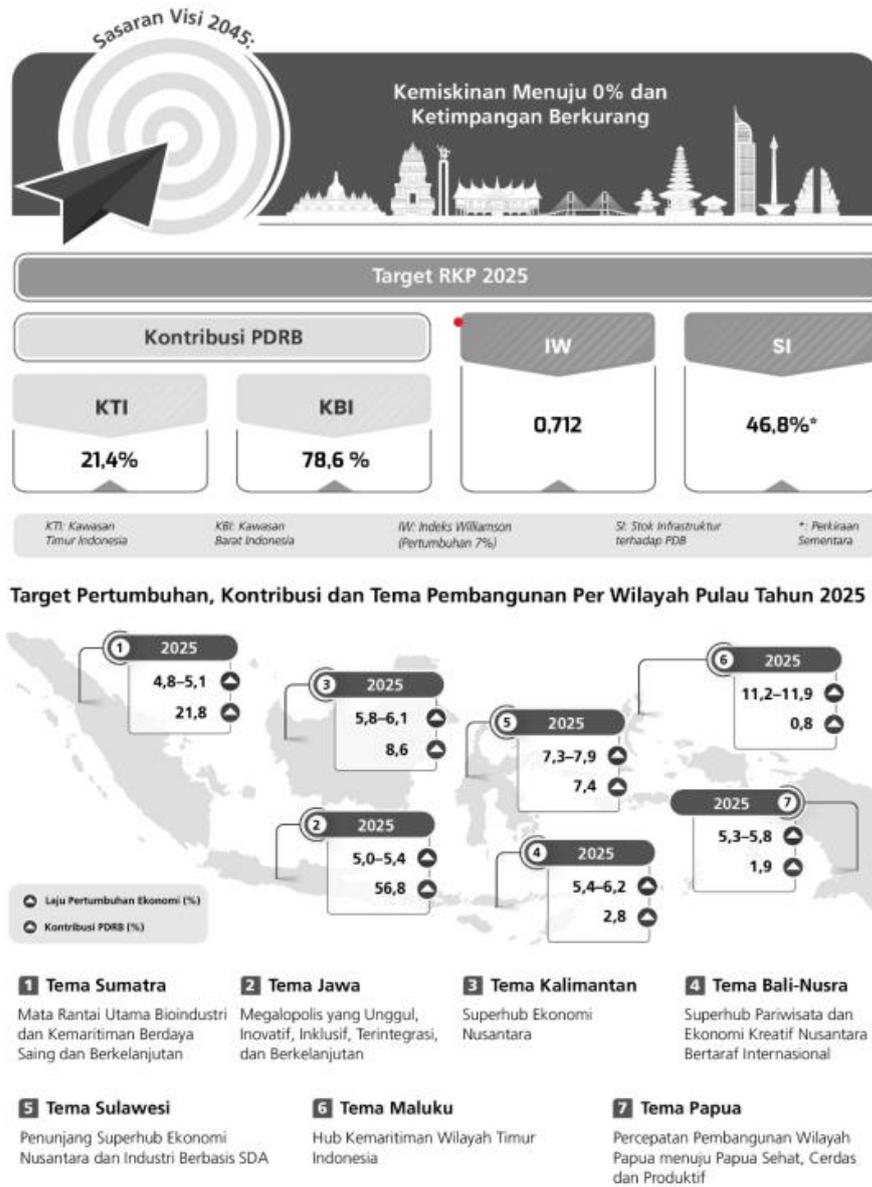
**Arah kebijakan wilayah Sumatera** secara umum pada tahun 2025 sebagaimana arah kebijakan kewilayahah yang terdapat dalam teknokratis



RPJMN Tahun 2025-2026 adalah **“Gerbang selatan Sumatra yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustry”** dengan fokus transformasi sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial :
  - a. Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur dan agroindustry (pilot project: Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatra);
  - b. Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Pesisir Barat Lampung.
2. Transformasi Ekonomi:
  - Pengembangan agroindustry terintegrasi di Bandarlampung;
  - Kajian Pra-FS, FS, DED konektivitas langsung multiinfrastruktur Sumatra-Jawa melalui Selat Sunda;
  - Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik (termasuk pembangunan/peningkatan dry port) yang menginterkoneksi pelabuhan-pelabuhan utama (portto-port interconnection) di Sumatra pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan;
  - Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis panas bumi dan hidro dan interkoneksi Sistem Jawa Sumatera.
3. Transformasi Tatakelola :
  - a. Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Bandarlampung.
4. Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
  - a. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Lampung menduduki peringkat keenam provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 9.764 kejadian).
5. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi:
  - a. Pengembangan kawasan strategis agrikultur Sumsel-Lampung dengan pengembangan irigasi di WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Seputih-Sekampung;
  - b. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

Gambar 5. 1 Kontribusi PDRB per Wilayah



Berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Pusat menargetkan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2025 di Provinsi Lampung. Target sasaran Nasional di Provinsi Lampung, Prioritas Nasional dan *Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Lampung ditunjukkan oleh Matrik dibawah ini.



Gambar 5. 2 Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:  
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 5. 1 Sasaran Pembangunan Daerah dan Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat</li> <li>• Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik</li> </ul>
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Lanal Lampung guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1)</li> <li>• Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan Fasilitasi business matchmaking startup digital</li> <li>• Fasilitasi digital technopreneur</li> <li>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian</li> <li>• Peningkatan produktivitas tebu, kopi, ragam tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan, terutama di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesisir Barat</li> <li>• Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya, terutama pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan,</li> </ul>

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	<p>Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area penyaluran benih padi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung</li> <li>• Sarana pascapanen padi untuk mendukung pengembangan kawasan padi</li> <li>• Pengembangan kawasan peternakan kambing di Kabupaten Pringsewu</li> <li>• Pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan</li> </ul>
<p>Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bts. Kota Baturaja - Bts. Prov. Lampung</li> <li>• Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Sekampung</li> <li>• Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi</li> <li>• Perencanaan dan Pengawasan Teknik / Survei Topografi Tugu Cokelat, Pesawaran – Gedongtataan</li> <li>• Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman</li> </ul>
<p>Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)</li> <li>• Peningkatan kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri pada Sekolah Menengah Kejuruan Unggul Terpadu Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah</li> <li>• Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Lampung</li> <li>• Pembangunan kualitas keluarga</li> <li>• Percepatan penurunan ketimpangan gender, terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Tanggamus</li> <li>• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)</li> <li>• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan</li> </ul>

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering and mathematics unggulan pada Universitas Lampung melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "Higher Education for Technology and Innovation Project"</li> <li>• Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.</li> <li>• Fasilitasi literasi digital</li> <li>• Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li> <li>• Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat</li> <li>• Guru kejuruan dan kepala sekolah yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri Sekolah menengah kejuruan yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan di Kabupaten Lampung Tengah</li> </ul>
<p>Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilirisasi industri kelapa</li> <li>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik</li> <li>• Pengembangan Bandara Gatot Subroto</li> </ul>
<p>Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesisir Barat</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat miskin untuk pengurangan beban terkait kebutuhan dasar di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dengan program pendampingan usaha di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara</li> <li>• Pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Bandar Lampung</li> </ul>
<p>Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan pendidikan antinarkoba di Lampung</li> </ul>



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
<p>Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan wawasan kesejarahan berbasis budaya gotong royong dan optimalisasi potensi ekonomi kreatif melalui pengembangan dan pemanfaatan situs megalitik dan nilai tradisi Begawi</li> <li>• Pengamanan Pantai Pesisir Barat</li> <li>• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan</li> </ul>

Sumber : Rancangan RKP 2025

## 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung

Kebijakan Pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung dilakukan dengan pendekatan wilayah perencanaan/Cluster. Penerapan klaster berdasarkan Potensi Alam-Rencana Tata Ruang Wilayah-Potensi infrastruktur menjadi dasar kosep klaster pada Kabupaten kota di Provinsi Lampung. Konsep ini mengarahkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi diharapkan dapat mejalar pada kabupaten atau kota dimana pertumbuhannya lebih rendah yang berada didalam klaster yang sama.

1. Klaster I dengan Wilayah Pengembangan (WP) : Bandar Lampung-MetroPringsewu : a. Metro-Lampung Tengah-Lampung Timur b. Pringsewu-Pesawaran c. Bandar Lampung-Pesawaran-Lampung Selatan
2. Klaster II a. Lampung Utara-Way Kanan b. Tulang Bawang-Tulang Bawang Barat-Mesuji
3. Klaster III Tanggamus-Pesisir Barat-Lampung Barat.

Gambar 5. 3 Klaster Pengembangan Wilayah



Sumber : Dokumen RPJPD 2025 - 2045

### Arahan Pembangunan Cluster I

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah Perkotaan Bandar Lampung :

1. Pendorong pertumbuhan wilayah metropolitan Lampung Raya dimana koata Bandar Lampung sebagai PKN dan wilayah-wilayah hinterlandnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera.
3. Pemantaban Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai interkoneksi antar Pulau.
4. Pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya.
5. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
6. Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan simpul utama di sumatera di provinsi Lampung simpul domestik (Dumai Riau-Panjang Lampung)
7. Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.

8. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (smart grid).
9. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan Pringsewu-Pesawaran-Bandar Lampung- Lampung Tengah-Lampung Timur-Lampung Selatan.

### **Arahan Pembangunan Cluster II**

1. Mendorong Perwujudan Jaringan Transportasi Udara pengumpan di Bandar Udara Gatot Subroto Way Kanan.
2. Mendorong Perwujudan pengembangan bandar udara khusus prasarana militer TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang,
3. Mendorong Perwujudan Bandar Udara khusus aktivitas perkebunan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang
4. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan prasarana air baku berupa Broncaptering di Kabupaten Way Kanan
5. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir di Bendungan Way Rarem Kabupaten Lampung Utara
6. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji.

### **Arahan Pembangunan Cluster III**

1. Percepatan pengembangan dan oprasionalisasi kawasan strategis sebagai *engine of growth*
2. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) khususnya pada kepulauan Pesisir Barat
3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim
4. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat
5. Perwujudan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 3 Kabupaten WP III dan Suaka margasatwa Gunung Raya Lampung Barat.
6. Perwujudan Taman Wisata Alam Laut
7. Perwujudan Kawasan Cagar Alam Laut Barisan Selatan
8. Perwujudan Kawasan Pariwisata KSPN Danau Ranau, DPD Teluk Lampung bagian Tanggamus, DPD Pesisir Pantai Barat Lampung

- 
9. Perwujudan Kawasan Transportasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus
  10. Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih



Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2025



### 5.3 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro pembangunan terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengeluaran Perkapita. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

#### 5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Tabel 5. 1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi
Lampung Barat	28.86	4.69
Tanggamus	29.60	4.70
Lampung Selatan	50.46	4.82
Lampung Timur	46.28	3.51
Lampung Tengah	59.72	4.70
Lampung Utara	44.75	4.22
Way Kanan	35.58	4.63
Tulang Bawang	63.34	4.27
Pesawaran	40.90	4.49
Pringsewu	33.39	4.78
Mesuji	54.42	4.06
Tulang Bawang Barat	48.70	4.53
Pesisir Barat	33.78	3.42
Bandar Lampung	61.65	4.99
Metro	45.24	4.86
Provinsi Lampung	48.19	4.55

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PE kabupaten/kota dan PDRB Per Kapita tahun 2023, maka capaian PE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 5. 1 Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023



Tabel 5. 2 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Utara dan Lampung Timur.
●	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Metro, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus dan Pringsewu.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2023 pada hakekatnya merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lampung menggambarkan pula percepatan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Lampung, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Lampung.

Terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita pada Tahun 2023 melebihi capaian Provinsi Lampung, yaitu: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian, masih terdapat 4 (empat) kabupaten yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita masih dibawah capaian Provinsi Lampung, yaitu: Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung, telah direncanakan program-program Pembangunan berbasis kewilayahan guna pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, infrastruktur dasar dan jaringan transportasi. Ke depan diharapkan, program-program tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru. Program-program tersebut meliputi:

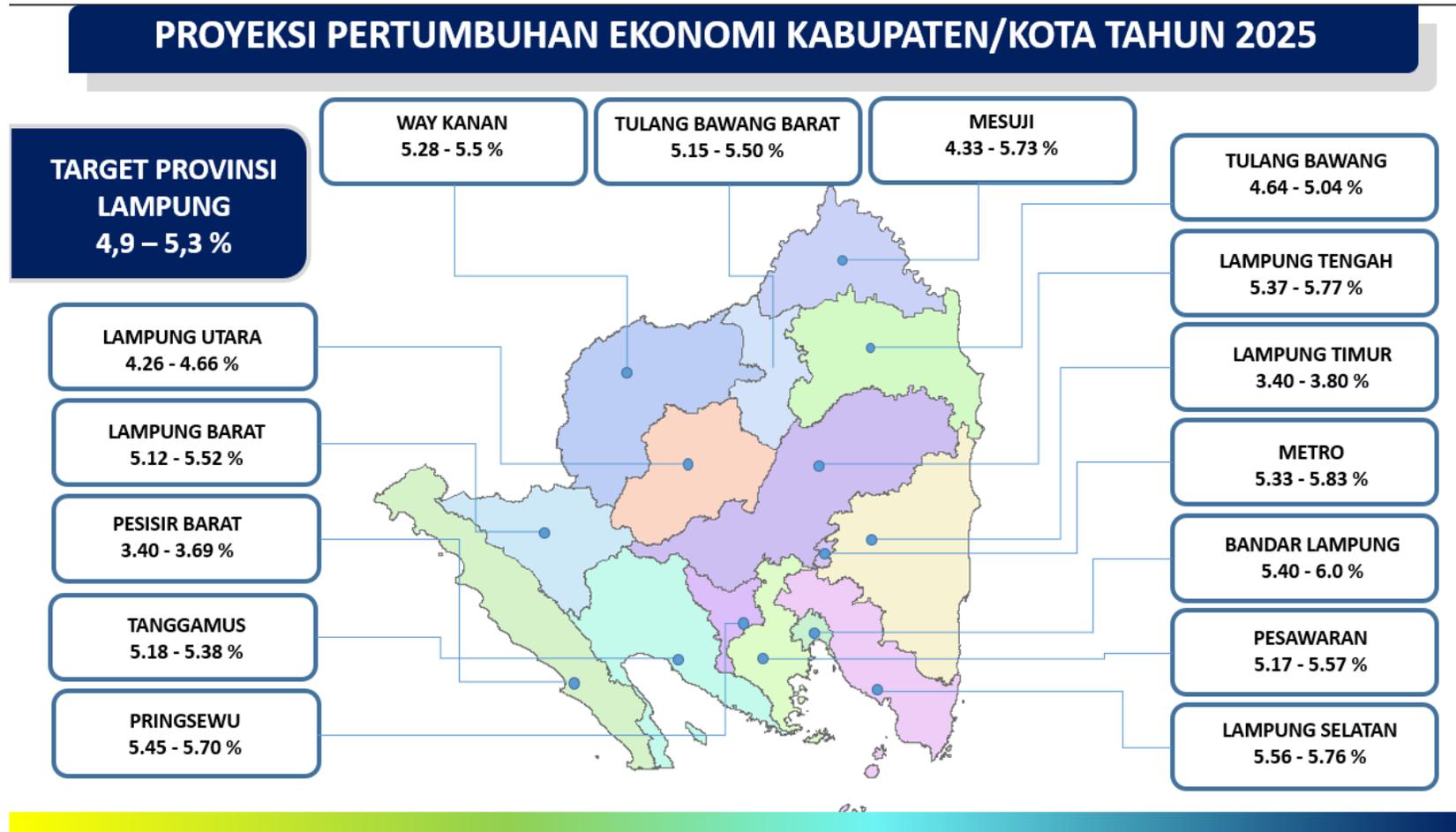
1. Pembangunan Kawasan Terpadu Pariwisata Bakauheni (BHC) di Lampung Selatan.
2. Sport Center & Exhibition, dan Kawasan Kotabaru di Lampung Selatan.



3. Pengembangan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung.
4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung.
5. Pembangunan Rel Kereta Api (Jalur Ganda, Jalur Pintas - Short Cut) di Lampung Selatan.
6. Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus.
7. Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Internasional Radin Inten II dan Pusat Kesehatan Internasional di Lampung Selatan.
8. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang.
9. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah dan Pelabuhan Pengumpan Regional kewenangan Provinsi Lampung.
10. Pengembangan Terminal Type A Betan Subing dan Terminal type B Provinsi.
11. Pengembangan (DPD) 1 Kawasan Pariwisata Teluk Lampung, Selat Sunda & sekitarnya dan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) 2 Pesisir Pantai Barat Lampung, TNBBS dan sekitarnya.

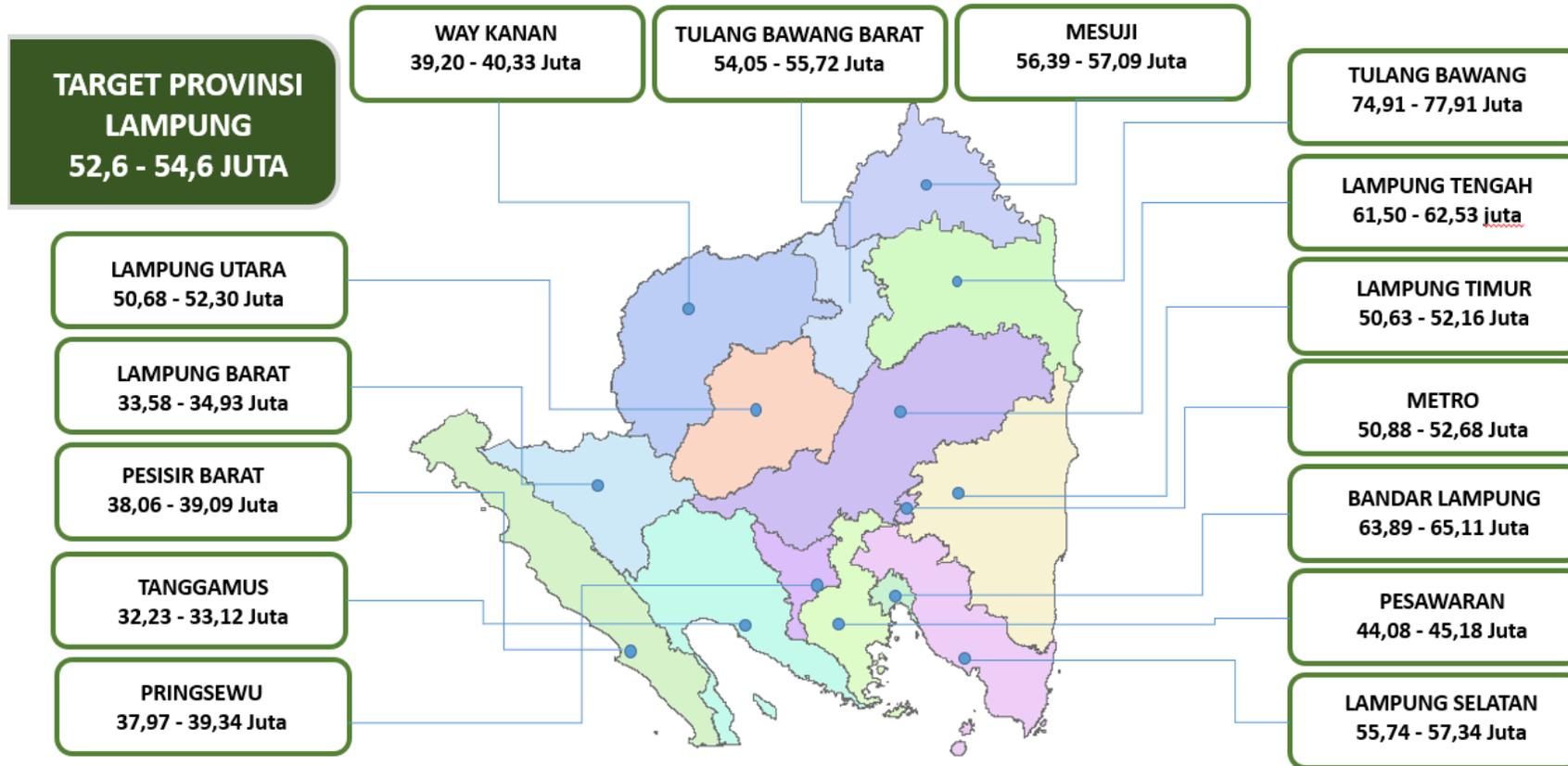


Gambar 5. 5 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2025



Gambar 5. 6 Penetapan Target PDRB per kapita Kabupaten/Kota Tahun 2025

## PROYEKSI PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025



## 5.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Gambaran capaian dan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

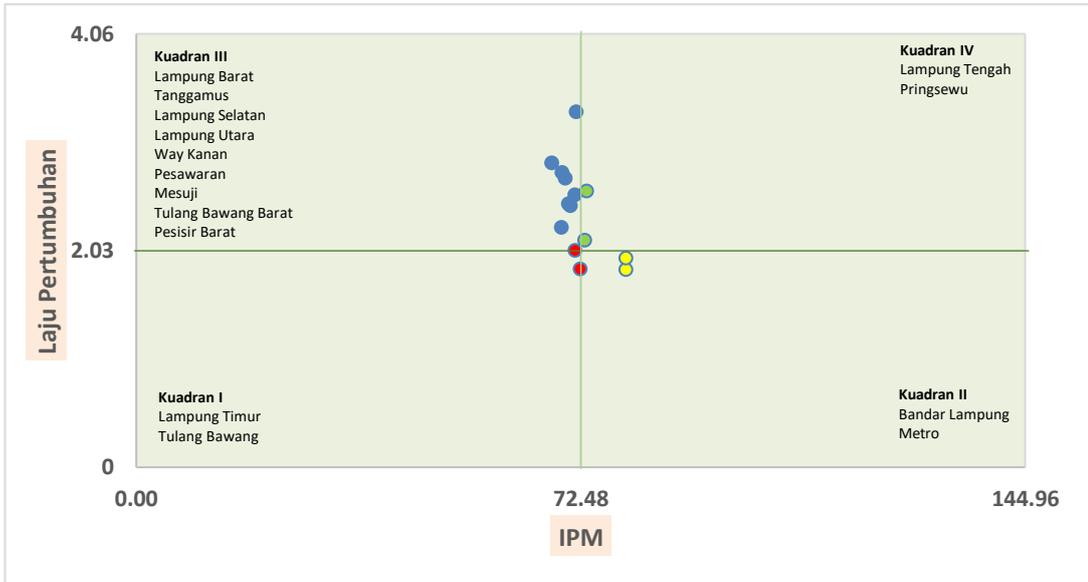
Tabel 5. 3 Capaian dan Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun		Laju Pertumbuhan
	2022	2023	
Lampung Barat	68.39	71.72	3.33
Tanggamus	67.22	69.93	2.71
Lampung Selatan	69.00	71.55	2.55
Lampung Timur	70.58	72.44	1.86
Lampung Tengah	70.80	73.39	2.59
Lampung Utara	68.33	70.78	2.45
Way Kanan	68.04	70.51	2.47
Tulang Bawang	69.53	71.56	2.03
Pesawaran	66.70	69.46	2.76
Pringsewu	70.98	73.11	2.13
Mesuji	64.94	67.79	2.85
Tulang Bawang Barat	67.13	69.38	2.25
Pesisir Barat	65.14	70.40	5.26
Kota Bandar Lampung	78.01	79.86	1.85
Kota Metro	77.89	79.85	1.96
Provinsi Lampung	70.45	72.48	2.03

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 67,79 (Kabupaten Mesuji) hingga 79,86 (Kota Bandar Lampung). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan status “Tinggi”, yaitu Kota Bandar Lampung (79,86), Kota Metro (79,85), Kabupaten Lampung Tengah (73,39), Kabupaten Pringsewu (73,11) dan Kabupaten Lampung Timur (72,44). Sedangkan 10 kabupaten lainnya berstatus “Sedang” (capaian  $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “Rendah” ( $\text{IPM} < 60$ ).

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten dan kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 5. 2 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023



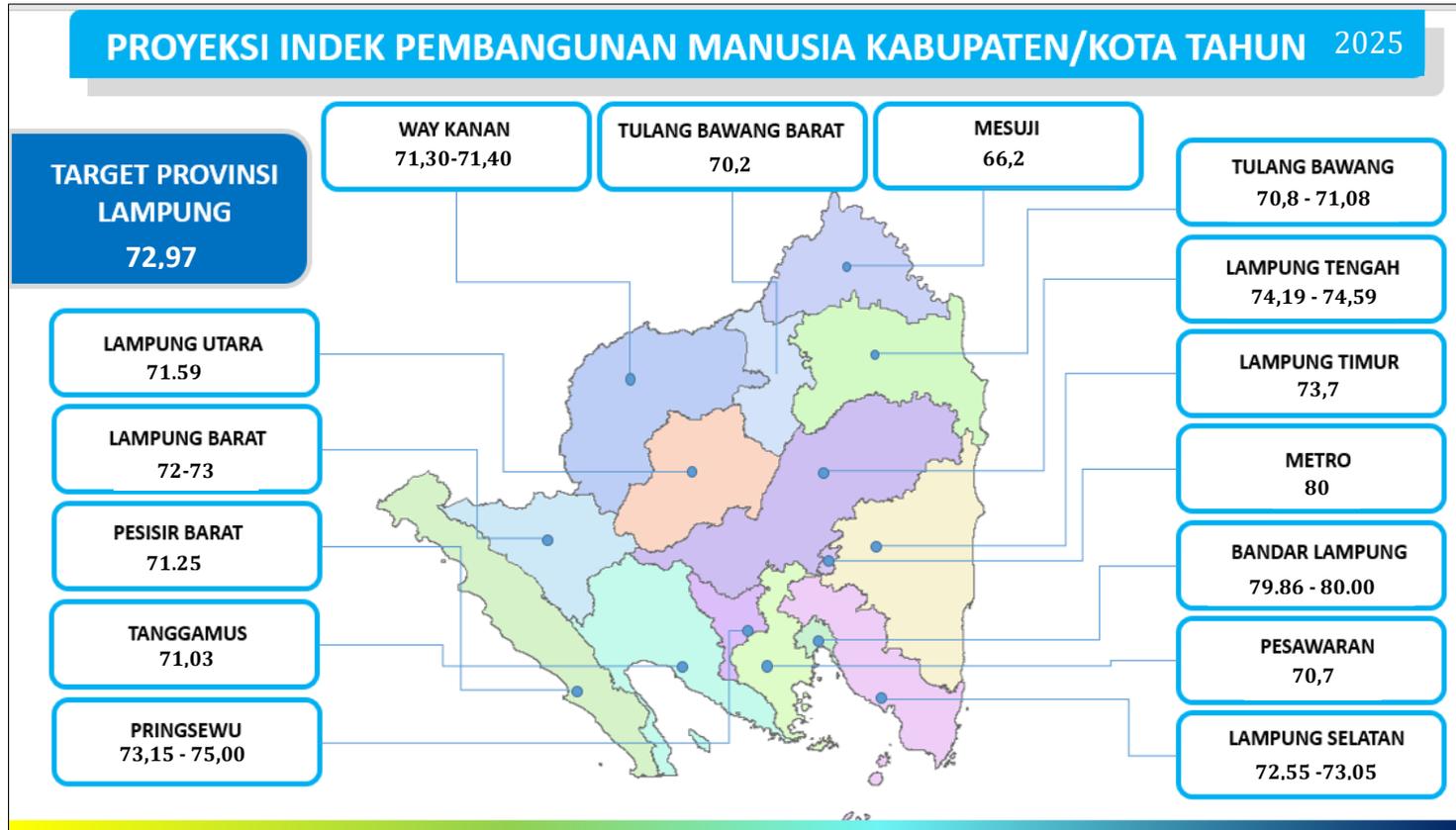
Tabel 5. 4 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Timur dan Tulang Bawang.
●	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Bandar Lampung dan Metro

●	<p>Kuadran III :  Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi</p>	<p>Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.</p>
●	<p>Kuadran IV :  Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi</p>	<p>Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Tengah dan Lampung Timur.</p>

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui peningkatan akses Pendidikan dan pelayanan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Gambar 5. 7 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2025



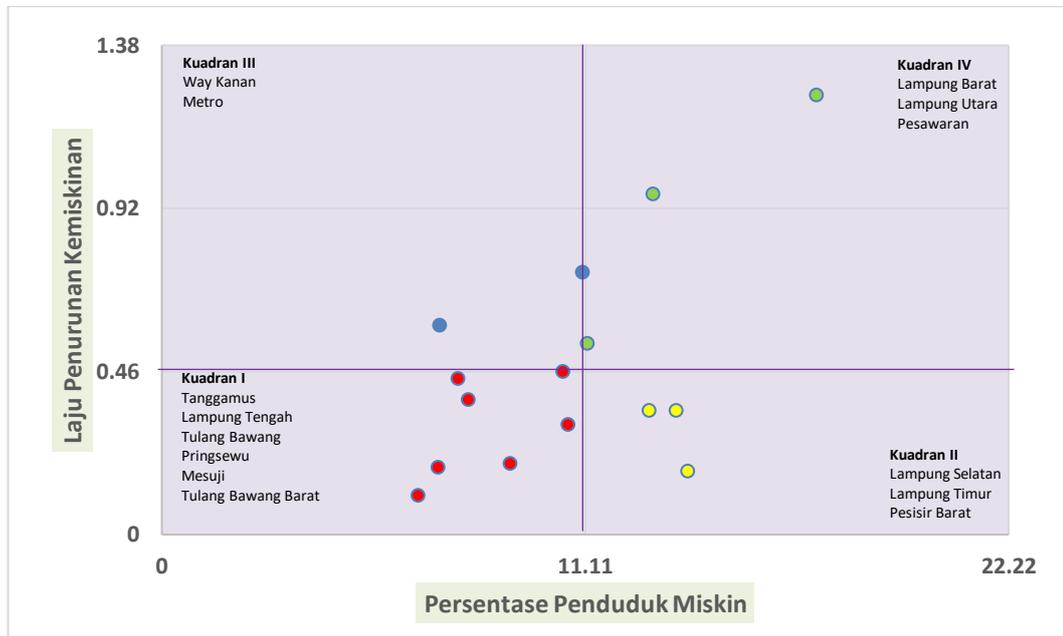
### 5.2.3 Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 5 Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun		Laju Penurunan Kemiskinan
	2022	2023	
Lampung Barat	11.71	11.17	0.54
Tanggamus	10.98	10.52	0.46
Lampung Selatan	13.14	12.79	0.35
Lampung Timur	13.98	13.8	0.18
Lampung Tengah	10.96	10.65	0.31
Lampung Utara	18.41	17.17	1.24
Way Kanan	11.76	11.02	0.74
Tulang Bawang	8.42	8.04	0.38
Pesawaran	13.85	12.89	0.96
Pringsewu	9.34	9.14	0.2
Mesuji	6.84	6.73	0.11
Tulang Bawang Barat	7.44	7.25	0.19
Pesisir Barat	13.84	13.49	0.35
Bandar Lampung	8.21	7.77	0.44
Metro	7.87	7.28	0.59
Provinsi Lampung	11.44	11.11	0.46

Grafik 5. 3 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Tabel 5. 6 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

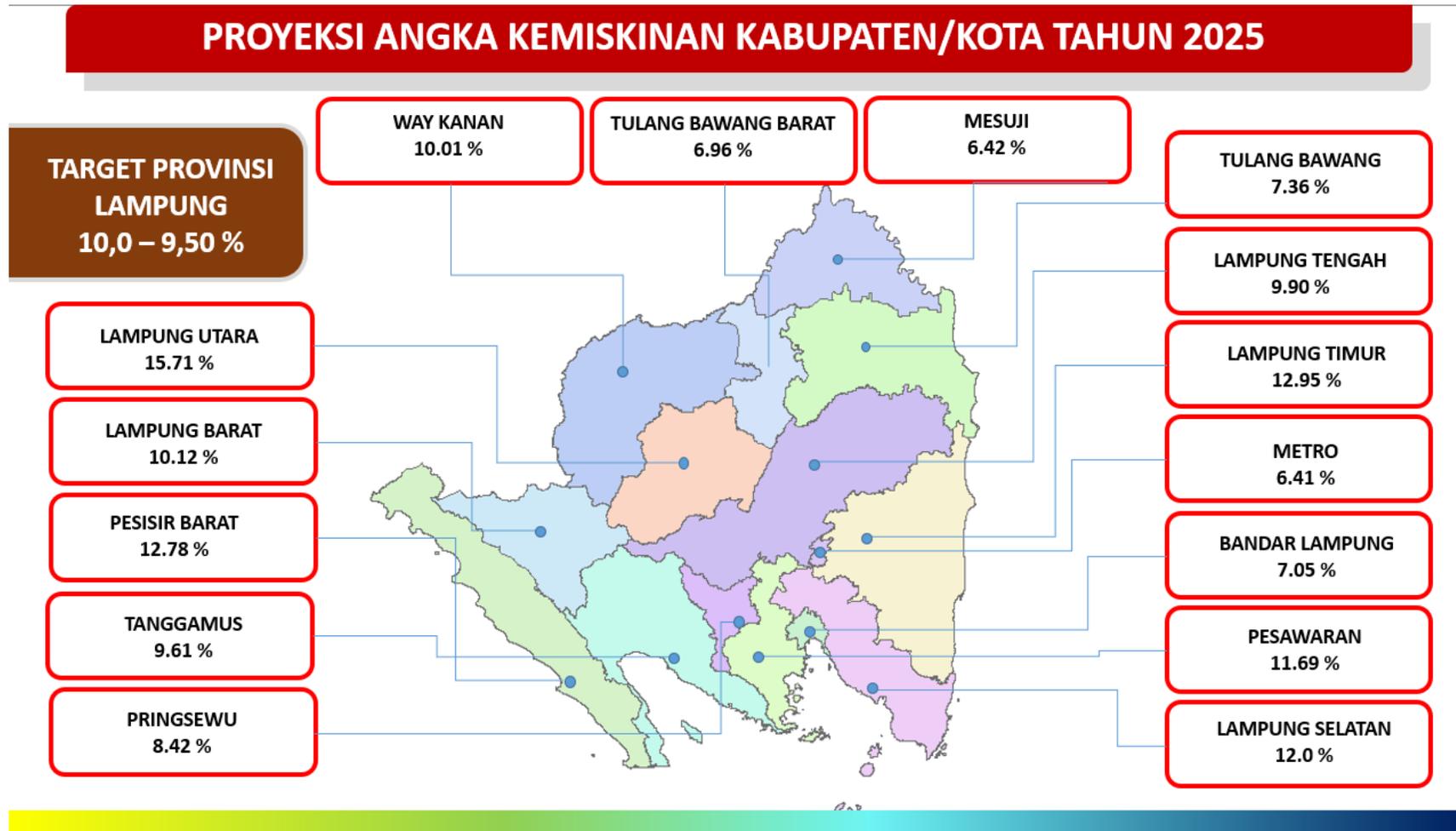
Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Kemiskinan dan Laju Penurunan Kemiskinan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian Kemiskinan dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat. dan Bandar Lampung.
●	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % kemiskinan <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Penurunan Kemiskinan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian % kemiskinan lebih tinggi dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Selatan, Lampung Timur dan Pesisir Barat.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % Kemiskinan LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan Kemiskinan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian % Kemiskinan lebih rendah dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Way Kanan dan Metro.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % Kemiskinan LEBIH TINGGI dan dan Laju Penurunan Kemiskinan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian % Kemiskinan lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan Kemiskinan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Barat, Lampung Utara dan Pesawaran.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren terus menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi terutama di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Pesisir Barat.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2023 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2023.

Gambar 5. 8 Penetapan Target Persentase Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025



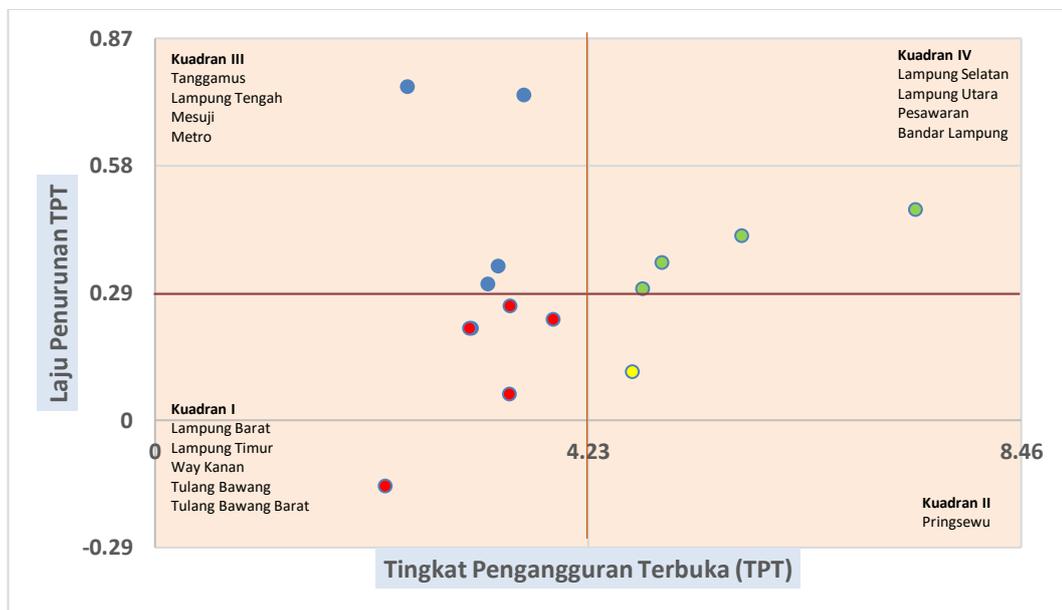
#### 5.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 7 Capaian dan Laju Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun		Laju Penurunan TPT
	2022	2023	
Lampung Barat	2.10	2.25	-0,15
Tanggamus	3.70	3.35	0,35
Lampung Selatan	5.31	4.95	0,36
Lampung Timur	3.30	3.09	0,21
Lampung Tengah	3.56	3.25	0,31
Lampung Utara	6.15	5.73	0,42
Way Kanan	3.28	3.07	0,21
Tulang Bawang	3.52	3.46	0,06
Pesawaran	5.06	4.76	0,30
Pringsewu	4.77	4.66	0,11
Mesuji	3.22	2.46	0,76
Tulang Bawang Barat	4.12	3.89	0,23
Pesisir Barat	3.73	3.47	0,26
Bandar Lampung	7.91	7.43	0,48
Metro	4.34	3.60	0,74
Provinsi Lampung	4.52	4.23	0.29

Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2023



Tabel 5. 8 Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2023

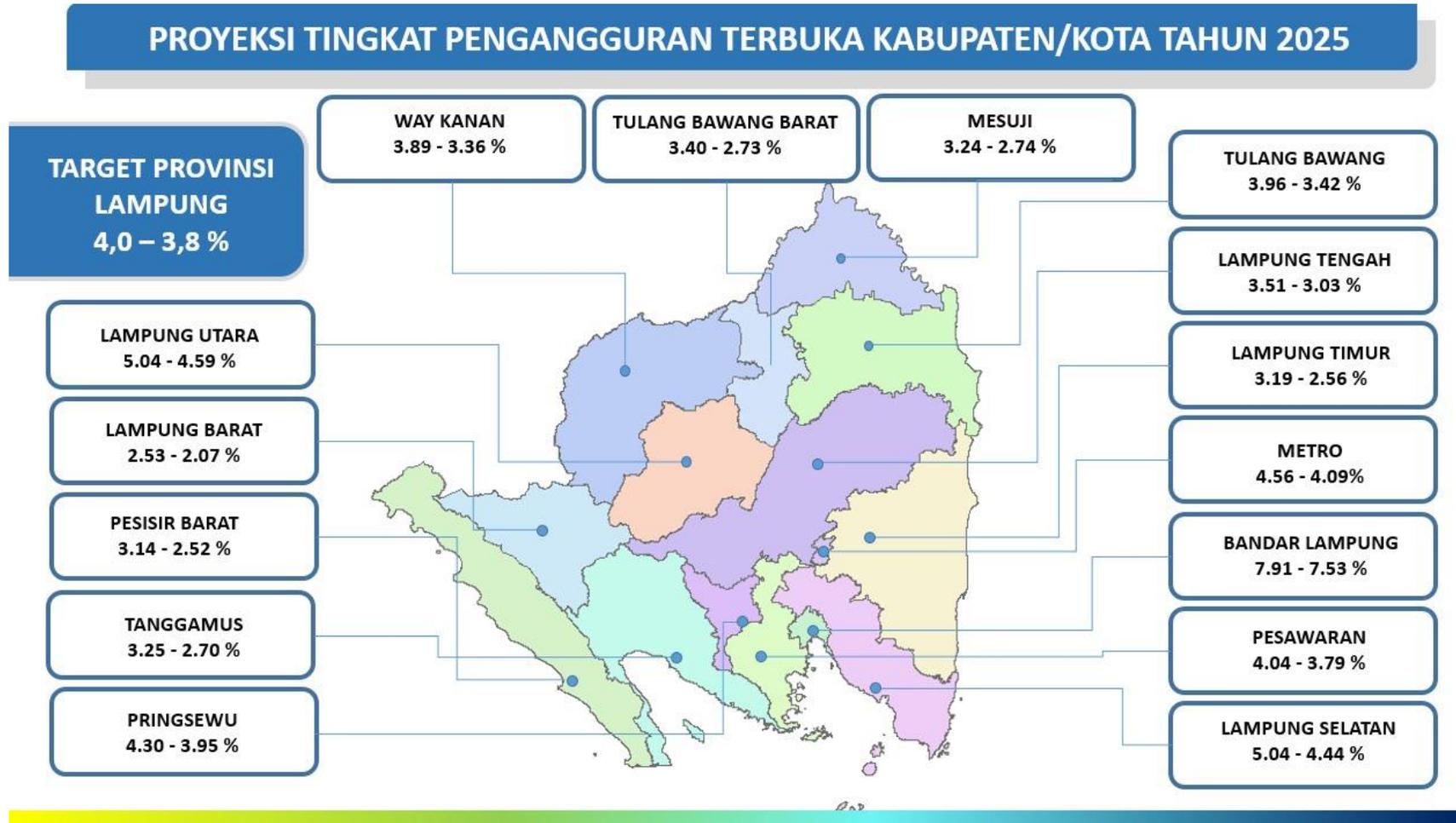
Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Laju Penurunan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian TPT dan Laju Penurunan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.
●	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan Laju Penurunan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pringsewu.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan Laju Penurunan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Tanggamus, Lampung Tengah, Mesuji dan Metro.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan dan Laju Penurunan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran dan Bandar Lampung.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

Gambar 5. 9 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2025



## 5.4 Sinergi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Lampung, terus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsubsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam aspek pendidikan, daya beli dan kesehatan. Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

### URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPD periode Tahun 2025-2026. Berikut tabel Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan.

Tabel 5. 9 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Iklm kebinekaan SMPLB	-	72,38 Nilai	
		Iklm keamanan SMALB	-	78.63 Nilai	
		Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	69,97 Nilai	
		Iklm inklusivitas SMALB	-	65,62 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	58,49 Nilai	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	54.96 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	57,86 Nilai	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		87,85 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	80,48 %	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	63.69 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	66.65 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	59,08 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	71,80 Nilai	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	64,36 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	65,57 Nilai	
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus			
		Iklm inklusivitas SMPLB	-	67,39 Nilai	
		Iklm keamanan SMA	-	81,14 Nilai	
		Iklm keamanan SMK	-	76,74 Nilai	
		Iklm keamanan SDLB	-	81,60 Nilai	
		Iklm keamanan SMPLB	-	80,23 Nilai	
		Iklm kebinekaan SMA	-	75,16 Nilai	
		Iklm kebinekaan SMK	-	73,32 Nilai	
		Iklm kebinekaan SDLB	-	76,53 Nilai	
		Iklm kebinekaan SMALB	-	71,32 Nilai	
		Iklm Inklusivitas SMA	-	64,71 Nilai	
		Iklm Inklusivitas SMK	-	61,17 Nilai	
		Iklm Inklusivitas SDLB	-	65,35 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 2. Kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya

saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Tabel 5. 10 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	100%	
2.	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	11 %	
3.	Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate)	Penemuan Kasus TBC	Penemuan Kasus TBC	90 %	
4.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	126 Per 100.000 Kelahiran Hidup	
5.	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	96 %	
6.	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	87 %	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
7.	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	88,23 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang dilakukan. Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 5. 11 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	0,476 Km	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	0 m <sup>3</sup> /detik	
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	0 Ha	
		Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi	9.692 Ha	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		dan/atau dimodernisasi	dan/atau dimodernisasi		
2.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	6 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	5 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR		5 Materi Teknis	
		Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	1 Perda/Perkada	
		Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	7 Perda/Perkada	
3.	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	1 Provinsi	
		Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	0 Kasus	
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	78 %	
5.	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	-	400 Orang	
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		10 %	
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		10 %	
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi		10 %	
		Persentase ketersediaan data dan		70 %	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		informasi jasa konstruksi			
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi		750 Orang	
6.	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum aman		14 %	
		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		14 %	
7.	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100 %	
8.	Lingkungan Hidup Berkualitas.	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah		16 %	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka		1,5 %	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman		7 %	
9.	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung	100 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

#### 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 12 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	68,95 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana		100 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat		1 Dokumen	
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi		1 Dokumen	
		Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya		30 %	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		100 %	
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100 %	
2.	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum		16 Daerah	
		Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"		16 Daerah	
3.	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*		16 Daerah	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 6. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Lampung yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang sosial dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100 %	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100 %	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	Kesejahteraan Sosial				
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	100 %	
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	1.440 Orang	
5.	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Peningkatan Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	70 %	
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	2 Laporan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	30.000 Orang	
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	62.000 Orang	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	4.500 Orang	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	75 %	
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	2.200 Perusahaan	
		Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	54.000 Orang	
		Jumlah pekerja pada perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan	35.668 Orang	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		
4.	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	60%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Dalam mendukung peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui kegiatan prioritas diantaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas pemuda. Beberapa Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.78 Indeks	
2.	Menurunnya ketimpangan gender,	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.88 Indeks	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkannya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.42 Indeks	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	
3.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Provinsi Layak Anak (Provila)	Provinsi Layak Anak (Provila)	100 Nilai	
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	801 Nilai	
		Persentase ARG	Persentase ARG	9 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

### 3. Urusan Pangan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	45 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
2.	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	2,62 %	keuangan daerah
3.	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	5 %	
4.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	94,3 Nilai	
5.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	95 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

#### 4. Urusan Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi melalui indikator Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi dan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria sehingga Tujuan Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat secara menyeluruh dapat terwujud. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanahan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	6700 Kepala Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	3000 Bidang Tanah	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 5. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*) serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537 Poin	Target Provinsi dan Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2024
2.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	40 %	
3.	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	12,5 %	
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,99 Poin	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Di tahun 2025 diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99.5 %	
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	
		Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	70 %	
2.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30%	
3.	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	2 Dokumen	

## 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	15 Desa	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	425 Orang	
		Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	0 Desa	
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	2.337 Desa	
		Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	1.000 Lembaga	
2.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	1,51 %	
3.	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	10 %	
4.	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	Persentase BUM Desa Maju	6 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari tren laju pertumbuhan penduduk yang berangsur menurun dari tahun ke tahun. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,5 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.19 Rata-rata Anak per Wanita	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	65.9 %	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		9,3 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 9. Urusan Perhubungan

Sektor Perhubungan adalah salah satu sektor yang penting dan menentukan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan. Efisiensi transportasi manusia dan barang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah. Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kinerja pelayanan perhubungan. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang perhubungan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,37 Rasio	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	87,15 Nilai	Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	1 Perusahaan	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari semakin membaiknya indeks SPBE Provinsi Lampung. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Koinfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Koinfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	20 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85 %	
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	85 %	
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 %	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akse	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan	75 %	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		s dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	kualitas informasi publik pemerintah daerah		
2.	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas ( <i>Smart Province</i> )	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas ( <i>Smart Province</i> )	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas ( <i>Smart Province</i> )	100 %	
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100 %	
		Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	31 %	
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	33 %	
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 %	
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 %	
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 %	



No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100 %	
3.	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	100 %	
		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

### 11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu urusan bidang yang paling tinggi menyerap angkatan kerja serta menjadi ujung tombak perekonomian apalagi pasca pandemi di Provinsi Lampung, tentunya indikator-indikator yang tersaji harus dapat memenuhi target. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya	Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	0 %	
		Jumlah Usaha Mikro yang	Jumlah Usaha Mikro yang	4 %	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	Saing dan Produktif	Bertransformasi dari Informal ke Formal	Bertransformasi dari Informal ke Formal		
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	4 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 12. Urusan Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang penanaman modal dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp 13 T	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.51 Nilai	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	76.75 %	
3.	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	36.53 Indeks	
4.	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	62.51 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

#### 14. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang statistik dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.6 Poin	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 15. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang persandian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	3 Orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	4 Orang	
		Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem	10 Orang	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		
		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	30 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Lampung yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kebudayaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	66.5 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.05 %	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	80 %	
		Persentase penduduk usia 10	Persentase penduduk usia 10	6.53 %	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	18.58 %	
2.	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.207 %	
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	95 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 17. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan. melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perpustakaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,5 Nilai	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	66.77 Index	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 18. Urusan Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kearsipan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	88 Nilai	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

### 1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi prioritas dan focus perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Untuk mendukung peningkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing serta pengawasan perikanan yang integrative maka dibutuhkan beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	-	168.698,08 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	-	1 Provinsi	
3.	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	172.223,44 Ton	
		Produksi Garam	Produksi Garam	106 Ton	
4.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	-	38,18 Kg/KAP/TH	
5.	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik dapat mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	Rasio PDB Pariwisata	3 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	15.000.000 Perjalanan	
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 0	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

### 3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	40 %	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	99,6 %	
		Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	98 %	
		Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	45 %	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	93,10 %	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	71 %	
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	14.099 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	120.937 Ton	
		Jumlah Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur	314.520 Ton	
		Jumlah Produksi Susu	Jumlah Produksi Susu	3.751 Ton	
		Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	155.932 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman	Jumlah Produksi Tanaman	2.057 Ton	

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Perkebunan Jenis Cengkeh	Perkebunan Jenis Cengkeh		
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	621,98 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	47.502 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	80.056 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	123.160 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	2.313,12 Ton	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	43.100,63 Ton	
		Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	7.555.526 Ton	
		Jumlah Produksi Kedelai	Jumlah Produksi Kedelai	7.098 Ton	
		Jumlah Produksi Jagung	Jumlah Produksi Jagung	1.723.753 Ton	
		Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	2.832.483 Ton	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

#### 4. Urusan Kehutanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kehutanan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial	-	Rp 279.061.908.000/kapita	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	-	Rp 279.061.908.000/kapita	
3.	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	-	10.000 Ha	
4.	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	-	0 unit	
		Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	-	1.000 Ha	
		Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	-	4 Ha	
5.	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	-	5 Ha	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 5. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	-	99,99 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	-	36 %	
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	-	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja ekspor bernilai tambah tinggi, meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,5 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase kepatuhan berusaha	Persentase kepatuhan berusaha	100 %	
3.	Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 7. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	4 Nilai	
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	450 Orang	
4.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp. 5,5	
5.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18,5 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 8. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	46 Index	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	65,82 Index	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

## 9. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Badan Kesbangpol. Secara uraian tugas, berfungsi membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang kesbangpol dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kembangpol

No	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	100 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Meningkatkan kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas	100 Nilai	
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	100 Nilai	
4.	Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD)	1 Provinsi	
5.	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Provinsi	

### 5.5 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor



25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dikarenakan ada kekosongan pimpinan daerah, maka dokumen perencanaan daerah RPJMD diganti oleh dokumen RPD dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

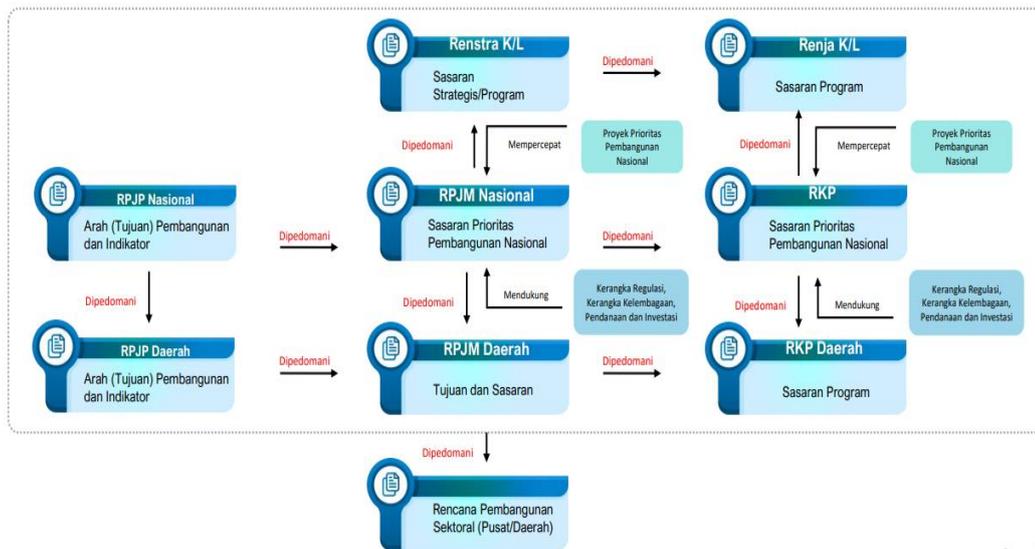
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD); dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar 5. 10 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Active

Lebih lanjut. Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota. rancangan awal RKPD provinsi. RKP. program strategis nasional. dan pedoman penyusunan RKPD”.

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2025 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 5. 42 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
PD6.	<i>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</i>		
		Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Kesejahteraan Rakyat



No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Kesbangpol	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
		Kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
<p>PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p>PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>			
PD5.	<i>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan</i>	Pertanian	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penanganan Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pertanian	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perkebunan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan	Dinas Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
		Penanaman Modal	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pariwisata	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Perindustrian	

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perdagangan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sekretariat Daerah	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
<p>PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>			
<i>PD3.</i>	<i>Pembangunan Infrastruktur</i>		
		Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat DPRD

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pertanahan	
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Perhubungan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
PD2.	<i>Peningkatan kualitas hidup SDM</i>		
		Pendidikan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Perpustakaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kearsipan	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Perekonomian
		Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan			
<i>PD4.</i>	<i>Penanggulangan Kemiskinan</i>	Tenaga Kerja	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Sosial	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Transmigrasi	
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Proritas Nasional (PN)/Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</b>			
<i>PP1.</i>	<i>Reformasi Birokrasi</i>		
		Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Perencanaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keuangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Keuangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penelitian dan Pengembangan	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penghubung	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Penghubung
		Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		Inspektorat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kehutanan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan
		Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Administrasi Pimpinan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Kesejahteraan Rakyat

		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Hukum
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Umum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Organisasi
		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Statistik	
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		Persandian	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
<i>PD 7.</i>	<i>Peningkatan kualitas Lingkungan hidup</i>		
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kehutanan	
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Kehutanan
		Lingkungan Hidup	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Dinas Lingkungan Hidup

		Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan.	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*Sumber : Permen PPN No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana RKP Tahun 2025; Rankhir RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026*

Adapun tema dan prioritas pembangunan serta beberapa program unggulan kabupaten/kota dalam menunjang pembangunan provinsi pada



Tahun 2025 yang memerlukan elaborasi atau dukungan baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TEMA : *“Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik;
- c) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur yang Baik dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana;
- d) Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian, UMKM dan Pariwisata;
- e) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Berbudaya.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro dan dalam upaya meningkatkan peran strategis UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru dan pengentasan kemiskinan salah satu upaya yang dilakukan dengan Pemberdayaan UMKM sehingga hal tersebut kami jadikan salah satu kegiatan unggulan di Kabupaten Lampung Barat. Melalui dukungan anggaran di tahun 2024 ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk inovasi kegiatan unggulan dengan terus fokus terhadap peningkatan UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan, Fasilitasi baik dalam perizinan, produk, pembiayaan sampai dengan pemasaran. Pembangunan Pasar Tematik Wisata Jelajah Wisata Danau Ranau, pengolahan ikan Danau Ranau serta pembangunan rumah produksi bersama.

b) Meningkatkan Literasi Daerah

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi. Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan minat baca dan kunjungan masyarakat Lampung Barat ke perpustakaan. sehingga Peningkatan Literasi menjadi salah satu kegiatan Unggulan di Kabupaten Lampung Barat. Komitmen tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Baca di Tahun 2023 sebesar 76,901 point atau masuk dalam kategori tinggi. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan sebesar 77 Point

yang akan dilaksanakan perhitungan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk inovasi kegiatan unggulan diantaranya pelaksanaan Festival Literasi di tingkat Kabupaten serta keikutsertaan dalam festival Literasi Provinsi Lampung. Perpustakaan keliling di 15 kecamatan serta Pembangunan Perpustakaan Daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

c) Pengembangan Geopark Kaldera Suoh

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 20, Kaldera Suoh masuk dalam 110 warisan geologi nusantara yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Atas dasar tersebut Kabupaten Lampung Barat menjadikan Pengembangan Geopark Kompleks Kaldera Suoh menjadi salah satu kegiatan unggulan di Kabupaten Lampung Barat. Adapun upaya yang dilakukan untuk inovasi kegiatan unggulan antara lain : MOU Kampus Lapangan dengan beberapa Universitas, penetapan Warisan Geologi, review rencana induk kaldera suoh oleh bappenas, dossier geopark kaldera suoh, telah menjadwalkan beberapa aksi dalam Pengembangan Geopark Kaldera Suoh, Penyusunan Buku Seri Kaldera Nusantara Kaldera Suoh serta Usulan Penetapan Geopark Nasional Kaldera Suoh oleh Menteri ESDM oleh Gubernur Lampung.

d) Ambulan Hebat

Ambulan hebat merupakan program unggulan berupa penyediaan mobil ambulance dengan sarana dan SDM kesehatan yang lengkap yang setiap saat dapat diakses oleh masyarakat.

e) Seragam Sekolah Gratis

Seragam sekolah gratis untuk siswa-siswi baru tingkat SD/MI dan SMP/MTS merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memajukan dunia pendidikan. Program seragam sekolah gratis diharapkan mampu mengurangi beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya.

f) Beasiswa Kedokteran

Beasiswa kedokteran merupakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Lampung Barat yang berprestasi dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dokter di Lampung Barat. Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdikan serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Lampung Barat. Komponen beasiswa berupa : biaya penyelenggaraan kuliah; uang saku; transport lokal; uang buku; uang praktek; uang

penggunaan/fotocopy; biaya kesehatan; biaya pemondokan dan biaya hidup.

g) Beasiswa Pendidikan Kesenian

Dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesenian di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Seni Tari dan Musik bagi siswa SMA/Sederajat yang lulus seleksi pendidikan kesenian di Universitas Lampung. Beasiswa berupa biaya pendidikan selama 8 (delapan) semester.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA : *“Peningkatan Sumber Daya Manusia, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan;
- b) Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
- c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
- d) Meningkatnya Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah, Pelayanan Dasar dan Energi;
- e) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
- f) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Bapak Asuh Stunting  
Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian seluruh instansi di Kabupaten Lampung Utara terhadap stunting, setiap Perangkat Daerah memiliki daerah binaan stunting.
- b) Jemput Bola  
Program pemberian pelayanan pencatatan sipil ke desa dan kecamatan, diutamakan bagi masyarakat lansia dan memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke kabupaten.

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA : *“Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*

#### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial;
- b) Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c) Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan;
- d) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana;
- e) Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik.

#### PROGRAM UNGGULAN :

- a) Swasembada WC  
Lampung Selatan berkomitmen untuk meningkatkan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program ini diampu oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan beberapa inovasi yang diantaranya berupa peningkatan honorarium bagi tenaga pengajar, beasiswa bagi pelajar, dan pembelajaran malam hari dalam upaya program kejar paket A, B, dan C.
- b) Program Jalan Lancar dan Terhubung  
Program ini merupakan upaya Lampung Selatan untuk meningkatkan akses jalan lancar dan terhubung antar desa, kecamatan hingga pusat kabupaten. Program diampu oleh Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan serta sinergitas dengan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa untuk menangani jalan lingkungan.
- c) Program Rumah Layak Huni  
Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam meningkatkan akses masyarakat Lampung Selatan untuk menikmati rumah layak huni. Program ini diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Program ini juga didukung oleh organisasi seperti Baznas Kabupaten Lampung Selatan.
- d) Program Pemberdayaan UMKM  
Program pengembangan UMKM diampu oleh Dinas UMKM dan salah satunya fasilitatornya adalah Dekranasda Lampung Selatan. Produk UMKM juga selalu ditampilkan dalam berbagai event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti Event Pariwisata, Event Musik bahkan pada Musrenbang RKPD, termasuk upaya digitalisasi UMKM.

- e) **Program Pengembangan Pariwisata Unggulan**  
Program pengembangan pariwisata salah satunya melalui Program Gerakan Gotong Royong Terpadu (GEROT) Pariwisata dalam upaya mempersiapkan suatu wilayah untuk menjadi destinasi wisata. Pengembangan ini meliputi wisata alami, berupa pantai, air panas, air terjun dan lainnya hingga wisata dan wahana buatan seperti pengembangan agrowisata, motocross dan lainnya. Serta berbagai upaya pengembangan event-event seperti musik, olahraga hingga hobi baik skala lokal, domestik hingga Nasional.
- f) **Program Swasembada Gizi**  
Program ini salah satu tujuan utamanya adalah pengentasan stunting yang ditargetkan pada Tahun 2024 ini sebesar 0%. Program ini merupakan program lintas sektor yang diantaranya diampu oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Bappeda dan lain sebagainya. Program ini memberikan jaminan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi, yang meliputi sosialisasi, pendampingan hingga penanganan stunting.
- g) **Program Hilirisasi Produk Pertanian**  
Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan. Pengembangan BUMD Lampung Selatan Maju yang mengembangkan salah satu produknya yaitu Beras Lampung Selatan Maju yang didistribusikan kepada sebagian besar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Lampung Selatan setiap bulannya.
- h) **Program Pelayanan Terpadu**  
Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan aktivitas administrasinya. Pengembangan dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik menjadi prioritas utama. Mal Pelayanan Publik telah memberikan pelayanan untuk 260 pelayanan perizinan yang meliputi Pemerintah Daerah hingga instansi vertikal.
- i) **Program Lampung Selatan Damai dan Tenteram**  
Program yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi vertikal serta Forkopimda. Sinergitas dengan Forkopimda dilakukan dalam berbagai kesempatan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan daerah.

#### 4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TEMA : *“Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”*

##### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b) Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan;
- c) Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya;
- d) Pemerataan infrastruktur yang berkualitas; dan
- e) Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

##### PROGRAM UNGGULAN :

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

##### a) Pendidikan Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:

1. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer;
4. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan;
5. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu;
6. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah; dan
7. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.

##### b) Kesehatan Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:

1. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
  2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas;
  4. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu); dan
  5. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.
- c) Pemuda Milenial Berjaya  
Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.
- d) SIJALU Berjaya  
Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan :
1. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan
  2. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.
- e) Petani Berjaya  
Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah :
1. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani;
  2. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri;
  3. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat;
  4. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi; dan
  5. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.
- f) BUNKAM Berjaya  
Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.

g) Keberagaman Umat Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:

1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan;
2. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung);
3. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
4. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat;
5. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal; dan
6. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat.

h) Pelayanan Berjaya

Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:

1. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu;
2. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan;
3. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat;
4. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala;
5. *DPMPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan;
6. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari; dan
7. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

## 5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA : *“Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”*

### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
- b) Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah Berkelanjutan;
- c) Memantapkan Infrastruktur Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- d) Meningkatkan Layanan SPM, Penanggulangan Kemiskinan, Prevalensi Stunting dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
- e) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
- f) Membangun Keluarga Berkualitas, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Pemuda dan Olah Raga;
- g) Memantapkan Stabilitas Makro Ekonomi dan Keamanan Masyarakat; dan
- h) Melestarikan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

### PROGRAM UNGGULAN :

- a) Pemerataan dan Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Universal;
- b) Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan;
- c) Perlindungan Sosial Adaptif, Terintegrasi, dan Inklusif;
- d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Usia Produktif;
- e) Peningkatan Keterkaitan UMKM pada Rantai Nilai Industri Domestik dan Global;
- f) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Produk Pertanian Yang Terintegrasi Dengan Upaya Penguatan Ketahanan & Kemandirian Pangan;
- g) Pengembangan Ekonomi Biru Berbasis Keunggulan Wilayah;
- h) Percepatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi Dan Logistik Yang Andal Untuk Mendukung Tumbuhnya Sektor Industri Manufaktur;
- i) Peningkatan Pelayanan Publik Dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- j) Pengembangan Tata Ruang Berbasis Wilayah Kesatuan Lanskap Ekologis;

k) Peningkatan Ketahanan Bencana.

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA : *"Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- d) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
- e) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah; dan
- f) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Semua Bisa Sekolah  
Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi Pendidikan. kelompok sasaran dari program ini adalah penduduk yang mengalami putus sekolah. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Pekon antara lain melalui penganggaran anak putus sekolah dimasing-masing Pekon untuk mengikuti Program Kejar Paket A, B dan C yang dibiayai oleh APBPekon.
- b) Penyediaan jamban sehat bagi masyarakat miskin;
- c) Program Inovasi GEMA PENTING (Gerakan Bersama Penanggulangan dan Pencegahan Stunting);
- d) Program Penguatan Peran Pelayanan Kesehatan berdasarkan *Academic Health System (AHS)* dan Peningkatan Akreditasi RSUD dan Puskesmas menjadi Pelayanan Paripurna;
- e) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, melakukan pembinaan Unit Kompetensi Pelatihan Pelaksana Tenaga Kerja (UKP22TK) yang terintegrasi dengan SMK, melaksanakan Job Canvassing/Pemasaran Tenaga Kerja ke Perusahaan dalam rangka memasarkan tenaga kerja, memberdayakan Bursa Kerja Khusus

- (BKK) di Satuan SMK dan Lembaga Pelatihan dalam rangka memasarkan alumninya ke Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- f) Program Anjungan Dukcapil Mandiri;
  - g) Program Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan terpadu untuk Publik (SiCANTIK) *Cloud* dan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - h) Program Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengembangan Sentra-Sentra Produksi;
  - i) Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
  - j) Program GERTAK MATA BABE (Gerakan Serentak Masyarakat Tanam Bawang dan Cabe);
  - k) Program Pemberdayaan UMKM dan IKM melalui Standarisasi Produk, Kemasan, Pemasaran dan Akses Keuangan;
  - l) Program Hilirisasi Sumber Daya Alam Produk Unggulan Daerah secara Inklusif;
  - m) Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata sebagai Objek Destinasi Wisata;
  - n) Program Sipesta Ratu (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah, Amanah, Tangguh dan Unggul);
  - o) Penguatan Manajemen Bencana terutama pada saat Tanggap Darurat.

## 7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA : *"Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung Ketersediaan Infrastruktur Menuju Way Kanan Unggul dan Sejahtera"*

### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pembangunan Sumber daya manusia yang unggul melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Sosial;
- b) Peningkatan Produktifitas dan Produksi, daya saing Sektor Pertanian, UMKM dan Pariwisata yang didukung Ketersediaan Infrastruktur;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
- d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

### PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya mempercepat penurunan kemiskinan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya.

- b) Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas  
Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang berkualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan.
- c) Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah  
Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada.

## 8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA : *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Pembangunan Manusia”*

### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan ekonomi masyarakat, dunia usaha, pemanfaatan potensi dan pemerataan pembangunan;
- b) Peningkatkan SDM yang berkualitas;
- c) Percepatan penurunan kemiskinan;
- d) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan mitigasi bencana;
- e) Reformasi birokrasi yang berkualitas, bersih dan transparan;
- f) Kehidupan masyarakat yang kondusif dalam berbangsa dan bernegara; dan
- g) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pemberian Insentif Tenaga Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Program Pemberian Insentif Aparatur Keamanan;
- c) Program Percepatan Pelayanan Publik;
- d) Program Pemberian Bantuan Sosial;
- e) Program Pemberian Bantuan Bedah Rumah;

- f) Program Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin;
- g) Program Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan;
- h) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan;
- i) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian;
- j) Program Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- k) Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan;
- l) Program Peningkatan Pendapatan Aparatur Kampung.

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA : *"Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, dan berdaya saing;
- b) Pemerataan Infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas;
- c) Peningkatan Iklim Investasi dan berusaha yang kondusif;
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi;
- e) Mewujudkan Desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA : *"Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah"*

#### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global;
- b) Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi;
- c) Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting;
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
- e) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- f) Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat.

#### PROGRAM UNGGULAN :

Berlakunya otonomi daerah, menjadi penanda bagi pemerintah daerah dalam hal kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya. Permasalahan klasik desa-desa hampir di seluruh Indonesia adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola desanya sehingga potensi sumber daya alam tidak dapat dikelola secara mandiri. Solusi dari permasalahan tersebut adalah harus adanya program, sistem, kebijakan, aturan, undang-undang yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah untuk desa. Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Tata kelola yang baik memerlukan sumber daya manusia yang kompeten serta campur tangan berbagai stakeholder diantaranya pemerintah, komunitas, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan media. Karena bagaimanapun, berhasil tidaknya pengelolaan sumber daya dan potensi desa akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan kemampuan para stakeholder dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Memahami hal ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggagas inovasi berjudul WISATA JEJAMA (Wisata Jelajah Edukasi sejarah budAya dan alaM desa), yakni sebuah gerakan optimalisasi sektor strategis pariwisata dengan berbasis potensi unggulan desa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak/ stakeholder agar terkelola dengan baik hingga memberikan hasil yang optimal.

Dalam inovasi ini, melalui kolaborasi berbagai stakeholder, satu desa dengan wilayah yang relatif kecil akan memiliki beragam konsep wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan. Dimana desa pertama yang dipilih dalam penerapan inovasi ini adalah Pekon Lugusari. Pekon Lugusari merupakan salah satu pekon di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, SDM yang ulet dan kompeten, sehingga sejak awal Pekon ini cukup

menonjol dalam hal pemberdayaan. Lokasi Pekon Lugusari juga cukup strategis, yaitu berjarak 5 km dari Ibukota Kecamatan Pagelaran, 25 km dari Ibukota Kabupaten Pringsewu, dan 45 km dari ibukota Provinsi Lampung.

Secara administrasi, Pekon Lugusari terbagi menjadi lima dusun yaitu dusun I Lugusari, Dusun II Sridadi, Dusun Rejosari, Dusun Solo, dan Dusun Ngadirejo. Pada tanggal 02 September 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu Proyek Strategis Nasional Bendungan Way Sekampung yang terletak di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran. Jembatan Way Sekampung menghubungkan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran dengan Pekon Fajarbaru Kecamatan Pagelaran Utara. Bendungan Way Sekampung dengan genangan airnya yang berdaya tampung 68,06 juta m<sup>3</sup> dan luas genangan 800 Hektar menjadikannya sebagai salah satu bendungan terbesar di Provinsi Lampung, dan Jembatan Way Sekampung ini memiliki panjang 400 meter, menjadikannya sebagai jembatan terpanjang di Provinsi Lampung dengan hamparan air dan pegunungan yang indah. Dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang dibangun di Kabupaten Pringsewu berupa Bendungan Way Sekampung dan Jembatan Way Sekampung ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Kecamatan Pagelaran dan Pekon Lugusari untuk memanfaatkannya sebagai sebuah potensi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Disamping itu, Pekon Lugusari juga memiliki sejumlah potensi wisata lain, seperti Ledeng Pendem, Pura, Sentra Kerajinan Tapis, Sentra Ikan Air Tawar, Wisata Agro, industri makanan ringan tradisonal, modern, dan lain- lain. Potensi-potensi inilah yang dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya melalui program inovasi Wisata Jejama, guna memberi hasil maksimal, terutama bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA : *“Peningkatan SDM yang Adaptif dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif;
- b) Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah;
- c) Peningkatan Infrastruktur;

- d) Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e) Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi;
- f) Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya; dan
- g) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Pelatihan Kerja
- d) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
- e) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
- f) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h) Program Penyelenggaraan Jalan;
- i) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- j) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- k) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- l) Program Peningkatan Ketertiban Umum;
- m) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA : *"Peningkatan Infrastruktur dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah;
- b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan;
- c) Peningkatan Perekonomian Daerah;
- d) Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
- e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Bergerak Bersama Maju Semua  
Merupakan program yang dimotori oleh Penjabat Bupati Mesuji dengan semangat membangun Kabupaten Mesuji, berkolaborasi dan

sinergi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, instansi vertikal, akademisi dan stakeholder terkait. Proses pembangunan akan berjalan dengan baik manakala seluruh pihak dapat bekerja bersama dalam harmoni dan dinamika, saling mengisi kekosongan untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

b) Geber Mas (Gerakan Bersama Mengatasi Stunting)

Merupakan program yang berfokus pada upaya menekan laju angka prevalensi stunting dengan kolaborasi, elaborasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan termasuk berbagai inovasi daerah di lingkup sektoral. Stunting telah menjadi isu penting mengingat Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi di bawah 14% pada 2024. Untuk itu, target penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7%. Sementara intervensi yang telah dilakukan tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut terlihat dari angka prevalensi stunting Kabupaten Mesuji yang berada di atas angka rata-rata nasional yaitu 22.8% mengalami lonjakan di banding tahun 2021 yang berada pada angka 21.8%.

c) E-Signature

Merupakan program yang mendukung tata kelola pemerintahan utamanya arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini memberikan kemudahan proses paraf koordinasi dan penandatanganan naskah dinas oleh pejabat berwenang karena dapat dilakukan secara Rilltime dimanapun dan kapanpun. Aplikasi yang digunakan dibangun dengan platform berbasis website dan aplikasi android, dimana semua proses mulai dari penyampaian hingga penandatanganan naskah dinas dilakukan dalam bentuk digital. pemanfaatan aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) proses pengadministrasian naskah dinas lebih efisien dan efektif.

d) Senja (Sistem Elektronifikasi Kerja)

Program ini merupakan terobosan baru yang merupakan pengembangan dari pola absensi elektronik yang sebelumnya diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji. Hadirnya aplikasi Senja merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap perkembangan industry era industri 4.0 yang dikenal dengan istilah internet of things (IoT). sekaligus memperkuat arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Eksekutif (SPBE). Mulai di uji coba pada Bulan November dan Desember tahun 2022, Aplikasi ini secara resmi telah mulai diterapkan pada Januari 2023. Aplikasi Senja ini terintegrasi dengan GPS yang menunjukkan lokasi pada saat aplikasi diakses. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu Tools yang bermanfaat dalam memberikan kontribusi besar terhadap upaya peningkatan disiplin ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

e) Pak KUR

Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam memulihkan perekonomian yang pada beberapa tahun belakangan ini mengalami degradasi diakibatkan oleh pandemic COVID-19 sekaligus menekan maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh entitas ilegal, seperti rentenir dan pinjaman online ilegal. Upaya tersebut di mulai dengan beberapa prioritas yang salah satunya adalah peningkatan produktivitas masyarakat melalui strategi inovasi perluasan akses kredit usaha rakyat (Pak Kur) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan basis pada kearifan lokal di Kabupaten Mesuji. Inovasi “Pak Kur” berisi rangkaian kegiatan yang berfokus meningkatkan layanan keteraksesan masyarakat terutama pelaku UMKM terhadap kredit/pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan formal.

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA : *“Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b) Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan;
- c) Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
- d) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas; dan
- e) Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Sai Batin

Merupakan program yang ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kependudukan bagi masyarakat. Program

ini berbentuk Aplikasi Sistem Informasi Adminduk Berbasis Teknologi Terintegrasi yang menyediakan layanan online kependudukan bagi seluruh masyarakat. Sehingga pelayanan dapat dilakukan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan.

b) Program Pipit Cuping

Merupakan program yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk pelaporan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon yang dilakukan oleh para aparat Desa/Pekon. Diharapkan melalui aplikasi ini pelaksanaan perencanaan pemerintahan Desa/Pekon dapat dilaksanakan secara real dan akuntabel, dan dapat terpantau sepenuhnya oleh APIP.

c) Program Pesisir Barat Sehat

Merupakan program yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan ambulance di setiap pekon, baik di daerah dekat dengan fasilitas kesehatan terlebih untuk daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dimana setiap pekon diminta untuk menyediakan ambulance untuk layanan kepada masyarakat, penganggaran menggunakan Dana Desa/Alokasi Dana Desa.

d) Program Si Prio RTLH

Merupakan program untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni masyarakat, dimana bedah rumah dilakukan berdasarkan pada urutan prioritas kondisi rumah berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari program ini adalah mengentaskan jumlah Rumah Tidak Layak Huni daerah.

e) Program Petani Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan. Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Petani yang optimal. Program ini juga bentuk dukungan terhadap program petani berjaya.

f) Program Nelayan Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan nelayan melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Nelayan yang optimal.

program ini juga bentuk dukungan terhadap program nelayan berjaya.

g) Program Pekan Fest UMKM

Merupakan program yang memberikan wadah kepada seluruh pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk unggulannya kepada masyarakat. Program dilaksanakan rutin pertriwulan dengan lokasi yang berbeda-beda di Seluruh Pesisir Barat

h) Program Krui Pro Surfing

Merupakan program yang menggabungkan antara olahraga Surfing dengan even kebudayaan daerah. Dimana tujuan dari program ini adalah mengenalkan pariwisata sekaligus adat istiadat krui. lampung dan nasional. Program ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap even Festival Krakatau.

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA : *“Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Perkotaan dan Ekonomi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
- b) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
- c) Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
- d) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah; dan
- f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan
  - Pendidikan Gratis untuk Jenjang SMP
  - Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa SD dan SMP
  - Bantuan Biaya Pendidikan Siswa jenjang SMA SMK Perguruan Tinggi
  - Bantuan Billing Siswa Di Pesantren

- b) Program Pemberdayaan Sosial
  - Bantuan Kelembagaan Pondok Pesantren
  - Bantuan Rekening Listrik Masjid
- c) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - Pelayanan Kesehatan/Berobat/Melahirkan/Ambulan Gratis
- e) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pinjaman Tanpa Bunga Bagi UMKM
- e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- f) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Insentif RT, Kepala Lingkungan, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas
- g) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Insentif Guru Ngaji dan Marbot
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- i) Program Pengendalian Penduduk
  - Insentif Operator Pelayanan Faskes, Kader Posyandu, PPKBD dan BKB
- j) Program Penanganan Bencana
- k) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - Bantuan Beras bagi Prenduduk Kurang Mampu
- l) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- m) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- n) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- o) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- p) Program Pengembangan Permukiman
- q) Program Penataan Bangunan Gedung
- r) Program Penyelenggaraan Jalan
- s) Program Pengembangan Perumahan
- t) Pembangunan Infrastruktur

## 15. KOTA METRO

TEMA : *“Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”*

#### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

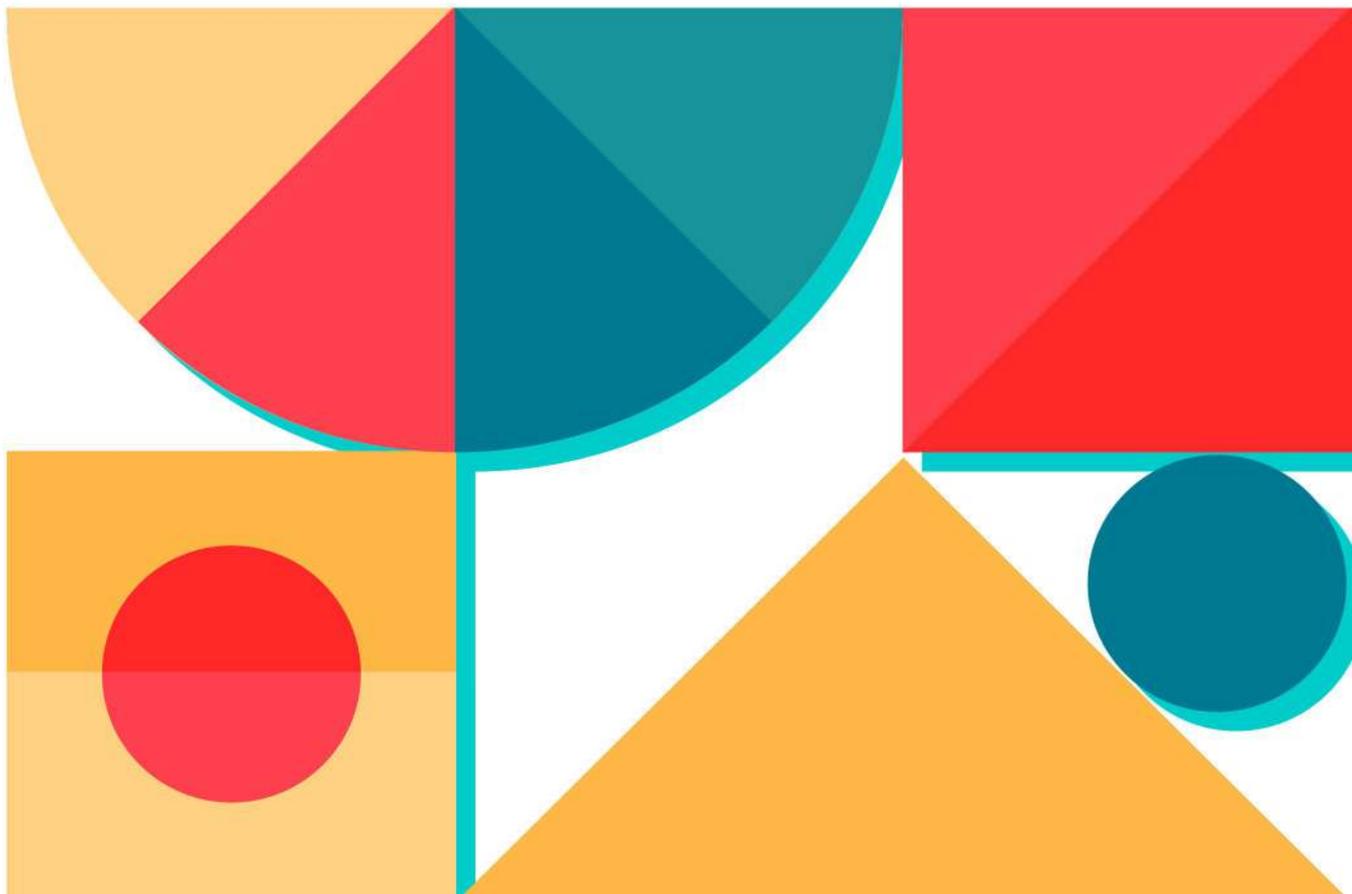
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- b) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- c) Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Berkelanjutan; dan
- d) Transformasi Birokrasi.

#### PROGRAM UNGGULAN :

- a) Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (KMC) dari keluarga tidak mampu dan berprestasi melalui program Gemerlang (Generasi Emas Metro Cemerlang);
- b) Pemerintah Kota Metro juga telah memberikan insentif bagi para pamong (Ketua RT dan Ketua RW) Penggiat Keagamaan yang terdiri dari Kaum. Guru TPA. Guru Sekolah Minggu. Marbot/Penjaga Rumah Ibadah semua Agama dan Juru Kunci Makam. LPM dan Linmas di masing-masing kelurahan. para kader Kesehatan. Pekerja Sosial (TKSK dan PSM) serta pengelola perpustakaan kelurahan. Selain itu di berikan juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- c) Pembebasan iuran BPJS Kelas III. dengan pelayanan yang berkualitas melalau program BKD (Bawa KTP Dilayani);
- d) Pemerintah Kota Metro juga telah menetapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1309/2022;
- e) Penyediaan Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat) adalah upaya Pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan layanan masyarakat yang terpadu dan cepat;
- f) Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan IOT (*Internet Of Things*).
- g) Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya;
- h) Bantuan Saranan Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani ;
- i) Membangun *Creative-Hub*. yaitu merupakan Program Kemitraan Pemerintah. Perguruan Tinggi. dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang berlokasi di Sentra Kreatif Metro (SEKAM).



# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Program dan kegiatan juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), politik, dan teknokratik. **Pendekatan partisipatif** dilakukan dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak/pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan Bersama terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. **Pendekatan bottom up** dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan hasil dari Musrenbang Provinsi. **Pendekatan top down** dilakukan dengan menjabarkan dan menyelaraskan arah-kebijakan pemerintah pusat, dalam setiap dokumen perencanaan daerah, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Sedangkan **pendekatan teknokratik** dilakukan melalui evaluasi dan penelaahan dokumen perencanaan sebelumnya, melakukan analisis dan diskusi dengan para ahli, serta elaborasi referensi dan data-data yang relevan.

Selanjutnya **pendekatan politik** dilakukan dengan menjabarkan dan menajamkan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif setiap tahun, disamping itu juga memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran dari DPRD Provinsi Lampung. Oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021, terakhir melalui pemutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, dan hibah.

## **6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025**

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pembangunan dan tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 serta sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Pada tahun pertama RPD Tahun 2025-2026, kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan pada tema "*Sinergi Memperkuat*



*Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”* dengan prioritas daerah difokuskan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2025, kerangka pendanaan daerah Provinsi Lampung dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Lampung tahun 2025. Pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7,114 triliun, belanja daerah sebesar Rp7,139 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp25 Milyar.

Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.114.050.629.066,21</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.710.910.739.734,21</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.817.166.899.379,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	419.450.084.328,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.148.941.374,21
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.144.814.653,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.389.348.990.597,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.339.582.362.597,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.081.955.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	34.684.673.000,00
4.2.2.2.4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot	34.684.673.000,00



<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.790.898.735,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-
4.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.139.050.629.066,21</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.364.896.299.500,91</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.396.919.427.785,08
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.967.976.871.715,83
5.1.3	Belanja Bunga	
5.1.4	Belanja Subsidi	
5.1.5	Belanja Hibah	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>31.500.000.000,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.455.240.740.088,00</b>
	<b>Selisih Pendapatan dan Belanja</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Serentak Tahun 2029 (tahap 1)	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

## **6.2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung tahun 2025**

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.





Rencana program prioritas dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagaimana matrik di bawah ini.



Tabel 6. 2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	<b>Pertanian</b>		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi gudang cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penanganan Kerawanan Pangan.	Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa stunting dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan higiene sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan food estate, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai database petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyak benih padi dan revitalisasi kebun benih,	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			serta perbanyak/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<b>Pertanian</b>		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB) dan fasilitasi <i>good breeding practices</i> (GBP)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan unit usaha peternakan yang memiliki izin edar.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		<b>Perkebunan</b>		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan aksesibilitas petani dalam menjalankan usaha taninya dengan memanfaatkan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan	Program ini diarahkan untuk kegiatan pengendalian dan penggulungan bencana serta ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan	Dinas Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program ini diarahkan untuk Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan.	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh perkebunan.	Dinas Perkebunan
		<b>Penanaman Modal</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Lampung dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepedulian berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman terumbu karang buatan/TKB, penanaman bibit mangrove.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Lampung melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) melalui kerja sama dengan stakeholders; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/certificate of analysis); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).	Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>Pariwisata</b>		
		Program Pemasaran Pariwisata	Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi event pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan;	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			<p>penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.</p>	
		<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau</p>	<p>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>



No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		<b>Perindustrian</b>		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online-offline dan jejaring	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		<b>Perdagangan</b>		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			produk UKM melalui e-commerce, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Lampung, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Lampung dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta one on one meeting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			dengan atase perdagangan (Atdag)/Indonesian trade promotion center (ITPC).	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Sekretariat Daerah</b>		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).	Biro Perekonomian
2.	Peningkatan kualitas hidup SDM			
		<b>Pendidikan</b>		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<b>Kebudayaan</b>		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<b>Kesehatan</b>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			<p>pengecehan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di RSUD/RSJD</p>	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.	
		<b>Kesehatan</b>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit Abdul Muluk melalui peningkatan fasilitas Gedung pelayanan dan peralatan medis rumah sakit.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkan kualitas SDM kesehatan yang sesuai standar kompetensi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		<b>Kesehatan</b>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan program unggulan pelayanan Kesehatan Jiwa (Rehabilitasi Psikososial, Rehabilitasi Napza dan Personal Development Center (PDC)	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis di RSJD	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		<b>Perpustakaan</b>		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Lampung.	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Lampung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<b>Kearsipan</b>		
		Program Pengelolaan Arsip	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.	
		Program Perlindungan Perempuan	Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pendaftaran Penduduk	Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan online admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota.	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program ini diarahkan untuk Pembinaan Sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program ini diarahkan untuk Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		<b>Sekretariat DPRD</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD
3.	Penanggulangan Kemiskinan	<b>Tenaga Kerja</b>		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online e-makaryo, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; job canvassing, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif;	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.	
		Program Hubungan Industrial	Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (specified skilled worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	Dinas Tenaga Kerja
		<b>Sosial</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pemberdayaan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penanganan Bencana	Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Dinas Sosial
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		<b>Transmigrasi</b>		
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Lampung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang memiliki katagori sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi yang berbadan hukum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Pembangunan Infrastruktur			

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Sekretariat DPRD</b>		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan terkait dengan pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (Pokir), serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD
		<b>Kesehatan</b>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur untuk pelayanan Kesehatan masyarakat.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
		Program Pengembangan Perumahan	Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB backlog), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengembangan Permukiman	Program ini diarahkan untuk Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D skala komunal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program ini diarahkan untuk pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional yang saat ini baru pada tahap penyediaan dok. perencanaan pengembangan system pengelolaan persampahan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini diarahkan untuk pembangunan MCK pada daerah rawan sanitasi.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		<b>Pertanahan</b>		
		Program Penatagunaan Tanah	Program ini diarahkan untuk Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Program ini diarahkan untuk Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan flood forecasting and warning system (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan	
		<b>Perhubungan</b>		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Lampung.	Dinas Perhubungan
		<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
		Program Pengelolaan Aspek Geologi	Program ini diarahkan pada peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah, penyusunan kajian studi kelayakan dalam perizinan air tanah, serta penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah .	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (good mining practice), terwujudnya tertib usaha pertambangan dan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan di Lampung.	
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana dan sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Reformasi Birokrasi			
		<b>Sekretariat DPRD</b>		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Perencanaan</b>		
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<b>Keuangan</b>		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		<b>Keuangan</b>		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.	Badan Pendapatan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>		
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan assestment test; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui talent scouting maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	
		<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		<b>Penghubung</b>		
		Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui	Badan Penghubung

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.	
		<b>Inspektorat</b>		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Inspektorat
		<b>Sekretariat Daerah</b>		
		Program Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi,	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.	
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundangundangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan undang-undang, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.	Biro Hukum
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penataan Organisasi	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.	Biro Organisasi
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.	Biro Administrasi Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Administrasi Umum	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.	Biro Umum
		<b>Statistik</b>		
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		<b>Persandian</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi dan digital forensik.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			
		<b>Sekretariat Daerah</b>		
		Program Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.	Biro Kesejahteraan Rakyat
		<b>Kesbangpol</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.	Badan Kesbangpol

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.	Badan Kesbangpol
		<b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program ini diarahkan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan penanganan gangguan trantibummas	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup			
		<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program ini diarahkan untuk Penerapan blue ekonomi dan pembangunan berketahanan iklim sektor kelautan dan perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program ini diarahkan untuk mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terpadu.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>Kehutanan</b>		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Hutan	Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi.	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah.	Dinas Kehutanan
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan	Dinas Kehutanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja percepatan perhutanan sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)/pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (kulin KK)/izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program ini diarahkan pada pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS.	Dinas Kehutanan
		<b>Lingkungan Hidup</b>		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) UMKM dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program ini diarahkan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan.	Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional.	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		<b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		
		Program Penanggulangan Bencana	Program ini diarahkan untuk peningkatan Kapasitas Daerah terhadap Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Tabel 6. 3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2025

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.239.619.018.711,70
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pengelolaan Pendidikan	746.489.102.000,00
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00
4	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	500.000.000,00
5	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00
6	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengelolaan Permuseuman	4.500.000.000,00
7	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86.501.143.704,40



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
8	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	203.291.568.180,00
9	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.833.215.215,00
10	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	195.000.000,00
11	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	625.000.000,00
12	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.652.911.999,60
13	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.611.272.209,58
14	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.549.802.225,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas			
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	60.531.440.466,05
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	441.322.801.000,59
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	5.535.597.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	46.622.690.410,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.000.000,00
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.152.805.200,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.452.355.400,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	14.739.520.400,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	260.479.600,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.440.000.000,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.248.514.618,83



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	300.000.000,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	2.700.000.000,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.645.702.460,00
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	260.000.000,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penatagunaan Tanah	300.000.000,00
32	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.136.058.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
33	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penanggulangan Bencana	1.925.740.600,00
34	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.136.296.900,55
35	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	320.000.000,00
36	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	185.999.500,00
37	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	7.791.159.389,00
38	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	520.000.000,00
39	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Bencana	1.117.505.677,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas			
40	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00
41	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.600.000.000,00
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.325.000.000,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Pelayaran	950.000.000,00
44	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.902.016.328,00
45	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	9.449.127.000,00
46	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.314.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru			
47	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350.876.400,00
48	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	305.000.000,00
49	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	350.000.000,00
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000,00
51	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	200.000.000,00
52	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5.161.677.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
53	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	350.000.000,00
54	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	600.000.000,00
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	450.000.000,00
56	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00
57	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	525.000.000,00
58	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.077.200.000,00
59	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi,	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75.000.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Narkoba, Judi Dan Penyeludupan			
60	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.730.675.024,85
61	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pembinaan Perpustakaan	930.000.000,00
62	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	175.000.000,00
63	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Arsip	805.000.000,00
64	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	640.000.000,00
65	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.345.000.000,00
66	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.760.366.000,00
67	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	665.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Pembangunan		
68	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.350.000.000,00
69	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.640.000.000,00
70	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pemasaran Pariwisata	2.500.000.000,00
71	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.593.047.491,32
72	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	575.000.000,00
73	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.385.880.000,00
74	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	550.000.000,00
75	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000,00
76	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyuluhan Pertanian	2.987.562.500,00
77	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi,	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	130.000.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Pembangunan		
78	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	965.000.000,00
79	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000,00
80	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.500.000.000,00
81	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	929.000.000,00
82	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.871.632.087,85
83	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan	2.482.076.000,00
84	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	991.216.000,00
85	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.634.539.300,00
86	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	123.915.000,00
87	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.167.328.523,40



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru			
88	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	553.410.000,00
89	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.019.250.000,00
90	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.053.715.000,00
91	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.903.624.999,50
92	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000,00
93	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00
94	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Kesejahteraan Rakyat	60.710.042.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
95	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.355.082.000,00
96	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.220.259.000,00
97	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	871.251.000,00
98	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.628.749.000,00
99	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	913.719.000,00
100	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.086.281.000,00
101	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.608.198.500,00
102	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi	1.591.801.500,00
103	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	145.671.254.826,90
104	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	128.406.206.417,97



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
105	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.726.103.000,00
106	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.349.229.455,70
107	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.590.916.000,00
108	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.586.653.157,12
109	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.490.556.251,00
110	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00
111	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.721.700.787,32
112	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	877.945.000,00
113	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.750.000.000,00
114	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	1.000.000.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
		Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
115	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	525.000.000,00
116	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00

Tabel 6. 4 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.992.118.120.711,70	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.992.118.120.711,70	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.239.619.018.711,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	746.489.102.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.500.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.500.000.000,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	292.445.927.099,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	292.445.927.099,40	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.501.143.704,40	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	203.291.568.180,00	DINAS KESEHATAN



No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.833.215.215,00	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	494.027.732.829,38	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	494.027.732.829,38	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.868.220.829,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.652.911.999,60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	506.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.719.174.834,58	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	51.719.174.834,58	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.611.272.209,58	RUMAH SAKIT JIWA
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.549.802.225,00	RUMAH SAKIT JIWA
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	558.100.400,00	RUMAH SAKIT JIWA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	507.389.838.466,64	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	507.389.838.466,64	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.531.440.466,05	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	441.322.801.000,59	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
22	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.535.597.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101.854.793.265,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.854.793.265,00	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.232.102.855,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
24	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.622.690.410,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.738.514.618,83	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.844.297.540,00	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
			PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
27	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.894.217.078,83	
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.248.514.618,83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
33	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
34	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
35	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	560.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	560.000.000,00	
36	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
37	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	58.552.953.583,90	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	58.552.953.583,90	
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.416.895.583,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.136.058.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.077.188.631,57	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.077.188.631,57	
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.151.448.031,57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.925.740.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.818.329.187,35	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.818.329.187,35	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.136.296.900,55	DINAS SOSIAL
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	320.000.000,00	DINAS SOSIAL
44	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	185.999.500,00	DINAS SOSIAL
45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.791.159.389,00	DINAS SOSIAL
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520.000.000,00	DINAS SOSIAL
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.117.505.677,00	DINAS SOSIAL
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	294.171.000,00	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.466.566.619,65	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.466.566.619,65	
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.745.170.669,65	DINAS TENAGA KERJA
50	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
51	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
52	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	920.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
53	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.271.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA
54	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	755.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.128.091.760,80	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.850.621.760,80	
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.512.122.560,80	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
56	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	618.098.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
57	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	888.904.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	110.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
59	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.849.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
60	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	422.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
61	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	147.595.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	277.470.000,00	
62	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	44.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
63	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	53.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	179.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.611.680.724,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.611.680.724,40	
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.618.724,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	282.197.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	447.208.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	163.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
69	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	188.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	66.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90.057.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	700.614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.265.095.352,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.265.095.352,00	
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.131.852.352,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	685.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
77	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	157.556.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
78	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	131.426.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.269.775.280,05	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.269.775.280,05	
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.484.710.280,05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
81	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
82	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.438.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.175.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	500.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	500.000.000,00	
84	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.831.681.351,21	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.831.681.351,21	
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.526.681.351,21	DINAS PERHUBUNGAN
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
87	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
88	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.321.019.728,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.665.143.328,00	
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.902.016.328,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
90	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.449.127.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
91	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.314.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	350.876.400,00	
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.876.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	305.000.000,00	
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.757.368.968,96	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.757.368.968,96	
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.377.291.968,96	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
95	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
96	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
97	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
98	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.161.677.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
100	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
101	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	568.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.181.560.966,86	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	20.181.560.966,86	
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.854.360.966,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
103	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
105	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
106	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.077.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
107	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.693.252.616,45	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	61.693.252.616,45	
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.193.252.616,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
109	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
110	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
111	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.640.675.024,85	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.835.675.024,85	
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.730.675.024,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
113	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	930.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
114	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	805.000.000,00	
115	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	805.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.411.861.638,80	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.411.861.638,80	
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.651.495.638,80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
117	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	640.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
118	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
119	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.760.366.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
120	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	665.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
121	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.779.612.318,88	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.779.612.318,88	
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.830.235.218,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
123	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.640.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
124	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
125	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	978.097.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
126	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.831.280.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.341.489.991,32	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.341.489.991,32	
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.593.047.491,32	DINAS PERKEBUNAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
128	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	575.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
129	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
130	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
131	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
132	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.987.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30.069.084.327,16	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.069.084.327,16	
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.819.084.327,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
134	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.645.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
135	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
136	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	965.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
137	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
138	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	409.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.900.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.900.000.000,00	
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
140	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
141	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
142	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
143	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.944.649.688,75	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	56.944.649.688,75	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.745.554.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
145	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	929.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
146	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.520.094.992,75	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
147	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
148	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	71.103.378.387,85	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	71.103.378.387,85	
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.871.632.087,85	DINAS KEHUTANAN
150	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.482.076.000,00	DINAS KEHUTANAN
151	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	991.216.000,00	DINAS KEHUTANAN
152	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.634.539.300,00	DINAS KEHUTANAN
153	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	123.915.000,00	DINAS KEHUTANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.697.328.522,90	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.697.328.522,90	
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.167.328.523,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
155	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	553.410.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
156	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.019.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
157	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.053.715.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
158	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.903.624.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.996.753.621,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.260.968.621,40	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.555.968.621,40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
160	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
161	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	640.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
162	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
163	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.060.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
164	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.735.785.000,00	
165	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.385.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
166	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
167	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.500.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.500.000.000,00	
168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.121.388.700,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
169	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.378.611.300,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	61.553.651.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	61.553.651.000,00	
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	843.609.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
171	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.710.042.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.575.341.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.575.341.000,00	
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.355.082.000,00	BIRO HUKUM
173	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.220.259.000,00	BIRO HUKUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.060.279.800,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.060.279.800,00	
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.643.500,00	BIRO PEREKONOMIAN



No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
175	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.872.636.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.500.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.500.000.000,00	
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.251.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
177	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.628.749.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000,00	
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	913.719.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
179	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.086.281.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.200.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.200.000.000,00	
180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.608.198.500,00	BIRO ORGANISASI
181	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.591.801.500,00	BIRO ORGANISASI
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	145.671.254.826,90	
	SEKRETARIAT DAERAH	145.671.254.826,90	
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	145.671.254.826,90	BIRO UMUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000.000,00	
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	390.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DPRD	390.000.000.000,00	
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.932.114.712,00	SEKRETARIAT DPRD
185	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	217.067.885.288,00	SEKRETARIAT DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	40.098.270.391,00	
	PERENCANAAN	40.098.270.391,00	
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.165.746.291,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
187	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.996.458.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
188	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.986.065.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.913.355.913.758,42	
	KEUANGAN	1.913.355.913.758,42	
189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.329.341.571,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.784.579.683.667,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
191	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	145.132.309.417,97	
192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.406.206.417,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
193	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.726.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN	116.137.261.386,00	
194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.636.661.386,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
195	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.500.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.940.145.455,70	
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.349.229.455,70	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
197	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.590.916.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.077.209.408,12	
198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.586.653.157,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
199	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.490.556.251,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG	20.876.159.885,84	
200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.936.174.885,84	BADAN PENGHUBUNG
201	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.939.985.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	58.412.533.787,32	
202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.721.700.787,32	INSPEKTORAT
203	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.812.888.000,00	INSPEKTORAT
204	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.945.000,00	INSPEKTORAT
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.649.995.549,78	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.899.995.549,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
206	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
207	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
208	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
209	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
210	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Tabel 6. 5 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.239.619.018.711,70</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
2	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.217.318.652.161,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.017.544.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.818.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.726.134.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.661.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.492.414.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
11	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>746.489.102.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
12	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	359.293.351.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	370.373.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.822.111.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>6.010.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
16	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	6.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
18	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
21	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
23	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
25	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
26	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
27	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Museum Provinsi	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>86.501.143.704,40</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
29	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
30	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.852.636.918,40	DINAS KESEHATAN
31	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
32	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.768.000,00	DINAS KESEHATAN
33	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.514.638.450,00	DINAS KESEHATAN
34	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.481.256.293,00	DINAS KESEHATAN
35	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.394.492.340,00	DINAS KESEHATAN
36	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.511.451.703,00	DINAS KESEHATAN
37	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.470.900.000,00	DINAS KESEHATAN
38	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>203.291.568.180,00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
39	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.570.844.000,00	DINAS KESEHATAN
40	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	190.668.504.180,00	DINAS KESEHATAN
41	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
42	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	552.220.000,00	DINAS KESEHATAN
43	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1.833.215.215,00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
44	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	279.820.000,00	DINAS KESEHATAN
45	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.553.395.215,00	DINAS KESEHATAN
46	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
47	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
48	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
49	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
50	Peningkatan kualitas hidup SDM	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
51	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
52	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
53	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>473.868.220.829,78</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK</b>
54	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.341.088.829,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
55	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.027.132.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
56	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	379.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
57	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	19.652.911.999,60	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK</b>
58	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.352.911.999,60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
59	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
60	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	506.600.000,00	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK</b>
61	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	506.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
62	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	48.611.272.209,58	<b>RUMAH SAKIT JIWA</b>
63	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.122.600,00	RUMAH SAKIT JIWA
64	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.431.353.006,31	RUMAH SAKIT JIWA
65	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.279.170,27	RUMAH SAKIT JIWA
66	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.854.774.433,00	RUMAH SAKIT JIWA
67	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.743.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
68	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
69	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	2.549.802.225,00	<b>RUMAH SAKIT JIWA</b>
70	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.167.266.125,00	RUMAH SAKIT JIWA
71	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	382.536.100,00	RUMAH SAKIT JIWA



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
72	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>558.100.400,00</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA</b>
73	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	558.100.400,00	RUMAH SAKIT JIWA
74	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>60.531.440.466,05</b>	<b>DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI</b>
75	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
76	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.598.504.566,05	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
77	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	410.300.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
78	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.180.649.100,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
79	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.101.187.300,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
80	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.951.444.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
81	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.475.140.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
82	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.073.715.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
83	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>441.322.801.000,59</b>	<b>DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI</b>
84	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	441.322.801.000,59	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
85	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>5.535.597.000,00</b>	<b>DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI</b>
86	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	3.632.791.400,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
87	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	368.523.900,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
88	Pembangunan Infrastruktur	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.534.281.700,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
89	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	46.622.690.410,00	<b>DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>
90	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.987.311.700,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
91	Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.635.378.710,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
92	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	50.000.000,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
93	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
94	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	2.152.805.200,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
95	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
96	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	1.749.136.940,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
97	Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
98	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	2.452.355.400,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
99	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
100	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	14.739.520.400,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
101	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
102	Pembangunan Infrastruktur	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	260.479.600,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
103	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
104	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.440.000.000,00</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
105	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
106	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
107	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
108	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
109	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.248.514.618,83</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
110	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
111	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.430.377.339,88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
112	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
113	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
114	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.393.255.678,95	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
115	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
116	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.294.385.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
117	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.422.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
118	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	300.000.000,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
119	Pembangunan Infrastruktur	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
120	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	2.700.000.000,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
121	Pembangunan Infrastruktur	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
122	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
123	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	3.645.702.460,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
124	Pembangunan Infrastruktur	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
125	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	260.000.000,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
126	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
127	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	300.000.000,00	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>
128	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
129	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	53.416.895.583,90	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
130	Pemantapan kehidupan masyarakat yang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.933.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	aman, berbudaya dan demokratis			
131	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.811.731.574,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
132	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
133	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	843.503.199,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
134	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.761.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
135	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.011.624.780,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
136	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.341.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
137	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.136.058.000,00</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
138	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.494.742.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
139	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
140	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	181.316.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
141	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.925.740.600,00</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
142	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	146.510.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
143	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	725.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
144	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	615.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
145	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	439.110.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>146</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.136.296.900,55</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
147	Penanggulangan Kemiskinan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
148	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.893.724.605,20	DINAS SOSIAL
149	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
150	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000,00	DINAS SOSIAL
151	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.680.482,00	DINAS SOSIAL
152	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.856.000,00	DINAS SOSIAL
153	Penanggulangan Kemiskinan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.414.534,15	DINAS SOSIAL
<b>154</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
155	Penanggulangan Kemiskinan	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
156	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
<b>157</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>185.999.500,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
158	Penanggulangan Kemiskinan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	185.999.500,00	DINAS SOSIAL
<b>159</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>7.791.159.389,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
160	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.078.562.599,00	DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
161	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.588.691.325,00	DINAS SOSIAL
162	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.552.940.279,00	DINAS SOSIAL
163	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	527.674.726,00	DINAS SOSIAL
164	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.043.290.460,00	DINAS SOSIAL
165	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
166	Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	520.000.000,00	DINAS SOSIAL
167	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.117.505.677,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
168	Penanggulangan Kemiskinan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.117.505.677,00	DINAS SOSIAL
169	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>294.171.000,00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
170	Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	294.171.000,00	DINAS SOSIAL
171	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
172	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
173	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
174	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
175	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>2.271.395.950,00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
176	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.001.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA
177	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	356.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
178	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>888.904.200,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
179	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	503.424.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
180	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>110.852.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
181	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	110.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
182	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.403.618.724,40</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
183	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.676.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
184	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.746.067.959,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
185	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
186	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
187	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	876.965.365,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
188	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
189	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.000.000,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
190	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.609.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
191	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
192	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>282.197.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
193	Reformasi Birokrasi	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	126.467.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
194	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	155.729.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
195	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>447.208.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
196	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	347.381.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
197	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56.673.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
198	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43.154.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
199	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>163.924.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
200	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	163.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
201	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>188.518.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
202	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	188.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
203	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>139.020.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
204	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	139.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>66.524.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
206	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	66.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
207	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>90.057.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
208	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	90.057.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
209	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
210	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
211	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>700.614.000,00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
212	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	700.614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
213	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.131.852.352,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
214	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
215	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.922.351.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
216	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
217	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.869.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
218	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.070.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
219	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	115.668.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
220	Reformasi Birokrasi	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.354.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
221	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.539.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
222	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>685.000.000,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
223	Reformasi Birokrasi	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
224	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	570.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
225	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
226	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>157.556.000,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				<b>DAN PENCATATAN SIPIL</b>
227	Reformasi Birokrasi	Pelayanan Pencatatan Sipil	29.556.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
228	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
229	Reformasi Birokrasi	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>230</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>159.261.000,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
231	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	72.099.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
232	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	87.162.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>233</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>131.426.000,00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
234	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Profil Kependudukan	131.426.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>235</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.484.710.280,05</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI</b>
236	Penanggulangan Kemiskinan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
237	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.566.877.131,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
238	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
239	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
240	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.880.893.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
241	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.032.440.149,05	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pemerintahan Daerah		MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
242	Penanggulangan Kemiskinan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
243	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>170.560.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI</b>
244	Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
245	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.438.745.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI</b>
246	Penanggulangan Kemiskinan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.438.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
247	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.175.760.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI</b>
248	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.175.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
249	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI</b>
250	Penanggulangan Kemiskinan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
251	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.526.681.351,21</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
252	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
253	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.216.385.249,26	DINAS PERHUBUNGAN
254	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Perangkat Daerah		
255	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	509.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
256	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
257	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
258	Pembangunan Infrastruktur	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.493.896.101,95	DINAS PERHUBUNGAN
259	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
<b>260</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.325.000.000,00</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
261	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
262	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
263	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
264	Pembangunan Infrastruktur	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
265	Pembangunan Infrastruktur	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
266	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
267	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
<b>268</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
269	Pembangunan Infrastruktur	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
270	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
271	Pembangunan Infrastruktur	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
272	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
273	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
274	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.902.016.328,00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
275	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
276	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.816.571.828,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
277	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
278	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
279	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.282.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
280	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
281	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.090.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
282	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
283	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>9.449.127.000,00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
284	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	9.449.127.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
285	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>10.314.000.000,00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
286	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
287	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.214.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
288	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	350.876.400,00	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
289	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	350.876.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
290	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	305.000.000,00	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
291	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
292	Reformasi Birokrasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
293	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	350.000.000,00	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
294	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
295	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
296	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	150.000.000,00	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
297	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
298	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
299	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	200.000.000,00	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	<b>pemerataan pembangunan</b>			
300	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
301	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>5.161.677.000,00</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
302	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.161.677.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
303	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
304	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
305	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
306	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
307	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>568.400.000,00</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
308	Penanggulangan Kemiskinan	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	568.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
309	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.854.360.966,86</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
310	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
311	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.177.070.966,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
312	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
313	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
314	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.394.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
315	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
316	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.261.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
317	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.449.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>318</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
319	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
320	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>321</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
322	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
323	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	525.000.000,00	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
324	Reformasi Birokrasi	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
325	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.077.200.000,00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
326	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.077.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
327	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
328	Reformasi Birokrasi	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
329	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>44.193.252.616,45</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
330	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
331	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.645.754.616,20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
332	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
333	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.411.700.000,25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
334	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.721.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
335	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>4.650.000.000,00</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
336	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
337	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		
338	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>12.650.000.000,00</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
339	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.185.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
340	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.465.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
341	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
342	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
343	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
344	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
345	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.730.675.024,85</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
346	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
347	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.704.575.024,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
348	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
349	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
350	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
351	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.349.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
352	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
353	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
354	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
355	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	280.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
356	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
357	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
358	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
359	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>805.000.000,00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
360	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
361	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
362	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	465.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
363	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.651.495.638,80</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
364	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
365	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.257.173.107,80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
366	Reformasi Birokrasi	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
367	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>640.000.000,00</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
368	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	430.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
369	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
370	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
371	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>12.345.000.000,00</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	<b>pemerataan pembangunan</b>			
372	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	825.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
373	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
374	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	320.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
375	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	10.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
376	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
377	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.760.366.000,00</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
378	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
379	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	730.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
380	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.990.366.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
381	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
382	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	590.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
383	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
384	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
385	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
386	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	555.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
387	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
388	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.830.235.218,88</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
389	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
390	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.734.034.618,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
391	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
392	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.450.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
393	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.094.921.600,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
394	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.127.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
395	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.672.702.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
396	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
397	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1.640.000.000,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
398	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
399	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.115.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
400	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
401	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
402	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
403	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>978.097.100,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
404	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	746.097.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
405	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	232.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
406	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1.831.280.000,00</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
407	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.407.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
408	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	423.580.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
409	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.593.047.491,32</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
410	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.698.337,92	DINAS PERKEBUNAN
411	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.911.911.153,40	DINAS PERKEBUNAN
412	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
413	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
414	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.956.000,00	DINAS PERKEBUNAN
415	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
416	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.980.000,00	DINAS PERKEBUNAN
417	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.502.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
418	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	575.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
419	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
420	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	425.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
421	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
422	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penataan Prasarana Pertanian	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
423	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
424	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
425	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
426	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
427	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	2.987.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
428	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.887.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
429	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
430	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.819.084.327,16</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
431	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.943.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
432	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.393.008.227,49	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
433	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
434	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.832.599,67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
435	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
436	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
437	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>7.645.500.000,00</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
438	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
439	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	690.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
440	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.130.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
441	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
442	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
443	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penataan Prasarana Pertanian	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
444	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>965.000.000,00</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
445	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
446	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	90.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
447	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	425.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
448	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
449	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
450	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
451	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>409.500.000,00</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
452	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
453	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	409.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
454	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
455	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				<b>HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
456	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
457	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
458	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
459	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
460	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
461	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
462	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
463	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
464	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
465	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
466	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
467	Peningkatan kualitas hidup SDM	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>43.745.554.696,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
468	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
469	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.087.472.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
470	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
471	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
472	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
473	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
474	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
475	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.940.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
476	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.042.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
477	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>929.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
478	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	379.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
479	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
480	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
481	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>10.520.094.992,75</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
482	Pembangunan Infrastruktur	Penataan Prasarana Pertanian	10.520.094.992,75	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
483	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
484	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
485	<b>Peningkatan kualitas hidup SDM</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
486	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
487	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
488	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
489	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>65.871.632.087,85</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
490	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
491	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.855.540.042,85	DINAS KEHUTANAN
492	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada	45.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Perangkat Daerah		
493	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
494	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.377.881.045,00	DINAS KEHUTANAN
495	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	465.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		Urusan Pemerintah Daerah		
496	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.620.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
		Pemerintahan Daerah		
497	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.322.411.000,00	DINAS KEHUTANAN
<b>498</b>	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2.482.076.000,00</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
499	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	282.076.000,00	DINAS KEHUTANAN
500	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
501	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	325.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
502	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	515.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
503	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.015.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
504	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
505	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun	60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
506	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbenihan Tanaman Hutan	35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
<b>507</b>	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>991.216.000,00</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
508	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	879.336.000,00	DINAS KEHUTANAN
509	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk	75.789.000,00	DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Kewenangan Daerah Provinsi		
510	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	36.091.000,00	DINAS KEHUTANAN
511	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1.634.539.300,00</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
512	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.634.539.300,00	DINAS KEHUTANAN
513	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>123.915.000,00</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
514	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	123.915.000,00	DINAS KEHUTANAN
515	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.167.328.523,40</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
516	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.356.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
517	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.583.075.122,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
518	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
519	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
520	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.908.486,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
521	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	713.493.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
522	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.661.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
523	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.634.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
524	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>553.410.000,00</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
525	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	248.755.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
526	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	304.655.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>527</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>1.019.250.000,00</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
528	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
529	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	419.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>530</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>1.053.715.000,00</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
531	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	223.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
532	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	572.975.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
533	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	33.540.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
534	Pembangunan Infrastruktur	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	111.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
535	Pembangunan Infrastruktur	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	111.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
536	<b>Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>1.903.624.999,50</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
537	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	180.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
538	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
539	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	210.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
540	Penanggulangan Kemiskinan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.163.624.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
542	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
543	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
544	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
545	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
546	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
547	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
548	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
549	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
550	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>3.385.785.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
551	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.385.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
552	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
553	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
554	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
555	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
556	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.121.388.700,00</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>
557	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.350.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
558	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.469.900,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
559	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.568.800,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
<b>560</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>1.378.611.300,00</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>
561	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	365.593.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
562	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Otonomi Daerah	741.815.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
563	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	271.203.300,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
<b>564</b>	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>843.609.000,00</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
565	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.700.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
566	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.797.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
567	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.950.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
568	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.172.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
569	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.990.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
<b>570</b>	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>60.710.042.000,00</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
571	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	57.530.042.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
572	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.950.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
573	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.230.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
<b>574</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.355.082.000,00</b>	<b>BIRO HUKUM</b>
575	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.663.000,00	BIRO HUKUM
576	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.118.739.000,00	BIRO HUKUM
577	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.680.000,00	BIRO HUKUM
<b>578</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>1.220.259.000,00</b>	<b>BIRO HUKUM</b>
579	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	581.120.400,00	BIRO HUKUM
580	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	639.138.600,00	BIRO HUKUM
<b>581</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.187.643.500,00</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>
582	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.435.800,00	BIRO PEREKONOMIAN
583	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
584	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.004.438.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
585	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.769.700,00	BIRO PEREKONOMIAN
<b>586</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.872.636.300,00</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>
587	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	392.905.200,00	BIRO PEREKONOMIAN
588	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	833.009.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
589	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	646.722.100,00	BIRO PEREKONOMIAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
<b>590</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>871.251.000,00</b>	<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>
591	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.383.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
592	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240.784.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
593	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.309.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
594	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.123.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
595	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.987.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
596	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.665.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
<b>597</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>2.628.749.000,00</b>	<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>
598	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	903.994.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
599	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	845.047.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
600	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	879.708.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
<b>601</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>913.719.000,00</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>
602	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.832.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
603	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	183.563.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
604	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
605	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.078.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
606	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.246.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
<b>607</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.086.281.000,00</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>
608	Reformasi Birokrasi	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	407.968.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
609	Reformasi Birokrasi	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.313.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
<b>610</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.608.198.500,00</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
611	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.744.700,00	BIRO ORGANISASI
612	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.002.477.000,00	BIRO ORGANISASI
613	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.976.800,00	BIRO ORGANISASI
<b>614</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>1.591.801.500,00</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>
615	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	513.198.300,00	BIRO ORGANISASI
616	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.078.603.200,00	BIRO ORGANISASI
<b>617</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>145.671.254.826,90</b>	<b>BIRO UMUM</b>
618	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.544.801.050,00	BIRO UMUM
619	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.342.992.132,40	BIRO UMUM
620	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.339.892.100,00	BIRO UMUM
621	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	982.246.100,00	BIRO UMUM
622	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.336.294.250,00	BIRO UMUM
623	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.005.556.000,00	BIRO UMUM
624	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.354.735.400,00	BIRO UMUM
625	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.439.147.200,00	BIRO UMUM
626	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.286.436.394,50	BIRO UMUM
627	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.039.154.200,00	BIRO UMUM
<b>628</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>
629	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.785.300,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
630	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.785.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
631	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.491.789.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
632	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.442.100,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
633	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	149.558.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
634	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	502.527.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
635	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Keprotokolan	681.111.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
<b>636</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>172.932.114.712,00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
637	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.865.165.500,00	SEKRETARIAT DPRD
638	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.988.420.893,00	SEKRETARIAT DPRD
639	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.971.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD
640	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.915.027.249,00	SEKRETARIAT DPRD
641	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.422.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
642	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.521.055.800,00	SEKRETARIAT DPRD
643	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.313.237.900,00	SEKRETARIAT DPRD
644	Reformasi Birokrasi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74.583.204.470,00	SEKRETARIAT DPRD
645	Reformasi Birokrasi	Layanan Administrasi DPRD	31.351.913.500,00	SEKRETARIAT DPRD
<b>646</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>217.067.885.288,00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
647	Reformasi Birokrasi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	12.681.572.600,00	SEKRETARIAT DPRD
648	Reformasi Birokrasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.140.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
649	Reformasi Birokrasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.088.167.600,00	SEKRETARIAT DPRD
650	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	143.053.432.288,00	SEKRETARIAT DPRD
651	Reformasi Birokrasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	46.682.814.800,00	SEKRETARIAT DPRD
652	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.165.376.200,00	SEKRETARIAT DPRD
653	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Tugas DPRD	2.255.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
<b>654</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>26.165.746.291,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
655	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	744.374.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
656	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.956.379.803,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
657	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.563.492,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
658	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.399.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
659	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.433.496,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
660	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.312.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
661	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.247.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>662</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.946.458.600,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
663	Reformasi Birokrasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.598.902.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
664	Reformasi Birokrasi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.495.514.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
665	Reformasi Birokrasi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.439.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
666	Reformasi Birokrasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	412.922.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>667</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>7.986.065.500,00</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
668	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.673.458.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
669	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.565.209.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
670	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.747.397.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>671</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>121.329.341.571,12</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
672	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.006.998,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
673	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.861.757.373,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
674	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
675	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.021.971.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
676	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.459.007.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
677	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	219.547.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
678	Reformasi Birokrasi	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.316.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
679	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.450.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>680</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.784.579.683.667,30</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
681	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.163.080.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
682	Reformasi Birokrasi	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.328.155.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
683	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.565.456.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
684	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.904.016.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
685	Reformasi Birokrasi	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.774.283.929.565,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
686	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2.335.045.707,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>687</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>7.446.888.520,00</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
688	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>689</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>128.406.206.417,97</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>
690	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
691	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.689.596.194,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
692	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.675.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
693	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
694	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.385.548.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
695	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.053.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
696	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.264.060.023,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
697	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.621.327.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>698</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>16.726.103.000,00</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>
699	Reformasi Birokrasi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.726.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>700</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>113.636.661.386,00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
701	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
702	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.876.231.622,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
703	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	791.350.309,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
704	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.269.948.055,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
705	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.131.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
<b>706</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.500.600.000,00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
707	Reformasi Birokrasi	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	805.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
708	Reformasi Birokrasi	Mutasi dan Promosi ASN	789.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
709	Reformasi Birokrasi	Pengembangan Kompetensi ASN	780.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
710	Reformasi Birokrasi	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
<b>711</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.349.229.455,70</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>
712	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
713	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.962.750.255,80	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
714	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.990.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
715	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192.256.800,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
716	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.001.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
717	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.126.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
718	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.767.734.199,90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
719	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.370.000,00	BADAN PENGEMBANGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
720	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.590.916.000,00</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>
721	Reformasi Birokrasi	Pengembangan Kompetensi Teknis	983.010.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
722	Reformasi Birokrasi	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.607.906.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
723	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.586.653.157,12</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
724	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.384.885,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
725	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.298.434.472,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
726	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.120.100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
727	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.700.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
728	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.842.100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
729	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
730	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.435.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
731	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.736.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
732	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.490.556.251,00</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
733	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	507.319.767,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
734	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	320.417.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
735	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.127.640.984,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
736	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	535.178.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>737</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.936.174.885,84</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>
738	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.137.500,00	BADAN PENGHUBUNG
739	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.591.467.585,84	BADAN PENGHUBUNG
740	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.232.800,00	BADAN PENGHUBUNG
741	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
742	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.490.685.200,00	BADAN PENGHUBUNG
743	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.981.997.800,00	BADAN PENGHUBUNG
744	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.736.654.000,00	BADAN PENGHUBUNG
<b>745</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>1.939.985.000,00</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>
746	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	BADAN PENGHUBUNG
<b>747</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>50.721.700.787,32</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
748	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	INSPEKTORAT
749	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.412.538.787,32	INSPEKTORAT
750	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	INSPEKTORAT
751	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	984.239.000,00	INSPEKTORAT
752	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.714.294.000,00	INSPEKTORAT
753	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	899.599.000,00	INSPEKTORAT

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pemerintahan Daerah		
754	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.030.000,00	INSPEKTORAT
<b>755</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>6.812.888.000,00</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
756	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.092.460.000,00	INSPEKTORAT
757	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	720.428.000,00	INSPEKTORAT
<b>758</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>877.945.000,00</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
759	Reformasi Birokrasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	150.000.000,00	INSPEKTORAT
760	Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	727.945.000,00	INSPEKTORAT
<b>761</b>	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.899.995.549,78</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>
762	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.738.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
763	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.588.020.949,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
764	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.962.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
765	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
766	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.088.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
767	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.254.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
768	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.281.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
769	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>
770	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
771	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>
772	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
773	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>475.000.000,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>
774	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
775	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>
776	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
777	<b>Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH</b>

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		<b>PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		
778	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Tabel 6. 6 Alokasi Dukungan Pagu Per Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp)
1	Reformasi Birokrasi	3,068,126,169,777.39
2	Peningkatan kualitas hidup SDM	2,943,815,062,937.51
3	Pembangunan Infrastruktur	660,360,148,362.33
4	Penanggulangan Kemiskinan	790,175,378,276.50
5	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	115,264,818,500.00
6	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	153,556,600,133.68
7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	9,723,351,900.00

### 6.3 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5,210,000,000.00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	800,000,000.00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2,150,000,000.00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18,314,572,000.00
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5,758,000,000.00
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19,201,767,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24,227,742,300.00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	400,000,000.00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700.00
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8,721,500,000.00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3,431,385,000.00
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	7,820,625,000.00
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	438,373,000.00
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	180,000,000.00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300,000,000.00
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3,720,000,000.00
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000.00
25	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,000,000,000.00
26	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,000,000,000.00
27	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,152,805,200.00
28	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2,452,355,400.00
29	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	300,000,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14,850,000.00
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1,000,000.00
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	15,884,000.00
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	296,435,399.00
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4,740,000.00
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00
36	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1,000,000.00
37	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	23,000,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
38	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	53,109,000.00
39	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	573,637,500.00
40	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	89,906,700.00
41	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	587,469,800.00
42	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	7,450,000.00
43	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	174,465,820.00
44	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	349,572,810.00
45	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16,580,000.00
46	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12,160,142.00
47	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	373,038,050.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
48	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	186,145,600.00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	1,590,405,000.00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	50,917,103.00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	240,487,000.00
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,100,000.00
53	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2,500,000.00
54	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12,960,000.00
55	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169,934,300.00
56	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
57	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00
58	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	20,452,000.00
59	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	14,250,000.00
60	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	294,126,000.00
61	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35,153,700.00
62	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	920,852,000.00
63	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	65,612,279.00
64	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,225,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
65	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	2,000,000.00
66	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	5,000,000.00
67	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122,911,597.00
68	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51,570,000.00
69	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24,611,200.00
70	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	5,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		pengemis di dalam panti				
71	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	10,000,000.00
72	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6,304,429.00
73	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	273,750,000.00
74	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	19,302,500.00
75	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	363,800,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
76	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	417,810,377.00
77	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	28,500,000.00
78	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	19,640,000.00
79	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	287,755,300.00



#### 6.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 214 program yang terdiri dari 663 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2025 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2025.

Tabel 6. 8 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan	8	19	2,000,618,120,711.70
2	Dinas Kesehatan	5	20	292,445,927,099.40
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	3	6	494,027,732,829.38
4	Rumah Sakit Jiwa	4	11	51,719,174,834.58
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	507,389,838,466.64
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	10	101,854,793,265.00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	12	23	50,298,514,618.83
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	58,552,953,583.90
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	11,077,188,631.57
10	Dinas sosial Provinsi Lampung	7	18	31,365,132,466.55
11	Dinas Tenaga Kerja	6	20	33,466,566,619.65
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	23	14,128,091,760.80
14	Dinas Lingkungan Hidup	10	21	17,611,680,724.40
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	8,265,095,352.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	5	11	16,769,775,280.05
17	Dinas Perhubungan	4	20	22,831,681,352.21
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	5	14	35,321,019,728.00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8	17	19,757,368,968.96
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	20,181,560,966.86
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	15	61,693,252,616.45

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	18	15,640,675,024.85
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	25	39,411,861,638.80
24	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	16	21,779,612,318.88
26	Dinas Perkebunan	6	15	25,341,489,991.32
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	20	30,069,084,327.16
13	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura	9	23	59,844,649,688.75
27	Dinas Kehutanan	5	21	71,103,378,387.85
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	21	22,697,328,522.90
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	19	23,996,753,621.40
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	6	2,500,000,000.00
31	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	61,553,651,000.00
32	Biro Hukum	2	5	2,575,341,000.00
33	Biro Perekonomian	2	7	3,060,279,800.00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	3,500,000,000.00
35	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	2,000,000,000.00
36	Biro Organisasi	2	5	3,200,000,000.00
37	Biro Umum	1	10	145,671,254,826.90
38	Biro Administrasi Pimpinan	1	7	6,000,000,000.00
39	Sekretariat DPRD	2	16	390,000,000,000.00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	40,148,270,391.00
41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	15	1,913,355,913,758.42
42	Badan Pendapatan Daerah	2	9	145,132,309,417.97
43	Badan Kepegawaian Daerah	2	9	116,137,261,386.34
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	2	10	28,940,145,455.70
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	12	12,077,209,408.12
46	Badan Penghubung	2	8	20,876,159,885.84
47	Inspektorat	3	11	58,412,533,787.32
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	6	12	24,649,995,549.78
<b>JUMLAH</b>		<b>210</b>	<b>672</b>	<b>7,138,050,629,066.23</b>

## **6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025**

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil kesepakatan di Forum Rakortekabang dan Musrenbangnas Tahun 2024, sebagai berikut:



Tabel 6. 9 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan Rakortekbang dan Musrenbangnas Tahun 2024

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
1.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pengembangan Kawasan Padi Mendukung peningkatan produksi/produktivitas	98.300 ha	1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung) 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung)
3.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pembangunan Rusmah Susun Hunian ASN	1 paket	Penetapan RTRW Provinsi (Dinas PKPCK Provinsi Lampung)

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
3.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Pelatihan Dasar SDM bagi masyarakat disekitar destinasi wisata	150 orang	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi (Dinas Pariwisata dandan Ekonomi kreatif Provinsi Lampung)
4.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar industri	300 orang	Pembinaan kelompok dan manajemen asekolah Menengah Kejuruna (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)



No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
		penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas				
5.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunkannya ketimpangan	Sarana Pasca panen untuk mendukung pengembangan Kawasan padi	132 unit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida dan sarana pendukung pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung)</li> <li>2. Pengawasan sebaran sarana pasca panen Tanam,an pangan (Dinas KPTPH Provinsi Lampung)</li> <li>3. Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung).</li> </ol>

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
6.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pemberdayaan masyarakat miskin untuk pengurangan beban terkait kebutuhan dasar	300 KPM	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga (Dinas Sosial)
7.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pemberdayaan masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan	500 orang	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (Dinas Sosial)
8.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pengembangan Kawasan kambing berbasis korporasi di Provinsi Lampung	5 titik di kab Pringsewu	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung)

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
		ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
9.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pengembangan Kawasan tanaman semusim dan tahunan	6 hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida dan sarana pendukung pertanian (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)</li> <li>2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani (Dinas Perkebunan Prov. Lampung)</li> </ol>

Selanjutnya disajikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Lampung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2024, yang sudah diinput dalam aplikasi Krisna Selaras sedangkan DAK Tahun 2025 sampai saat ini belum disampaikan ke Pemerintah Daerah. Alokasi pagu anggaran DAK Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024, sesuai tematik pada bidang Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. **267.357.679.000** dengan 6 bidang sektoral, yaitu; Bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, Irigasi, Pertanian dan Kelautan Perikanan.

Tabel 6. 10 Alokasi Pagu DAK Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024

<b>Bidang</b>	<b>Tematik</b>	<b>Pagu</b>
<b>Pendidikan</b>	SMA	84.895.521.000
	SLB	2.089.191.000
	SMK	114.132.390.000
		<b>201.117.102.000</b>
<b>Kesehatan</b>	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	7.884.512.000
	Penguatan Sistem Kesehatan	4.500.000.000
		<b>12.384.512.000</b>
<b>Jalan</b>	Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	7.402.158.000
	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	12.222.953.000
		<b>19.625.111.000</b>
<b>Irigasi</b>	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	14.844.497.000
<b>Pertanian</b>	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.896.091.000
<b>Kelautan Perikanan</b>	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	11.490.366.000
<b>TOTAL</b>		<b>267.357.679.000</b>

Sumber; DJPK Kemenkeu RI

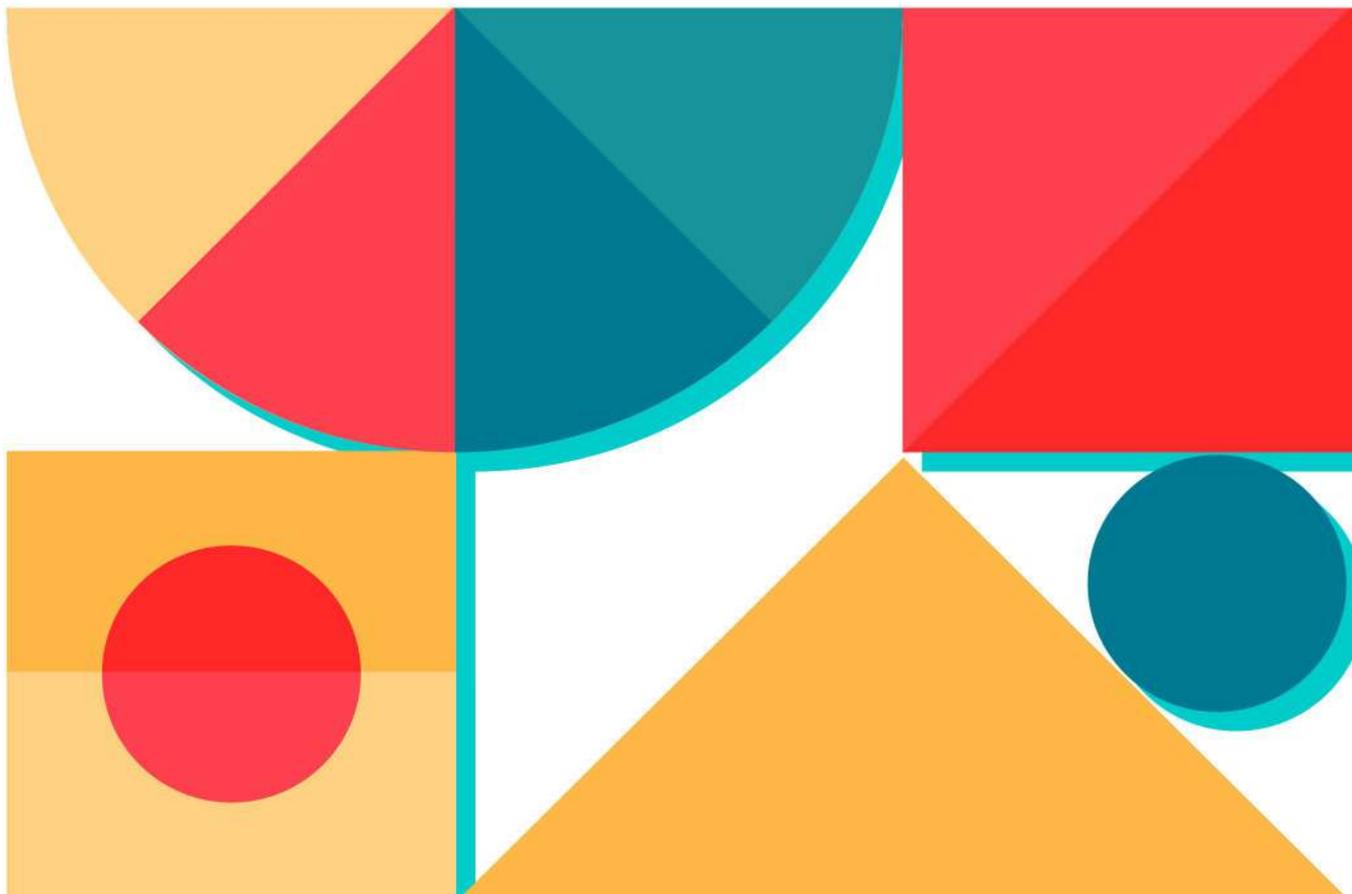
Alokasi pagu anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024, sesuai tematik pada bidang Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. **870.882.305.000** dengan 5 (lima) bidang sektoral, yaitu; Bidang Pendidikan, Kesehatan, Koperasi UMKM, PP dan PA serta Penanaman Modal. Berikut tabel alokasi anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024.

Tabel 6. 11 Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024

<b>BIDANG</b>	<b>PAGU</b>
<b>PENDIDIKAN</b>	
<b>BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)</b>	<b>522.742.500.000</b>
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	
REGULER	512.420.000.000
KINERJA	10.322.500.000
<b>TUNJANGAN GURU ASN DAERAH</b>	<b>326.395.311.000</b>
TUNJANGAN PROFESI GURU	324.027.455.000
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.927.161.000
TUNJANGAN KHUSUS GURU	440.695.000
<b>BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA</b>	<b>5.500.000.000</b>
MUSEUM	3.500.000.000
TAMAN BUDAYA	2.000.000.000
<b>BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)</b>	
BOK PROVINSI	<b>9.659.617.000</b>
<b>KOPERASI dan UMKM</b>	
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMK	<b>4.851.677.000</b>
<b>PP dan PA</b>	
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	<b>406.000.000</b>
<b>PENANAMAN MODAL</b>	
DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	1.327.200.000
<b>TOTAL ALOKASI DAK NON FISIK</b>	<b>870.882.305.000</b>



# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 berdasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2023 dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah sekaligus bahan evaluasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Gini Rasio, Inflasi, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani (NTP), Persentase Peningkatan PAD, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Target Indikator Kinerja Makro tahun 2025 tercantum pada tabel pada tabel 7.1 dibawah ini.



Tabel 7. 1 Asumsi Makro Provinsi Lampung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.55	4.9-5.3
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	48.20	52.6-54.6
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72.48	72,97
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.23	4,0-3.86
5.	Kemiskinan (%)	11.11	9.5-10
6.	Gini Rasio (Nilai)	0.324	0,318 - 0,321
7.	Inflasi (%)	3,47	1.5-3.5
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78,67	78
9.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Nilai)	109,25	116 - 117
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,75	2,59
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	14,93	13

Berdasarkan pada Tabel 7.1, Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memproyeksikan indikator makro tahun 2025, dengan memperhatikan capaian tahun 2023 untuk mencapai target-target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh positif dan menuju tren pertumbuhan ekonomi seperti saat sebelum Covid-19 meskipun saat ini masih dibayangi ekonomi dunia yang diperkirakan akan mengalami pelambatan. Masyarakat mulai beraktivitas normal sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung lebih baik lagi. Hal ini memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2024 dan 2025.

Kenaikan IPM tahun 2023 dibanding tahun 2022 juga sangat baik. Capaian Lampung Tahun 2023 menjadikan Lampung masuk dalam daerah dengan kategori IPM “tinggi”. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat. Indeks kualitas Kesehatan juga meningkat serta daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan meningkat dan dapat tumbuh signifikan.

TPT tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk

berinventasi di Lampung. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung.

NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 109,25. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (117,83). Angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, sehingga Daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2023 yaitu 14,93%, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas. Berdasarkan Kaji Ulang tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung, diketahui bahwa penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93.06%), sektor pengelolaan limbah (6.39%), sektor pertanian (0.53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0.02%). Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2020 hingga tahun 2030 adalah sebesar 82.38% atau setara dengan 19.2 Juta ton CO<sub>2</sub> eq.

### **7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama 2 (dua) tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 . IKU tersebut dapat dicapai dengan upaya dari seluruh kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung dengan jelas pada tahapan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Kontribusi seluruh perangkat daerah berbeda-beda sesuai dengan cascading kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung. Target capaian

indikator pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan target RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.9-5.3
2	Inflasi	Persen	1.5-3.5
3	Indeks Gini	Nilai	0,318 – 0,321
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,0-3.86
5	Pertumbuhan PMTB	Persen	2,9-5,6
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,97
7	Prevalensi Stunting	Persen	10,00
8	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	69,8
9	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.453-0.454
10	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	9.5-10
11	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Persen	74,9
12	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	13
13	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,93
14	Indeks Resiko bencana	Nilai	141,85
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB
16	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	A-
17	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	80
18	Indeks Kerukunan Umat Bergama	Nilai	74,13
19	Indeks Pembangunan kebudayaan	Nilai	57.91
20	Indeks Kewaspadaan Dini	Nilai	91.89

## 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama Gubernur tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang

dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (Impact) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,97	
2	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54	
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	9.5-10	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.9-5.3	
5	Indeks Gini	Indeks	0,318 - 0,321	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,0-3.86	
7	Inflasi	Persen	1.5-3.5	

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Menengah	Angka	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Pendidikan Khusus	Angka	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>			
	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	88	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kasus Kematian Bayi	kasus	510,0	Dinas Kesehatan
	Angka Penemuan CDR TB	Persen	70	Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan Kepesertaan JKN (UHC)	Persen	97,99	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Pariipurna SNARS	RSUAM
	Persentase Pelayanan Sub Spesialis	Persen	40	RSUAM
	Persentase Pencapaian SPM	Persen	90	RSUAM
	Nilai Survey Kepuasan Penerima Layanan	Nilai	82	RSUAM
	persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Persen	85	RSJ
	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar Akreditasi Rumah Sakit		Akreditasi Pariipurna	RSJ
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan RSJD	Indeks	89.5	RSJ
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78	BMBK
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
	Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	6,3	PKPCK
	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	88.84	PKPCK
	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	86.53	PKPCK
	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Persen	100	PKPCK
	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang	Persen	90.50	PKPCK

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air	Persen	35	PSDA
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	Persen	35	PSDA
<b>5</b>	<b>Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	Indeks Kewaspadaan Dini	Indeks	81	Kesbangpol
	Indeks Cinta Tanah Air	Indeks	81	Kesbangpol
	Indeks Nasionalisme	Indeks	71	Kesbangpol
	Indeks pencegahan konflik sosial	Indeks	81	Kesbangpol
	Indeks Toleransi antar umat beragama, suku dan etnis	Indeks	81	Kesbangpol
	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	Persen	85	Satpol PP
	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/Penurunan Kasus Konflik	Persen	85	Satpol PP
<b>6</b>	<b>Sosial</b>			
	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya	Persen		Dinas Sosial
	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang terpenuhi Kebutuhannya	Persen	1.78	Dinas Sosial
	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	20	Dinas Sosial
<b>7</b>	<b>Bencana</b>			
	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	nilai	6.65	BPBD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	95.72	Disnaker
	Persentase tenaga kerja di Perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Persen	84	Disnaker
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persen	3.3	PPPA

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	Persen	55.34	PPPA
	Predikat Provinsi Layak Anak	Predikat	Pratama	PPPA
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan paripurna	Persen	100	PPPA
<b>3</b>	<b>Pangan</b>			
	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90.1	KPTPH
	Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (Kelompok)	Kelompok	5	KPTPH
	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji	Persen	100	KPTPH
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,46	Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,10	Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	84,0	Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	35.31	Lingkungan Hidup dan Dishut
	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah (%)	Persen	8,83	Lingkungan Hidup
<b>5</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Persen	100	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	98	Disdukcapil
	Persentase Perangkat Daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	80	Disdukcapil
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa yang berdaya	Persen	2.39	PMDT
<b>7</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
	Persentase perempuan yang sudah menikah usia 17 tahun kebawah	Persen	17.99	PPPA
<b>8</b>	<b>Perhubungan</b>			

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Rasio Konektivitas Provinsi (3 matra)	Rasio	0.74	Dinas Perhubungan
	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis	Persen	46.00	Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi (3 Matra)	Indeks	87	Dinas Perhubungan
<b>9</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
	Nilai Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Nilai	95,50	Diskominfo
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,2	Diskominfo
	Nilai Kematangan Keamanan Siber ( <i>Cyber Security Maturity</i> )	Nilai	3,15	Diskominfo
<b>10</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
	Jumlah Koperasi Modern	unit	16	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase koperasi yang berkualitas	persen	36.66	Dinas Koperasi dan UMKM
	Nilai volume usaha koperasi	Triliun	3.3	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	persen	6.4	Dinas Koperasi dan UMKM
<b>11</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
	Realisasi Investasi	Triliun	13.00	DPMPTSP
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	86.00	DPMPTSP
<b>12</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	15,92	Dispora
	Persentase Pemuda berwirausaha	Persen	25,94	Dispora
	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi pada Event-event Nasional	Persen	45	Dispora
<b>13</b>	<b>Kebudayaan</b>			
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang tersertifikasi Nasional	Persen	87.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>14</b>	<b>Perpustakaan</b>			

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Rasio tingkat kunjungan pemustaka di perpustakaan umum secara onsite maupun online	Rasio	68.93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>16</b>	<b>Kearsipan</b>			
	Nilai penyelenggaraan kearsipan	Nilai	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>			
	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Lampung	Persen	2,5	Disparekraf
	Jumlah Wisatawan	Orang	6,000,000	Disparekraf
	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1.50	Disparekraf
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>			
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung Ubi Kayu) dan Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Pisang dan Nanas)	Persen	0.50	KPTPH
	Rasio Luas Serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Rasio	99.43	KPTPH
	Rasio Luas pengendalian DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI tanaman Pangan dan Hortikultura	Rasio	80	KPTPH
<b>3</b>	<b>Perkebunan</b>			
	Persentase pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat (%)	Persen	1.50	Dinas Perkebunan
	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelembagaan Pekebun (KT)	KT	20	Dinas Perkebunan
<b>4</b>	<b>Peternakan</b>			
	Persentase Peningkatan Produksi Ternak (%)	Persen	6,95	Dinas Peternakan dan Keswan
	Persentase Unit Usaha Peternakan/Kelompok Ternak yang dikelola dengan baik (%)	Persen	25	Dinas Peternakan dan Keswan
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>			
	Persentase penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	Persen		Dinas Kehutanan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
	Persentase EBT dalam bauran Energi	Persen	36	Dinas ESDM
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	tCO <sub>2</sub> e	2,178	Dinas ESDM
	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ Kapita	680	Dinas ESDM
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>			
	LPE Sektor Perdagangan	Angka	6,31 - 8,99	Disperindag
	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (%)	Persen	9.2	Disperindag
	Nilai ekspor Non Migas	Nilai	5.29	Disperindag
	Andil Inflasi Bahan Makanan	Persen	≤ 2	Disperindag
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>			
	LPE Sektor Industri Pengolahan	Angka	2,50 - 4,75	Disperindag
	Pertumbuhan Indeks Produksi IBS (%)	Persen	3.23	Disperindag
<b>8</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan terhadap PDRB Lampung (berdasarkan lapangan usaha)	Persen	5.40	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105.96	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai	98.79	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Luas kawasan perairan, pesisir dan pulau kecil (ha) yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh KKP	Hektar	166,639	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
	Indeks Perencanaan pembangunan	Indeks	83	Bappeda
	Persentase indikator sasaran RKPD yang target tahunannya tercapai (lebih dari 90%)	Persen	>90	Bappeda
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>			
	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persen	100	BPKAD
	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P APBD dan	Persen	75	BPKAD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	Persen	100	BPKAD
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	(11.32)	Bapenda
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Indeks	88.6	Bappenda
<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>			
	Indeks sistem merit	Indeks	295	BKD
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	Training Rate Pengembangan Kompetensi	Nilai	68	BPSDM
	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya sesuai sasaran pelatihan	Persen	73	BPSDM
	Nilai Survey Kepuasan Peserta Pelatihan	Nilai	94	BPSDM
<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58	Balitbangda
	Persentase policy paper yang dimanfaatkan dan atau didiseminasikan	Persen	70	Balitbangda
	Persentase peningkatan penerapan inovasi daerah	Persen	81	Balitbangda
<b>6</b>	<b>Pengawasan</b>			
	Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.	Nilai	3,25	Inspektorat
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3,1	Inspektorat
	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	level 3	Inspektorat
	Indeks Manajemen risiko	Nilai	3,05	Inspektorat
<b>7</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>			
	Realisasi Raperda yang telah dilaksanakan	Persen	50	Sekretariat DPRD
<b>8</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik (Tepat waktu, tepat sasaran dan efektif)	Persen	95	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Nilai Survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal perangkat daerah pada Biro Administrasi Pimpinan	Nilai	70	Biro Administrasi Pimpinan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	OPD PENGAMPU
	Indeks Tata Kelola (ITKP) Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	75	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Realisasi Transaksi Penggunaan Dalam Negeri (PDN) dalam proses PBJ	Persen	95	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Internal dan Eksternal Pada Biro Umum	Nilai	81	Biro Umum
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	65	biro Adbang
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	90-95	Setda
	Persentase kebijakan yang efektif	Persen	100	Setda
	Nilai SAKIP Provinsi	Nilai	72-74	Setda
	Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah, dan Terfasilitasinya Pelayanan Bantuan Hukum provinsi Lampung	Persen	100	Biro Hukum
	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang terealisasi	Persen	100	Biro Kesra
	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat	Persen	97.5	Biro Kesra
	Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai SAKIPnya BB Dengan Kategori Sangat Baik	Persen	73	Biro Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik	Persen	80	Biro Organisasi
	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah yang terlegitimasi	Persen	80%	Biro Pemotda
	Pencapaian kinerja LPPD	Angka	2.61-3.40	Biro Pemotda
	Pencapaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks	60-69	Biro Pemotda

Sumber : Dokumen RPD Provinsi Lampung 2025-2026

Dalam rangka penyelarasan indicator pembangunan per urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat antara lain Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Dalam Negeri RI bersama Pemerintah Daerah melakukan Desk Pembahasan Indikator per urusan



pemerintahan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pembangunan. Hasil desk sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 7. 4 Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Pada Desk Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2025  
Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>					
	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	99.26	100	100
		Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	62.06	71.38	72.38
		Iklim keamanan SMALB	Nilai	69.68	76.63	78.63
		Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	99.26	100	100
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66.95	67.41	69.97
		Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	58.59	63.26	65.62
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	81.3	100	100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57.29	53.33	58.49
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53.61	53.18	54.96
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56.40	55.88	57.86
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	86.38	86.85	87.85
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	80.19	79	80.48
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58.78	60.69	63.69
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57.62	59.85	66.65
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58.04	58.08	59.08
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64.54	66.96	71.80

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62.60	62.68	64.36
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.07	58.22	65.57
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	81.3	100	100
		Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai	59.36	65.35	67.39
		Iklm keamanan SMA	Nilai	71.21	79.14	81.14
		Iklm keamanan SMK	Nilai	68.93	76.24	76.74
		Iklm keamanan SDLB	Nilai	74.22	80.10	81.60
		Iklm keamanan SMPLB	Nilai	72.33	79.23	80.23
		Iklm kebinekaan SMA	Nilai	72.80	71.37	75.16
		Iklm kebinekaan SMK	Nilai	70.52	69.41	73.32
		Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	66.28	75.53	76.53
		Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	62.41	70.32	71.32
		Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	57.75	61.91	64.71
		Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	55.48	58.89	61.17
		Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	60.62	63.35	65.35
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>					

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100
	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	15.2	14	11.1
	Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate)	Penemuan Kasus TBC	%	57	79	90
	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	105	110	126
	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	94.63	96	96
	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	80,49		87
	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	82,35		88,23

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
3	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	7,1	4,82	2,15
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m <sup>3</sup> /detik	0,00166	0,00668	0,00162
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	80	500	10
		Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	13242	11786	9692
	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis			6
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis			5
		Penetapan RTRW	Perda/Perkada			1
		Penetapan RDTR	Perda/Perkada			7
	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi			1
		Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus			0

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	78.67	78	78
	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	550	245	400
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%			10
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%			10
		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%			10
		Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%			70
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang			750
	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	9,12		14
		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	4,56		14
	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%			100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%			16
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%			1.1
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	2,15		7
	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	%			0
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>					
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%			68,95
<b>5</b>	<b>Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>					
	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100
		Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat (dokumen)	Dok	1		

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dok	2	2	2
		Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	75	80	100
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	70	75	75
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	%		100	100
		Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat	Daerah provinsi	1	1	1

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		tanggap darurat dan pasca bencana				
		Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Daerah provinsi	1	1	1
	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	16	16	16
		Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Daerah	16	16	16
	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	Daerah	16	16	16
<b>6</b>	<b>Sosial</b>					
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	99.77	100	100
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	99.61	100	100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	97.51	100	100
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	95.19	100	100
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	99.77	100	100
	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	92.15	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	99.66	100	100
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	1440	1440	1440

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	88.47	100	100
7	<b>Bencana</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>					
1	<b>Tenaga Kerja</b>					
	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	64,27	70	72
		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	67.44	68	70
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	2	2
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	21160		3000
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	4084	4000	4.500

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	4945	4000	4.500
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	25		75
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan	14149	15000	2.200
		Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang			54.000
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6250	7500	35.668
	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%			60
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.78		66,78

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.58		90,88
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.456		0,42
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Provinsi Layak Anak (Provila)	Nilai	100	100	100
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	Nindya		801 (Utama)
		Persentase ARG	%	6.35	3.2	3.3
<b>3</b>	<b>Pangan</b>					
	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	26.3	45	45

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3.1		2,62
	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	3.45	3	5-Mar
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92.4	93	94,3
	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%			95
4	<b>Lingkungan Hidup</b>					
	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin			0,537
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	poin	35,88		40
	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	12,31		12,5
	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,91	69,51	70,99
5	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	%	100	100	100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan				
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%		99	99,5
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	%	100	100	100
		Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%		60	62
	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%		30	30
	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	dokumen		2	2
6	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa			15
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Orang			425
		Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa			0
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa			2337
		Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga			1000
	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	%			1,51
	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	%			10
	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	%	4	5	6
7	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,21		63.5
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.21		2,19
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	65.3		65.9
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19.3		19
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9.6		9.3
<b>8</b>	<b>Perhubungan</b>					
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0.69	0.73	0.37
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	87.15	86	87,5
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan		1	1

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	Unit			1
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	47,45		21
<b>9</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	%			20
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%			85

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%			85
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	75	75	75
	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	0	0	100
		Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	0	0	100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100	100
		Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	26		31
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0.	0.	33
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%		25	25
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%		25	50
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100	100
	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis	%	0.	0.	100

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas				
		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	2	10
<b>10</b>	<b>Statistik</b>					
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1.89	2.6	2.6
<b>11</b>	<b>Persandian</b>					
	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	1	0.	3
		Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang		2	4
		Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang		2	10

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Indeks			30
<b>12</b>	<b>Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah</b>					
	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase			7
	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase			
		Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase			4
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	3.63		4
<b>13</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	10.89		13
<b>14</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai			1,51
	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%			76,75

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	%			36,53
	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks			62,51
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>					
	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%			66.5
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0.87		1,05
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	76.70		80
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	6.19		6.53
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	17.83		18,58
	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%		0.27	0,207

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%			95
<b>16</b>	<b>Perpustakaan</b>					
	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,38		70,5
	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	59,25		66,77
<b>17</b>	<b>Kearsipan</b>					
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86.51	73.50	88
<b>18</b>	<b>Pariwisata</b>					
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	2,55	2,7	3
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan			15.000.000
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp			0
<b>19</b>	<b>Pertanian</b>					
	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	85.9		80,5

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%			40
		Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	99,9	95	99,6
		Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	99,9	75,8	98
		Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	51	42	45
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%			93,1
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%			71
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	14.050	15.932	16.171
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	182.434	169.684	172.229
		Jumlah Produksi Telur	Ton	300.224	277.159	314.520

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		Jumlah Produksi Susu	Ton	3.778	3.659	3.751
		Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	172.397	146.613	155.932
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	1.875		2.057
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	431		622
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	47.894	63.101	64.048
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	78.600	88.831	90.163
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	102.853	121.340	123.160
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2.295	3.156	3.187
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	29.017	45.583	46.038
		Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	7.205.836	7.580.720	7.555.526
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	7.494	12.541	12.603
		Jumlah Produksi Jagung	Ton	2.728.204	3.024.530	3.115.265
		Jumlah Produksi Padi	Ton	2.713.595	3.325.390	3.358.643

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
<b>20</b>	<b>Kehutanan</b>					
	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah	#####	#####	#####
	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha		10.000	10.000
	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit		0	0
		Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	1.124,74	1.000	1.000
		Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	220	4	4
	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	38		5
<b>21</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					
	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	%	99,99	99,00	99,99
	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	-	34,8	36

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	99,73	99.00	100
<b>22</b>	<b>Perdagangan</b>					
	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-17,1		6,5
	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	persentase kepatuhan berusaha	Persentase			100
	Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	86.21	85	100
<b>23</b>	<b>Perindustrian</b>					
	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	1,4		4
	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	4,64	3,5	4
	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	446 ribu	445 ribu	450 ribu
	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	4,76		5.1
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.01		18.5

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
24	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	152.096,00	168.698,00	168.698,00
	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	Provinsi	1	1	1
	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	154.465	206.995	200.000
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	188.721	184.185	172.223
		Produksi Garam	Ton	106.68		106
	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	37	41,19	38,18
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100	100
25	<b>Pertanahan</b>					
	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga			6.700
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	bidang			3000

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
26	<b>Transmigrasi</b>					
	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Indeks	44		46
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Indeks	54		65,82
27	<b>Bencana</b>					
	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100
		Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	dok	1	1	1
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	dok	1	1	1
		Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang	%			30

NO.	Sasaran	Indikator Urusan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
		dikembangkan teknis dan manajerialnya				
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	daerah	1	1	1
		Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	provinsi	1	1	1
		Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	provinsi	1	1	1

<b>NO.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Urusan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Target 2025</b>
	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah			16
		Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah			16
	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah			16





# BAB VIII PENUTUP

## BAB VIII PENUTUP

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025- 2045 dengan **Visi Lampung SMART 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”**, pembangunan Lampung ke depan juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Tema Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 adalah **“Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia”**. RKPD Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.





Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

